PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

2025

2029

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi Jambi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Provinsi, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai tujuan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

(1) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(3) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Jambi dan RPJMN Tahun 2025-2029.

(4) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB II
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

(2) Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

(3) Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
b. pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
b. pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
c. hasil RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tetap digunakan sampai dengan berlakunya RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Agustus 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (6-104/2025)

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah untuk:

a. menetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota;
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 54

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-2

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1-7

1.4 Maksud Dan Tujuan.....1-11

1.4.1 Maksud 1-11

1.4.2 Tujuan 1-12

1.5 Sistematika Penulisan 1-13

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....2-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2-1

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 2-1

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 2-5

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2-24

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan .2-34

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 2-40

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2-44

2.1.7 Demografi 2-50

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-55

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 2-55

2.2.2 Kesehatan untuk Semua 2-73

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 2-78

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 2-91

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2-92

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....2-97

2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2-103

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....2-103

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....2-104

Dipindai dengan CamScanner

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 2-114
2.3.4 Transformasi Digital 2-114
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2-117
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2-119
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 2-128
2.4. Aspek Pelayanan Umum 2-131
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... 2-131
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial..... 2-133
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 2-136
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah..... 2-137
2.5. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan 2-174
2.6. Gambaran Keuangan Daerah 2-177
2.6.1 Kinerja Keuangan Masa lalu 2-178
2.6.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 2-204
2.6.3 Kerangka Pendanaan..... 2-207
2.7. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 2-220
2.7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-221
2.7.2 Penyelerasan terhadap RTRW 2-246
2.7.3 Isu Strategis 2-248
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....3-1
3.1 Visi 3-1
3.2 Misi 3-2
3.3 Tujuan dan Sasaran.....3-3
3.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah 3-3
3.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah 3-5
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....3-18
3.4.1 Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi.....3-27

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4-1

BAB V PENUTUP 5-1

5.1 Kaidah Pelaksanaan 5-1

5.1.1. Manajemen Resiko pembangunan 5-3

5.1.2. Kerangka Regulasi.....5-4

5.2 Pedoman Transisi.....5-4

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 1-11
Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi.....2-4
Gambar 2-2 Orientasi Wilayah Provinsi Jambi 2-5
Gambar 2-3 Sebaran DAS di Provinsi Jambi.....2-11
Gambar 2-4 Produktivitas Air Tanah Provinsi Jambi 2-16
Gambar 2-5 Peta Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi 2-17
Gambar 2-6 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Menurut Kemampuan Pengaturan Iklim Tahun 2020-2049 2-19
Gambar 2-7 Peta Proyeksi Perubahan Suhu Rata-rata Tahunan di Indonesia 2020-2049 2-20
Gambar 2-8 Peta Proyeksi Perubahan Hari Kering Di Indonesia 2020-2049 2-21
Gambar 2-9 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049 2-21
Gambar 2-10 Peta Jasa Penyedia Pangan Provinsi Jambi 2-26
Gambar 2-11 Neraca Air Wilayah Proivinsi Jambi 2021 2-28
Gambar 2-12 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi.....2-32
Gambar 2-13 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi.....2-33
Gambar 2-14 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-35
Gambar 2-15 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-36
Gambar 2-16 Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (kWh) 2-38
Gambar 2-17 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 2-39
Gambar 2-18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-41
Gambar 2-19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Jambi Tahun 2002-2024 2-42

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2-20 Timbulan Sampah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....2-43
Gambar 2-21 Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030.2-48
Gambar 2-22 Indeks Resiko Bencana Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-50
Gambar 2-23 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-52
Gambar 2-24 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024.....2-53
Gambar 2-25 Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 (Ribu Jiwa).....2-54
Gambar 2-26 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020- 2024 2-56
Gambar 2-27 Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024.....2-58
Gambar 2-28 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 (Dalam Milyar Rupiah).....2-59
Gambar 2-29 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 2-61
Gambar 2-30 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-62
Gambar 2-31 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (P0) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-63
Gambar 2-32 Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....2-65
Gambar 2-33 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 -2024 (Dalam Juta Rupiah) 2-66
Gambar 2-34 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun 2019-2024 2-67
Gambar 2-35 Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-68
Gambar 2-36 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-69
Gambar 2-37 IPM Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-71
Gambar 2-38 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.2-72
Gambar 2-39 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-74
Gambar 2-40 Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023.....2-75
Gambar 2-41 Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2020–2024...2-76

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2-42 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-79
Gambar 2-43 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-80
Gambar 2-44 Rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-81
Gambar 2-45 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 . 2-83
Gambar 2-46 Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-84
Gambar 2-47 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2-86
Gambar 2-48 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-88
Gambar 2-49 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-89
Gambar 2-50 Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-91
Gambar 2-51 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 2-93
Gambar 2-52 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 2020-2023 2-94
Gambar 2-53 Indeks Perlindungan Khusus Anak Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-98
Gambar 2-54 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020-2023 2-99
Gambar 2-55 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-100
Gambar 2-56 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 2-101
Gambar 2-57 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-102
Gambar 2-58 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-104
Gambar 2-59 Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-105
Gambar 2-60 Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-106
Gambar 2-61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-107

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2-62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-108
Gambar 2-63 Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-112
Gambar 2-64 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2020- 2024 .. 2-113
Gambar 2-65 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-116
Gambar 2-66 Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-117
Gambar 2-67 Distribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024..... 2-118
Gambar 2-68 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-120
Gambar 2-69 Status Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-121
Gambar 2-70 Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-123
Gambar 2-71 Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi 2-124
Gambar 2-72 Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi 2-125
Gambar 2-73 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-126
Gambar 2-74 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 ... 2-127
Gambar 2-75 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-129
Gambar 2-76 Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-130
Gambar 2-77 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi Tahun 2021-20242-133
Gambar 2-78 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-135
Gambar 2-79 Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Utama Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025..... 2-222
Gambar 2-80 Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Pertambangan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025 2-224
Gambar 2-81 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Provinsi Jambi terhadap Nasional, Tahun 2019 - 2024 .. 227
Gambar 2-82 Perbandingan IPM Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 2-228

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2-83 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 2-229
Gambar 2-84 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 2-231
Gambar 2-85 Panjang Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024 2-232
Gambar 2-86 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-235
Gambar 2-87 Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2-236
Gambar 2-88 Produksi Padi dan Jagung Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2023 2-238
Gambar 2-89 Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-238
Gambar 2-90 Perkembangan Aset, Omset Usaha dan Serapan Tenaga Kerja UMKM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 2-239
Gambar 2-91 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 2-240
Gambar 2-92 Indeks Gini Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 2-241
Gambar 2-93 Capaian Indikator-Indikator Penerapan Reformasi Birokasi Provinsi Jambi Tahun 2024 2-243
Gambar 2-94 Deforestasi Dan Degradasi Hutan Yang Terjadi Tahun 1990 – 2018 2-246
Gambar 2-95 Risiko Global Jangka Menengah 2-249
Gambar 2-96 Isu Strategis Jangka Menengah Nasional 2-251
Gambar 3-1 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Sumatera 3-27
Gambar 3-2 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi pada RPJMN 2025-2029 3-28
Gambar 3-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2024 3-29
Gambar 3-4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024 3-31

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3-5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024 3-32
Gambar 3-6 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024 3-33
Gambar 3-7 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024 3-34
Gambar 3-8 Penahapan Pembangunan 3-36
Gambar 3-9 Pengembangan Kawasan Sentusa (Sengeti – Tungkal – Sabak) 3-72

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi.....2-2

Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari 2-11

Tabel 2.3 Nama Sungai yang Melintasi Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota 2-13

Tabel 2.4 Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi 2-13

Tabel 2.5 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2-18

Tabel 2.6 Tutupan Lahan Provinsi Jambi 2-23

Tabel 2.7 Pola Penggunaan Lahan tahun 2022 di Wilayah Provinsi Jambi 2-23

Tabel 2.8 Luas dan Status Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi ..2-26

Tabel 2.9 Kebutuhan dan Ketersediaan Ruang Hidup Layak (Tidak Rawan Bencana) Bagi Penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota Pada Tahun 2020. 2-29

Tabel 2.10 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi 2-46

Tabel 2.11 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Jambi 2-47

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024.....2-52

Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 2-52

Tabel 2.14 Tingkat Kegemaran Membaca Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024 2-85

Tabel 2.15 Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jambi.....2-95

Tabel 2.16 Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024 2-96

Tabel 2.17 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024...2-108

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.18 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 2-130

Tabel 2.19 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021-2023 2-132

Tabel 2.20 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-134

Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Jambi Tahun 2022-2024 136

Tabel 2-22 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2024 2-174

Tabel 2-23 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi berdasarkan kelompok pilar TPB Tahun 2024. 2-176

Tabel 2.24 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-178

Tabel 2.25 Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-184

Tabel 2.26 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Rp) 2-185

Tabel 2.27 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-188

Tabel 2.28 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-189

Tabel 2.29 Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024 ...2-191

Tabel 2.30 Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 - 31 Desember 2024 2-196

Tabel 2.31 Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-199

Tabel 2.32 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 2-200

Tabel 2.33 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-202

Tabel 2.34 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-204

Tabel 2.35 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-206

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.36 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 2-207

Tabel 2.37 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2026-2030 2-210

Tabel 2.38 Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Jambi Tahun 2026-2030..... 2-216

Tabel 2.39 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030..... 2-217

Tabel 2.40 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030..... 2-218

Tabel 2.41 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2024 2-229

Tabel 2.42 Deviasi capaian Aspek sistem Merit dibanding Target Ideal 2-243

Tabel 2.43 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2-254

Tabel 2.44 Matriks Penelaahan Integrasi KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 ke RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029..... 264

Tabel 2.45 Matriks Penelaahan Isu Strategis..... 2-269

Tabel 3-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi 3-10

Tabel 3-2 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 3-15

Tabel 3-3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 .3-17

Tabel 3-4 Arah Kebijakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 3-18

Tabel 3-5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024 3-28

Tabel 3-6 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 3-29

Tabel 3-7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 3-30

Tabel 3-8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 3-31

Tabel 3-9 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024..... 3-32

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3-10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 3-33
Tabel 3-11 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa 3-67
Tabel 3-12 Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin... 3-..... 68
Tabel 3-13 Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/ UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial 3-69
Tabel 3-14 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 3-71
Tabel 3-15 Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 3-72
Tabel 3-16 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029..... 3-73
Tabel 3-17 Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029..... 3-73
Tabel 3-18 Program Prioritas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 3-74
Tabel 4-1 Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi..... 4-1
Tabel 4-2 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi ... 4-85
Tabel 4-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi 4-85
Tabel 4-4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi 4-87

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bapak Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Bapak Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka dilakukan penyelarasan terhadap kinerja dan periodesasi antara RPJMD dan RPJMN

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2025-2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2025-2029. Adapun ruang lingkup penyelarasan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mencakup:

1. Periodesasi;
2. Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029;
3. Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD;
4. Indikator makro RPJMD Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan per provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029
5. Program Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan tahapan lima (5) tahun pertama dalam rangka mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, yaitu JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN. Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya serta implementasi pertumbuhan ekonomi hijau Jambi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang

Dipindai dengan CamScanner

berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Sedangkan dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 20);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan renstra PD Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi

   RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 merupakan rencana pembangunan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2029, harus berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025 – 2045, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu"Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan". Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (enam) misi pembangunan yaitu :

1) Mewujudkan transformasi sosial;
2) Mewujudkan transformasi ekonomi;
3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah;
4) Memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7) Mewujudkan transformasi penyediaan sarana prasarana daerah yag berkualitas dan ramah lingkungan
8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan

2. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, harus berpedoman pula pada RTRW Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga berkaitan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi

Dipindai dengan CamScanner

sehingga bisa disebut sebagai zona konservasi. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai zona produksi. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai zona distribusi.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

   RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

   Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

5. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

   Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan wakil Presiden RI Periode 2025-2029.

6. RTRWN dan RPJMD Provinsi Jambi

   Sesuai dengan RTRWN, Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional tersebut adalah:

   - Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan).
   - Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi).
   - Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau).
   - Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

   Dalam RPJMD Provinsi Jambi keempat kawasan strategis tersebut difungsikan sesuai dengan arahan ruangnya dalam RTRWN dengan penguatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

7. RPJMD dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Daerah (RIPJPID)

   RIPJPID adalah dokumen tematik yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan IPTEK dan inovasi secara terstruktur, berjangka menengah – panjang, dan berbasis potensi daerah. RPJMD menjadi wadah utama untuk mengintegrasikan arah kebijakan dan program RIPJPID, terutama pada sasaran terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi.

8. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

   KLHS merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam

Dipindai dengan CamScanner

kebijakan, rencana dan program RPJMD. KLHS memberikan landasan analitis terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD tidak melampaui kapasitas ekologi wilayah. Integrasi KLHS dalam RPJMD akan menjamin arah pembangunan RPJMD dapat menjawab tantangan lingkungan, sosial dan ekonomi secara simultan dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

9. RPJMD dan RTRW Provinsi Berbatasan dengan RPJMD Provinsi Jambi

   Arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 tetap memperhatikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi dan kebijakan keruangan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergisitas pembangunan antar daerah berbatasan dan meminimalisir konflik pada wilayah perbatasan.

   Hubungan antara RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan berikut ini.

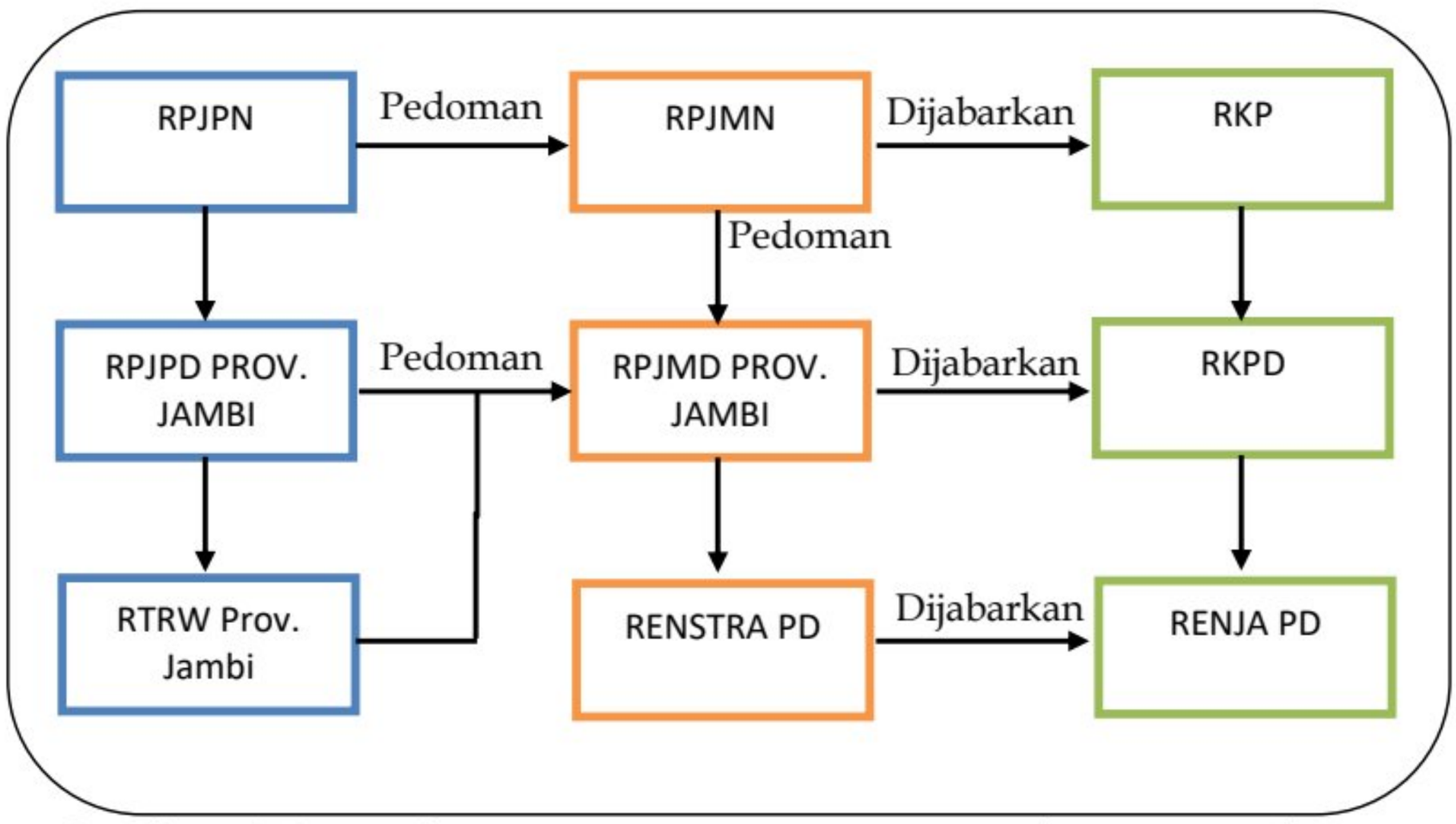

Gambar 1-1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program

Dipindai dengan CamScanner

pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2025–2029 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dilakukan dengan tujuan:

1. Menyempurnakan arah kebijakan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ke dalam dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah dan terukur;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jambi, dan *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi;

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.
8. Sebagai acuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Dipindai dengan CamScanner

2.5 Kinerja Keuangan Masa Lalu
2.6 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
2.7 Kerangka Pendanaan
2.8 Permasalahan Pembangunan
2.9 Isu Strategis
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Tujuan dan Sasaran
3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1 Program Perangkat Daerah
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dan memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan regional maupun nasional. Secara geografis, Provinsi Jambi memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan keberagaman kondisi alam yang mencakup dataran rendah, perbukitan, serta kawasan hutan yang luas. Keanekaragaman geografis ini memberikan potensi yang besar bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dari aspek demografi, Provinsi Jambi memiliki komposisi penduduk yang beragam secara etnis, dengan mayoritas penduduk berasal dari Suku Melayu, disusul oleh kelompok etnis lain seperti Minangkabau, Bugis, serta suku-suku pendatang lainnya. Struktur kependudukan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika pertumbuhan yang beragam, di mana terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal kepadatan penduduk serta akses terhadap fasilitas umum. Keberagaman ini berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Pembahasan pada subbab ini akan menguraikan kondisi geografis dan demografis Provinsi Jambi yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Jambi memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di bagian tengah Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sebelah utara, Provinsi Sumatra Selatan di sebelah selatan, Provinsi Bengkulu di sebelah barat, serta Laut China Selatan di sebelah timur. Letaknya yang berada di jalur utama perdagangan antara Pulau Sumatra dan wilayah Indonesia lainnya menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan sektor transportasi dan logistik. Selain itu, Provinsi Jambi memiliki akses ke pelabuhan laut yang mendukung peranannya sebagai pintu gerbang perdagangan antarwilayah dan internasional. Salah satu pelabuhan utamanya adalah Pelabuhan Talang Duku, yang mendukung peranannya sebagai

Dipindai dengan CamScanner

pintu gerbang perdagangan internasional. Pelabuhan lain yang berperan strategis dalam mendukung konektivitas maritim dan pertumbuhan ekonomi diantaranya Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Ujung Jabung yang saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur. Keberadaan jaringan transportasi yang terhubung dengan daerah lainnya memberikan kemudahan dalam distribusi barang dan mempercepat arus perdagangan, baik untuk sektor pertanian, perkebunan dan industri lainnya. Peran strategis ini juga didorong oleh keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki, yang menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penting dalam pengembangan ekonomi di Pulau Sumatra. Dalam perencanaan pembangunan, posisi dan peran strategis ini akan menjadi faktor utama dalam pengembangan infrastruktur, perekonomian, serta peningkatan konektivitas antar daerah.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 sebesar 49.023,037 km2. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.540,118 km2 atau sebesar 15,38% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.103,737 km2 dan 5.935,894 km2, sedangkan rincian luas perkabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km2)
		Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	Kabupaten Kerinci	18	2	285	3.445,196
2	Kabupaten Merangin	24	10	205	7.540,118
3	Kabupaten Sarolangun	11	9	149	5.935,894
4	Kabupaten Batanghari	8	14	110	5.453,689
5	Kabupaten Muaro Jambi	11	5	150	5.159,623
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	13	20	114	5.544,567
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	11	20	73	4.544,575
8	Kabupaten Bungo	17	12	141	4.760,827

Dipindai dengan CamScanner

No	Kabupaten/Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km2)
		Kecamatan	Kelurahan	Desa	
9	Kabupaten Tebo	12	7	122	6.103,737
10	Kota Jambi	11	68		169,887
11	Kota Sungai Penuh	8	4	65	364,924
Provinsi Jambi		**144**	**171**	**1.414**	**49.023,037**

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 144 kecamatan, dengan kabupaten yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan. Sementara jumlah kelurahan serta di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 171 kelurahan dan 1.414 desa dengan jumlah desa terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 285 desa. Secara administratif batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 dibawah ini menggambarkan kawasan administratif Provinsi Jambi dan sekitarnya. Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dengan batas wilayah administratif di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, serta di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Peta ini juga menampilkan batas administratif wilayah di Provinsi Jambi yang terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota, dengan masing-masing wilayah diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi. Peta ini memberikan gambaran mengenai posisi geografis Provinsi Jambi dalam hubungan dengan provinsi lainnya, serta menunjukkan keterkaitan wilayah yang berpotensi mendukung perkembangan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Letak geografis tersebut menjadikan Provinsi Jambi memiliki posisi yang strategis di Pulau Sumatera, karena wilayahnya terhubung

Dipindai dengan CamScanner

langsung dengan beberapa provinsi lain yang berpotensi mendukung pengembangan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan mendorong pembangunan antar daerah. Keberadaan peta ini sangat penting dalam merencanakan pengembangan infrastruktur dan kebijakan tata ruang yang dapat memperkuat posisi Provinsi Jambi sebagai daerah strategis di Pulau Sumatra.

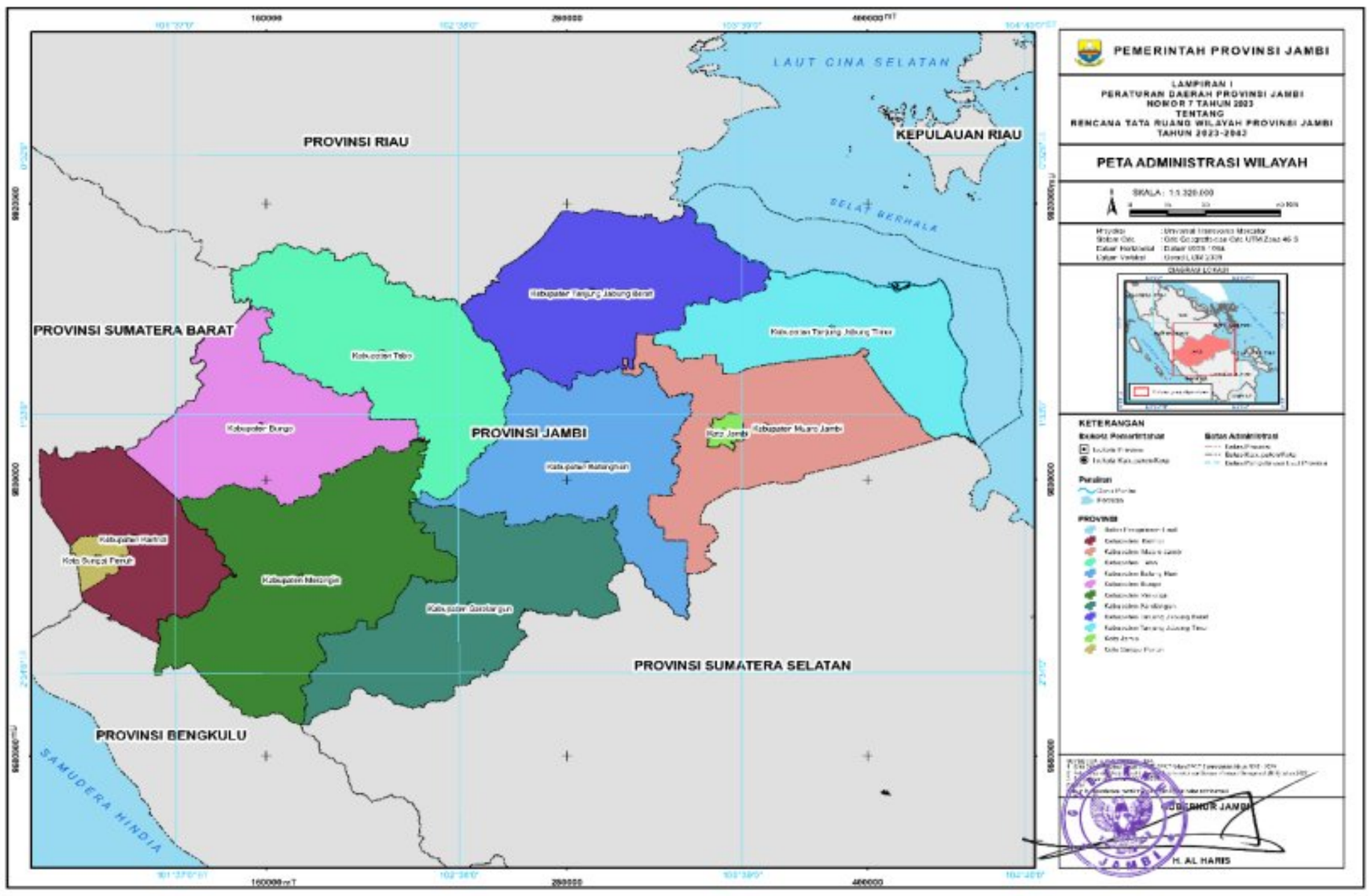

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Peta orientasi Provinsi Jambi memperlihatkan posisi geografis provinsi ini di Pulau Sumatera serta batas-batas administratif dengan provinsi-provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Peta ini juga menampilkan variasi topografi wilayah, dengan ketinggian yang ditandai melalui gradasi warna, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Informasi spasial yang ditampilkan menjadi penting dalam mendukung evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, keterkaitan

Dipindai dengan CamScanner

antarwilayah, serta potensi dan kendala fisik yang ada di Provinsi Jambi.

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-2 Orientasi Wilayah Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di antara 0°45' sampai 2°45' Lintang Selatan dan 101°10' sampai 104°55' Bujur Timur (BPS Provinsi Jambi, 2025). Provinsi ini berada di bagian tengah Pulau Sumatera serta memiliki wilayah perairan yang menghadap ke Selat Berhala, yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional melalui Selat Karimata. Posisi tersebut menjadikan Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang strategis bagi lalu lintas perdagangan internasional. Dengan letak ini, Provinsi Jambi juga masuk dalam rencana pembangunan tol laut nasional dan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang terhubung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi sub-regional Indonesia–Malaysia–Singapura atau *Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle* (IMS-GT).

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam. Hal ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Keberagaman sumber daya alam ini mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

Dipindai dengan CamScanner

serta potensi tambang yang melimpah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor ini antara lain padi, jagung, kedelai, dan hortikultura seperti cabai, bawang merah, serta berbagai jenis buah-buahan. Selain sebagai sumber pangan, sektor pertanian juga menjadi penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di Provinsi Jambi. Sektor perikanan air tawar juga memiliki potensi yang cukup besar, mengingat banyaknya sungai, danau, dan lahan perairan darat yang mendukung budidaya ikan air tawar. Komoditas unggulan dari sektor ini meliputi ikan patin, lele, nila, dan gurami. Perikanan air tawar tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal, tetapi juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan hasil perikanan.

Provinsi Jambi juga dikenal sebagai salah satu penghasil utama komoditas perkebunan, seperti pinang, karet, kelapa sawit, kelapa kopra, dan cokelat, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional. Komoditas pinang di Provinsi Jambi menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dan berperan penting dalam sektor pertanian dan perdagangan internasional. Produksi pinang di Jambi terus menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan permintaan global terhadap pinang terus meningkat, baik dalam bentuk biji utuh, pinang iris kering, maupun produk olahan. Dengan potensi yang besar dan pengembangan komoditas pinang di Provinsi Jambi diharapkan dapat terus meningkat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat.

Selain itu, sektor kehutanan juga memiliki peran signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan luasnya kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi sumber bahan baku industri serta mendukung keberagaman hayati. Potensi tambang, terutama batu bara dan mineral, juga memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan

Dipindai dengan CamScanner

yang berkelanjutan dari sumber daya alam ini sangat penting, agar dapat mendukung pembangunan yang optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan, pemetaan potensi sumber daya alam Provinsi Jambi menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan sektor-sektor unggulan yang ada.

2.1.2.1 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 mdpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 mdpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi di mana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatra Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, secara topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yaitu:

a. Daerah dataran rendah 0-100 m (67%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin;
b. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (17%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. Daerah dataran tinggi >500 m (16%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Kabupaten Merangin, sebagian Kabupaten Sarolangun dan sebagian Kabupaten Bungo.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga

Dipindai dengan CamScanner

membutuhkan masukan teknologi tertentu dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Provinsi Jambi dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang mempunyai kelerengan antara (200-400). Kawasan ini terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang membujur dari barat laut tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin.
- Perbukitan bergelombang dengan ketinggian antara 50-500 meter dan kemiringan lereng 100 - 200. Wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari.
- Dataran dengan ketinggian antara 0-50 meter, kelerengan antara 00-100. Wilayah ini terletak di bagian timur Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan wilayah pantai.

2.1.2.2 **Geologi**

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari:

a. Endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.
b. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan alluvium, endapan rawa dan endapan undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang menandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, resen.

Dipindai dengan CamScanner

c. Batuan sedimen, berumur permo-karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda adalah sebagai berikut:
   - Formasi Mentulu (Permo-Karbon)
   - Formasi Mengkarang (Perem)
   - Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura)
   - Formasi Telangakar (Oligo Miosen)
   - Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen)
   - Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen)
   - Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen)
   - Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen)

   Formasi ini terdiri dari batupasir, batu lempung, dengan sisipan batu bara, batu lanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batu pasir tufan, batu pasir gampingan, batu gamping, konglomerat polemik dan breksi.

d. Batuan malihan, terbagi atas formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi Mentulu, dan formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta.

e. Batuan gunung api, berumur Perem hingga Kuarter. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.

f. Batuan terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horenblenda dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Provinsi Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatra berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar-pun banyak dijumpai. Struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin,

Dipindai dengan CamScanner

Bungo, Tebo serta Batang Hari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu: Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari sesar besar Sumatra.

2.1.2.3 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

Pada musim hujan kecenderungan air sungai meluap, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai tujuh meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha. Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang mencakup enam sub DAS di dalamnya yaitu:

- Sub DAS Batanghari Hulu
- Sub DAS Batang Merangin Tembesi
- Sub DAS Batang Tabir
- Sub DAS Batang Bungo
- Sub DAS Batang Tebo
- Sub DAS Batanghari Hilir

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Jambi	Batanghari	450,295	10.27
		Bungo	463,749	10.58
		Kerinci	260,024	5.93
		Merangin	658,230	15.02
		Muaro Jambi	277,845	6.34
		Sarolangun	558,475	12.74
		Tanjung Jabung Timur	286,656	6.54
		Tebo	616,617	14.07
		Kota Jambi	16,895	0.39
		Kota Sungai Penuh	14,939	0.34
		Luas DAS di Provinsi Jambi	3,603,725	82.23
2.	Sumatra Barat	Dharmasraya	304,274	6.94
		Solok	117,741	2.69
		Solok Selatan	356,973	8.15
		Luas DAS di Prov. Sumatra Barat	778,988	17.77
Luas DAS Total			**4,382,713**	**100.00**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

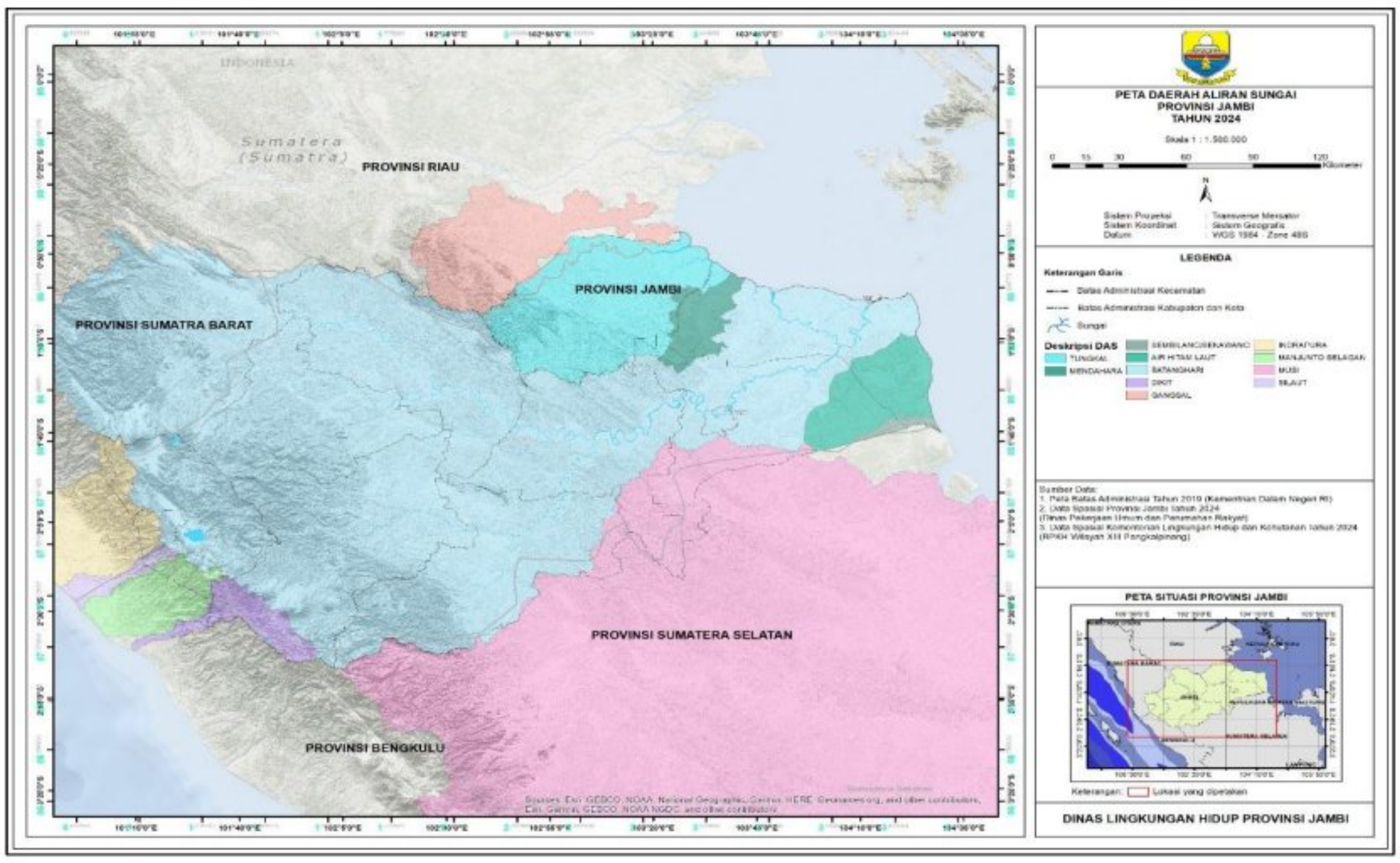

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2-3 Sebaran DAS di Provinsi Jambi

Di samping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu:

a. DAS Betara Pengabuan mencakup tujuh Sub DAS didalamnya.
b. DAS Mendahara mencakup sembilan Sub DAS didalamnya.
c. DAS Air Hitam Laut mencakup empat Sub DAS didalamnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pola aliran sungai di Provinsi Jambi berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai- sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruhi pada musim hujan dan kemarau.

Tabel 2-3 menyajikan daftar sungai yang melintasi setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sungai-sungai ini memiliki kontribusi strategis dalam mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, baik sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian, perikanan, maupun sebagai sarana transportasi antarwilayah. Di antara seluruh sungai yang ada, Sungai Batanghari merupakan yang terpanjang dan paling dominan, melintasi beberapa kabupaten/kota seperti Batang Hari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Timur, hingga Kota Jambi. Keberadaan Sungai Batanghari tidak hanya menentukan arah perkembangan wilayah, tetapi juga menjadi tulang punggung aktivitas perikanan air tawar yang berkembang secara tradisional maupun semi-intensif di sepanjang alirannya.

Sektor perikanan sungai di Provinsi Jambi, khususnya di daerah hilir dan tengah Sungai Batanghari, memiliki potensi yang besar namun belum tergarap secara optimal. Komoditas perikanan seperti ikan patin, baung, toman, dan nila merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya perairan darat ini, termasuk penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan teknologi budidaya, pengendalian pencemaran sungai, serta penyusunan zonasi konservasi perikanan yang mendukung keberlanjutan ekosistem perairan. Selain Sungai Batanghari, sungai-sungai lain seperti Batang Merangin, Batang Tebo, Batang Bungo, Batang Asai, dan Batang Tembesi juga memegang peranan penting di wilayah hulu dan pedalaman. Sungai-sungai ini menjadi sumber air irigasi, penggerak perekonomian lokal, serta penentu pola permukiman masyarakat. Mengingat pentingnya fungsi ekologis dan ekonomi dari sistem sungai di Provinsi Jambi, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) perlu menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan wilayah, dengan pendekatan berbasis ekosistem yang inklusif dan partisipatif.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-3 Nama Sungai yang Melintasi Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai
Kerinci	Batang Merangin, Sungai Siulak Deras
Merangin	Batang Merangin, Batang Tabir
Sarolangun	Batang Limun, Batang Tembesi, Batang Asai
Batang Hari	Batanghari, Batang Tembesi, Batang Asai
Muaro Jambi	Batanghari, Sungai Kumpeh
Tanjung Jabung Timur	Batanghari, Batang Berbak, Batang Mendahara, Batang Lagan, Batang Air Hitam
Tanjung Jabung Barat	Sungai Pengabuhan, Sungai Betara, Sungai Tungkal
Tebo	Batang Tebo, Batanghari
Bungo	Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat
Kota Jambi	Batang Hari

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Provinsi Jambi memiliki sumber daya air yang melimpah, beberapa potensi kondisi yang mendukung untuk dibangun sarana prasarana sumber daya air. Berikut merupakan beberapa potensi danau yang ada di Provinsi Jambi yang dapat dikembangkan.

Tabel 2-4 Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi

No	Nama Danau	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
A.	Kota Jambi			
1	Danau Sipin	Sungai Putri, Legok dan Danau Sipin	Telanaipura	40
2	Danau Teluk Kenali	Teluk Kenali	Telanaipura	15
3	Danau Teluk	Teluk	Telanaipura	50
B.	Kabupaten Merangin			
1	Danau Depati Empat	Rantau Kermas	Jangkat	35
2	Danau Pauh	Pulau Tengah	Jangkat	250
3	Danau Kecil	Pulau Tengah	Jangkat	18
4	Sikumbang	Pulau Tengah	Jangkat	20
C.	Kabupaten Kerinci			
1	Danau Kerinci	Jujun	Keliling Danau	4.200
2	Danau Air Lingkat	Lempur Tengah	Gunung Raya	48
3	Danau Dua	Lempur Tengah	Gunung Raya	12
4	Danau Gunung Tujuh	Pelompek, Lubuk Pauh	Kayu Aro	1.200
5	Danau Belibis	Sido Mulyo	Kayu Aro	25
D.	Kabupaten			

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama Danau	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
	Sarolangun			
1	Danau Biaro	Lidung	Sarolangun	10
2	Danau Baru	Pulau Pinang	Sarolangun	10
Jumlah				**5.933**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Secara hidrogeologi, produktivitas air tanah daerah Povinsi Jambi yang didasarkan atas sifat fisik batuan penyusun (akuifernya) dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Produktivitas air tanah tinggi

Meliputi sepanjang Sungai Batanghari dan Sungai Tembesi. Litologi akuifaer terutama berupa pasir dan kerikil yang merupakan endapan alluvium sungai. Debit sumur berkisar 5 hingga 25 l/detik dan jika ditinjau dari sifat fisik batuan penyusun akuifernya yang merupakan batuan lepas maka aliran air tanah yang terjadi merupakan aliran air tanah melalui ruang antar butir. Muka air tanah bebas mempunyai kedalaman berkisar dari 0.5 – 2.5 m di bawah muka tanah setempat dengan buaian (perbedaan) muka air tanah kecil antara musim hujan dan kemarau. Muka air tanah dalam atau tertekan diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m dari muka tanah setempat.

Pasokan air dari daerah resapan umumnya kecil akan tetapi pasokan air terutama berasal dari Sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Sungai yang bertindak sebagai pemasok air tanah disebut juga sebagai sungai influen (*influent stream*). Ciri-ciri air tanah seperti ini umumnya potensi air tanahnya tinggi. Pengukuran harga keterusan air (*trasmissivity*) yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan di berbagai tempat di Indonesia yang mempunyai kondisi serupa menunjukkan bahwa harga keterusannya lebih dari 500 m/hari.

b. Produktivitas air tanah sedang

Produktivitas air tanah sedang di daerah Provinsi Jambi terdapat di 3 (tiga) tempat, yaitu:

a) Di bagian timur, meliputi daerah daratan pantai timur

Walaupun produktivitas tanahnya sedang akan tetapi kendalanya adalah kualitas air tanahnya yang kurang baik,

Dipindai dengan CamScanner

terutama untuk air tanah bebas. Kemungkinan air tanah dengan kualitas baik dapat diperoleh hanya berupa spot-spot, terutama pada lensa-lensa pasir lepas, dengan kedalaman muka air tanah bebas berkisar dari 3–10 m dibawah muka tanah setempat. Data air tanah tertekan diperoleh dari hasil pemboran di beberapa tempat menunjukkan 2 (dua) litologi akuifer utama, yaitu:

1. Litologi akuifer dari Formasi Kasai yang dijumpai pada interval kedalaman 18 – 44 meter dan 76 – 95 meter dan berkualitas air kurang baik; dan
2. Litologi akuifer dari Formasi Muaraenim yang dijumpai pada kedalaman antara 90 – 120 meter dan berkualitas air baik.

b) Di bagian tengah, di sekitar Bangko dan utara Muara Bungo

Debit sumur berkisar antara 1 – 5 l/detik dengan akuifer utama berupa batu pasir kurang padu, tufa dan tufa pasiran. Muka air tanah bebas diperkirakan kurang dari 20 m dari muka tanah setempat, sedangkan air tanah dalam diperkirakan dari 50 m dari muka tanah setempat. Data pemboran air tanah dalam di sekitar Bangko enunjukkan bahwa kedalaman sumur bor mencapai 100 meter dengan debit sekitar 8.5 l/detik.

c) Di bagian barat, di selatan Gunung Kerinci meliputi Sungai Penuh dan Padang Panjang (kaki Gunung Masurai)

Debit sumur diperkirakan sampai 5 l.detik dengan akuifer utama berupa tufa atau breksi volkanik dari endapan volkanik muda. Pada akuifer batuan lepas sistem airan air tanah dapat melalui ruang antar butir, sedangkan pada akuifer pada batuan padu aliran air tanah dapat melalui celahan dan rekahan. Muka air tanah bebas maupun muka air tanah dalam umumnya dalam. Untuk air tanah bebas, pada daerah tertentu dapat mencapai kurang dari 20 m di bawah muka tanah setempat.

c. Produktivitas air tanah rendah

Umumnya terdapat di bagian utara, baratdaya, dan barat wilayah Provinsi Jambi. Batuan penyusunnya adalah berupa batuan sedimen padu, batuan malihan dan batuan beku terobosan. Pada batuan malihan dan sedimen masih dapat diharapkan dijumpai air tanah walaupun secara terbatas, terutama pada zona pelapukan

Dipindai dengan CamScanner

yang tebal atau daerah lembah. Sifat air tanah di daerah pelapukan dan lembah merupakan air tanah bebas yang dipengaruhi oleh musim, pada musim hujan air tanah dapat diperoleh sedangkan pada musim kamarau umumnya sulit diperoleh.

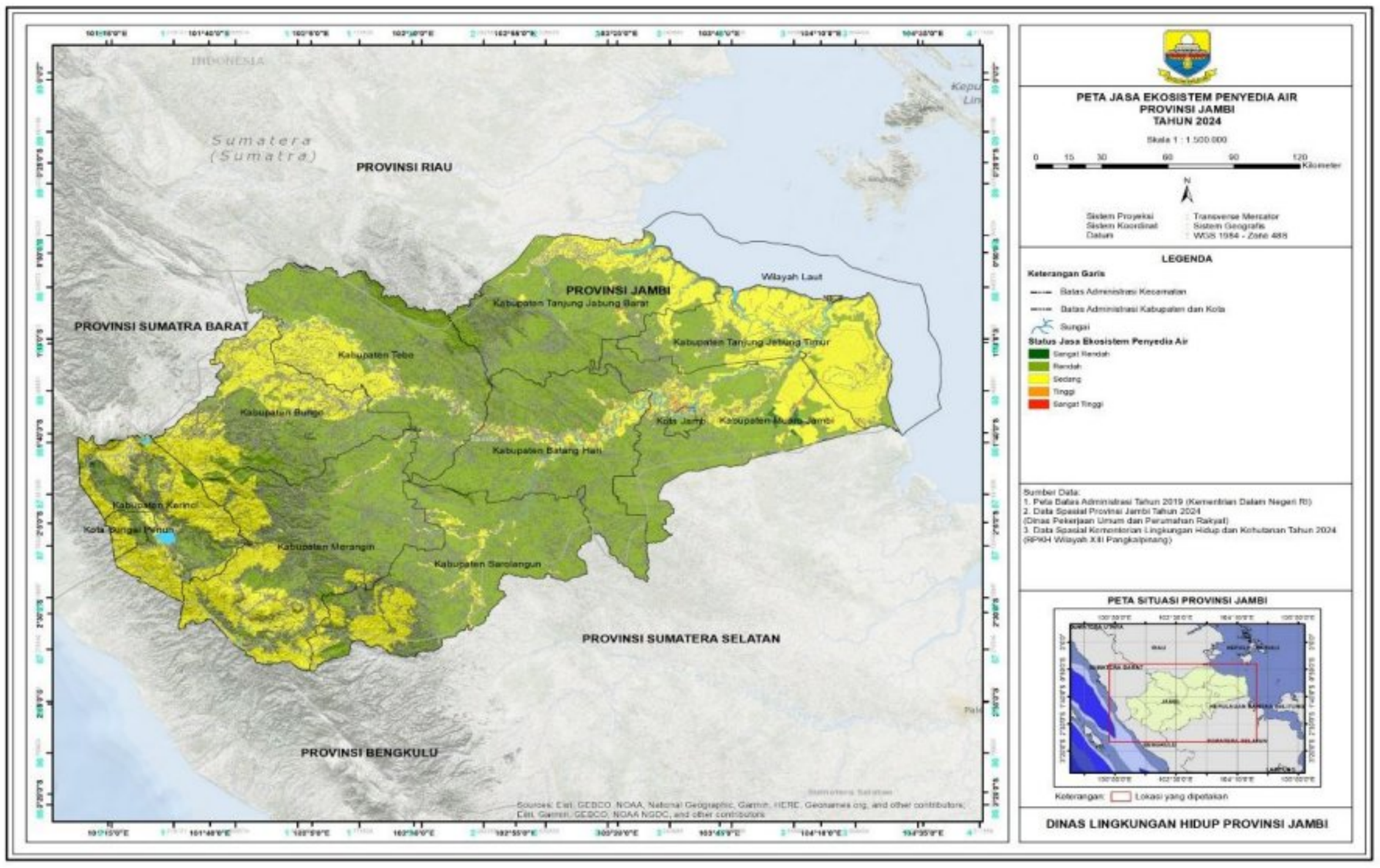

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025

Gambar 2-4 Produktivitas Air Tanah Provinsi Jambi

2.1.2.4 Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim yang mengacu pada nilai konservasi. Kawasan konservasi tinggi tersebar pada wilayah dengan penetapan Taman Nasional. Taman Nasional Berbak (TNB) yang kemudian dikenal dengan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berada di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) yang berada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari dan

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Tebo, serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan persentase luas masing masing kabupaten berdasarkan tingkat daya tampung lingkungan dalam pengaturan iklim adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini. Pada sebagian kabupaten di dominasi oleh kemampuan sangat rendah yaitu di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sebaliknya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh didominasi kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi.

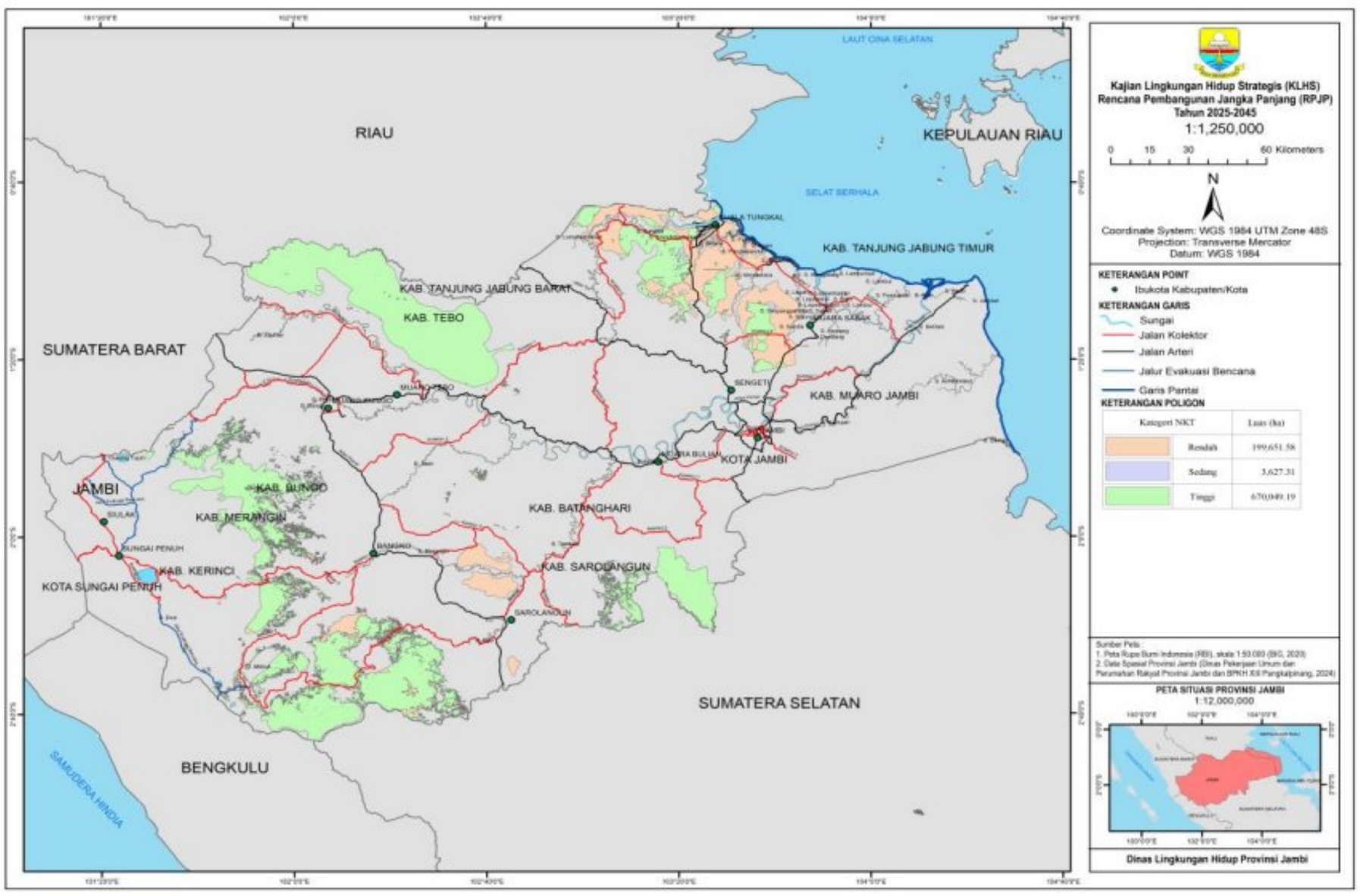

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025

Gambar 2-5 Peta Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi

Tabel 2-5 menyajikan informasi mengenai luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim. Pengelompokan ini mencerminkan sejauh mana daerah-daerah di Provinsi Jambi mampu mengelola dan mengatur kondisi iklim yang ada di wilayahnya, yang berpengaruh pada berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Setiap kabupaten/kota memiliki distribusi luas wilayah yang berbeda, dengan variasi dalam tingkat kemampuan pengaturan iklim yang dikategorikan mulai dari Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi.

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Kerinci yang tercatat dengan kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi pada sektor tertentu memiliki luas wilayah yang signifikan dengan potensi alam yang melimpah sedangkan daerah lainnya seperti Kota Jambi memiliki karakteristik berbeda dengan pengaturan iklim yang lebih terfokus pada area terbatas. Data ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan dan potensi yang ada di masing-masing wilayah Provinsi Jambi dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek iklim.

Tabel 2-5 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Kabupaten Batanghari	9.542,33	0,20	7.073,09	0,14	408.308,01	8,32	112.394,28	2,29
Kabupaten Bungo	17.734,50	0,36	1.094,36	0,02	158.127,23	3,22	283.647,00	5,78
Kabupaten Kerinci	3.002,88	0,06	NA	NA	123.762,91	2,52	218.797,39	4,46
Kabupaten Merangin	19.906,51	0,41	708,38	0,01	423.640,97	8,64	311.151,52	6,34
Kabupaten Muaro jambi	23.077,40	0,47	4.458,59	0,09	416.395,15	8,49	106.959,09	2,18
Kabupaten Sarolangun	13.487,51	0,28	1.740,85	0,04	378.599,62	7,72	200.297,61	4,08
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3.945,27	0,08	4.113,69	0,08	390.880,26	7,97	95.134,44	1,94
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.350,43	0,09	5.193,41	0,11	310.815,32	6,34	165.782,45	3,38
Kabupaten Tebo	19.484,63	0,40	5.133,67	0,11	358.886,46	7,32	244.022,61	4,98
Kota Jambi	14.218,19	0,29	730,30	0,02	2.036,87	0,04	NA	NA
Kota Sungai Penuh	1.212,35	0,03	NA	NA	10.772,83	0,22	24.628,14	0,50
Total	129.962,0	2,65	30.246,33	1,00	2.982.225,62	60,80	1.762.814,50	35,94

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Berdasarkan Tabel 2-5, total luas wilayah dengan fungsi jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Jambi mencapai 4.902.884,00 hektare, yang terbagi ke dalam empat kategori tingkat peran: sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan, kategori sedang mendominasi dengan luas sebesar 2.982.225,62 hektare atau sekitar 60,80% dari total wilayah, diikuti oleh kategori tinggi sebesar

Dipindai dengan CamScanner

1.762.814,50 hektare (35,94%), kategori rendah seluas 130.246,33 hektare (2,70%), dan kategori sangat rendah seluas 129.962,00 hektare (2,65%).

Kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar dalam kategori peran tinggi adalah Kabupaten Tebo dengan luas 244.022,41 hektare (4,98%), diikuti oleh Kabupaten Bungo sebesar 283.647,00 hektare (5,78%), serta Kabupaten Merangin dengan luas 311.151,52 hektare (6,34%). Sementara itu, Kabupaten Sarolangun mencatat luas tertinggi pada kategori sedang sebesar 378.599,52 hektare (7,72%), menunjukkan peran signifikan dalam stabilisasi iklim regional.

Kabupaten/Kota dengan kontribusi relatif kecil dalam peran jasa ekosistem pengaturan iklim, baik dalam kategori tinggi maupun sedang, adalah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Kota Jambi hanya memiliki 2.036,87 hektare pada kategori sedang (0,04%) dan tidak tercatat memiliki wilayah pada kategori tinggi. Kota Sungai Penuh memiliki 24.628,14 hektare pada kategori tinggi (0,50%) dan 10.772,83 hektare pada kategori sedang (0,22%).

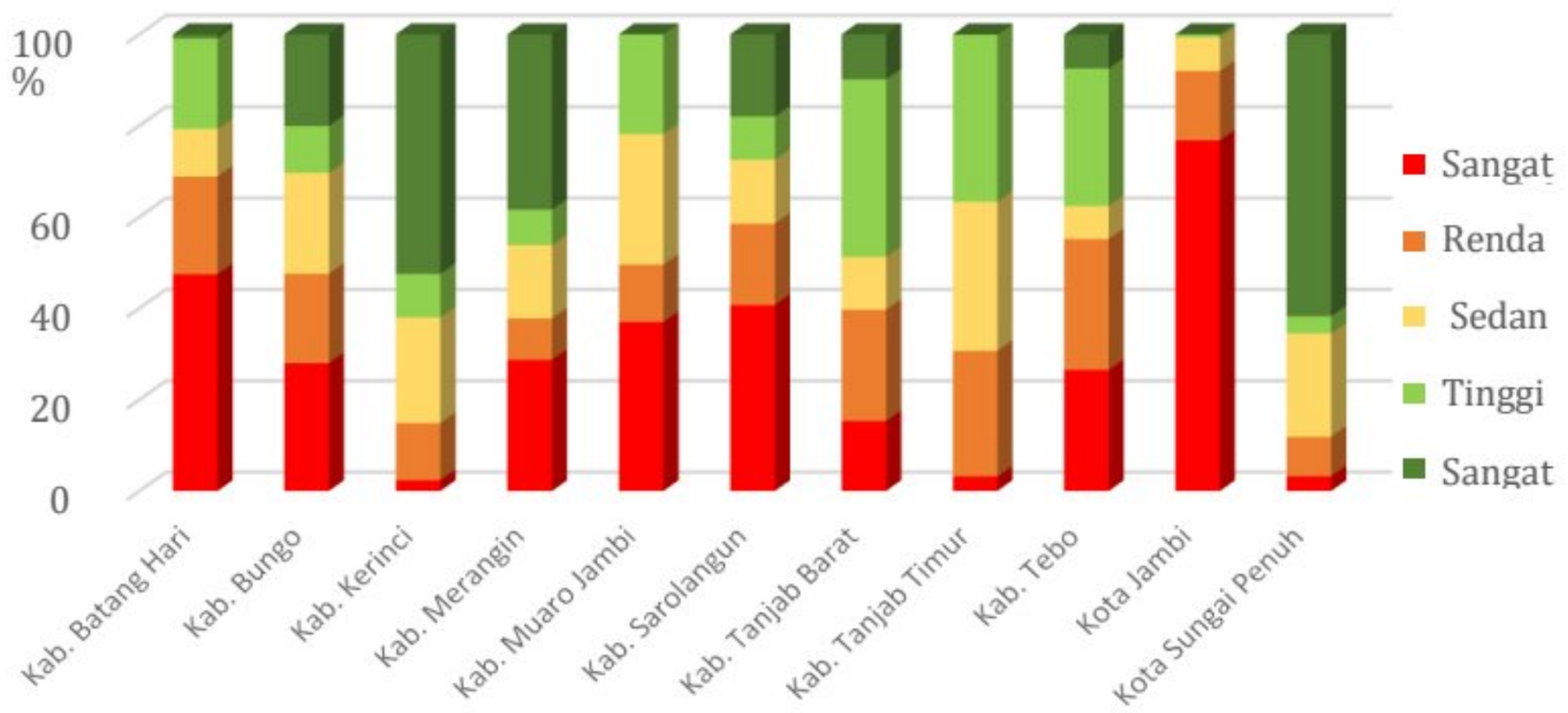

Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-6 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Menurut Kemampuan Pengaturan Iklim Tahun 2020-2049

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bagaimana setiap daerah di Provinsi Jambi memiliki kekuatan dan tantangan terkait dengan pengelolaan iklim yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memajukan sektor pertanian, perkebunan, dan lainnya. Daerah dengan kemampuan pengaturan iklim yang tinggi harus memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan ketahanan

Dipindai dengan CamScanner

ekonomi dan ekosistemnya, sementara daerah dengan pengelolaan iklim yang rendah perlu fokus pada peningkatan sistem pengelolaan lingkungan agar dapat menghadapi perubahan iklim dengan lebih baik.

Gambar-gambar berikut menunjukkan hasil proyeksi perubahan iklim di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk periode tahun 2020 hingga 2049 berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976 hingga tahun 2005. Hasil proyeksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

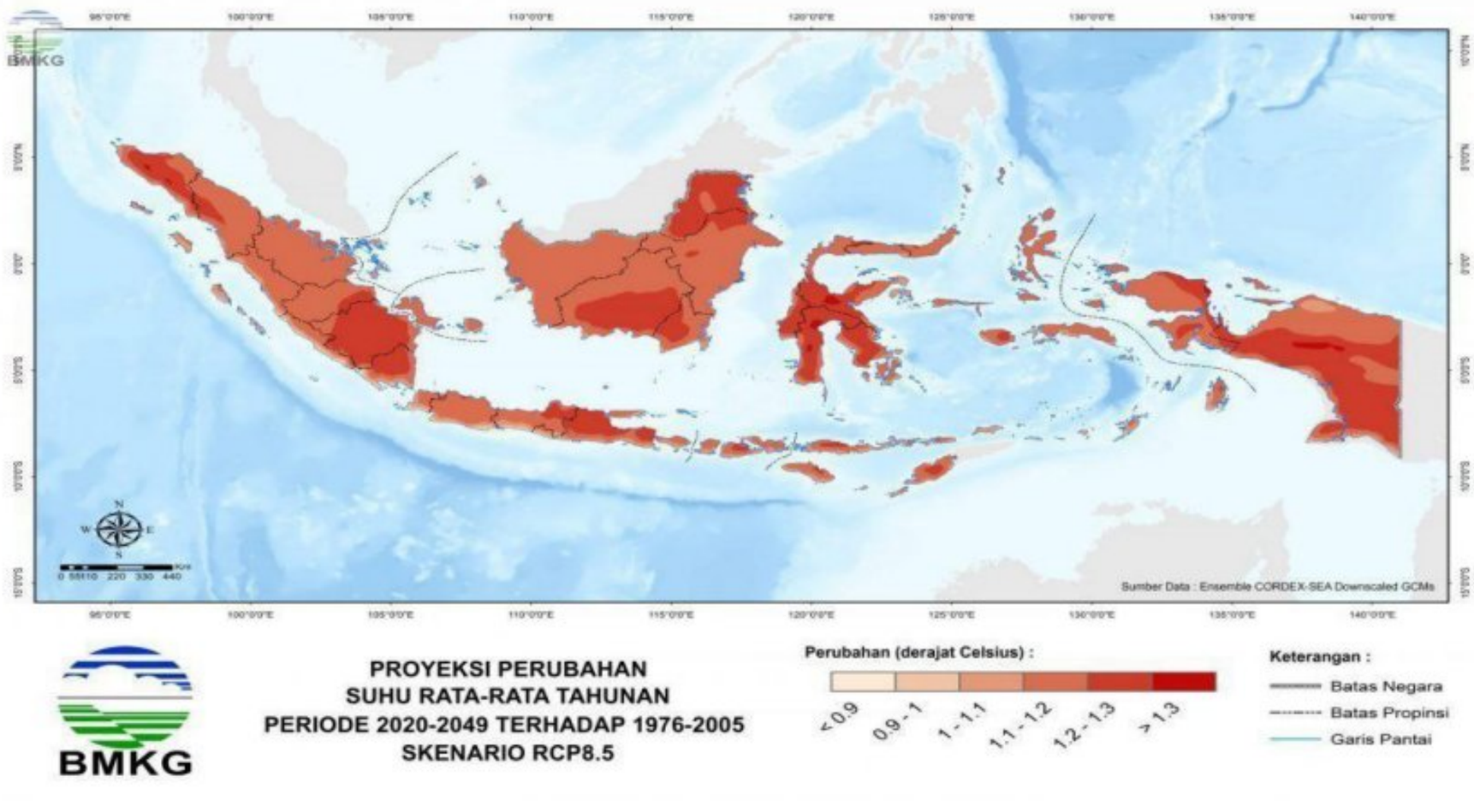

Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-7 Peta Proyeksi Perubahan Suhu Rata-rata Tahunan di Indonesia 2020-2049

Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-7 menampilkan bahwa sebagian besar wilayah Jambi akan mengalami peningkatan suhu rata- rata tahun sebesar 10C hingga 1.10C, dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan mengalami peningkatan sekitar 1.10C hingga 1.20C dibandingkan saat ini. Sementara Gambar 2-8 menampilkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan mengalami penambahan hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatra yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20% dibandingkan saat ini.

Dipindai dengan CamScanner

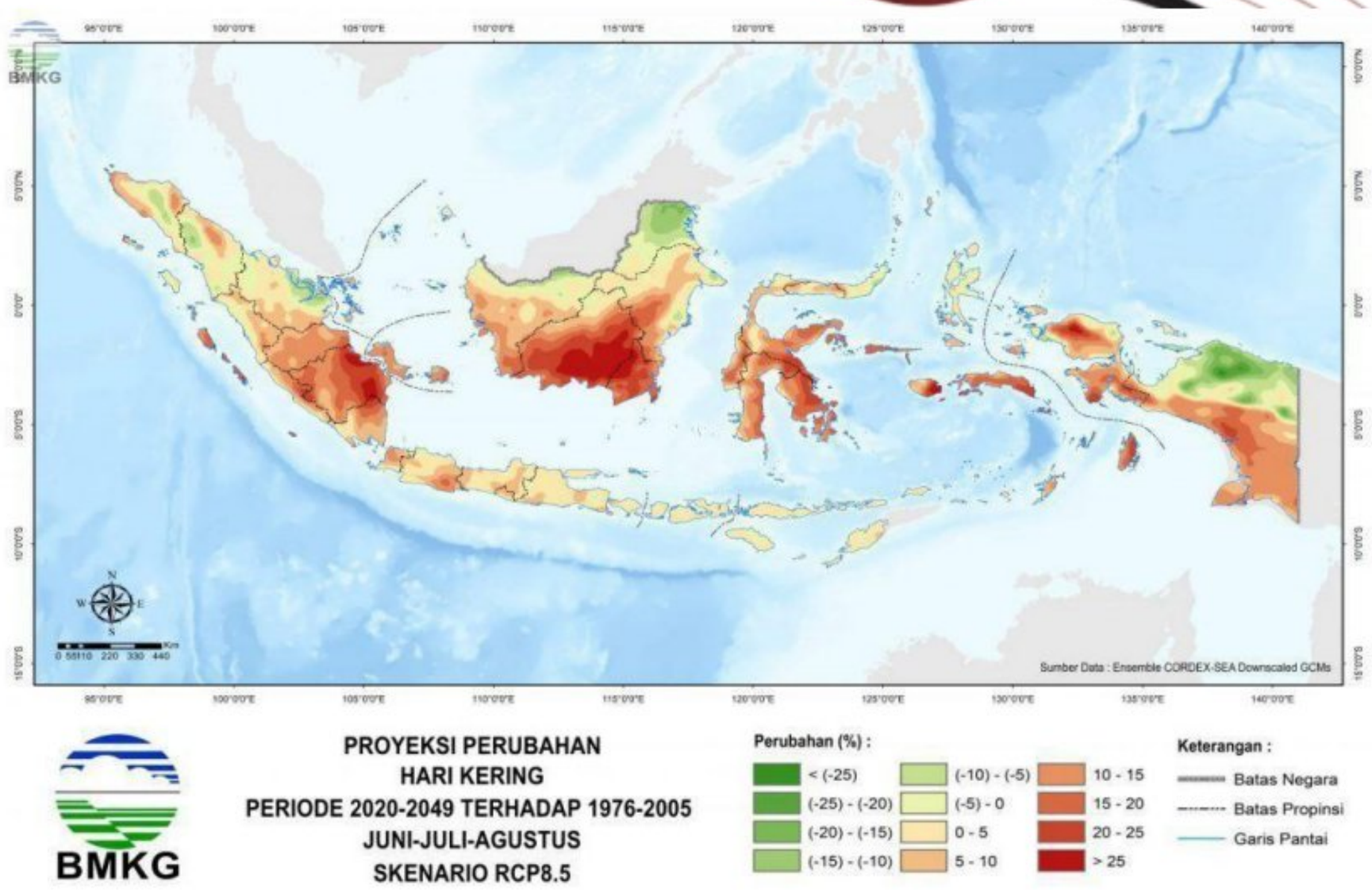

Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-8 Peta Proyeksi Perubahan Hari Kering Di Indonesia 2020-2049

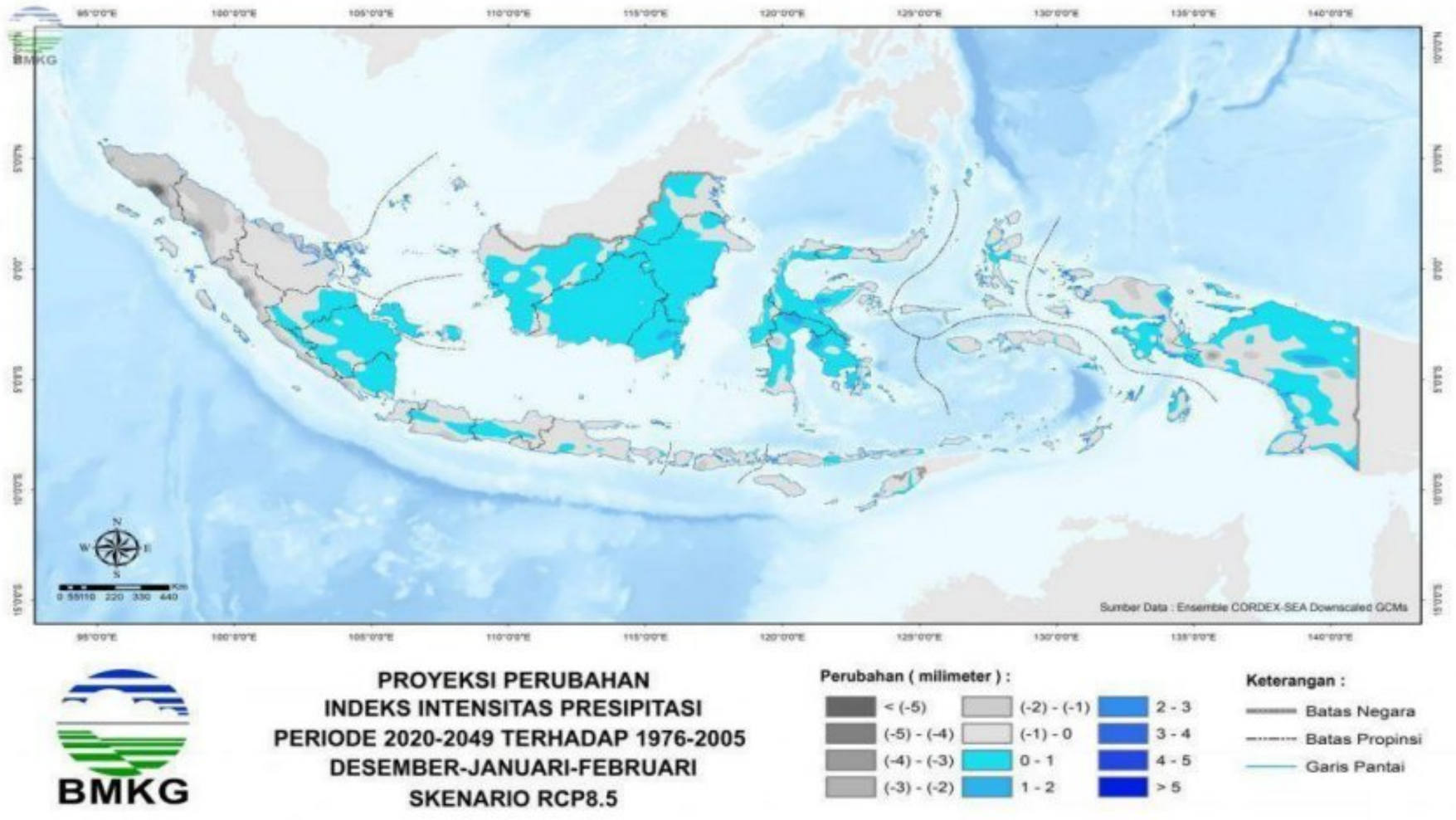

Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-9 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049

Gambar di atas menjelaskan bahwa sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan Pantai Timur Sumatra) akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm, namun sebagian lainnya (wilayah tengah

Dipindai dengan CamScanner

hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm.

2.1.2.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jambi menjadi 2 fungsi yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-6 dan Tabel 2-7 Pola Penggunaan Lahan tahun 2022 di Wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 2-6 Tutupan Lahan Provinsi Jambi

Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Persentase (%)
Air Danau/Situ	10.340,01	0,21
Air Tawar Sungai	33.921,02	0,69
Hutan Rimba	1.327.992,55	27,07
Perkebunan/Kebun	856.202,64	17,45
Permukiman dan Tempat Kegiatan	151.542,42	3,09
Sawah	115.215,79	2,35
Semak Belukar/Alang-Alang	1.102.391,46	22,47
Tegalan/Ladang	1.308.103,11	26,66
Jumlah	**4.905.709,00**	**100**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Luas lahan hutan mencapai 1.327.992,55 Ha atau 27,07% dari luas keseluruhan tutupan lahan di Provinsi Jambi. Penggunaan lahan kawasan permukiman mencapai 151.542,42 Ha atau sebesar 3,09% dari luas keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tutupan lahan di Provinsi Jambi masih didominasi oleh lahan alami dan semi-alami seperti hutan rimba, semak belukar/alang-alang, dan tegalan/ladang, sementara penggunaan lahan untuk untuk perairan seperti danau atau situ hanya mencakup 10.340,01 Ha atau sekitar 0,21% dari total luas tutupan lahan.

Tabel 2-7 Pola Penggunaan Lahan tahun 2022 di Wilayah Provinsi Jambi

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Badan Air	45.687.30	Hutan Tanaman	309.562.07

Dipindai dengan CamScanner

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Bandara / Pelabuhan	94.64	Pemukiman	119.108.13
Belukar	489.410.28	Perkebunan	1.882.426.03
Belukar Rawa	295.271.84	Pertambangan	19.437.16
Hutan Lahan Kering Primer	563.229.08	Pertanian Lahan Kering	138.251.86
Hutan Lahan Kering Sekunder	272.717.94	Pertanian Lahan Kering Campur	501.491.18
Hutan Mangrove Primer	1.323.95	Rawa	16.590.34
Hutan Mangrove Sekunder	9.131.94	Sawah	23.950.49
Hutan Rawa Primer	104.502.43	Tanah Terbuka	34.117.13
Hutan Rawa Sekunder	64.604.10	Transimigrasi	11.616.66
Total			**4.902.525**

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Di Provinsi Jambi, pemanfaatan ruang menunjukkan karakteristik wilayah yang sangat dipengaruhi oleh fungsi ekologis hutan, dominasi sektor perkebunan, serta keberadaan kawasan budidaya dan non-budidaya yang terus berkembang. Berdasarkan data terbaru, total luas lahan yang telah teridentifikasi penggunaannya mencapai 4.902.525 hektar.

Komposisi penggunaan lahan memperlihatkan dominasi kawasan kehutanan dan perkebunan. Lahan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa, serta hutan mangrove, mencerminkan peran penting ekosistem alami dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keanekaragaman hayati. Hutan Lahan Kering Primer memiliki cakupan yang paling luas, yaitu 563.229,08 Ha, yang menunjukkan masih cukup besarnya tutupan hutan alam yang relatif belum terganggu. Sementara itu, keberadaan Hutan Sekunder dan belukar mengindikasikan adanya tekanan terhadap kawasan hutan primer, baik karena aktivitas budidaya maupun alih fungsi lahan.

Dipindai dengan CamScanner

Sektor perkebunan menjadi pengguna lahan terbesar di Provinsi Jambi, mencapai 1.882.426,03 Ha atau lebih dari sepertiga total wilayah. Hal ini mencerminkan ketergantungan ekonomi daerah terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, perlu diwaspadai dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan akibat ekspansi perkebunan, termasuk potensi konflik lahan, degradasi tanah, dan hilangnya fungsi ekosistem. Sektor pertanian juga menempati peran penting, dengan luas lahan pertanian lahan kering campur sebesar 501.491,18 Ha, diikuti oleh pertanian lahan kering (138.251,86 Ha) dan sawah (23.950,49 Ha). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pertanian di Jambi masih mengandalkan sistem pertanian tadah hujan dan berskala kecil, yang rentan terhadap perubahan iklim. Adapun kawasan non-agraris seperti pemukiman, pertambangan, transmigrasi, serta tanah terbuka menunjukkan dinamika pembangunan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Luasan lahan permukiman sebesar 119.108,13 Ha mengindikasikan adanya pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan hunian. Keberadaan lahan untuk pertambangan (19.437,16 Ha) serta transmigrasi (11.616,66 Ha) menunjukkan intervensi pembangunan yang bersifat sektoral dan terarah. Sementara itu, lahan badan air seluas 45.687,30 Ha dan keberadaan bandara/pelabuhan (94,64 Ha) menandakan pentingnya jaringan transportasi dan sumber daya air sebagai bagian dari sistem pendukung pembangunan wilayah.

Secara keseluruhan, struktur penggunaan lahan di Provinsi Jambi memperlihatkan potensi besar yang perlu dikelola secara arif dan berkelanjutan. Penataan ruang ke depan harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis wilayah. Strategi pembangunan jangka menengah perlu memprioritaskan pemanfaatan ruang yang berkeadilan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Bagian ini memaparkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi berdasarkan beberapa jasa ekosistem yang disediakan.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.3.1 Ketersediaan Pangan

Provinsi Jambi memiliki struktur wilayah yang ditandai oleh beragam karakteristik penggunaan lahan yang mencerminkan potensi dan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, termasuk ketersediaan pangan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, diperoleh gambaran mengenai kondisi daya dukung dan daya tampung (DDDT) lahan terhadap penyediaan pangan di wilayah ini.

Dari total luas wilayah Provinsi Jambi, yaitu sebesar 4.907.395,72 hektar, sebagian besar lahan termasuk dalam kategori daya dukung seimbang, yaitu seluas 2.814.699,40 hektar. Artinya, lahan pada kawasan tersebut secara umum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya secara relatif seimbang antara kapasitas produksi dengan konsumsi. Namun demikian, tantangan nyata terlihat dari masih luasnya kawasan yang berada dalam status defisit, yaitu sebesar 2.041.136,22 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada area tersebut, kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan pangan, terutama jika tidak didukung oleh distribusi pangan yang baik atau intervensi produksi yang memadai. Sementara itu, hanya sebagian kecil wilayah yang tergolong dalam status surplus, yakni 51.560,1 hektar, yang mencerminkan adanya kelebihan kapasitas produksi pangan dibandingkan kebutuhan di wilayah tersebut. Lahan-lahan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan lokal maupun penyangga distribusi antarwilayah. Kondisi daya dukung lahan ini menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Distribusi status daya dukung lahan terhadap pangan menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi ke depan perlu berfokus pada peningkatan produktivitas lahan, penguatan sistem distribusi pangan, serta pengelolaan ruang yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan kemandirian pangan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-8 Luas dan Status Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi

No	Status	Luas (Ha)
1	Surplus	51.560,1
2	Seimbang	2.814.699,40
3	Defisit	2.041.136,22
TOTAL		**4.907.395,72**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

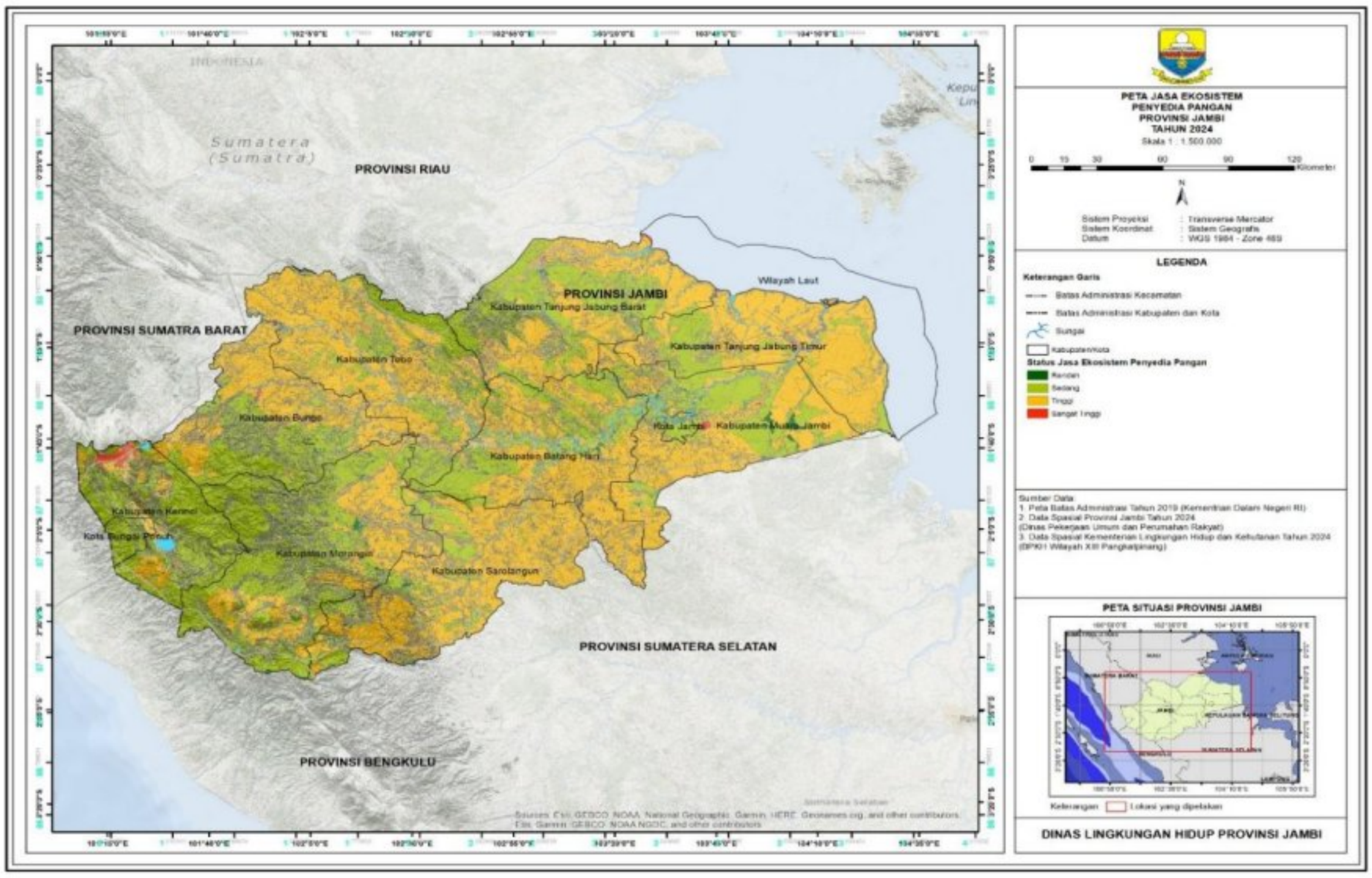

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2-10 Peta Jasa Penyedia Pangan Provinsi Jambi

Gambar di atas menunjukkan sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada pada kategori tinggi dan sedang dalam hal kapasitas ekosistem untuk menyediakan pangan. Secara keseluruhan, wilayah Jambi masih memiliki kemampuan ekosistem yang cukup untuk menopang penyediaan pangan secara berkelanjutan. Beberapa kabupaten dengan kontribusi ekosistem tertinggi terhadap penyediaan pangan yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah-wilayah tersebut mencerminkan adanya potensi besar dari segi sumber daya alam dan tata guna lahan yang mendukung sistem pangan lokal dan regional. Di sisi lain, beberapa kota seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh menunjukkan keterbatasan luasan lahan dengan peran ekosistem

Dipindai dengan CamScanner

tinggi maupun sangat tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena karakteristik kota yang cenderung lebih padat penduduk dan didominasi oleh aktivitas non-pertanian.

Kategori sangat tinggi, meskipun hanya mencakup wilayah yang kecil, tetap penting sebagai kawasan strategis yang dapat berperan sebagai lumbung pangan, penyimpan cadangan ekologis, serta wilayah konservasi produktif. Salah satu wilayah yang memiliki proporsi tertinggi dalam kategori ini adalah Kabupaten Kerinci. Distribusi ini menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pembangunan wilayah yang berbasis pada daya dukung ekologis, khususnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kawasan dengan fungsi ekosistem tinggi.

2.1.3.2 Ketersediaan Air

Hasil olahan terhadap data curah hujan dan geohidrologi dikatehui bahwa hingga kini ketersediaan air untuk penduduk di wilayah bagian barat dan sebagian besar wilayah bagian tengah Provinsi Jambi masih melimpah. Wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhannya adalah terutama beberapa daerah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada daerah-daerah ini neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan).

Pada daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan). Kondisi defisit ini menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan, khususnya untuk mendukung kebutuhan pertanian, domestik, dan industri. Oleh karena itu, intervensi kebijakan melalui konservasi daerah tangkapan air, pembangunan infrastruktur air, serta pengendalian pemanfaatan air tanah menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan neraca air di wilayah tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

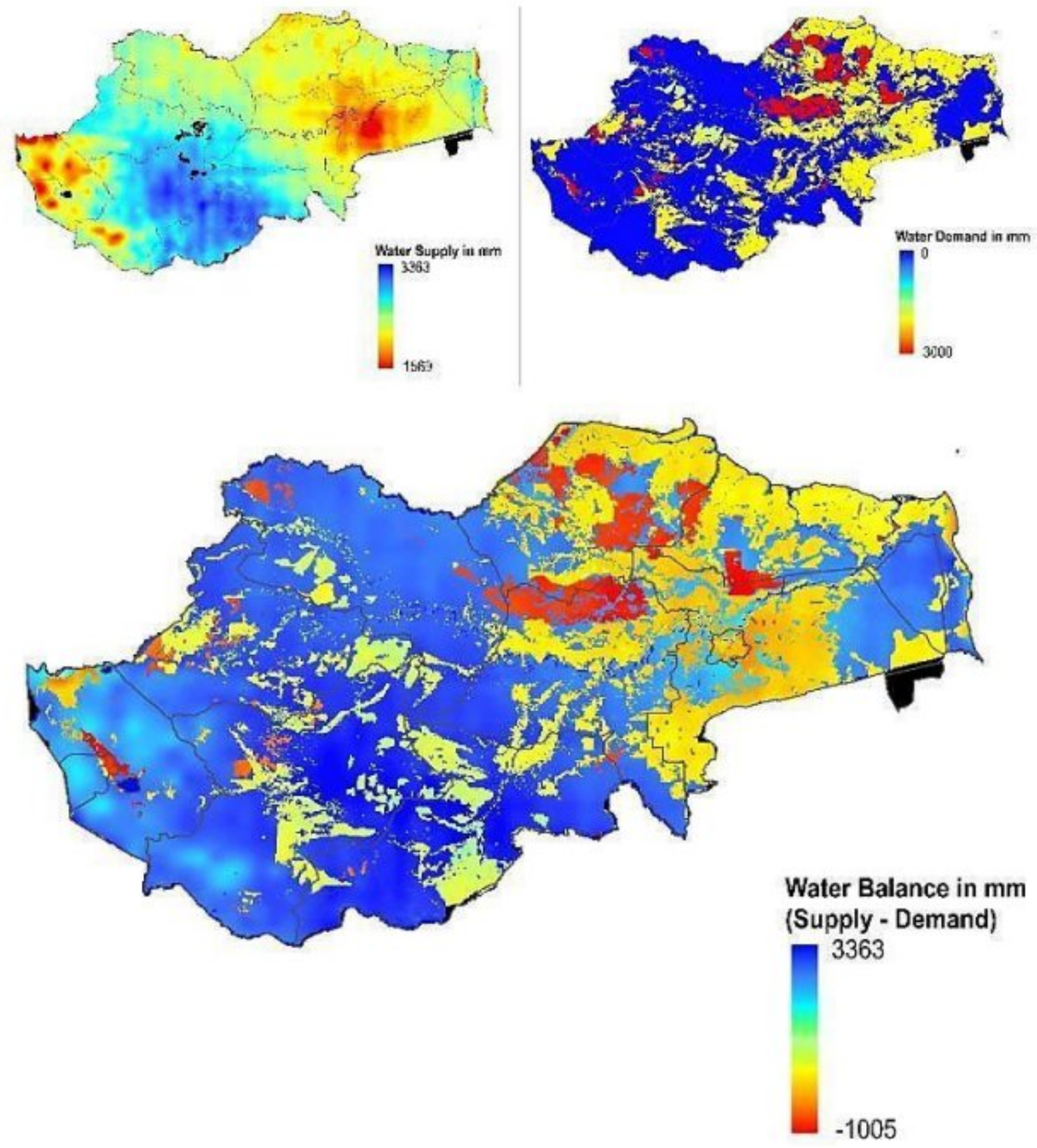

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2-11 Neraca Air Wilayah Proivinsi Jambi 2021

2.1.3.3 Ketersediaan Lahan Tempat Tinggal/Berusaha Rendah Risiko Bencana

Dengan menggunakan indeks rawan bencana yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (rawan bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan dan lahan) serta standar luas ruang hidup layak yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR (11 m2/orang) dan Koefisien Dasar Hijau wilayah perkotaan dan perdesaan, maka dapat diketahui masih cukup ruang yang layak untuk penduduk di wilayah Provinsi Jambi tinggal dan berusaha, kecuali di wilayah perkotaan yaitu Kota Jambi dan terutama Kota Sungai Penuh yang mulai terbatas. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (provinsi maupun Kabupaten/kota) dengan penataan ruang untuk kawasan pemukiman atau desa tangguh bencana serta bangunan layak ramah lingkungan di kawasan-kawasan pemukiman yang teridentifikasi berada di daerah rawan bencana untuk memitigasi dan mengantisipasi terjadinya kejadian bencana.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-9 Kebutuhan dan Ketersediaan Ruang Hidup Layak (Tidak Rawan Bencana) Bagi Penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota Pada Tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Ruang Layak (Ha)*	Ruang Layak** (Ha)	Surplus/ (Defisit) (Ha)
Kabupaten Kerinci	826	3.304	2.478
Kabupaten Merangin	1.169	4.674	3.506
Kabupaten Sarolangun	957	3.829	2.872
Kabupaten Bungo	1.595	6.378	4.784
Kabupaten Batang Hari	1.327	5.310	3.982
Kabupaten Tebo	1.486	5.944	4.458
Kabupaten Muaro Jambi	1.327	5.306	3.980
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.397	5.588	4.191
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.011	4.044	3.033
Kota Jambi	1.000	1.500	500
Kota Sungai Penuh	159	239	80
Total	**6.380**	**22.622**	**16.242**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Data diolah (2021), Data termutakhir

2.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Iingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebaga warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. Menurut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. Rawan bencana alam nasional;

Dipindai dengan CamScanner

g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. Kawasan Taman Nasioanl Berbak Sembilang
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh; dan
4. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan sosial budaya salah satunya adalah Kawasan Percandian Muara Jambi seluas kurang lebih 21.288 hektar (3.355 Ha). Kawasan Cagar Budaya Muara jambi merupakan kawasan percandian agama Buddha yang telah tumbuh dan berkembang pada abad ke 7-13 M. Kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang menempati 8 (Delapan) Desa dalam 2 (Dua) Kecamatan, yaitu Desa Danau Lamo, Desa Muaro Jambi, Desa Baru, dan Desa Kemingking Luar di Kecamatan Maro Sebo, serta Desa Tebat Patah, Desa Kemingking Dalam, Desa Dusun Mudo, dan Desa Teluk Jambu di Kecamatan Taman Rajo.

Kawasan Cagar Budaya Muara jambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.259/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muara Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan luas 3.981 hektar. Bahkan telah masuk dalam daftar tentatif (*Tentative List*) UNESCO untuk nominasi warisan dunia dengan No. 5465 Tahun 2009. Berdasarkan letak astronomis, kawasan ini berada pada zona 48 M 346839 mT- 356779 mT dan 9833468 mU-9840765 mU. Batas-batas kawasan ini adalah:

- Sebelah Utara: Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo
- Sebelah Selatan: Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah
- Sebelah Barat: Desa Danau Lamo dan Desa Baru
- Sebelah Timur: Desa Teluk Jambu dan Desa Dusun Mudo

Kawasan ini dibelah oleh sebuah sungai besar, yakni Sungai Batanghari yang membagi 2 kawasan ini menjadi sisi utara dan sisi

Dipindai dengan CamScanner

selatan. Adapun tinggalan purbakala tersebut menempati tanggul alam kuno yang ada di sepanjang tepi Sungai Batanghari, baik di sisi utara maupun di sisi selatan. Tanggul alam merupakan bentukan lahan di sepanjang tebing sungai yang relatif lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang terbentuk dari proses pengendapan oleh limpahan banjir. Umumnya daerah pedesaan yang terdapat di sepanjang Sungai Batanghari terletak pada tanggul alam, contohnya Desa Muaro Jambi.

Kawasan strategis nasional lain adalah Geopark Merangin, kawasan Geopark Merangin masuk dalam daftar pengusulan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Pengusulan Geopark Merangin sebagai bagian dari jejaring UGGp meliputi proses pemenuhan standar internasional aspek konservai, edukasi, dan pengelolaan partisipatif masyarakat. Geopark Merangin mengintergrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya dalam satu kawasan strategis. Kawasan ini terkenal dengan fosil flora tertua di dunia dari zaman Karbon-Permian. Fosil-fosil terekam dalam batuan sedimen di sepanjang aliran Sungai Mengkarang, yang merupakan situs geologi utama. Geopark Merangin mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakt lokal.

Sistem sungai di satuan ruang geografis Muara Jambi terdiri dari Sungai Batanghari sebagai sungai induk dan beberapa anak sungainya, seperti Sungai Amburan Jalo, Sungai Terusan, Sungai Jambi, Parit Sekapung, Parit Johor, Sungai Melayu, Sungai Selat, dan Sungai Berembang. Berdasarkan analisis arah aliran, pola aliran, dan morfometri saluran diketahui bahwa sistem sungai di daerah ini dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal tersebut diketahui dari adanya dugaan bahwa beberapa sungai di daerah ini merupakan sungai buatan, seperti Sungai Terusan, Parit Sekapung, Parit Johor, dan lain-lain.

Dipindai dengan CamScanner

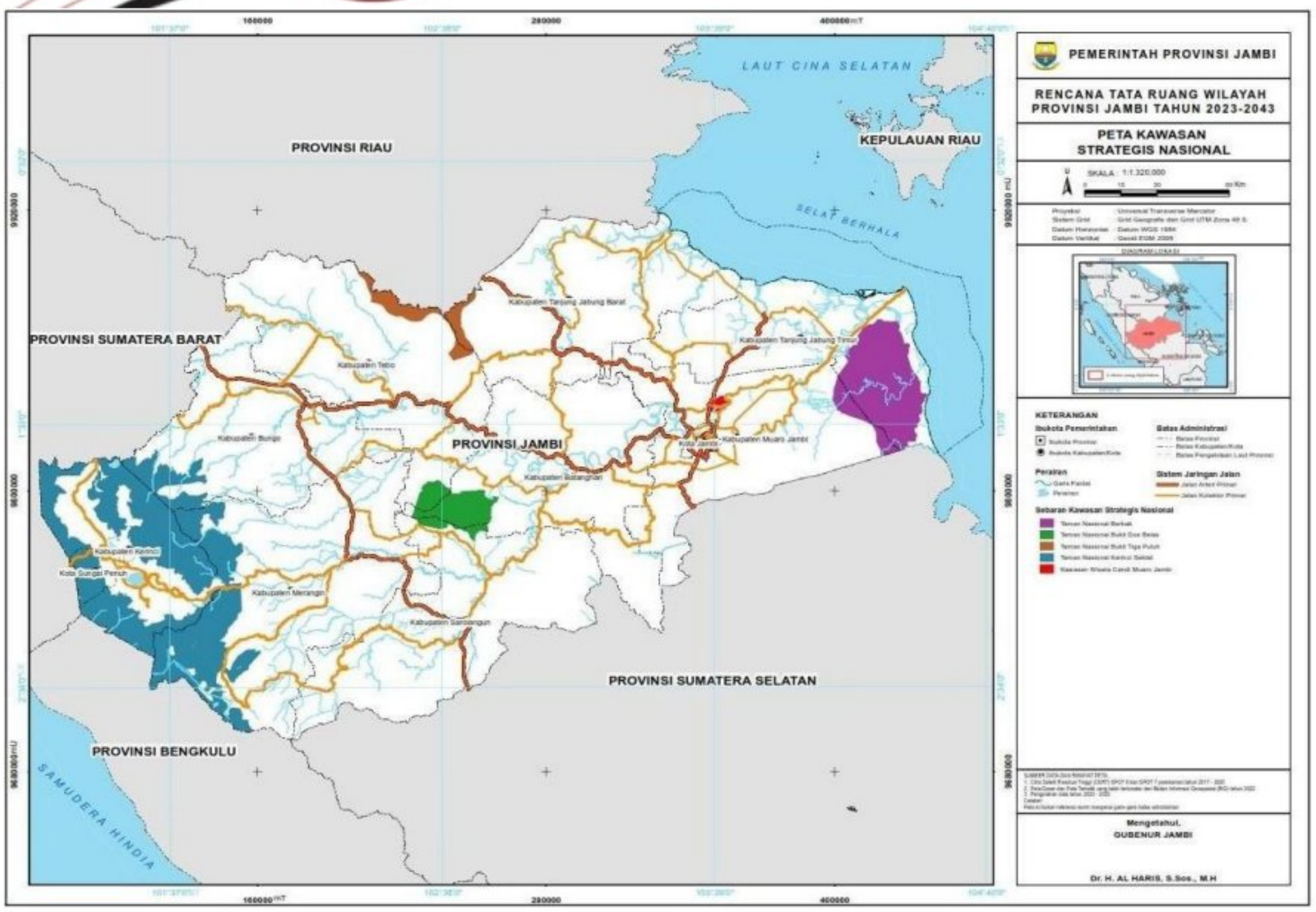

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Gambar 2-12 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Provinsi Jambi meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jambi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dengan pertimbangan tipologi kawasan yang berbentuk kawasan perkotaan, kawasan berkarakter koridor, kawasan perdesaan, dan kawasan cepat tumbuh karena ada trigger ekonomi yang sedang dan akan dikembangkan. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

- Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi;
- Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
- Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;

Dipindai dengan CamScanner

- Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
- Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
- Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
- Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
- Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
- Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

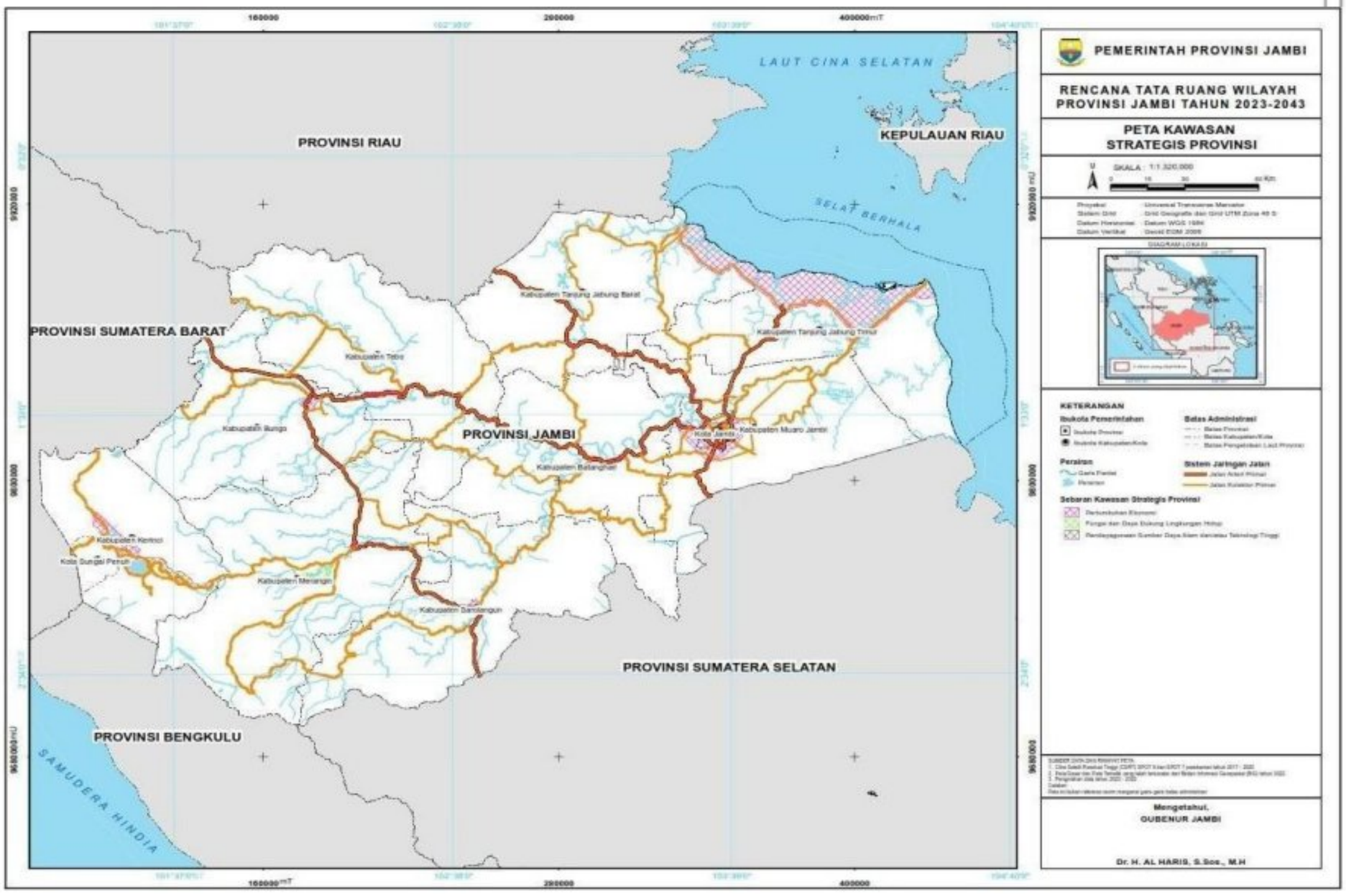

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Gambar 2-13 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi

Arah pengembangannya yaitu penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan strategis provinsi teknologi tinggi di Kabupaten Kerinci. Dengan arah pengembangan pengembangan pemanfaatan sumber energi non fosil dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumber energi berbasis hitech

Dipindai dengan CamScanner

dan berwawasan lingkungan. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berada pada Kawasan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin.

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan unsur strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses terhadap energi, air bersih, serta pangan yang memadai menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah terhadap risiko krisis. Oleh karena itu, penguatan ketiga aspek tersebut perlu dilakukan secara terpadu melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan, dukungan inovasi, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Tingginya rendahnya indeks ini menunjukkan sistem pangan yang tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi, perubahan iklim, dan gangguan distribusi. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan daerah perlu dilakukan melalui peningkatan produksi lokal, efisiensi rantai pasok, pengembangan cadangan pangan strategis, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. cadangan pangan strategis, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika perkembangan yang variatif sepanjang periode 2020 hingga 2023**.** Meskipun data tahun 2019 belum tersedia, pada tahun 2020 indeks tercatat sebesar 70,00. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 74,18, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek akses, ketersediaan, dan kualitas pangan masyarakat. Namun, pada tahun 2022 indeks mengalami penurunan menjadi 69,50. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain gangguan distribusi pangan, kenaikan harga bahan pokok akibat inflasi, serta dampak perubahan iklim terhadap

Dipindai dengan CamScanner

produktivitas pertanian. Meskipun demikian, pada tahun 2023 indeks kembali menunjukkan peningkatan menjadi 72,15, menandakan adanya perbaikan dalam sistem ketahanan pangan daerah. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan, arah pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jambi tetap menunjukkan kecenderungan yang positif dan progresif.

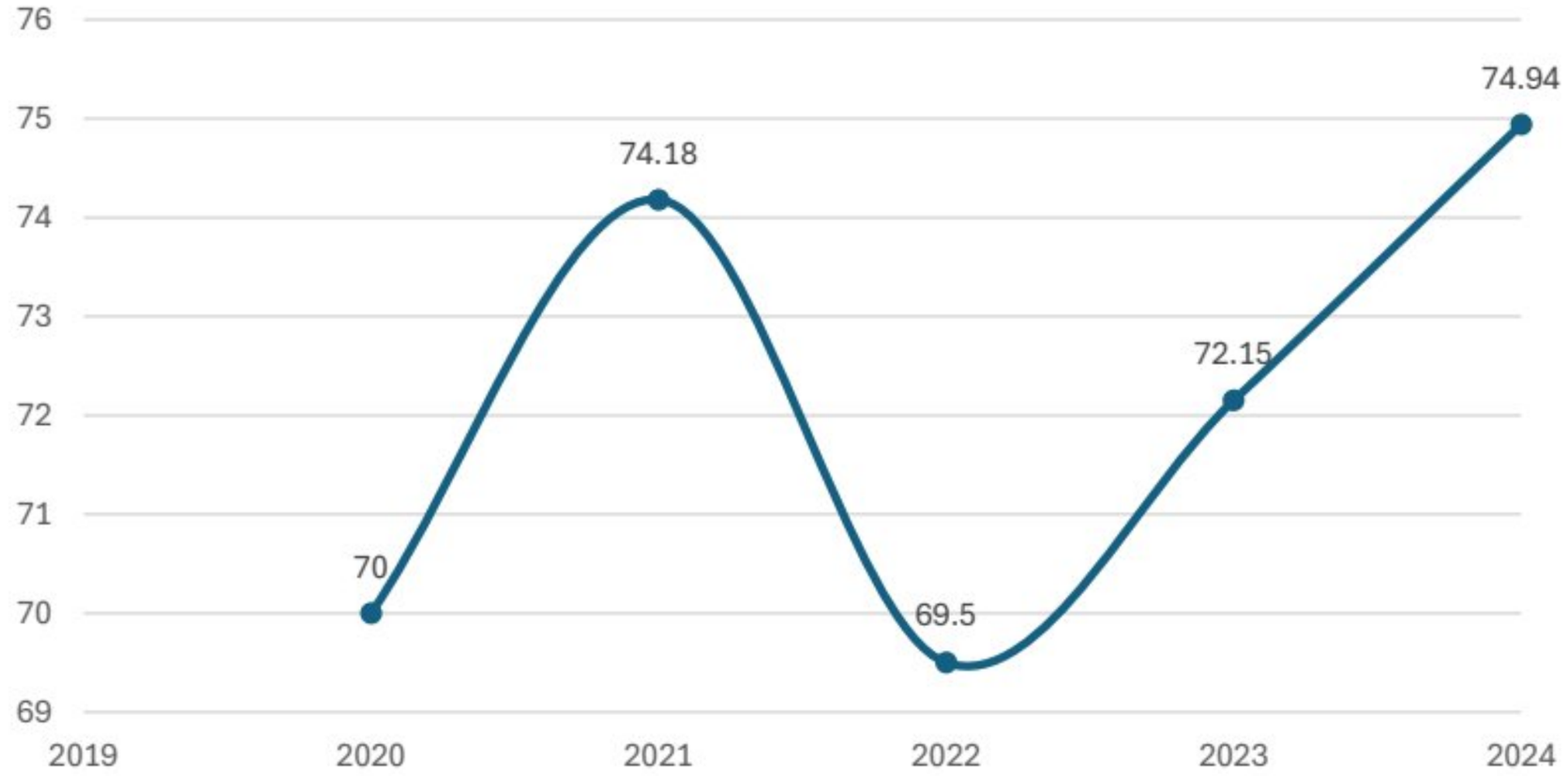

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2-14 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

2.1.4.2 Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menggambarkan persentase penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan harian secara layak, angka ini mencerminkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko rawan pangan dan gizi buruk. Penurunan prevalensi ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di suatu daerah. Oleh karena itu, upaya perbaikan pola konsumsi masyarakat, peningkatan akses pangan bergizi, serta penguatan program perlindungan sosial menjadi langkah penting yang perlu terus diperkuat oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan.

Dipindai dengan CamScanner

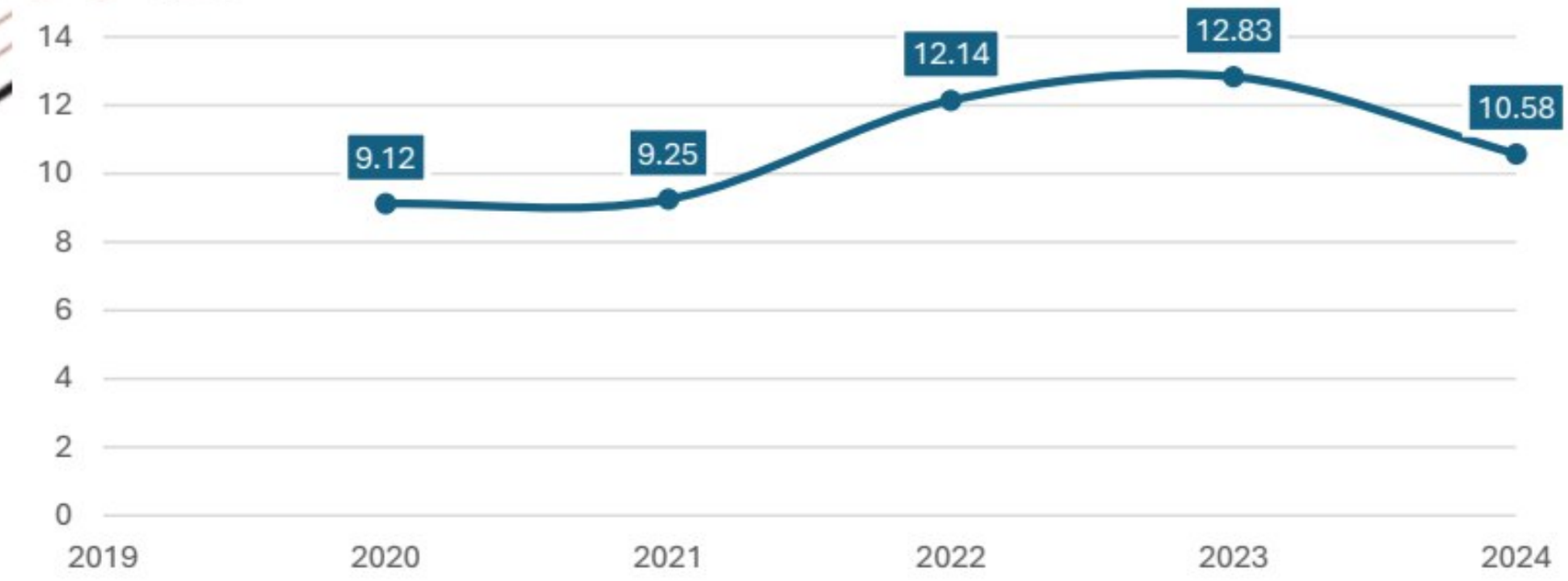

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-15 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, angka PKKP tercatat sebesar 9,12%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,25% pada tahun 2021. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi daya beli masyarakat serta distribusi pangan di sejumlah wilayah. Pada tahun 2022, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 12,14 persen. Kondisi ini mengindikasikan memburuknya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, di mana semakin banyak penduduk yang belum memperoleh asupan energi minimum yang dianjurkan. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan angka PKKP kembali meningkat menjadi 12,83 persen. Lonjakan selama dua tahun berturut-turut ini mencerminkan tekanan serius terhadap sistem ketahanan pangan, khususnya dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan PKKP ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama, antara lain tingginya volatilitas harga pangan pokok, ketimpangan distribusi logistik antarwilayah, serta masih kuatnya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Harga beras, telur, dan minyak goreng yang mengalami kenaikan selama periode tersebut memberikan tekanan

Dipindai dengan CamScanner

langsung pada daya beli rumah tangga miskin dan rentan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur distribusi, khususnya di wilayah perdesaan, turut memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang bersifat lintas sektor dan berbasis wilayah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem cadangan pangan daerah, mengembangkan produksi pangan lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperbaiki rantai pasok dan distribusi pangan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selain itu, penguatan data dan sistem pemantauan ketahanan pangan sangat diperlukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pasar serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan dengan menurunnya angka PKKP menjadi 10,58%. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam sistem distribusi pangan, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta penguatan intervensi pemerintah melalui berbagai program ketahanan pangan.

2.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi menjadi salah satu aspek strategis yang harus diperhatikan oleh setiap daerah. Ketahanan energi tidak hanya diukur dari ketersediaan pasokan energi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat ketahanan energi di suatu wilayah adalah konsumsi listrik per kapita. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat, sekaligus mencerminkan kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan kemajuan infrastruktur energi di suatu daerah.

Dipindai dengan CamScanner

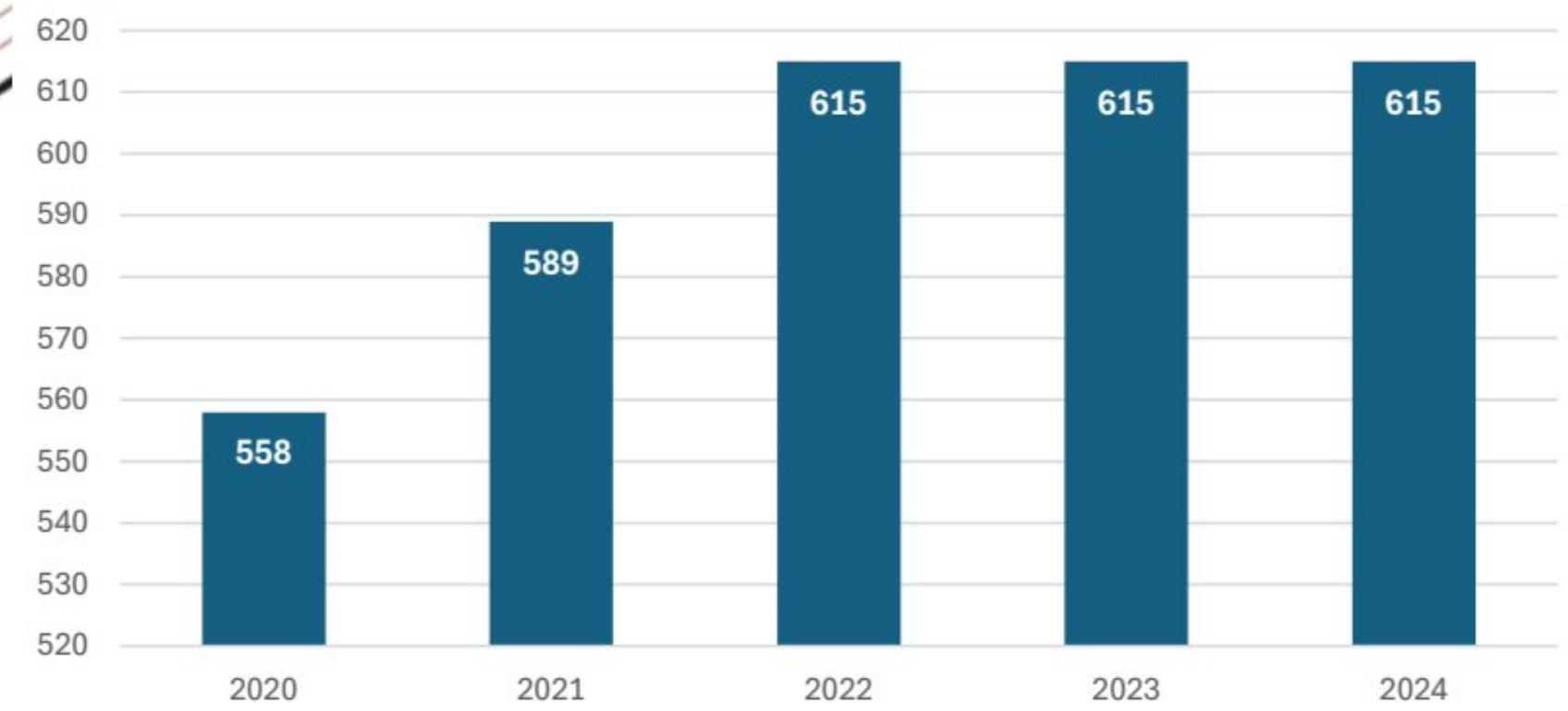

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025.

Gambar 2-16 Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (kWh)

Konsumsi Listrik per kapita Provinsi Jambi tahun 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun pertama, dari 558 kWh di tahun 2020 menjadi 589 kWh di tahun 2021, kemudian naik kembali ke angka 615 kWh di tahun 2022. Capaian konsumsi listrik per kapita tersebut kemudian bertahan stabil sebesar 615 kWh hingga tahun 2024. Peningkatan awal tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, peningkatan aksesibilitas listrik masyarakat, serta pertumbuhan konsumsi listrik di sektor rumah tangga dan usaha kecil. Namun, stagnasi angka konsumsi sejak tahun 2022 menunjukkan bahwa perlu upaya mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif masyarakat yang lebih luas, termasuk di sektor industri kecil, jasa, dan digitalisasi layanan publik. Apabila konsumsi listrik per kapita stagnan sementara jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat, maka dapat terindikasi bahwa terdapat keterbatasan optimalisasi pemanfaatan listrik untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi perlu melakukan upaya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi listrik dengan melakukan perluasan akses listrik di wilayah pedesaan, mendorong penggunaan listrik untuk usaha produktif, digitalisasi layanan publik, serta kampanye efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan untuk menopang kebutuhan listrik berkelanjutan di masa mendatang.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.4.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan mahkluk hidup, khussunya bagi manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

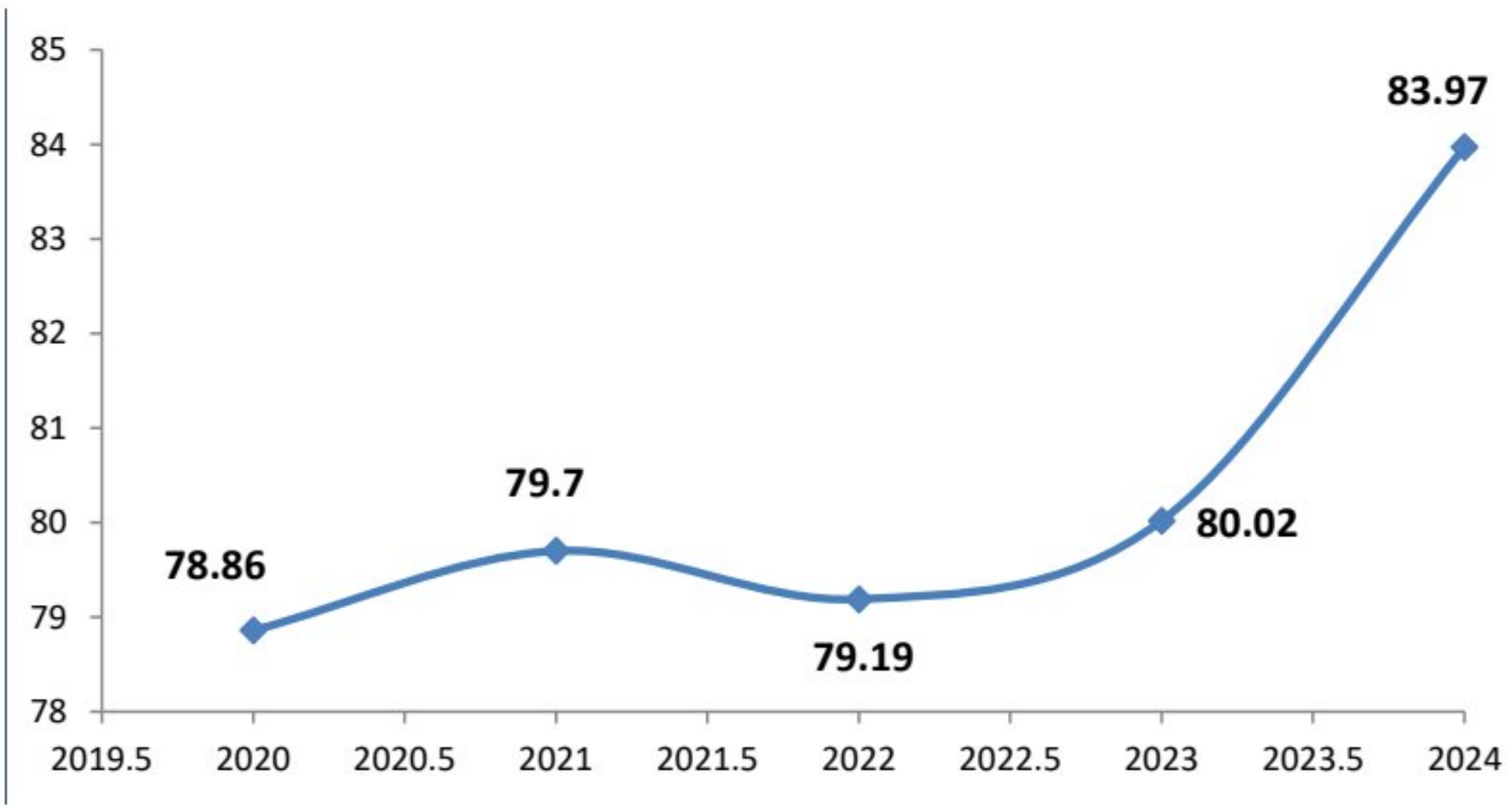

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Gambar 2-17 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2023 proporsi rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, mencapai 80,02 persen. Perkembangan capaian indikator ini dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan, meskipun laju pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam

Dipindai dengan CamScanner

perluasan cakupan layanan air minum layak antara lain mencakup keterbatasan sumber pendanaan, luasnya wilayah cakupan pembangunan, rendahnya kapasitas pelayanan dari operator penyedia air minum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan, yang membatasi kemampuan rumah tangga untuk mengakses layanan air minum yang layak.

Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan capaian indikator ini, antara lain melalui perluasan dan pemasangan jaringan pipa distribusi, khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun demikian, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, posisi Provinsi Jambi masih berada di bawah tingkat nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan di sektor penyediaan air minum di Provinsi Jambi masih memerlukan penguatan agar mampu mengimbangi kebutuhan nasional akan akses air bersih yang aman dan layak.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kualitas lingkungan tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental penduduk, tetapi juga menentukan daya dukung serta daya tampung wilayah dalam menghadapi tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta partisipasi aktif masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi Tahun 2019–2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum sepenuhnya stabil, serta masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, dinamika kebijakan, dan intensitas aktivitas pembangunan. Pada tahun 2019, IKLH tercatat sebesar 68,06 dan mengalami peningkatan tajam menjadi 70,87 pada tahun 2020. Kenaikan ini diduga erat kaitannya

Dipindai dengan CamScanner

dengan menurunnya aktivitas industri dan transportasi selama pandemi COVID-19, yang berdampak positif terhadap kualitas udara dan lingkungan secara umum. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks menjadi 69,04, meskipun kemudian kembali naik menjadi 70,32 pada tahun 2022. Tren positif ini tidak berlanjut pada tahun 2023, di mana IKLH kembali menurun menjadi 68,15. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dan terarah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi, terutama dalam menghadapi tekanan dari kegiatan ekonomi dan pembangunan.

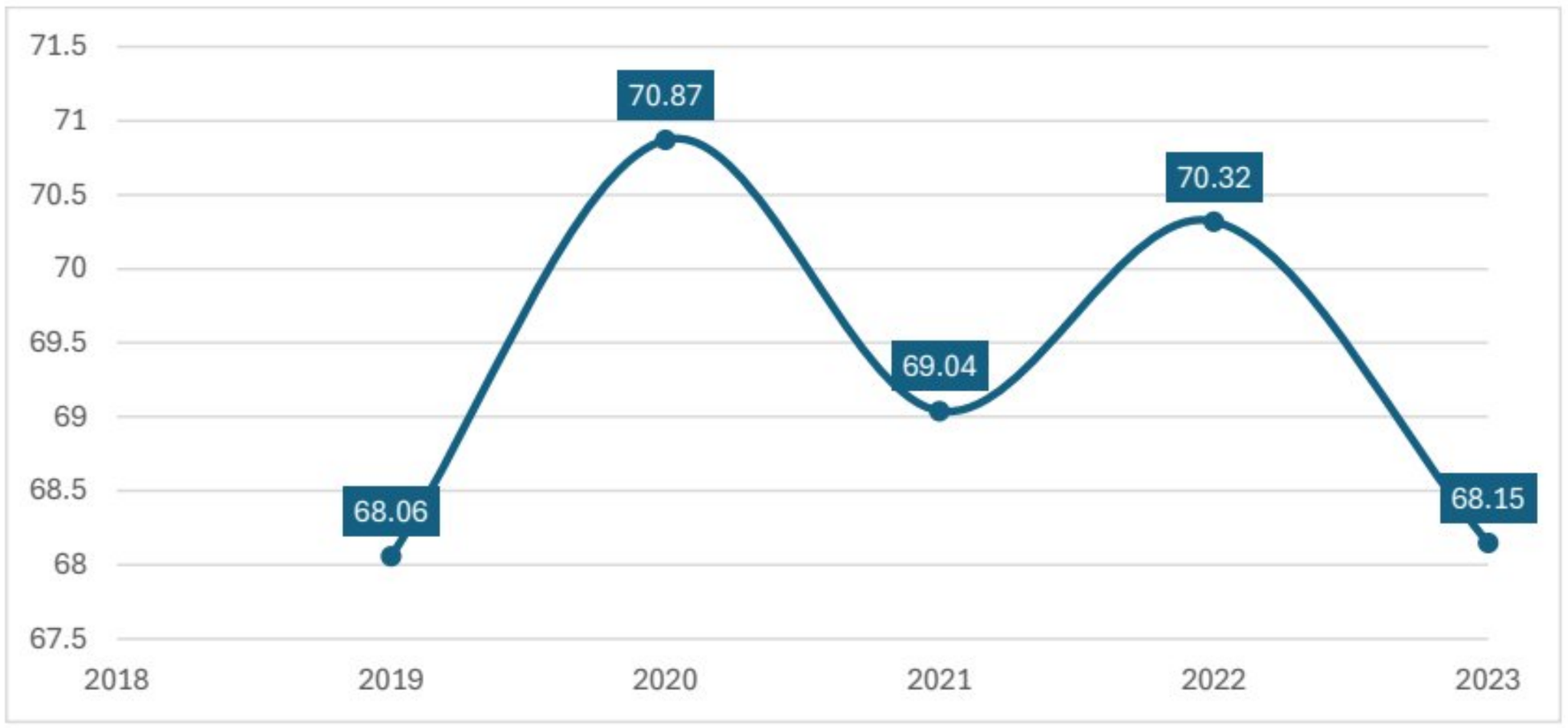

Sumber: KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir).

Gambar 2-18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

2.1.5.1 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi yang aman merupakan elemen penting dalam mewujudkan lingkungan sehat bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak tidak hanya berdampak pada kesehatan individu dan keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah pencemaran lingkungan serta penyebaran penyakit. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dalam memperluas akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

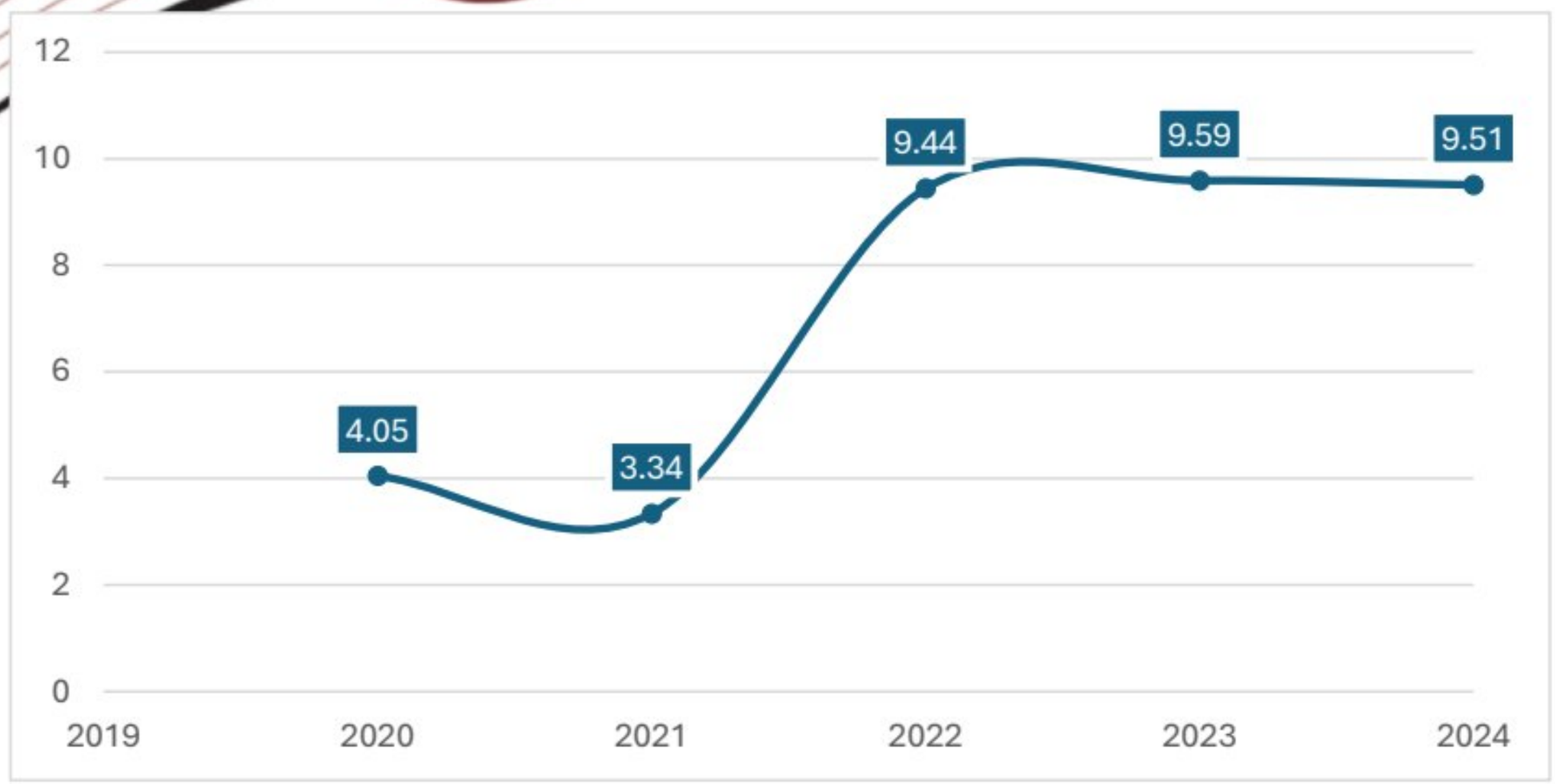

Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2-19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Jambi Tahun 2002-2024

Akses Sanitasi Aman di Provinsi Jambi mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman tercatat sebesar 4,05%. Namun, capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3,34%. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sanitasi, yang dapat disebabkan oleh kendala teknis, keterbatasan anggaran, atau rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Mulai tahun 2022, tren capaian akses sanitasi aman kembali menunjukkan perbaikan dengan peningkatan signifikan menjadi 9,44%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 9,59% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 9,51%, angka ini tetap menunjukkan kemajuan dibandingkan awal periode evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas program sanitasi serta bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak dan aman sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.5.2 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Jambi

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan sampah yang baik mencerminkan efektivitas sistem pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, capaian pengelolaan sampah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana telah berjalan efektif.

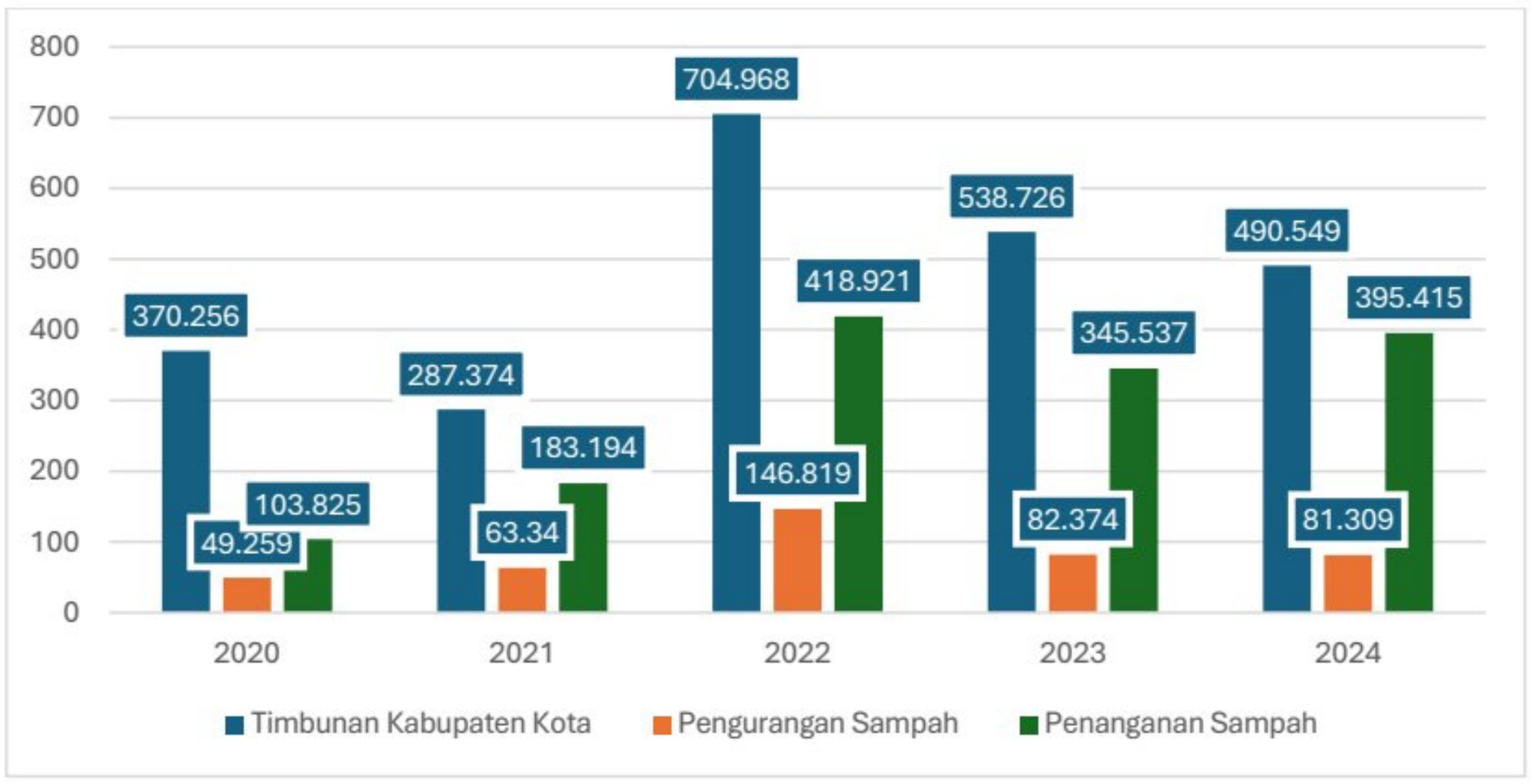

Sumber: SIPSN, Kementrian Lingkungan Hidup, 2025
Gambar 2-20 Timbulan Sampah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020 hingga 2024, jumlah timbunan sampah dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 sebesar 704,97 ribu ton. Upaya pengurangan dan penanganan sampah juga menunjukkan tren yang bervariasi. Pengurangan sampah tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 146,82 ribu ton, sementara penanganan sampah tertinggi tercapai pada tahun 2022 dengan total 418,921 ribu ton. Data ini mencerminkan adanya peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam mengelola sampah, meskipun tantangan dalam menjaga konsistensi pengurangan sampah masih perlu mendapat perhatian lebih.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tingginya risiko bencana alam serta dampak perubahan iklim yang semakin kompleks memerlukan pendekatan adaptif dan mitigatif yang terencana, terukur, dan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta integrasi aspek perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan menjadi langkah strategis yang harus terus dioptimalkan. Pendekatan ini perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta didukung oleh teknologi, inovasi, dan kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika risiko di masa depan.

2.1.6.1 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana:

1. Bencana Geologi

Bencana geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang berasal dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

a. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom volkanik yang membara. Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari enam kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

b. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi

Dipindai dengan CamScanner

letusan) akan tertimpa lapili (kerikil volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari sembilan kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

c. Bencana Banjir

Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir sangat erat kaitannya dengan tutupan lahan, kondisi kelerengan daerah dan ekoregionnya. Semakin baik fungsi tutupan lahannya maka semakin tinggi jasa pengaturan aliran air dan banjir wilayah tersebut. Ekoregion yang mempengaruhi jasa ini adalah pegunungan patahan, sedangkan tutupan lahannya adalah hutan kerapatan tinggi.

Tabel 2-10 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi

No	Nama Kecamatan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Batanghari	12,4	0,1	11.690,8	5,8	393.848,9	15,9	123.730,6	6,3	8.345,4	3,3
2	Bungo	1.503,9	16,4	21.257,2	10,6	169.366,6	6,8	238.321,1	12,1	28.987,7	11,6
3	Kerinci	1.809,0	19,7	25.228,4	12,6	89.142,8	3,6	183.239,5	9,3	45.534,6	18,2
4	Kota Jambi	0,0	0,0	12.286,7	6,1	1.321,0	0,1	2.502,3	0,1	892,2	0,4
5	Kota Sungai Penuh	661,0	7,2	1.531,7	0,8	9.492,1	0,4	24.857,0	1,3	0,0	0,0
6	Merangin	3.563,8	38,8	19.634,1	9,8	338.863,9	13,7	342.024,3	17,3	51.038,9	20,4
7	Muaro Jambi	0,0	0,0	29.524,3	14,7	244.810,0	9,9	263.256,2	13,4	8.763,1	3,5
8	Sarolangun	202,0	2,2	24.760,6	12,3	336.291,2	13,6	151.362,0	7,7	81.938,1	32,8
9	Tanjung Jabung Barat	1.304,1	14,2	17.732,2	8,8	326.571,6	13,2	202.241,3	10,3	6.952,5	2,8
10	Tanjung Jabung Timur	0,0	0,0	8.094,3	4,0	191.824,7	7,8	222.272,2	11,3	9.266,3	3,7
11	Tebo	139,4	1,5	28.942,7	14,4	371.683,6	15,0	218.048,6	11,1	8.192,7	3,3
Provinsi Jambi		9.195,5	100	200.683	100	2.473.216,5	100	1.971.855,1	100	249.911,5	100
Persentase		0,19		4,09		50,42		40,20		5,10	

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025.

Berdasarkan data distribusi luas dan peran jasa ekosistem dalam pengaturan tata aliran air dan banjir di Provinsi Jambi, terlihat bahwa sebagian besar wilayah masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Dari total luas ekosistem pengaturan tata air sebesar 4.923.446,6 hektare, sekitar 40,20% tergolong dalam kategori sedang, 50,42% kategori rendah, dan hanya 5,10% yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kerinci memiliki

Dipindai dengan CamScanner

kontribusi signifikan pada ekosistem dengan peran tinggi hingga sangat tinggi, masing-masing mencapai 20,4%, 32,8%, dan 18,2% dari total luas kawasan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih memiliki fungsi ekosistem tata air yang terbatas, yang berdampak pada tingginya potensi risiko banjir, sedimentasi, dan penurunan kualitas sumber daya air. Dampak dari kondisi ini antara lain meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, penurunan ketersediaan air bersih saat musim kemarau, serta gangguan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, lemahnya fungsi tata air juga berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem DAS Batanghari sebagai tulang punggung hidrologis wilayah. Provinsi Jambi perlu melakukan upaya untuk meminimalisir risiko banjir yang terjadi dengan melakukan peningkatan rehabilitasi kawasan hulu, konservasi sempadan sungai, dan penguatan kawasan lindung berbasis tata ruang. Selain itu, Provinsi Jambi juga perlu mendorong penerapan kebijakan pengelolaan lahan berbasis daya dukung lingkungan, restorasi lahan gambut, serta penguatan sistem informasi spasial dan pemantauan kualitas tata air secara berkala. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting dalam menjaga keberlanjutan jasa ekosistem pengendali tata air di Provinsi Jambi.

d. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-11 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Batanghari	50	113	54	3.282,93	397,25
Bungo	4	0	43	27,08	123,9
Kota Jambi	0	0	0	0	0
Kerinci	134	0	1	51,31	2,46
Merangin	278	1	68	149,13	249,25
Muaro Jambi	17	22	114	15,68	1.907,32
Sarolangun	169	264	399	1.324,78	1.224,68
Kota Sungai Penuh	0	0	0	91,15	8,67

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanjung Jabung Barat	134	20	4	446,03	245,05
Tanjung Jabung Timur	114	16	5	60,09	1.288,91
Tebo	102	104	231	1.091,51	189,19
Total	**1.002,00**	**540**	**919**	**6.539,69**	**5.636,68**

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025.

Berdasarkan data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tahun 2020–2024, terlihat tren yang sangat fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebesar 6.539,69 hektare, jauh di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar pada periode tersebut. Lonjakan luas karhutla di tahun 2023 menunjukkan adanya tekanan serius terhadap ekosistem lingkungan yang dapat berdampak luas, antara lain menurunnya kualitas udara, kerusakan ekosistem gambut, gangguan kesehatan masyarakat, serta ancaman terhadap produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat kerusakan lahan. Selain itu, tingginya angka karhutla juga dapat menghambat capaian target pengurangan emisi gas rumah kaca dan memperbesar risiko bencana ekologis di Provinsi Jambi. Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem pencegahan dini, pengendalian kebakaran, serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan tanpa izin. Provinsi jambi perlu melakukan upaya pencegahan agar potensi kebakaran dapat berkurang dengan melakukan penguatan patroli terpadu karhutla, optimalisasi sistem peringatan dini berbasis spasial, rehabilitasi kawasan gambut dan lahan kritis, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, penting mendorong sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat peduli api, serta pelaku usaha perkebunan dan kehutanan dalam strategi pencegahan dan pengendalian karhutla yang berkelanjutan. Edukasi dan kampanye bahaya karhutla kepada masyarakat juga harus diperluas untuk menekan kejadian serupa di tahun-tahun mendatang.

2.1.6.1.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk menurunkan laju pemanasan global dan dampaknya terhadap

Dipindai dengan CamScanner

sistem kehidupan. Dalam konteks pembangunan daerah, pengurangan emisi GRK menjadi indikator penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendorong efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, serta praktik pembangunan ramah lingkungan perlu diperkuat secara konsisten. Pendekatan multisektor dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi, sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap pengendalian perubahan iklim.

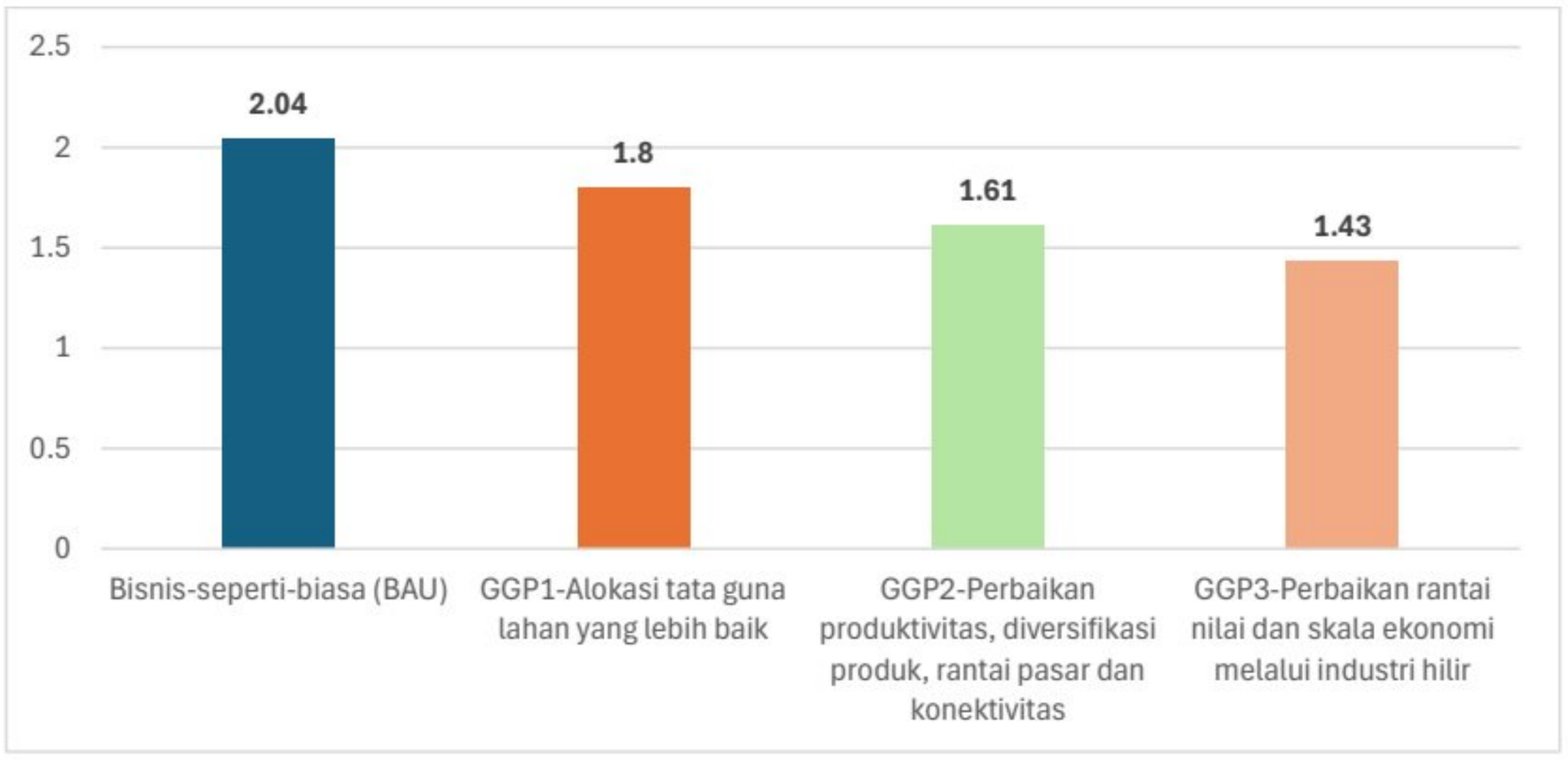

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025.
Gambar 2-21 Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030

Berdasarkan data skenario intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Jambi tahun 2018–2030, terlihat bahwa skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) mencatatkan nilai intensitas emisi tertinggi sebesar 2,04. Sementara itu, penerapan berbagai skenario intervensi pembangunan hijau (*Green Growth Pathway*/GGP) menunjukkan potensi signifikan dalam menurunkan intensitas emisi. Pada skenario GGP1, yaitu perbaikan tata guna lahan, intensitas emisi turun menjadi 1,80; sedangkan melalui GGP2, yang mencakup perbaikan produktivitas, diversifikasi produk, peningkatan konektivitas dan pasar, turun menjadi 1,61. Penurunan terbesar diperoleh pada skenario GGP3 yang fokus pada perbaikan rantai nilai dan skala ekonomi melalui pengembangan industri hilir, yaitu sebesar 1,43.

Dipindai dengan CamScanner

Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi strategis, intensitas emisi Provinsi Jambi akan tetap tinggi dan berpotensi memperburuk kualitas lingkungan serta meningkatkan risiko bencana ekologis dan gangguan kesehatan masyarakat. Dampaknya, peningkatan emisi GRK akan mempercepat perubahan iklim, berdampak pada ketahanan pangan, produktivitas ekonomi, dan ekosistem daerah. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi percepatan perbaikan tata kelola lahan, penguatan produktivitas sektor pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan, peningkatan akses pasar berbasis komoditas berkelanjutan, serta pengembangan industri hilir berbasis rendah karbon. Selain itu, penting pula mendorong kolaborasi multipihak dan kebijakan fiskal hijau untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

2.1.6.1.2 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana alam maupun non-alam. Tingginya risiko bencana dapat menghambat proses pembangunan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik seperti infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak. Oleh karena itu, upaya penurunan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap bencana, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini dan mitigasi.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2022, nilai indeks mengalami penurunan dari 138,64 menjadi 133,49. Namun pada tahun 2023 hingga 2024 nilai IRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai sebesar 138,02. Nilai IRB Provinsi Jambi yang kembali meningkat dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan kerentanan atau berkurangnya kapasitas wilayah dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini dapat

Dipindai dengan CamScanner

berdampak pada meningkatnya potensi kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan apabila terjadi bencana, serta dapat menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa hal antisipasi seperti penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko berbasis data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah.

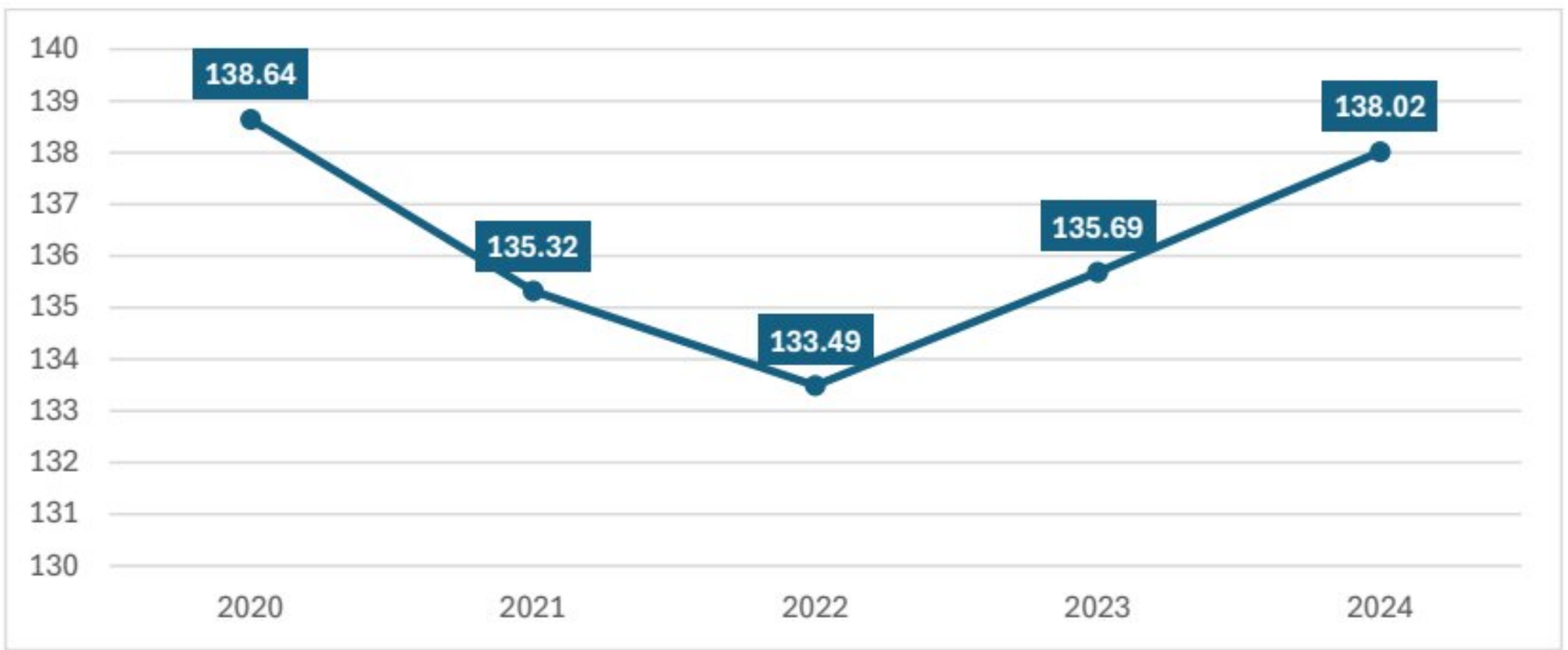

Sumber: Inarisk, 2025

Gambar 2-22 Indeks Resiko Bencana Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

2.1.7 Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak 3.724.300 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 76 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.738 jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 276 jiwa/km2, kepadatan terendah berada di Kabupaten Merangin sebesar 50 jiwa/km2.

Tabel 2-12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kerinci	250.300	251.900	250.300	251.120	256.700
2	Merangin	354.100	355.700	354.100	366.390	373.400

Dipindai dengan CamScanner

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
3	Sarolangun	290.100	293.600	290.000	302.240	306.500
4	Batang Hari	301.700	306.700	301.700	312.730	316.600
5	Muaro Jambi	402.000	406.800	402.000	418.800	424.600
6	Tanjung Jabung Timur	229.800	231.800	229.800	236.730	239.000
7	Tanjung Jabung Barat	317.500	320.600	317.500	330.470	335.100
8	Tebo	337.700	340.900	337.700	350.760	355.300
9	Bungo	362.400	367.200	362.400	376.380	381.300
10	Kota Jambi	606.200	612.200	606.200	627.770	635100
11	Kota Sungai Penuh	96.600	97.800	96.600	99.770	100.800
Provinsi Jambi		3.548.200	3.585.100	3.631.136	3.679.170	3.724.300

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,37 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 47,63 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo). Bila dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio 103,42.

Tabel 2-13 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk(jiwa/km^2)
1	Kerinci	75
2	Merangin	50
3	Sarolangun	52
4	Batang Hari	59
5	Muaro Jambi	81
6	Tanjab Timur	53
7	Tanjab Barat	60
8	Tebo	58
9	Bungo	80
10	Kota Jambi	3.738

Dipindai dengan CamScanner

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk(jiwa/km^2)
11	Sungai Penuh	276
Jumlah		**76**

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menjadi cerminan penting bagi dinamika sosial dan ekonomi suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Provinsi Jambi, tren pertumbuhan penduduk selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang patut diperhatikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebesar 1,30 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sarolangun sebesar 1,48 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,68 persen.

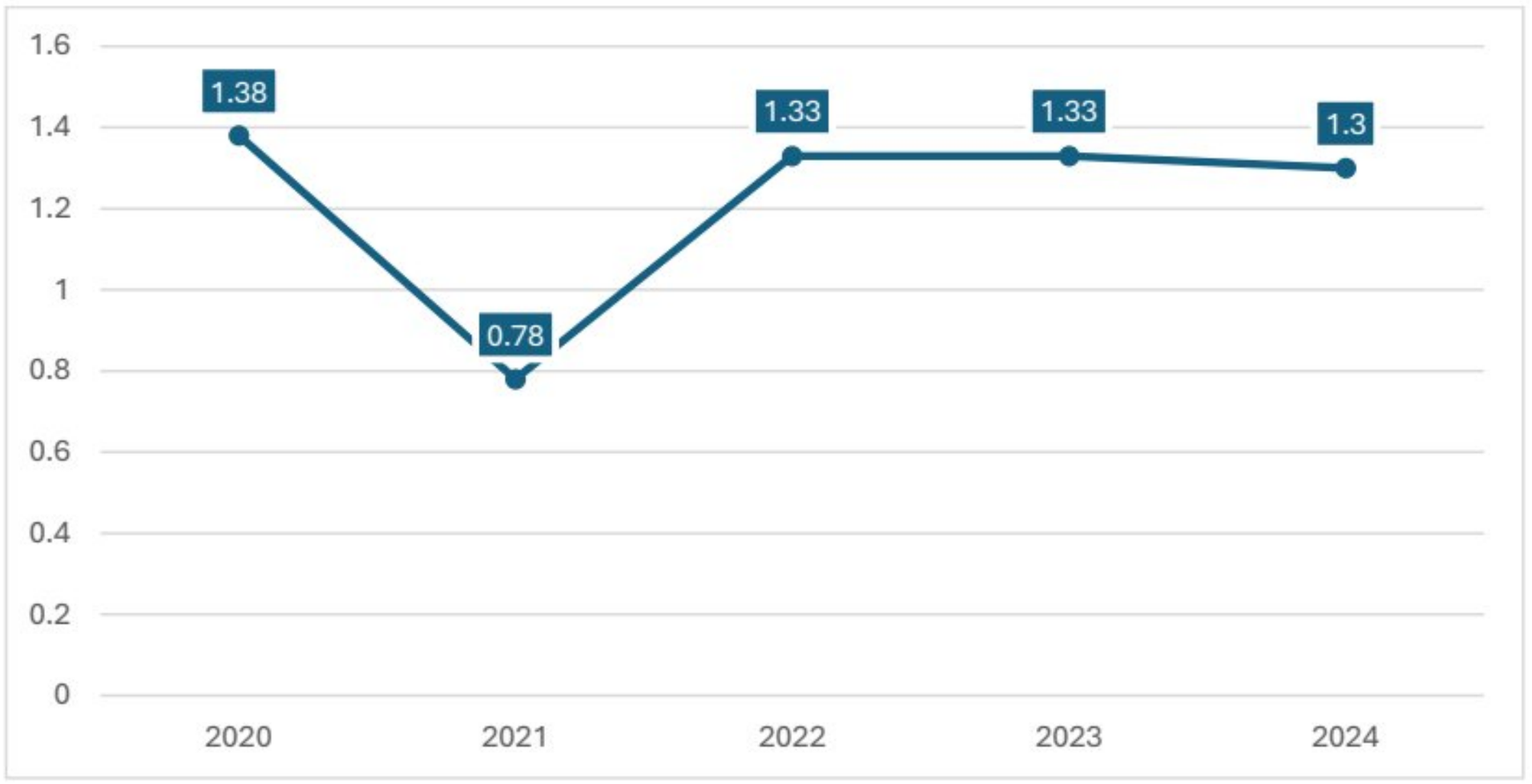

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Gambar 2-23 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Kondisi demografi Provinsi Jambi Kondisi demografi Provinsi Jambi dapat dianalisis lebih lanjut melalui piramida penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2024. Piramida ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Provinsi Jambi masih didominasi oleh kelompok usia muda, terutama pada rentang usia 0–19 tahun. Kelompok usia 0–4 tahun mencatat jumlah tertinggi, dengan 158,4

Dipindai dengan CamScanner

ribu jiwa perempuan dan 163,82 ribu jiwa laki-laki, menandakan angka kelahiran yang masih relatif tinggi.

Kelompok usia sekolah dasar hingga menengah (5–19 tahun) juga cukup besar, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap penyediaan layanan pendidikan yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, kelompok usia produktif (20–59 tahun) mendominasi struktur penduduk, mencerminkan potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Namun, pada kelompok usia 15–24 tahun, terlihat adanya penurunan jumlah penduduk dibandingkan kelompok usia sebelumnya, terutama pada usia 15–19 tahun dan 20–24 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan migrasi keluar daerah untuk keperluan pendidikan atau pekerjaan, yang sejalan dengan fenomena sebelumnya di mana usia tersebut cenderung meninggalkan daerah asal. Sementara itu, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) menunjukkan jumlah yang lebih kecil, tetapi tetap perlu diperhatikan terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jambi berada pada fase bonus demografi, yang jika dimanfaatkan secara optimal, dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025

Gambar 2-24 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024

Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2024, di mana dalam kurun waktu sembilan tahun, telah

Dipindai dengan CamScanner

terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok penduduk usia sekolah yang hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan usia lanjut yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat. Peningkatan jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan, namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia.

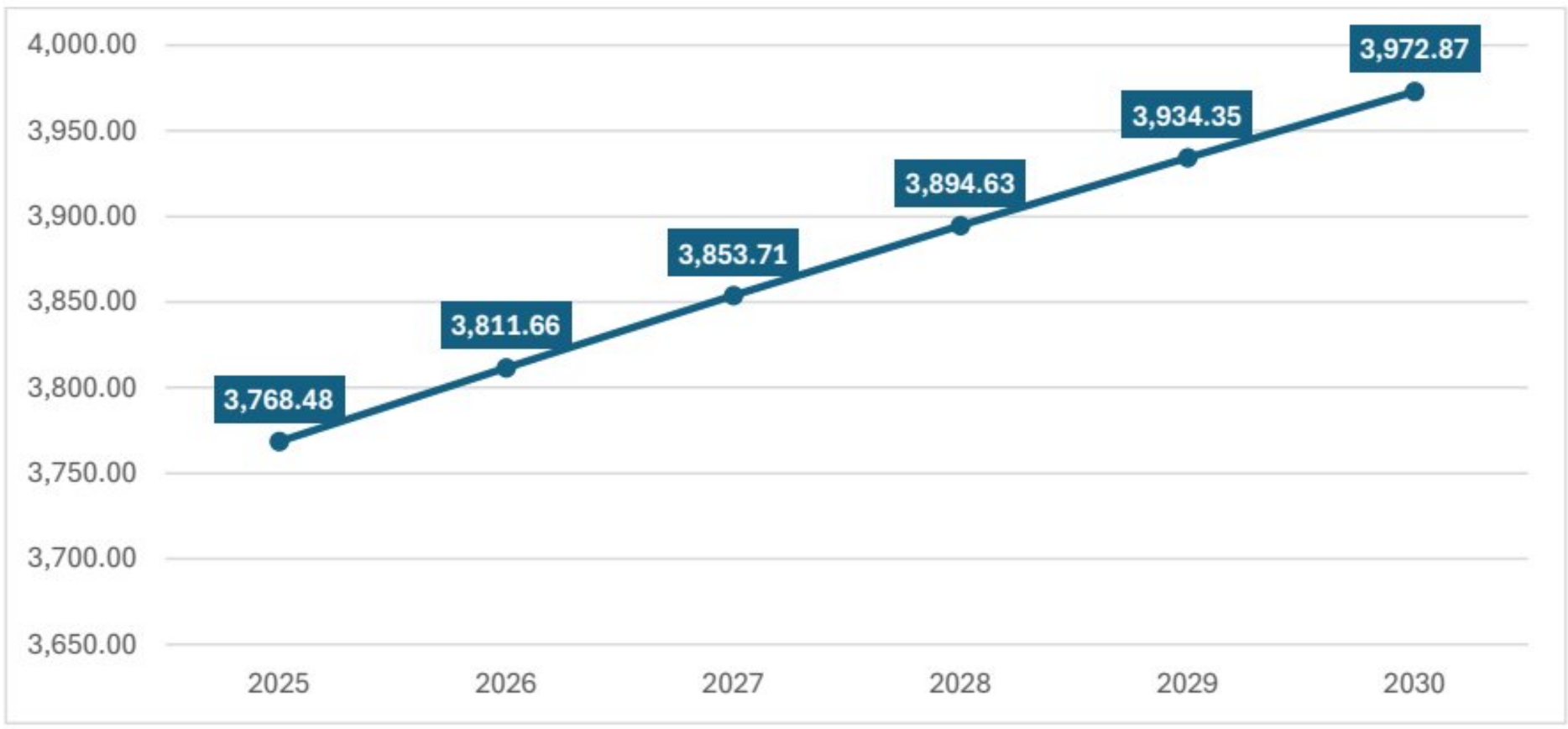

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025.

Gambar 2-25 Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 (Ribu Jiwa)

Proyeksi penduduk Provinsi Jambi menunjukkan adanya tren peningkatan nilai secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Jambi akan mencapai sebesar 3.768,48 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 3.972,87 ribu jiwa di tahun 2030. Secara keseluruhan, selama periode lima tahun ke depan, jumlah penduduk Provinsi Jambi diperkirakan bertambah sekitar 204,39 ribu jiwa atau meningkat sebesar 5,42 persen dari jumlah penduduk tahun 2025. Adanya kecenderungan peningkatan penduduk Provinsi Jambi perlu menjadi faktor strategis yang harus diperhatikan karena akan ada penambahan kebutuhan fasilitas

Dipindai dengan CamScanner

pelayanan dasar serta infrastruktur yang lebih memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyusun langkah antisipatif dan perencanaan yang terarah guna menghadapi dinamika demografi tersebut, sekaligus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan dimensi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak dasar setiap individu, termasuk kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, keseteraan gender, dan masyarakat inklusif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan masyarakat perlu diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial, mempersempit kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan intersektoral berbasis data dan responsif terhadap dinamika sosial menjadi landasan penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan pilar fundamental dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan. Pencapaian kesejahteraan ekonomi ditandai oleh peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, penguatan struktur ekonomi lokal, pengembangan sektor produktif unggulan, serta pemberdayaan pelaku ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi langkah strategis dalam memperluas peluang ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pemanfaatan potensi ekonomi digital juga perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi

Dipindai dengan CamScanner

yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud di seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi, di mana keduanya saling bersinergi dan saling bergantung dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan dari 4,66 persen (*yoy*) di tahun 2023 menjadi 4,51 persen, serta lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian akibat dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batu bara. Di sisi lain, angkutan komoditas batu bara via darat masih belum optimal pasca dibuka kembali pada Mei 2024. Selanjutnya, menurunnya produksi CPO akibat adanya penutupan dua pabrik pengolahan kelapa sawit serta menurunnya produksi TBS kelapa sawit juga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.

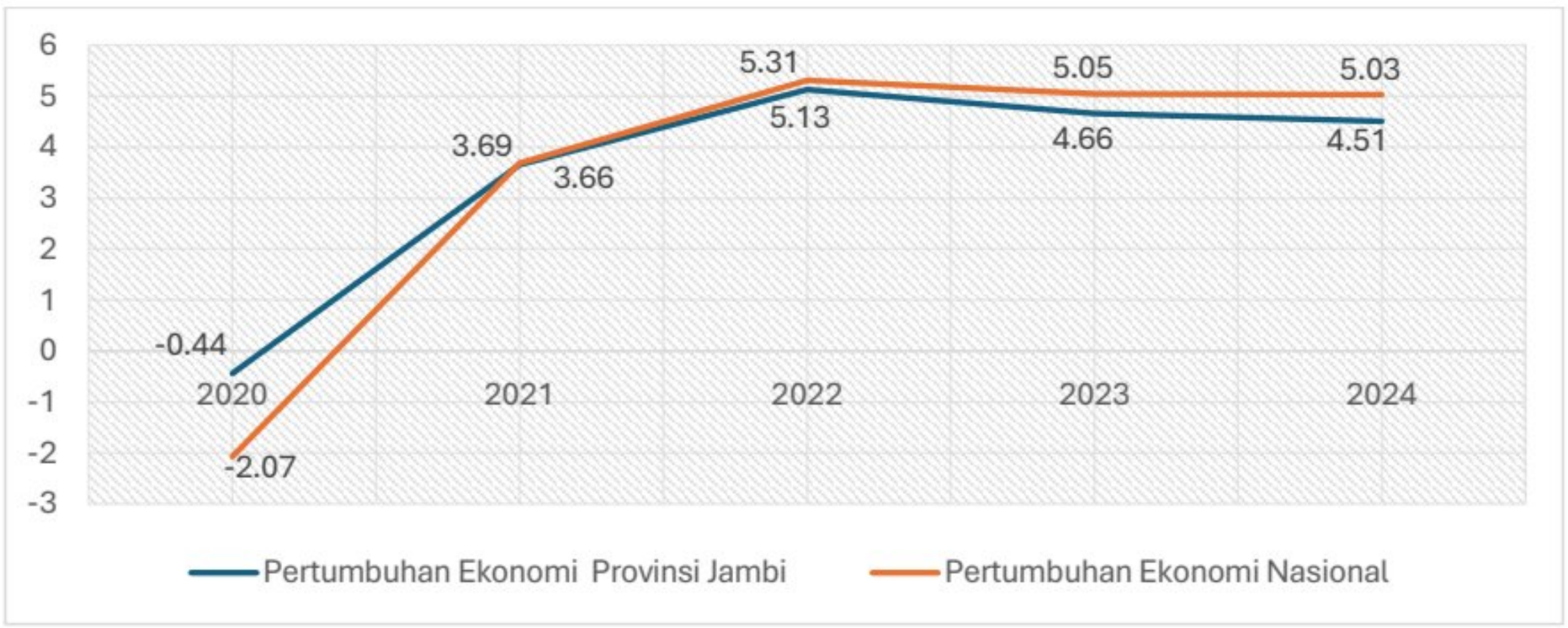

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-26 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sempat mengalami kontraksi sebesar 0,44 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia. Perkembangan

Dipindai dengan CamScanner

ekonomi Provinsi Jambi hingga tahun 2023 masih berada dalam fase pemulihan seiring dengan upaya penyesuaian terhadap tekanan eksternal dan perbaikan aktivitas ekonomi domestik. Kontraksi dialami oleh sebagian besar sektor, terutama yang dialami oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara sektor Informasi dan Komunikasi megalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi *Covid-19* yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang kemudian dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring (dalam jaringan) membuat aktivitas Informasi dan Komunikasi jadi meningkat. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.

Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, terutama sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 15,55 persen. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*. Selanjutnya, diikuti oleh sektor Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 7,94 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reaparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,96 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,96 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.

Dipindai dengan CamScanner

	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Perusahaan	Lainnya
2021	3.67	2.12	1.38	7.94	5.96	5.56	4.97	2.2	1.22	15.55	4.03	0.53
2022	5.00	7.76	3.09	-0.88	5.40	16.96	11.09	-0.65	2.02	-2.31	15.13	4.71
2023	5.61	0.07	4.19	7.98	8.84	8.29	8.76	2.97	2.54	4.66	16.84	5.31
2024	4.25	-0.87	4.73	9.83	5.90	8.19	9.64	11.31	8.46	13.26	9.53	4.6

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-27 Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat menjadi 4,66 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 5,05 persen. Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB yang hanya tumbuh sebesar 0,07 persen, jauh menurun dibandingkan tahun 2022. Meski demikian, penurunan ini bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi. Di sisi lain, terdapat kontribusi positif dari sektor lain yang mampu menahan tekanan perlambatan lebih lanjut.

Sektor Konstruksi, misalnya, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,83 persen. Kinerja sektor ini terdorong oleh pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatra (JTTS) Bayung Lencir–Tempino, proyek *multi-years Islamic Center*, Stadion Swarnabhumi, serta pembangunan fasilitas umum seperti PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center, dan drainase utama di Kota Jambi. Peningkatan aktivitas konstruksi tersebut memberikan dampak

Dipindai dengan CamScanner

multiplier yang cukup besar terhadap sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan bahan bangunan dan jasa transportasi.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,51 persen (*yoy*). Penurunan ini tetap dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sebagai akibat dari penurunan harga batu bara acuan di pasar global pada yang telah terjadi sejak pertengahan 2023. Namun demikian, sektor-sektor lain mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, di antaranya sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 13,26 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat sebesar 11,31 persen, didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah peran belanja pemerintah, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Meskipun belanja pemerintah menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan, efektivitas dan keberlanjutan belanja tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Khususnya, perlu ditinjau apakah alokasi dan realisasi anggaran sudah cukup optimal untuk mendorong sektor-sektor produktif secara merata, serta memastikan kesinambungan proyek agar dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

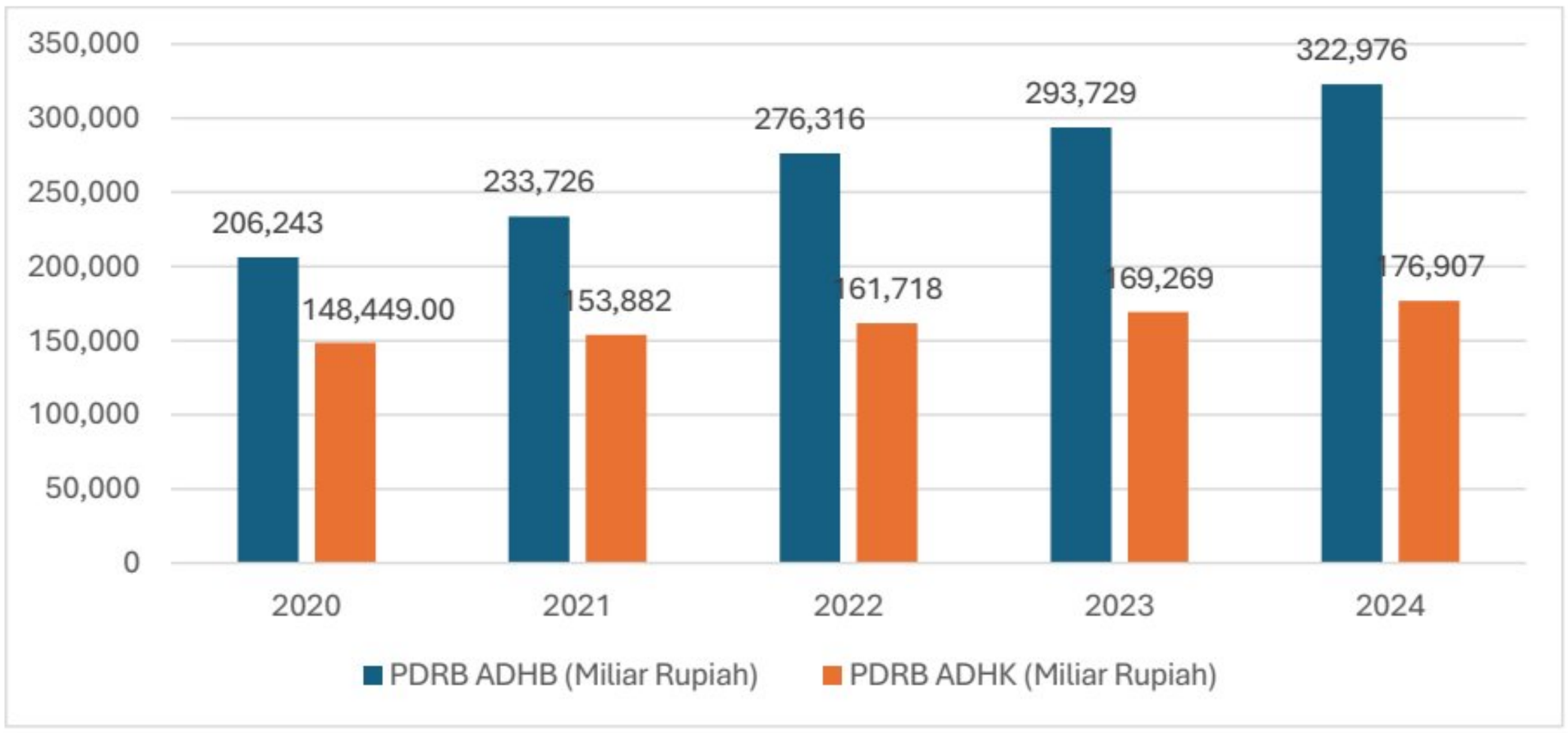

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-28 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 (Dalam Milyar Rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir (2020-2024), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 33,93 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,25 persen. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua, meskipun di tahun 2024 kontribusinya menurun dibanding tahun sebelumnya, dari 15,31 persen menjadi 13,41 persen di tahun 2024. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 13,29 persen.

2.2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hak dasar lainnya. Tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, kemiskinan juga mencerminkan ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlakuan yang adil dan bermartabat. Dalam upaya pembangunan, penanganan kemiskinan secara menyeluruh menjadi langkah strategis yang dapat mendorong terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi terutama pada tahun 2021 akibat pandemi *Covid-19* yang menyebabkan banyak aktivitas perekonomian mengalami stagnasi dan berdampak pada meningkatnya persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi penurunan persentase penduduk miskin seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, dan di tahun 2023 hingga 2024 terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan dari 7,58 persen di tahun 2020 menjadi 7,26 persen di tahun 2024, walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan dari

Dipindai dengan CamScanner

Rp485.920 per kapita perbulan pada 2020 menjadi Rp658.100 perkapita perbulan pada 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 288,10 ribu orang, mengalami penurunan menjadi 272,70 ribu orang pada tahun 2024.

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-29 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Permasalahan kemiskinan tidak hanya mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga mencakup dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbecke* (*FGT*). P1 mengukur rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; semakin mendekati angka nol, semakin kecil kesenjangan pengeluaran tersebut.

Selama periode Maret 2020 hingga 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada Mar 2020, P1 tercatat sebesar 1,10 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19,

Dipindai dengan CamScanner

terutama akibat terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sejak tahun 2023 ke 2024, nilai P1 menurun, yang mengindikasikan adanya perbaikan pada daya beli penduduk miskin. Fenomena grafik yang tampak berlawanan pada tahun 2021 dapat dijelaskan melalui dinamika demografis, khususnya peningkatan angka mortalitas dan migrasi. Pandemi *Covid-19* pada tahun tersebut menyebabkan lonjakan kematian, terutama di kelompok usia rentan, yang turut memengaruhi jumlah penduduk miskin secara statistik. Selain itu, terjadi mobilitas penduduk yang cukup besar, baik perpindahan antardaerah karena tekanan ekonomi maupun kembalinya penduduk ke daerah asal. Migrasi ini berpotensi mengubah distribusi geografis dan karakteristik penduduk miskin karena meskipun jumlah penduduk miskin dapat menurun secara absolut akibat faktor mortalitas dan migrasi, kondisi ekonomi dari kelompok miskin yang tersisa justru memburuk, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai persentase penduduk miskin dan P1 pada tahun 2021.

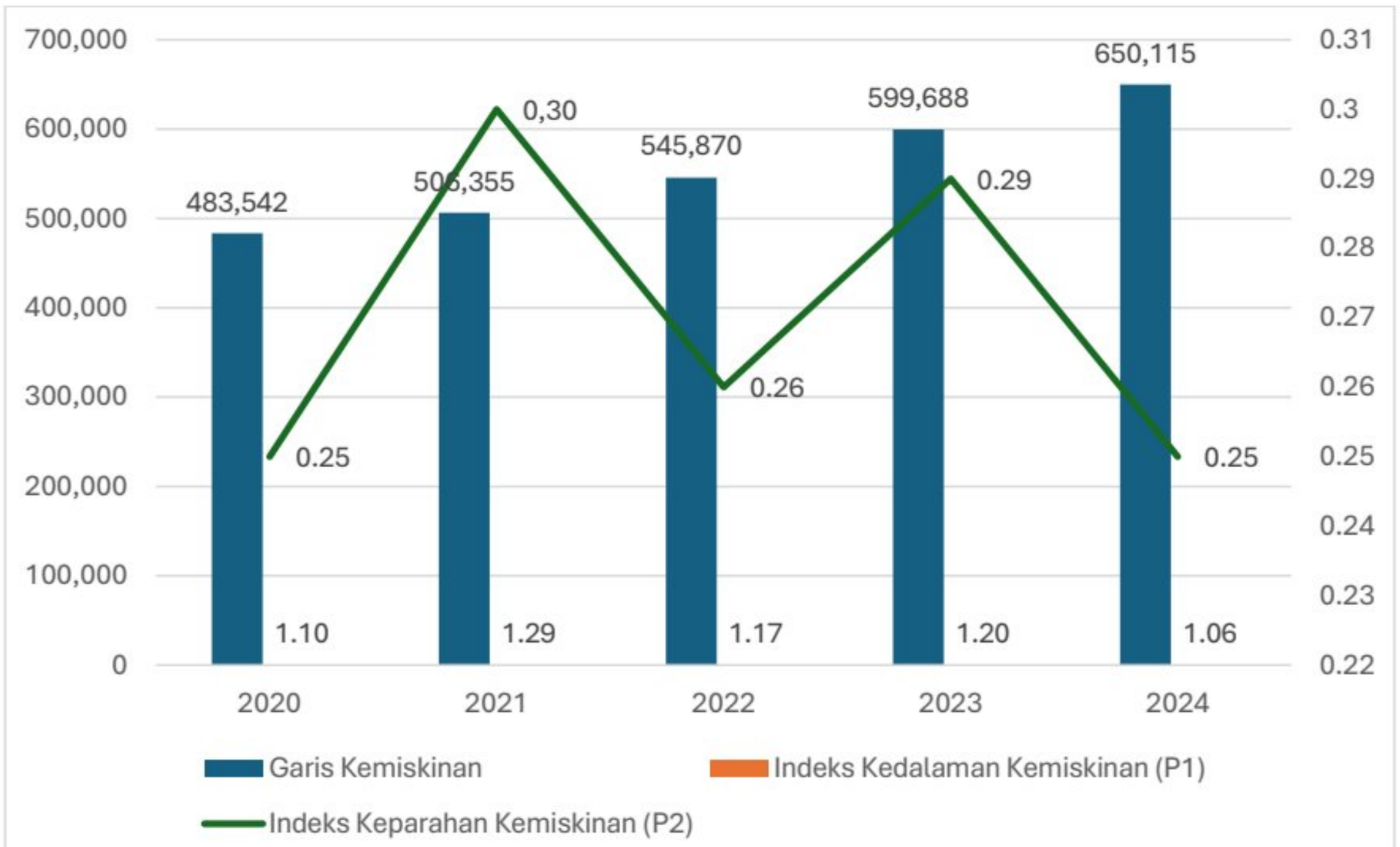

Sumber: BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2025

Gambar 2-30 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau

Dipindai dengan CamScanner

Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), juga mengalami fluktuasi, namun di tahun 2024 menjadi 0,25. Capaian ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.

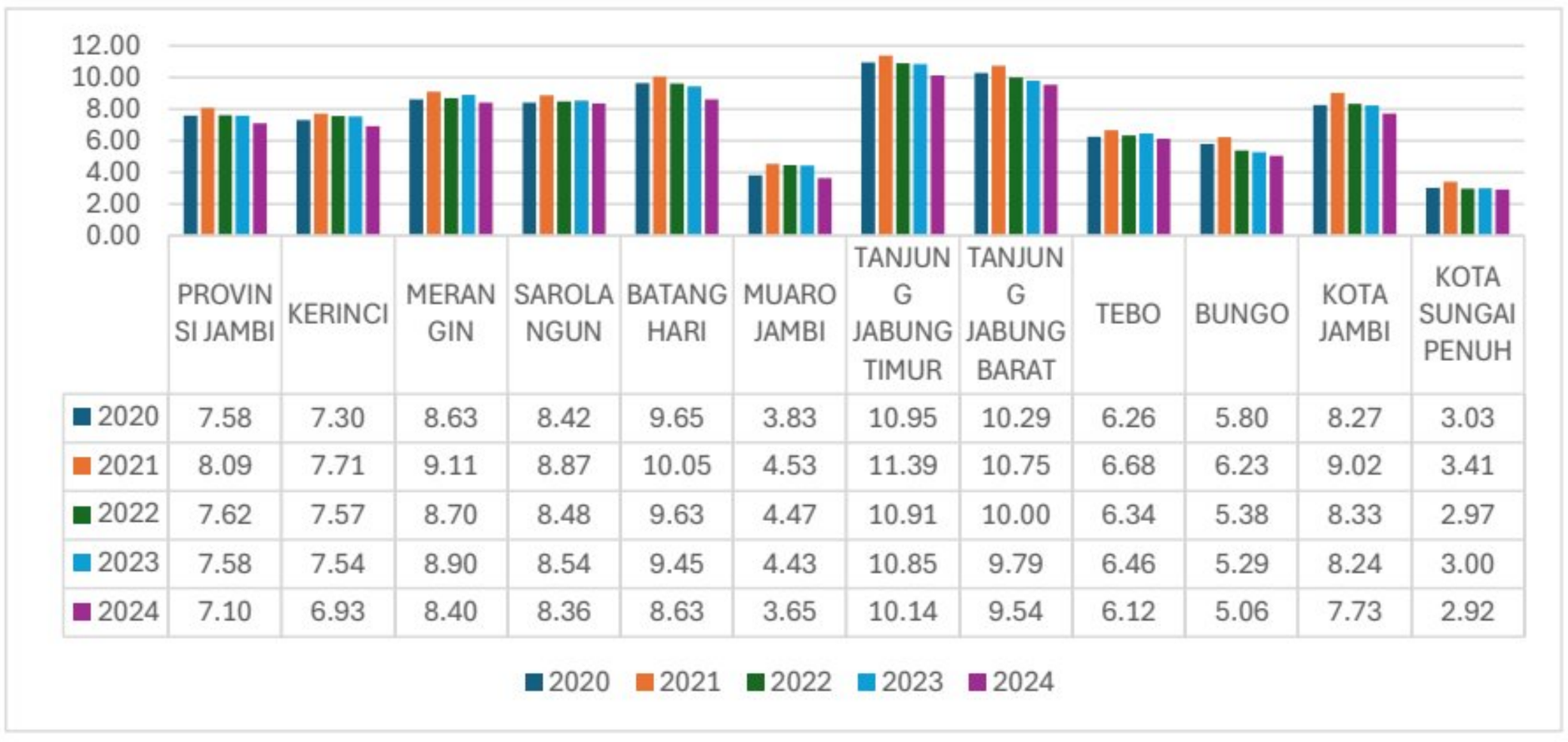

	PROVINSI JAMBI	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBO	BUNGO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH
2020	7.58	7.30	8.63	8.42	9.65	3.83	10.95	10.29	6.26	5.80	8.27	3.03
2021	8.09	7.71	9.11	8.87	10.05	4.53	11.39	10.75	6.68	6.23	9.02	3.41
2022	7.62	7.57	8.70	8.48	9.63	4.47	10.91	10.00	6.34	5.38	8.33	2.97
2023	7.58	7.54	8.90	8.54	9.45	4.43	10.85	9.79	6.46	5.29	8.24	3.00
2024	7.10	6.93	8.40	8.36	8.63	3.65	10.14	9.54	6.12	5.06	7.73	2.92

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-31 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (P0) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-31 atas menunjukkan distribusi persentase penduduk miskin (P0) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024. Data ini merefleksikan tingkat ketimpangan kesejahteraan antarwilayah yang masih cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Secara umum, Kota Sungai Penuh mencatat

Dipindai dengan CamScanner

persentase penduduk miskin terendah di provinsi, yang mengindikasikan relatif lebih baiknya akses terhadap layanan dasar, lapangan kerja formal, dan jaminan sosial. Sebaliknya, beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini memperkuat temuan bahwa wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Kesenjangan ini menuntut intervensi kebijakan yang bersifat terarah dan berbasis wilayah (*place-based policy*). Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang bersifat kontekstual, pelatihan berbasis potensi lokal, serta perluasan akses terhadap perlindungan sosial yang responsif menjadi langkah penting untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, penguatan sistem pendataan kemiskinan berbasis desa dan pengawasan pelaksanaan program perlindungan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Sementara dalam jangka menengah-panjang, upaya penurunan kemiskinan harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi lokal dan transformasi struktural di sektor pertanian, UMKM, dan industri kecil-menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah dengan kemiskinan tinggi.

Dipindai dengan CamScanner

	PROVINSI JAMBI	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBO	BUNGO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH
2020	277.80	17.48	33.92	25.79	26.54	17.30	24.23	34.78	22.47	22.07	50.44	2.78
2021	293.86	18.45	35.44	27.06	27.24	20.49	24.42	36.10	23.77	23.64	54.23	3.03
2022	279.37	18.20	34.14	26.23	26.24	20.64	23.42	33.95	22.81	20.69	50.40	2.64
2023	280.68	18.21	35.19	26.77	25.88	20.83	23.33	33.61	23.47	20.65	50.09	2.66
2024	265.42	16.83	33.49	26.54	23.74	17.48	21.86	33.12	22.48	20.04	47.25	2.60

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-32 Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas menyajikan data jumlah penduduk miskin dalam satuan ribu jiwa berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Informasi ini penting untuk melengkapi analisis kemiskinan, tidak hanya dari sisi persentase (proporsi terhadap total penduduk) tetapi juga dari sisi kuantitas absolut penduduk miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dari gambar terlihat bahwa Kota Jambi dan Kabupaten Merangin mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jambi, meskipun secara persentase P0 bukan yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk besar cenderung menyumbang angka absolut kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan tidak bisa semata didasarkan pada persentase kemiskinan (P0), tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah absolut penduduk miskin sebagai dasar prioritas intervensi. Daerah dengan jumlah penduduk miskin tinggi harus mendapat alokasi anggaran yang proporsional dalam program pengentasan kemiskinan, termasuk untuk program perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang sasaran program secara lebih detail, termasuk melalui pemutakhiran data berbasis rumah tangga miskin, agar intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap

Dipindai dengan CamScanner

penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Upaya peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga miskin di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas utama, disertai dengan penguatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Nilai ini mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi yang dihasilkan per individu, sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan daya beli, kualitas hidup, serta efektivitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Peningkatan PDRB per kapita yang berkelanjutan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, strategi peningkatan PDRB per kapita perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi produktif, peningkatan nilai tambah lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan tetap memperhatikan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

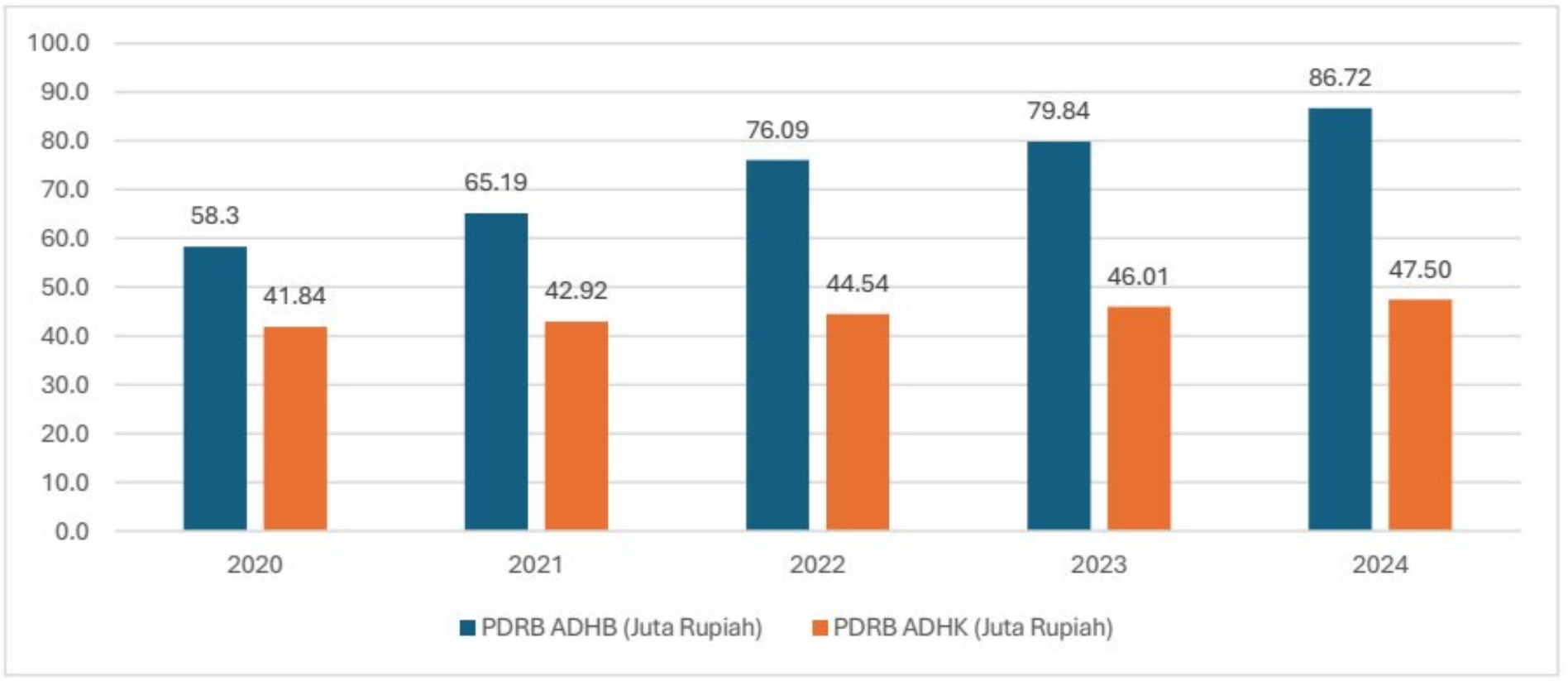

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-33 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 -2024 (Dalam Juta Rupiah)

PDRB perkapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikkan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,17 persen per tahun. Sedangkan PDRB

Dipindai dengan CamScanner

perkapita ADHB juga mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun sebesar 9,93 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah–menengah (*lower–middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 4,06 persen. Kemudian pada tahun 2020, TPT meningkat tajam menjadi 5,13 persen. Peningkatan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi *Covid-19* yang melanda sejak awal tahun tersebut. Pembatasan aktivitas masyarakat dan melambatnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh besar terhadap dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.

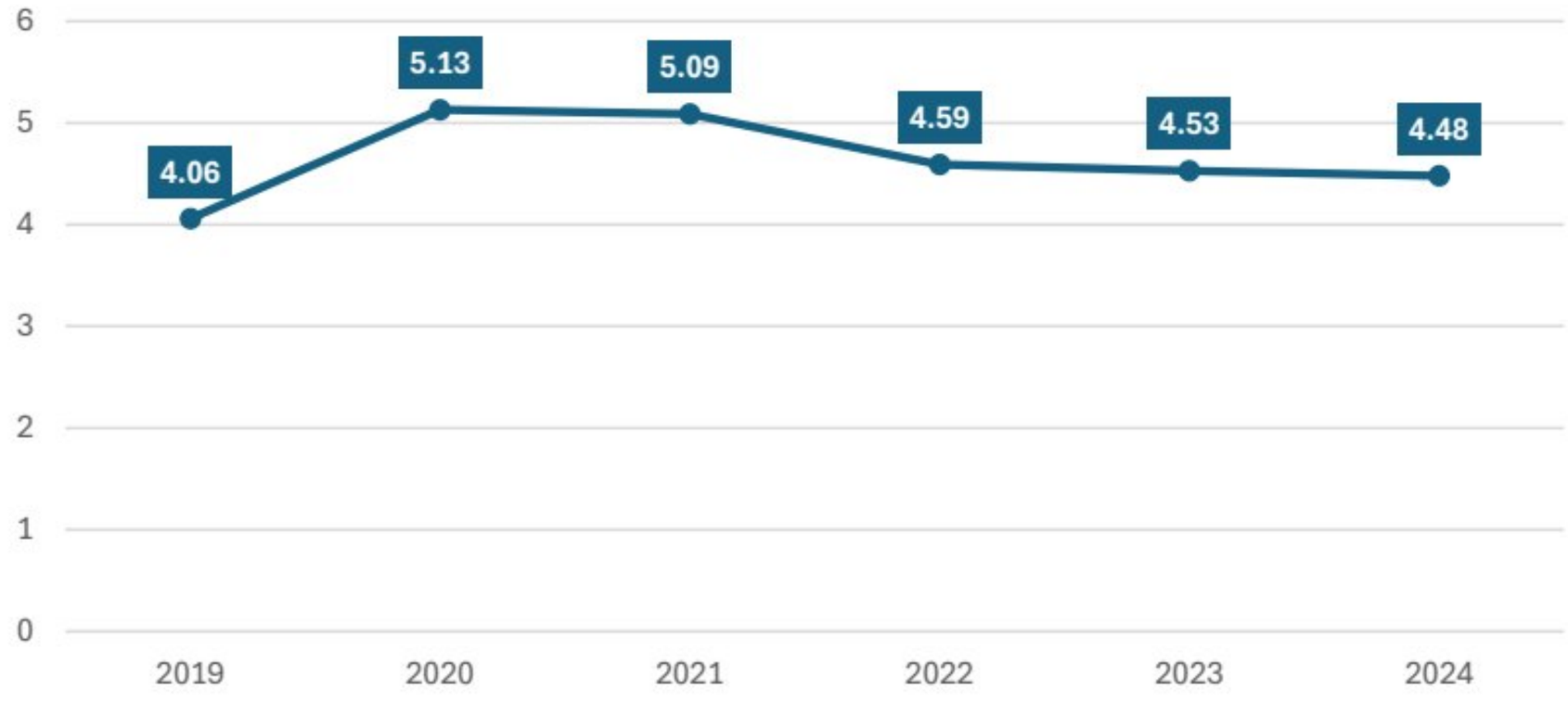

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-34 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun 2019-2024

Meskipun pandemi masih berlangsung, pada tahun 2021 TPT sedikit menurun menjadi 5,09 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja meskipun belum sepenuhnya pulih. Tren penurunan berlanjut di tahun 2022, di mana TPT menurun lebih signifikan menjadi 4,59 persen. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan seiring pelonggaran pembatasan dan pemulihan ekonomi yang terus

Dipindai dengan CamScanner

berjalan. Pada tahun 2023 hingga 2024, angka TPT kembali mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 4,48 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan terus berlanjut, masih dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi pasca-pandemi.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah. Semakin mendekati angka 0 (nol), Indeks Gini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan angka yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian Indeks Gini menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Upaya penurunan ketimpangan perlu ditempuh melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kesempatan kerja yang layak, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan pembangunan yang merata dan partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

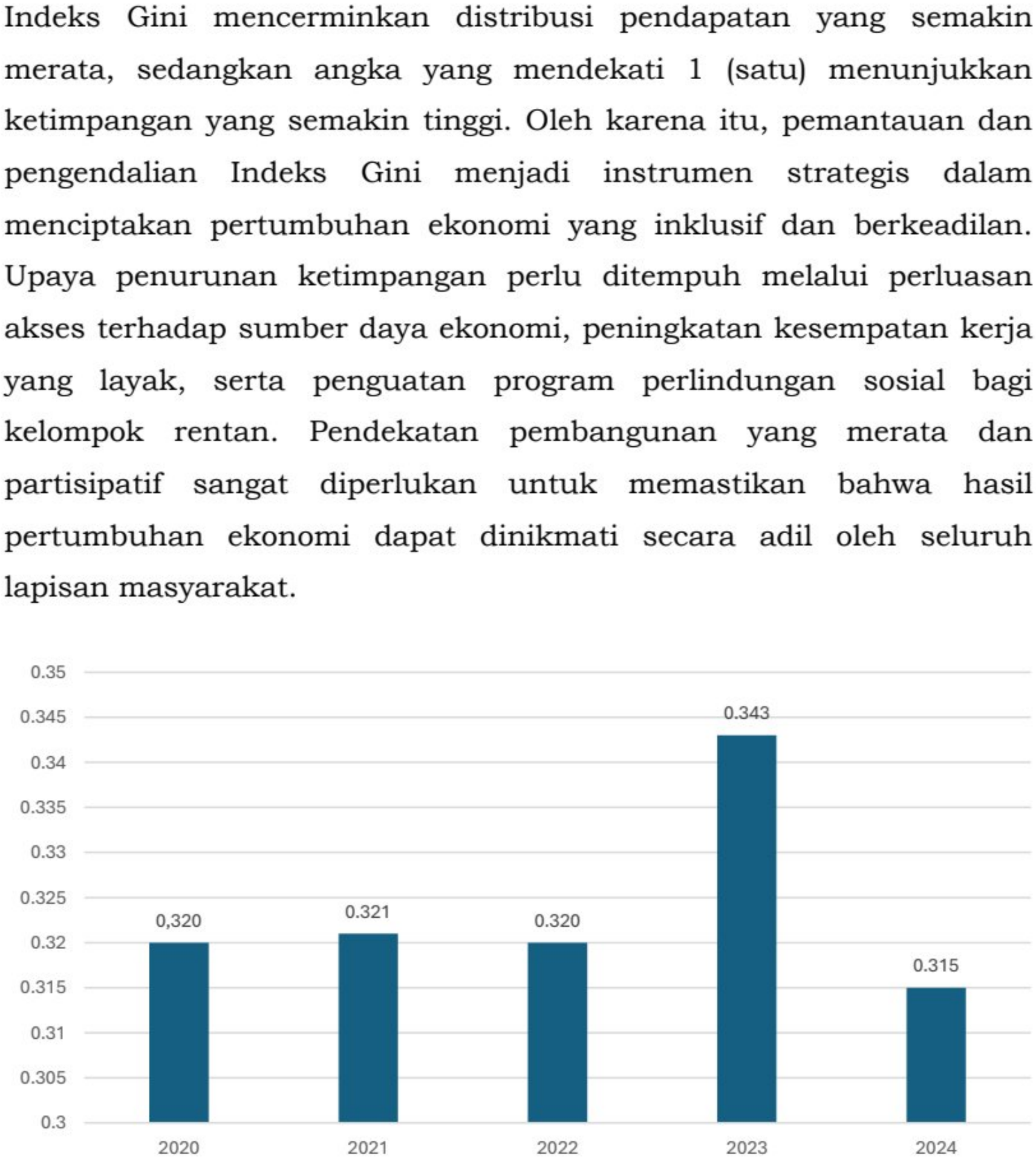

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025
Gambar 2-35 Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Dipindai dengan CamScanner

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-35 menampilkan selama tiga tahun pertama (2020–2022), nilai Indeks Gini relatif stabil pada kisaran 0,320, mencerminkan ketimpangan yang cukup moderat. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,343, yang menandakan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakmerataan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 atau perbedaan akses terhadap peluang ekonomi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,315. Penurunan ini patut diapresiasi sebagai indikasi perbaikan dalam distribusi pendapatan yang merupakan hasil dari intervensi pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi tantangan struktural yang perlu ditangani secara konsisten. Pemerintah Provinsi Jambi perlu terus memperkuat kebijakan inklusif dan memperluas cakupan program berbasis pemerataan agar tren positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

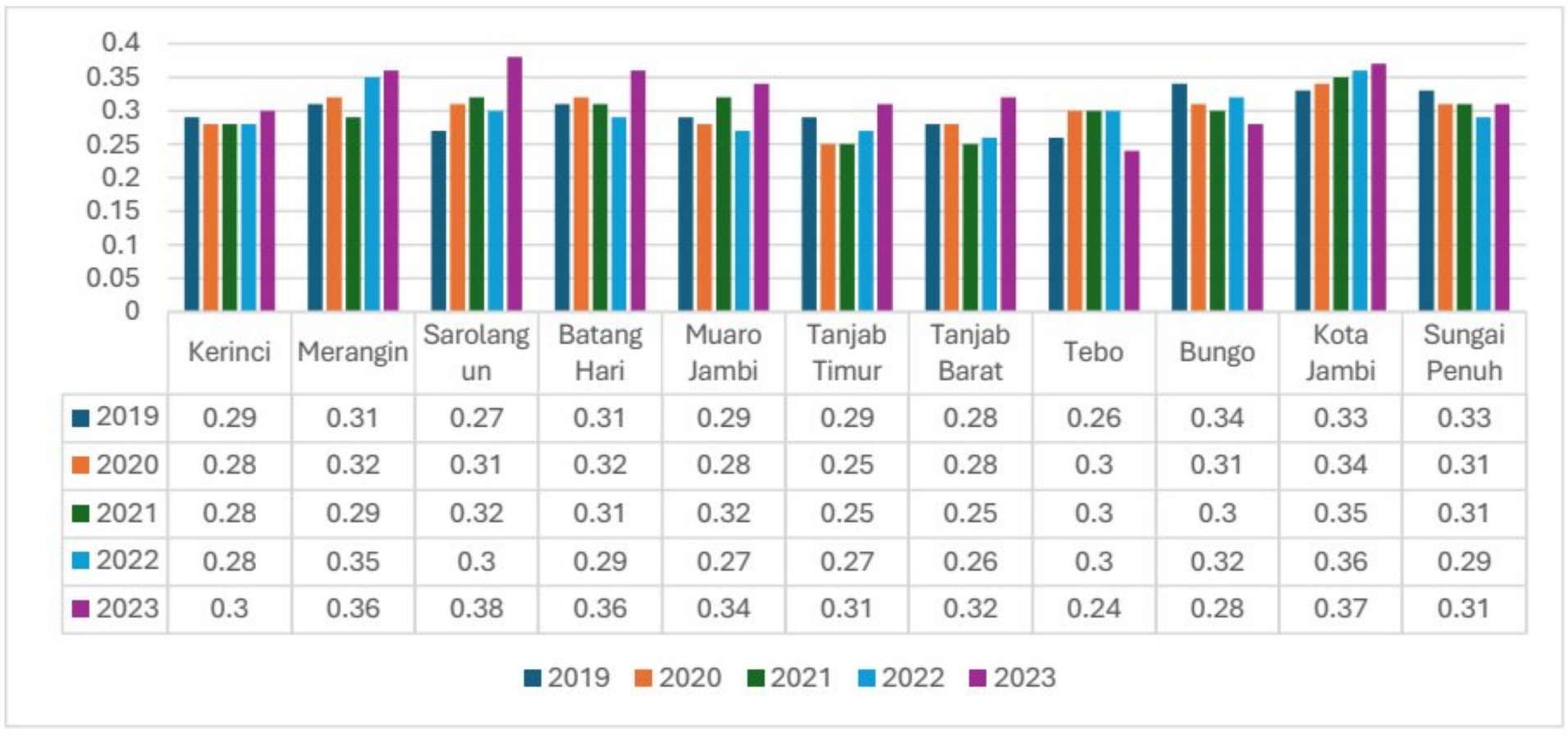

	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjab Timur	Tanjab Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Sungai Penuh
2019	0.29	0.31	0.27	0.31	0.29	0.29	0.28	0.26	0.34	0.33	0.33
2020	0.28	0.32	0.31	0.32	0.28	0.25	0.28	0.3	0.31	0.34	0.31
2021	0.28	0.29	0.32	0.31	0.32	0.25	0.25	0.3	0.3	0.35	0.31
2022	0.28	0.35	0.3	0.29	0.27	0.27	0.26	0.3	0.32	0.36	0.29
2023	0.3	0.36	0.38	0.36	0.34	0.31	0.32	0.24	0.28	0.37	0.31

Sumber: BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2025 (data termurakhir)

Gambar 2-36 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Dipindai dengan CamScanner

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Selama 5 tahun terakhir, Angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif rendah dan termasuk kategori ketimpangan sedang. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dilakukan melalui serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan melibatkan beberapa perangkat daerah, terutama melalui program DUMISAKE. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah:

1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;
2) Penggunaan rumus rata- rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif):

Dipindai dengan CamScanner

a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi;
b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain.

Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

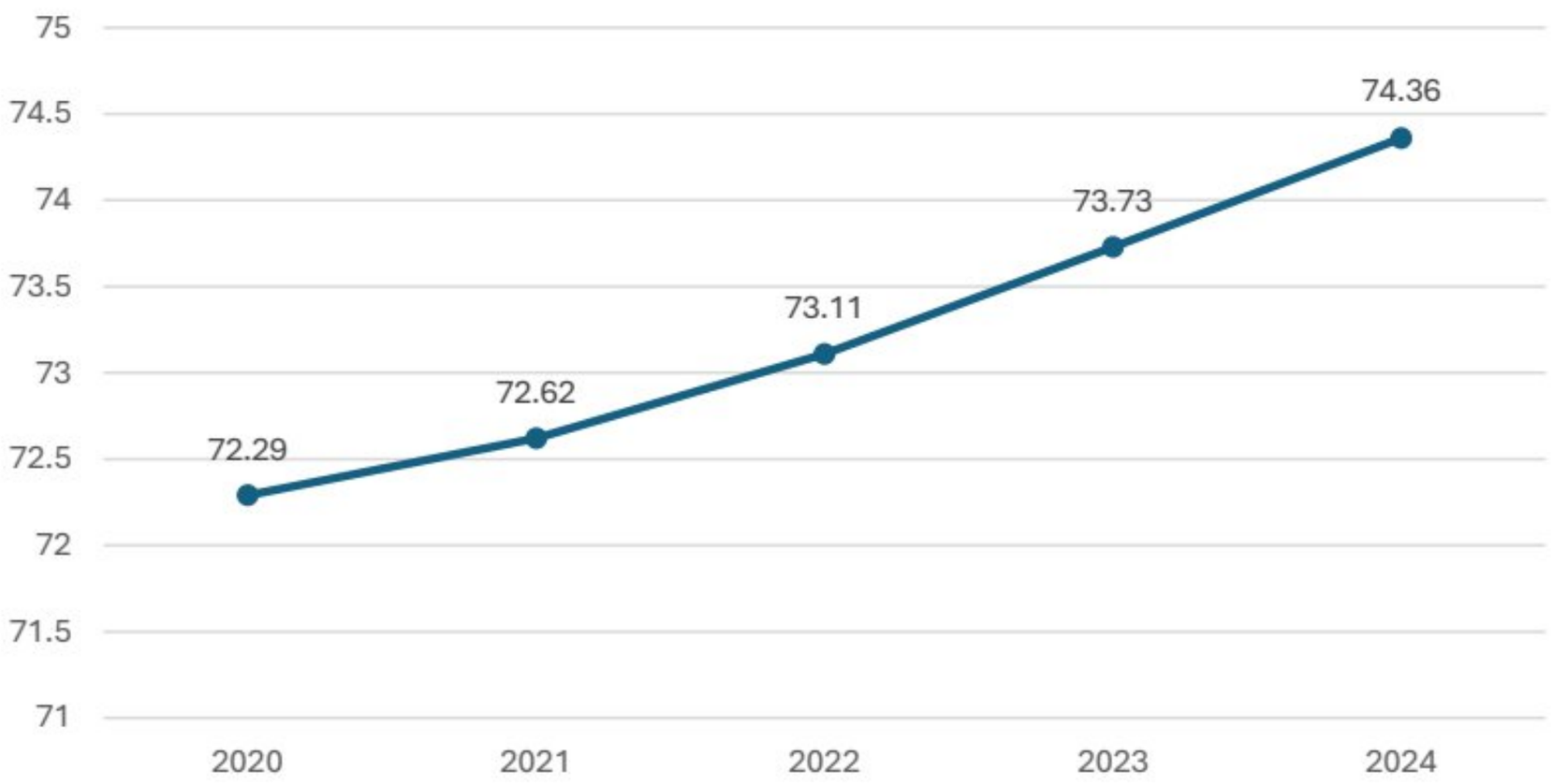

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-37 IPM Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Capaian IPM Provinsi Jambi menunjukan perbaikan setiap tahun, bahkan mulai tahun 2018 sudah masuk dalam kategori tinggi. Seluruh komponen menunjukan tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 di mana Pandemi *Covid-19* melanda dunia, hampir seluruh komponen tetap menunjukan perbaikan, kecuali komponen pengeluaran perkapita. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi, sebagai akibat kontraksi perekonomian secara global maupun nasional dan regional. Namun hingga tahun 2024, capaian IPM mengalami peningkatan menjadi 74,36 di tahun 2024 (Hasil *Long Form* SP 2020).

Dipindai dengan CamScanner

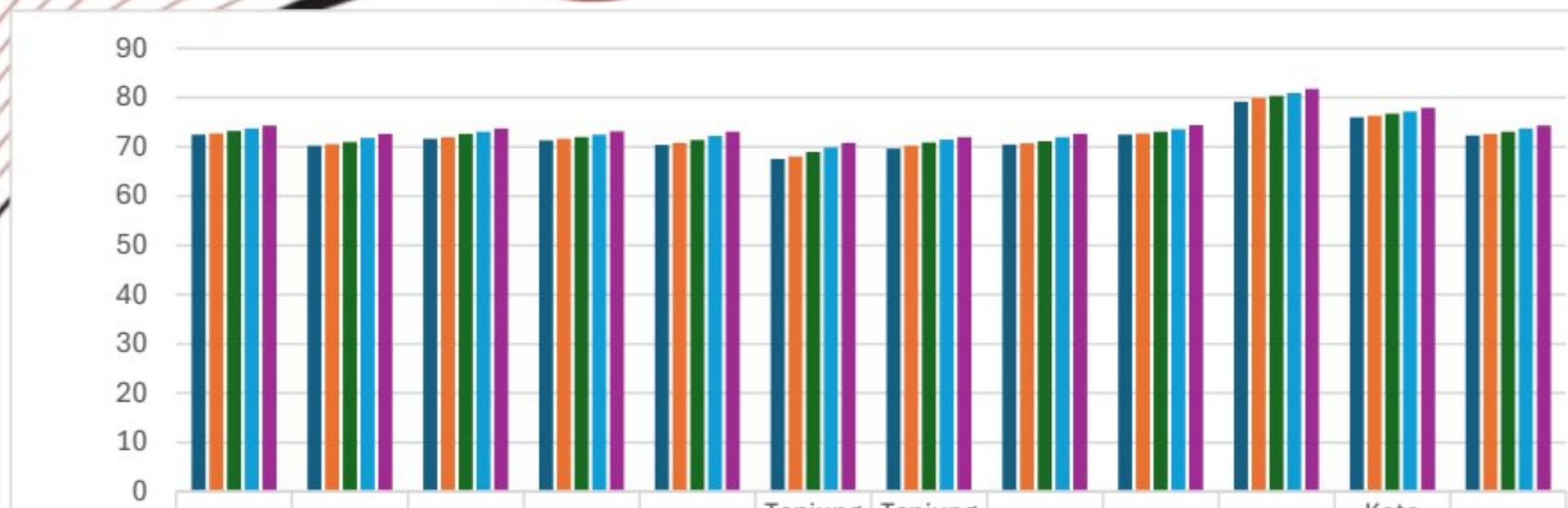

	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	Provinsi JAMBI
2020	72.47	70.2	71.63	71.34	70.41	67.58	69.62	70.51	72.46	79.19	76.02	72.29
2021	72.72	70.55	72.02	71.61	70.79	68.09	70.26	70.73	72.7	79.94	76.3	72.62
2022	73.24	70.98	72.66	71.99	71.41	68.96	70.88	71.14	73.08	80.38	76.75	73.11
2023	73.77	71.81	73.05	72.5	72.26	69.85	71.44	71.99	73.57	80.93	77.2	73.73
2024	74.33	72.65	73.76	73.12	73.11	70.77	72.01	72.67	74.44	81.77	77.93	74.36

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-38 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Pendapatan Per Kapita yang disesuaikan. Selama periode 2020–2024, UHH dan RLS di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Namun demikian, HLS mengalami pertumbuhan yang cenderung lambat, menandakan perlunya percepatan akses pendidikan lanjutan yang merata. Sementara itu, meskipun pendapatan per kapita mengalami pertumbuhan positif, status Provinsi Jambi masih berada pada kategori pendapatan menengah bawah (*lower–middle income*), yang menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan ekonomi memerlukan intervensi kebijakan yang lebih strategis.

Berdasarkan data antarwilayah, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan nilai IPM dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tren mendekati kategori IPM tinggi. Namun demikian, ketimpangan capaian antarwilayah masih cukup nyata, di

Dipindai dengan CamScanner

mana hanya Kota Jambi yang telah mencapai kategori IPM sangat tinggi sejak tahun 2022, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru memasuki kategori IPM tinggi. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas dalam kualitas layanan dasar antardaerah yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, percepatan peningkatan IPM di wilayah dengan capaian relatif rendah perlu difokuskan pada penguatan akses dan kualitas layanan dasar, terutama di bidang pendidikan menengah dan tinggi, pemerataan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Upaya ini harus dibarengi dengan pendekatan kebijakan yang berbasis wilayah, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi daerah-daerah tertinggal.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan landasan utama dalam pembangunan manusia yang berkualitas dan produktif. Akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan ketersediaan fasilitas, tenaga medis, serta pembiayaan kesehatan yang berkeadilan. Upaya promotif dan preventif juga harus diutamakan untuk menurunkan beban penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator demografis yang mencerminkan rata-rata perkiraan umur hidup seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, akses terhadap layanan medis, serta kualitas lingkungan hidup. Peningkatan UHH menunjukkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan dan

Dipindai dengan CamScanner

kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan UHH perlu difokuskan pada penguatan sistem kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat, serta pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke daerah terpencil. Upaya ini harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih sehat dan sejahtera bagi seluruh penduduk.

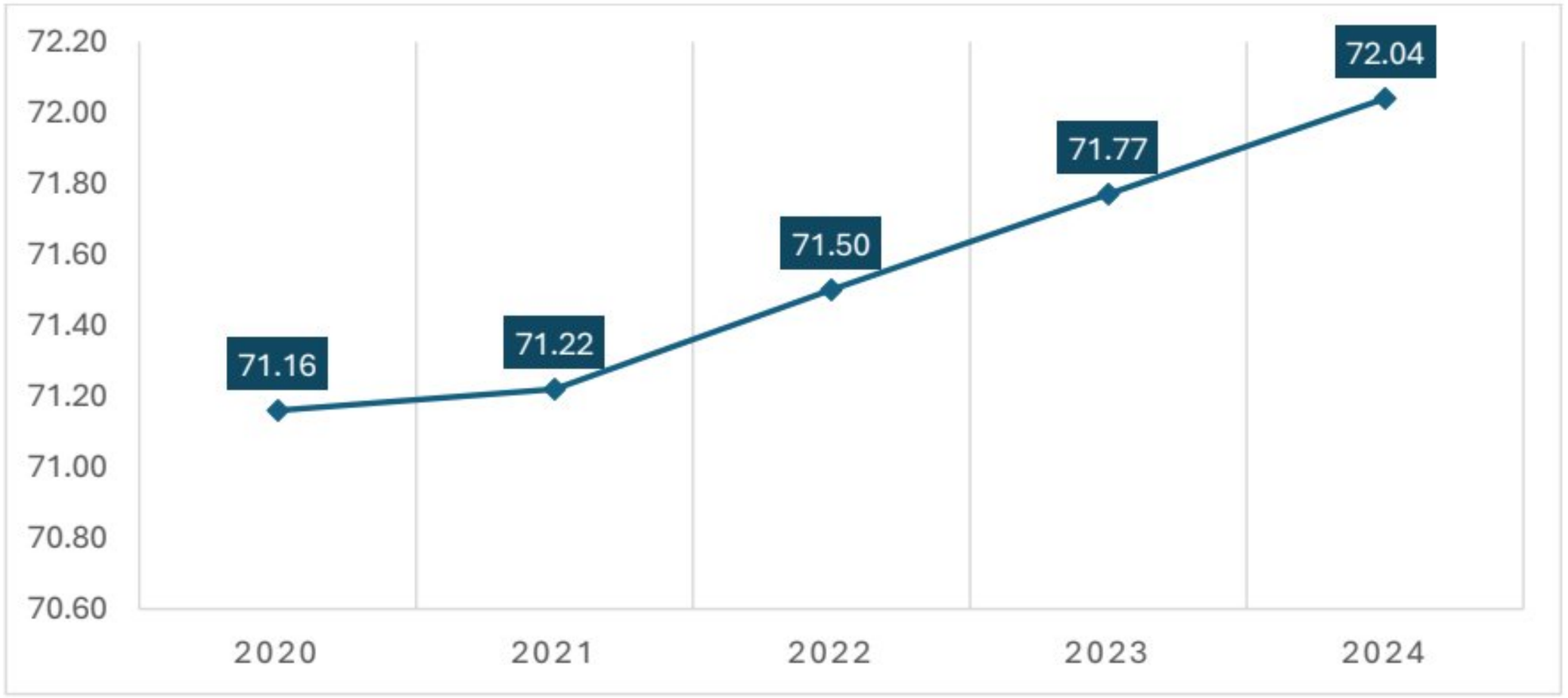

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-39 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 71,16 tahun dan meningkat berturut-turut menjadi 71,22 tahun pada 2021, 71,50 tahun pada 2022, 71,77 tahun pada 2023, dan mencapai 72,04 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, khususnya dalam perbaikan akses layanan kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, dan efektivitas intervensi program pemerintah. Capaian tersebut sekaligus mengindikasikan ketahanan sistem kesehatan Provinsi Jambi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 serta upaya keberlanjutan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.2 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang kesehatan suatu daerah atau negara. Indeks

Dipindai dengan CamScanner

Kesehatan berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, serta mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan pemerintah, seperti pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan penyakit, dan gizi masyarakat. Peningkatan nilai Indeks Kesehatan menunjukkan perbaikan dalam taraf kesehatan penduduk, sedangkan stagnasi atau penurunan bisa menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

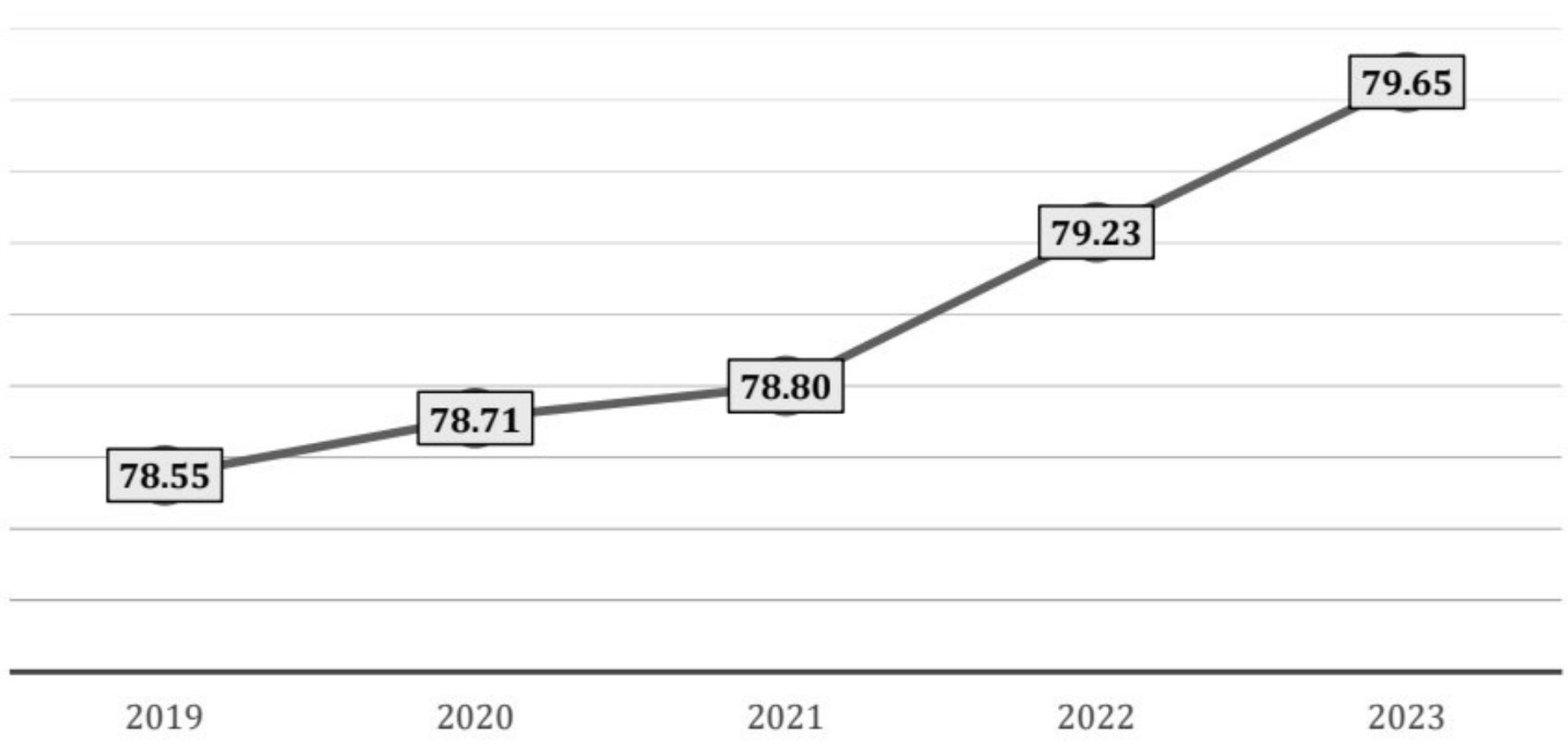

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir)
Gambar 2-40 Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Pada Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019–2023 terdapat tren peningkatan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, indeks ini berada pada angka 78,55 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai 79,65 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi baik dari sisi aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi, penanganan penyakit menular maupun tidak menular, dan lain-lain. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dari 78,80 menjadi 79,23, yang merupakan hasil dari peningkatan program kesehatan pasca pandemi *Covid-19*, seperti program optimalisasi pelayanan primer, peningkatan cakupan imunisasi, serta promosi kesehatan masyarakat yang lebih masif.

Dipindai dengan CamScanner

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat gangguan pertumbuhan kronis pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting memerlukan pendekatan multisektor yang terintegrasi, mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan pola asuh dan konsumsi gizi keluarga, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat, sangat diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.

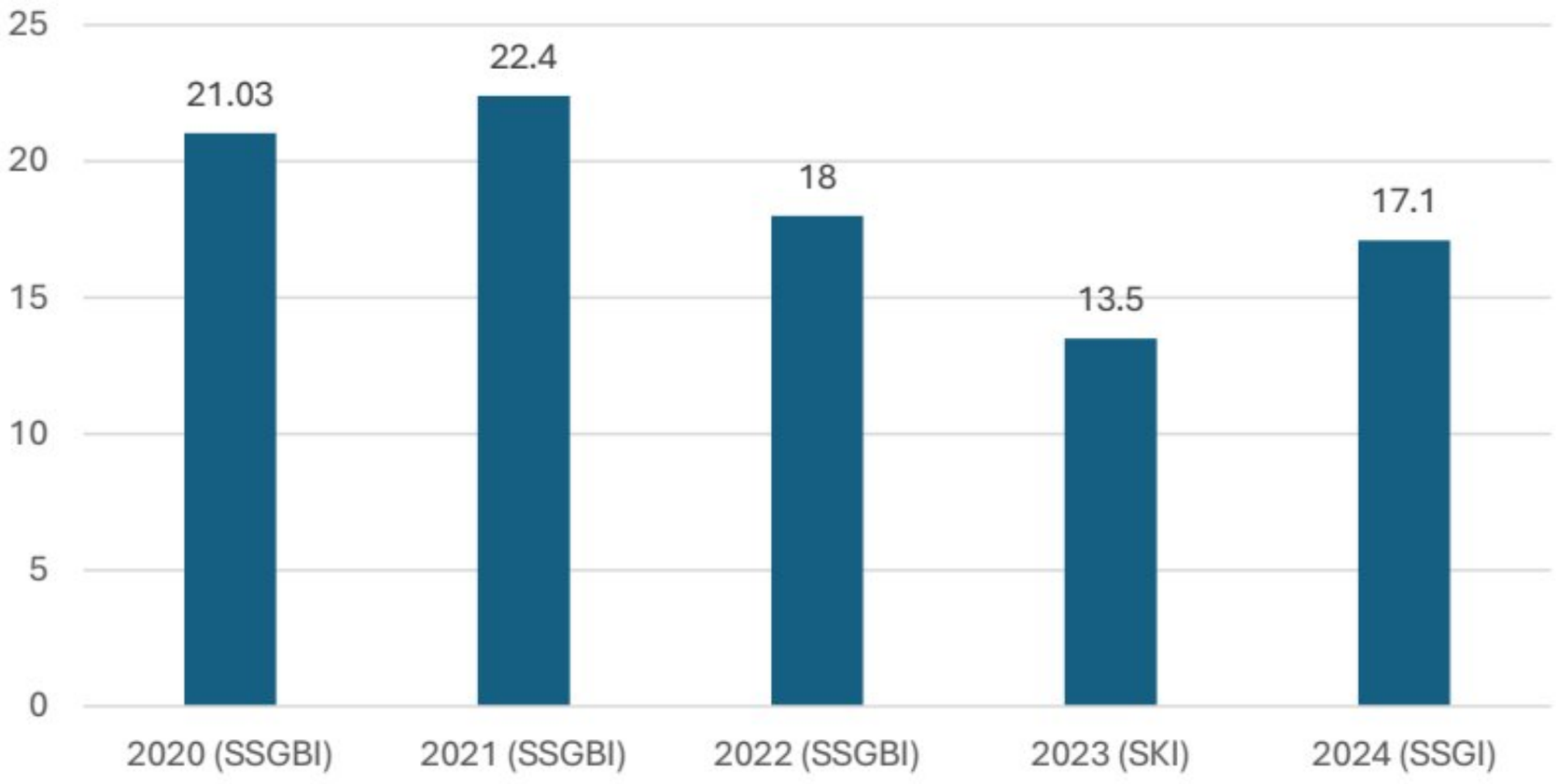

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (data diolah)
Gambar 2-41 Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Prevalensi stunting di Provinsi Jambi setiap tahun mengalami penurunan hingga tahun 2023, di mana pada tahun 2020 berdasarkan data SSGBI, prevalensi stunting di Provinsi Jambi sebesar 21,03 persen, dan pada tahun 2023 telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 13,5 persen (Survei Kesehatan Indonesia, 2024). Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Dipindai dengan CamScanner

Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan, antara lain melalui asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen, sedangkan intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya. Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari pelibatan lintas sektor melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya kebijakan Prevalensi Wasting (kurus) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan optimalisasi program tersebut diantaranya melalui SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi, Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, dan SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi. Hingga 31 Desember 2023 telah diterima sebanyak 3.759 paket manfaat dalam bentuk makanan tambahan, paket antropometri kit, paket bantuan usaha, bibit, KIE, fasilitasi jamban, dan air bersih dari sebanyak 301 pemberi manfaat yang terdiri dari pemangku kepentingan, dunia usaha, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu dengan total nilai rupiah mencapai Rp2.221.337.300,00.

Namun prevalensi stunting ini memngalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2024 berdasarkan data SSGI, yang menandakan bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum cukup untuk terus menurunkan stunting. Perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan tepat sasaran agar prevalensi stunting ini turun terus tanpa lonjakan peningkatan.

Dipindai dengan CamScanner

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menjadi landasan dalam menciptakan keadilan sosial dan mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan pada penguatan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, juga menjadi prioritas agar kesenjangan pendidikan dapat dikurangi secara signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, pembangunan sektor pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan global.

2.2.3.1 Rata- Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang telah diselesaikan maupun yang masih berlangsung. Peningkatan nilai RLS mengindikasikan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memperluas kesempatan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

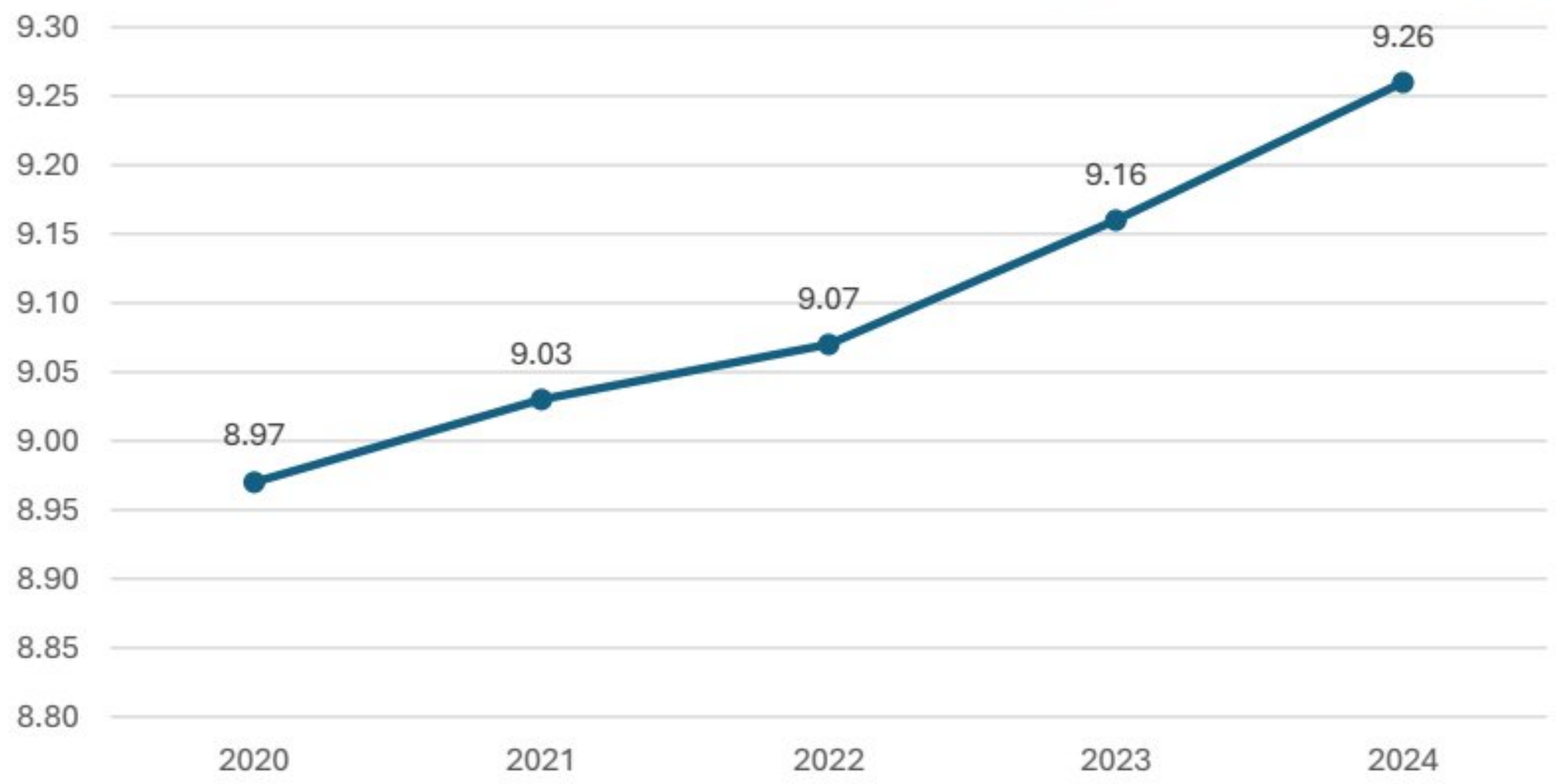

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-42 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,97 tahun dan mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 9,03 tahun pada 2021, 9,07 tahun pada 2022, 9,16 tahun pada 2023, dan mencapai 9,26 tahun pada 2024. Peningkatan RLS ini kemungkinan didorong oleh beberapa faktor yaitu adanya program pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang dijalankan pemerintah melalui kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun serta dukungan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Lalu kemungkinan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai modal sosial dan ekonomi mendorong partisipasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Meskipun peningkatannya bersifat bertahap, tren positif ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pendidikan serta perluasan layanan pendidikan yang inklusif dan

Dipindai dengan CamScanner

merata di wilayah Provinsi Jambi.

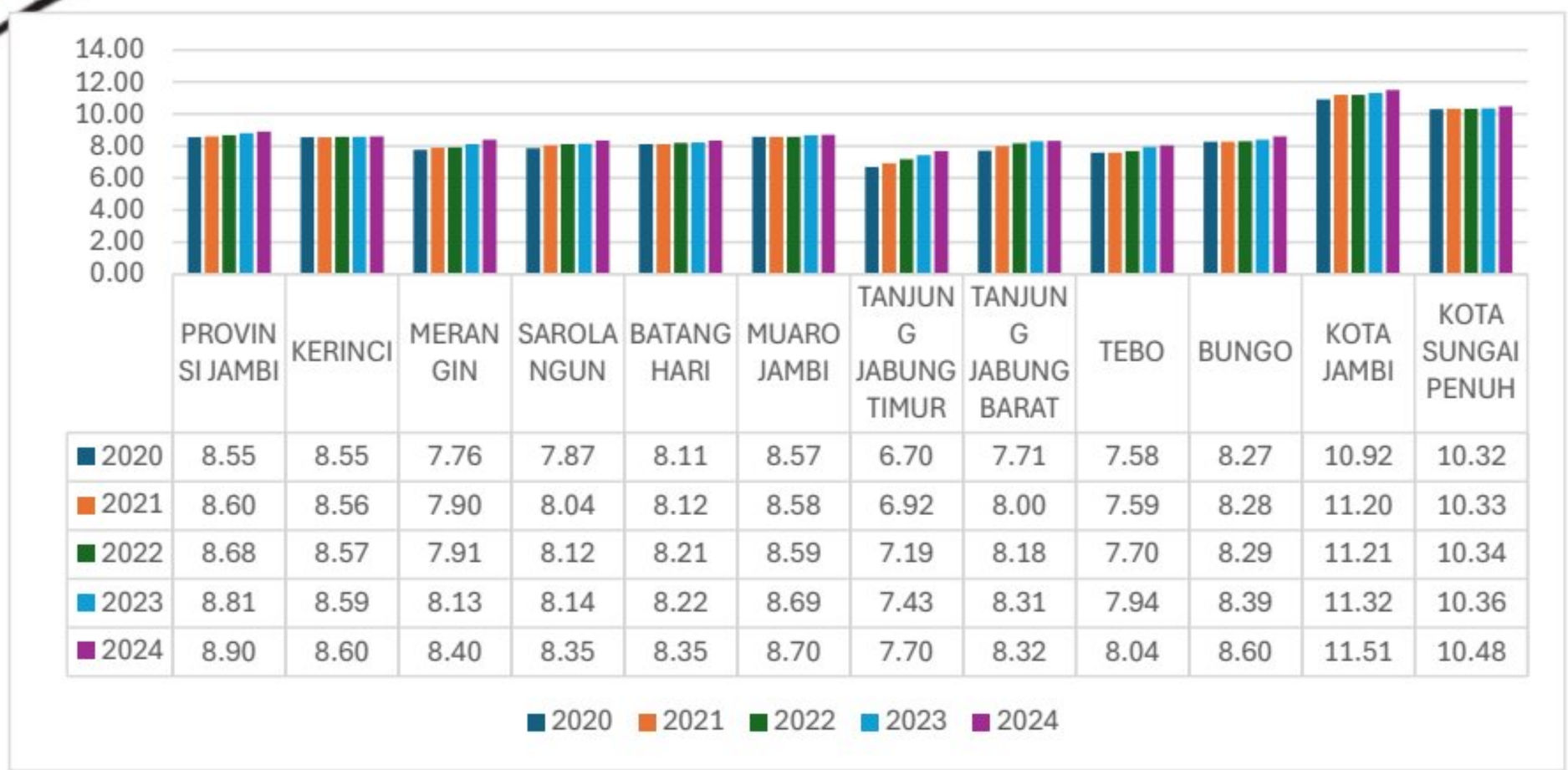

	PROVINSI JAMBI	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBO	BUNGO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH
2020	8.55	8.55	7.76	7.87	8.11	8.57	6.70	7.71	7.58	8.27	10.92	10.32
2021	8.60	8.56	7.90	8.04	8.12	8.58	6.92	8.00	7.59	8.28	11.20	10.33
2022	8.68	8.57	7.91	8.12	8.21	8.59	7.19	8.18	7.70	8.29	11.21	10.34
2023	8.81	8.59	8.13	8.14	8.22	8.69	7.43	8.31	7.94	8.39	11.32	10.36
2024	8.90	8.60	8.40	8.35	8.35	8.70	7.70	8.32	8.04	8.60	11.51	10.48

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-43 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-43 menggambarkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, RLS menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dari 8,97 tahun pada 2020 menjadi 9,26 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses terhadap pendidikan formal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kota Jambi secara konsisten mencatat RLS tertinggi, mencerminkan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo masih mencatat RLS relatif rendah, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan pendidikan yang lebih terfokus pada wilayah perdesaan dan tertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

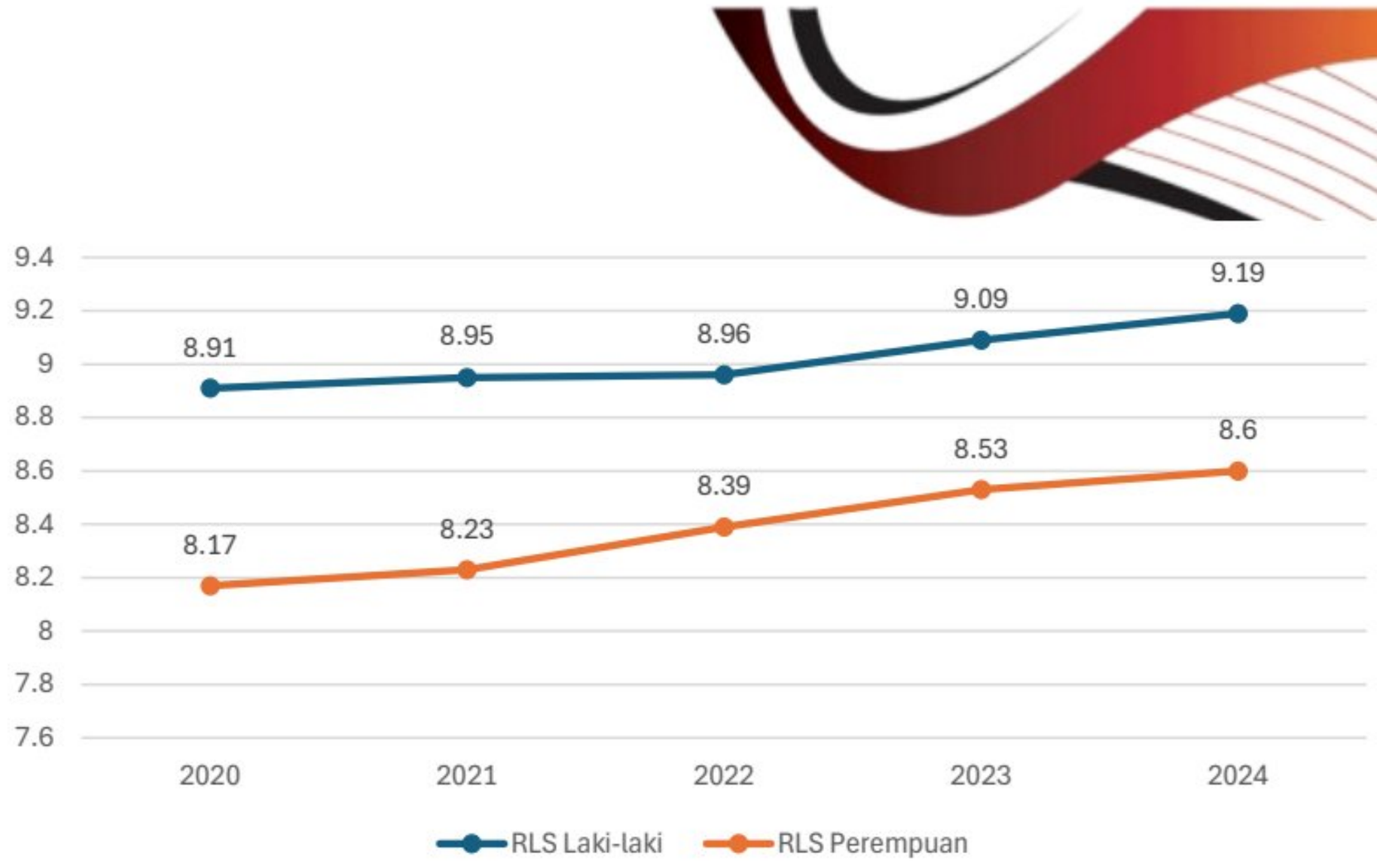

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-44 Rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Data rata-rata lama sekolah (RLS) menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan pada kelompok laki-laki maupun perempuan. RLS laki-laki meningkat dari 8,91 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,19 tahun pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 tahun. Sementara itu, RLS perempuan mengalami peningkatan dari 8,17 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,60 tahun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,43 tahun. Meskipun capaian RLS laki-laki secara konsisten masih lebih tinggi dibandingkan perempuan, laju pertumbuhan RLS perempuan relatif lebih cepat, sehingga mencerminkan adanya perbaikan secara gradual dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan.

Kesenjangan yang masih terjadi disebabkan oleh berbagai faktor struktural maupun kultural, antara lain masih kuatnya norma sosial yang membatasi partisipasi pendidikan perempuan, terutama di wilayah pedesaan, serta kondisi ekonomi keluarga yang berimplikasi pada tingginya risiko putus sekolah bagi anak perempuan. Dengan demikian, meskipun terdapat tren positif, masih diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi gender, penguatan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, serta perluasan fasilitas pendidikan di wilayah pedesaan. Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan berbagai upaya untuk dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas

Dipindai dengan CamScanner

sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan sebagai prasyarat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Meskipun tren tersebut menunjukkan arah yang positif, angka RLS yang masih berada di bawah 10 tahun mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih progresif dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah perdesaan. Kenaikan RLS yang cenderung lambat juga menandakan perlunya intervensi lebih kuat untuk mempercepat peningkatan capaian pendidikan. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik, aksesibilitas sarana pendidikan di daerah terpencil, serta hambatan sosial-ekonomi yang menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Dalam konteks pembangunan manusia, peningkatan RLS berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Oleh karena itu, strategi kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan program wajib belajar 12 tahun, penyediaan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk keluarga miskin, serta pengembangan pendidikan nonformal dan vokasional sebagai alternatif peningkatan keterampilan remaja yang tidak lagi bersekolah. Dengan upaya yang lebih terfokus dan berbasis data spasial, diharapkan peningkatan RLS di Provinsi Jambi tidak hanya terus berlanjut, tetapi juga lebih merata di seluruh kabupaten/kota sehingga kesenjangan pendidikan antardaerah dapat ditekan.

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang akan ditempuh oleh anak usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini memberikan gambaran mengenai potensi aksesibilitas dan kontinuitas pendidikan dalam jangka panjang serta mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau seluruh kelompok usia sekolah. Oleh karena itu, peningkatan nilai HLS perlu didukung melalui kebijakan yang menjamin ketersediaan

Dipindai dengan CamScanner

layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk di daerah tertinggal dan terpencil.

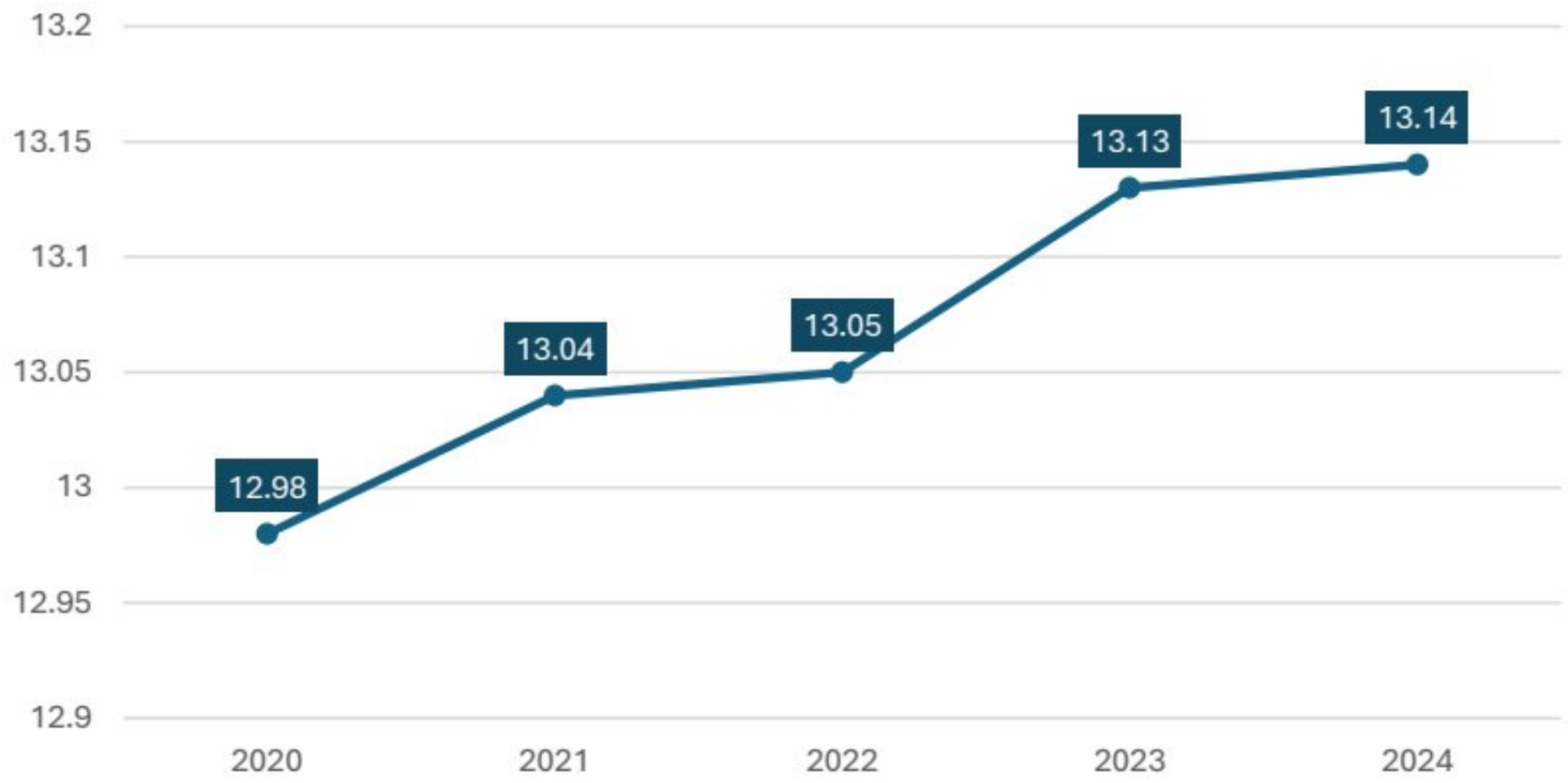

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-45 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang terus berlangsung, meskipun kenaikannya masih tergolong lambat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,98 tahun, lalu meningkat menjadi 13,04 tahun pada 2021. Angka ini naik sedikit menjadi 13,05 tahun pada 2022, kemudian mengalami peningkatan lebih nyata menjadi 13,13 tahun pada 2023, dan mencapai 13,14 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan formal di Provinsi Jambi terus membaik. Masyarakat semakin berpeluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, bahkan sebagian hingga perguruan tinggi. Namun demikian, mengingat pertumbuhannya masih cukup lambat, diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan HLS. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperluas akses pendidikan ke seluruh wilayah, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memberikan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan program yang merata, diharapkan peningkatan HLS di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat dan merata pada tahun-tahun mendatang.

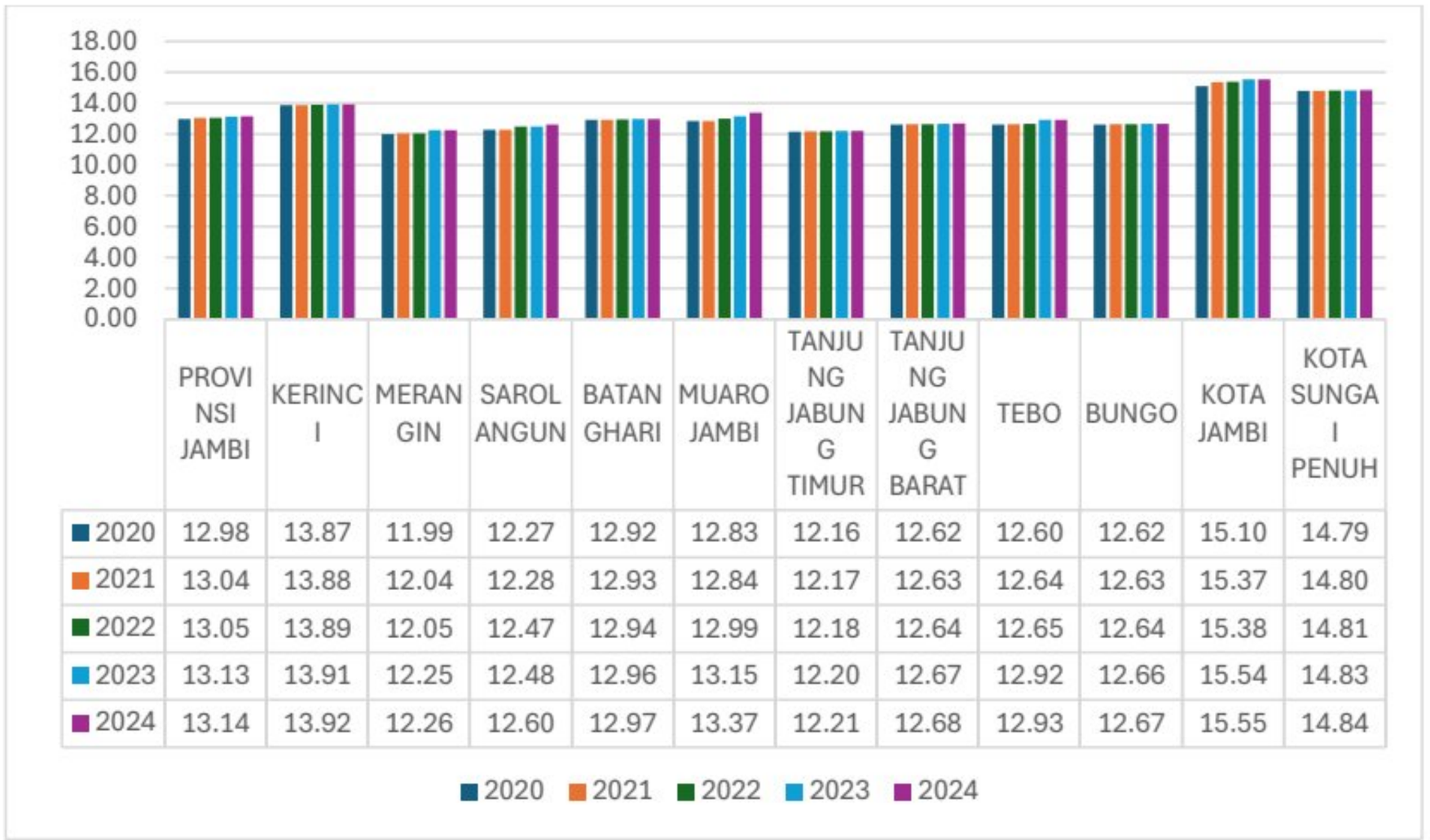

	PROVINSI JAMBI	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG TIMUR	TANJUNG JABUNG BARAT	TEBO	BUNGO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH
2020	12.98	13.87	11.99	12.27	12.92	12.83	12.16	12.62	12.60	12.62	15.10	14.79
2021	13.04	13.88	12.04	12.28	12.93	12.84	12.17	12.63	12.64	12.63	15.37	14.80
2022	13.05	13.89	12.05	12.47	12.94	12.99	12.18	12.64	12.65	12.64	15.38	14.81
2023	13.13	13.91	12.25	12.48	12.96	13.15	12.20	12.67	12.92	12.66	15.54	14.83
2024	13.14	13.92	12.26	12.60	12.97	13.37	12.21	12.68	12.93	12.67	15.55	14.84

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-46 Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2020 hingga 2024. Secara umum, HLS mengalami tren peningkatan di seluruh wilayah, namun terdapat ketimpangan antar daerah yang cukup mencolok. Kota Jambi secara konsisten mencatat HLS tertinggi, mengindikasikan bahwa anak-anak di wilayah ini memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, bahkan hingga perguruan tinggi.

Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Merangin dan Tanjung Jabung Timur mencatatkan HLS yang lebih rendah, mencerminkan keterbatasan akses pendidikan lanjutan di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih terfokus untuk memperluas kesempatan pendidikan di daerah dengan capaian HLS rendah, melalui pembangunan sarana pendidikan menengah dan tinggi, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan program beasiswa bagi kelompok rentan.

Dipindai dengan CamScanner

2.2.3.3 Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan pendidikan nonformal. Peningkatan budaya membaca tidak hanya mencerminkan akses yang lebih baik terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi terhadap tumbuhnya masyarakat yang kritis, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, penguatan minat baca menjadi bagian strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, khususnya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan memperkuat daya saing Provinsi Jambi. Hasil capaian tingkat kegemaran membaca ini sebagai cerminan angka literasi/numerasi di Provinsi Jambi yang terdapat pada juga penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah dan responsif dalam pengembangan literasi masyarakat ke depan.

Tabel 2-14 Tingkat Kegemaran Membaca Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Kegemaran Membaca
Kerinci	78,75
Merangin	56,96
Sarolangun	81,7
Batang Hari	65,79
Muaro Jambi	60,66
Tanjung Jabung Timur	68,86
Tanjung Jabung Barat	71,23
Tebo	57,87
Bungo	61,28
Kota Jambi	77,85
Kota Sungai Penuh	61,07
Jambi	**68,05**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2025

Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi Jambi menunjukkan variasi yang cukup beragam antar kabupaten/kota. Daerah dengan

Dipindai dengan CamScanner

tingkat kegemaran membaca tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun sebesar 81,7, diikuti oleh Kabupaten Kerinci sebesar 78,75, dan Kota Jambi sebesar 77,85. Sementara itu, daerah dengan tingkat kegemaran membaca terendah adalah Kabupaten Merangin dan Tebo, masing-masing sebesar 56,96 dan 57,87. Rata-rata tingkat kegemaran membaca di Provinsi Jambi berada pada angka 68,05. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wilayah telah menunjukkan minat baca yang tinggi, masih terdapat kabupaten yang perlu didorong untuk meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Salah satu indikator yang penting dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas adalah angka literasi Masyarakat. Indikator ini menggambarkan kemampuan dasar penduduk dalam membaca dan menulis, yang menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi, memahami hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan tingkat literasi perlu didukung melalui penguatan ekosistem literasi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan perpustakaan, peningkatan kualitas bahan bacaan, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas dalam budaya membaca.

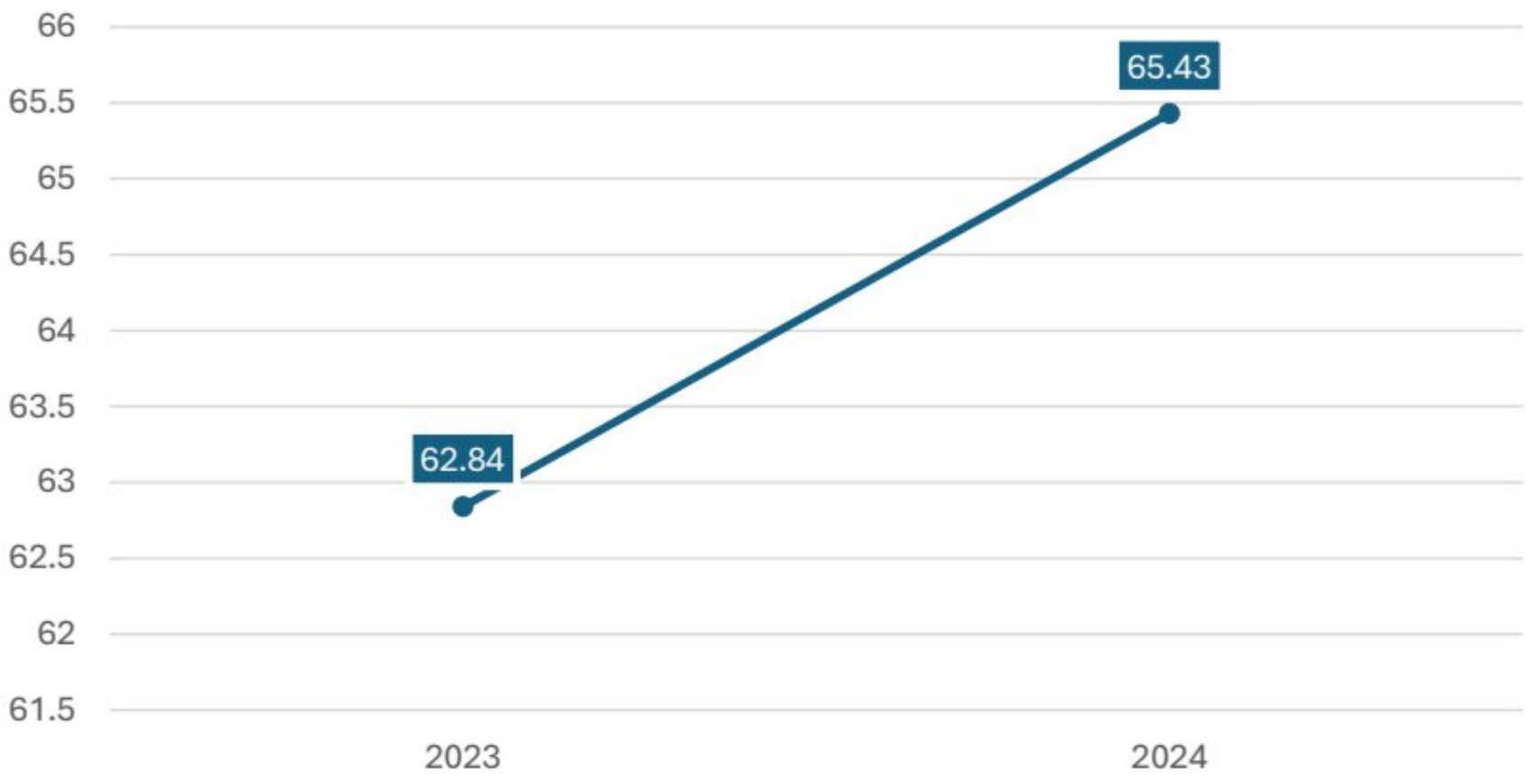

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-47 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks tercatat sebesar 62,84 dan meningkat menjadi 65,43 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan aktivitas literasi di masyarakat, termasuk peran perpustakaan, komunitas baca, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi sebagai dasar pengembangan kualitas hidup masyarakat.

2.2.3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Pada tahun 2024, APK pada tingkat SD mencapai 107,13, atau mengalamai penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 108,29. Hal ini berarti terdapat 107,13 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok

Dipindai dengan CamScanner

usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, APK SMP sederajat mencapai sebesar 88,91 persen dan terus meningkat menjadi 89,97 persen pada tahun 2024. Sementara, APK SMA Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2020, APK SMA sebesar 83,71 persen, meningkat menjadi 85,18 persen pada tahun 2024.

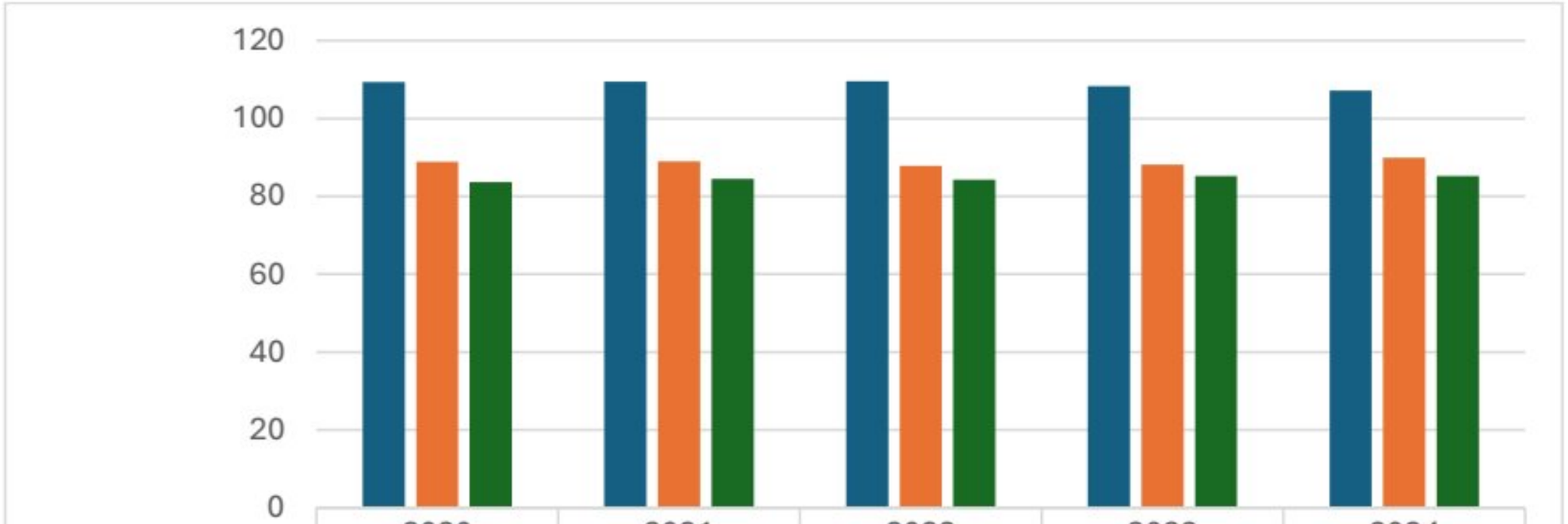

	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	109.39	109.48	109.55	108.29	107.13
SMP/Sederajat	88.91	88.96	87.84	88.20	89.97
SMA/Sederajat	83.71	84.47	84.33	85.23	85.18

Sumber: BPS, Tahun 2025

Gambar 2-48 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk, khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100

Dipindai dengan CamScanner

atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yaitu dari 99,11 persen pada tahun 2020 menjadi 98,17 persen pada tahun 2024. Demikian juga APM SMP yang mengalami penurunan dari 79,93 persen di tahun 2020 menjadi 79,65 persen di tahun 2024. Namun untuk APM SMA, pada tahun 2020-2024 justru mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020, APM SMA sebesar 61,38 persen, meningkat menjadi 62,48 persen pada tahun 2024. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.

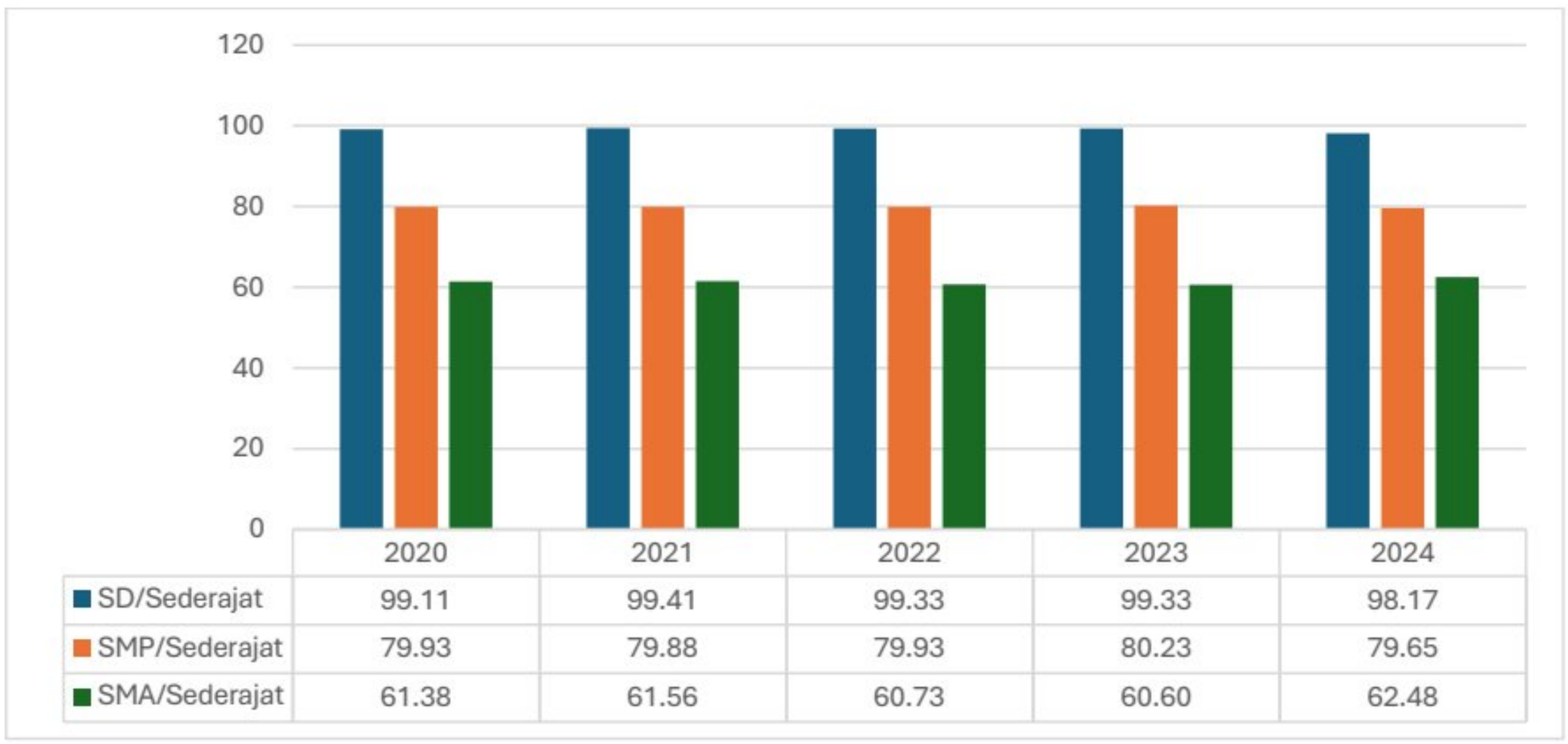

	2020	2021	2022	2023	2024
SD/Sederajat	99.11	99.41	99.33	99.33	98.17
SMP/Sederajat	79.93	79.88	79.93	80.23	79.65
SMA/Sederajat	61.38	61.56	60.73	60.60	62.48

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-49 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Meskipun Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah cukup baik, namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan antara lain:

a. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka

Dipindai dengan CamScanner

partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.

b. Tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan SLTA yang relatif rendah menjadi tantangan utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi.
c. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.
d. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

2.2.3.6 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sama pada tahun ajaran sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Provinsi Jambi pada periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum cenderung menurun. Meski demikian, tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani secara menyeluruh.

Dipindai dengan CamScanner

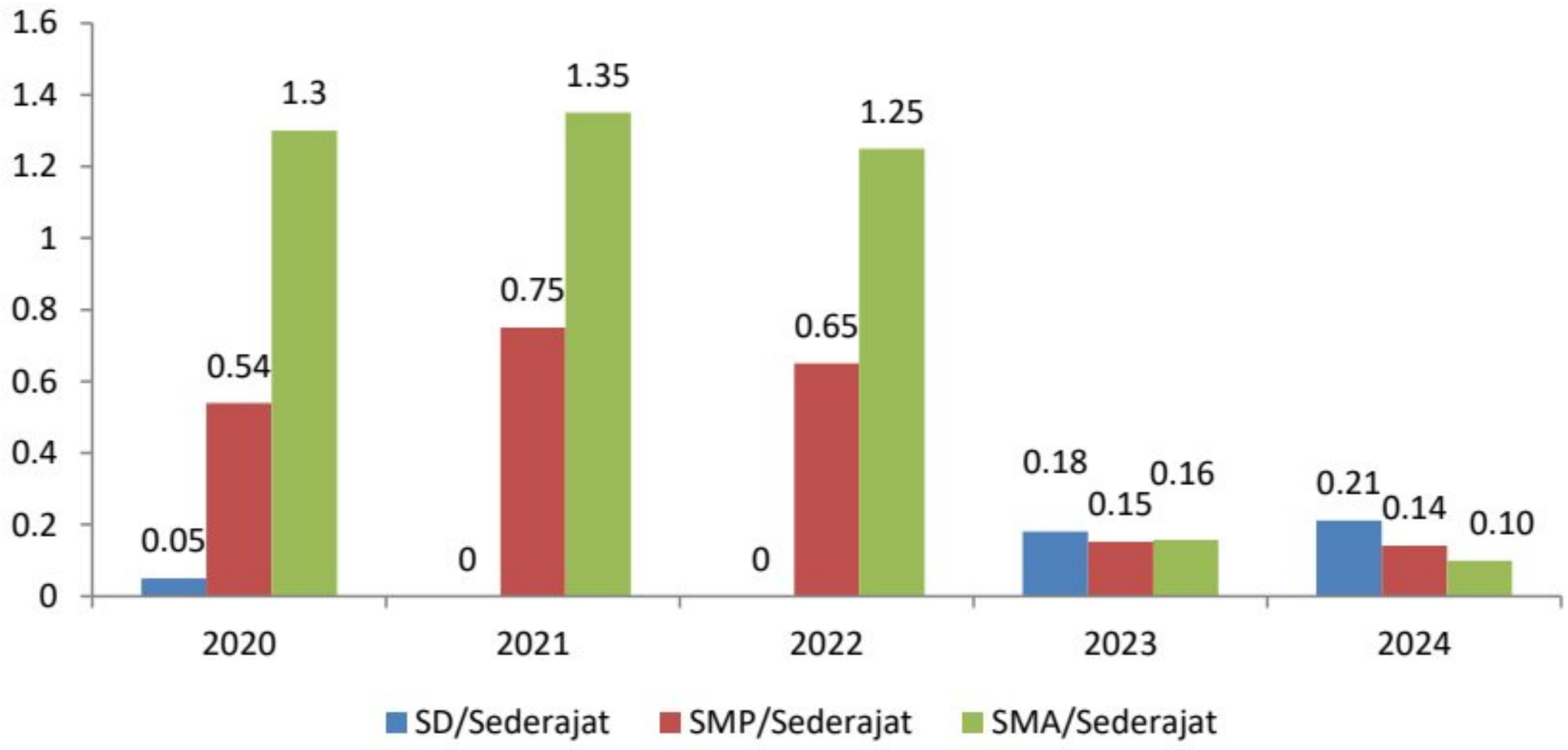

Sumber: Kemendikdasmen, 2025
Gambar 2-50 Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan pola bahwa sampai dengan tahun 2022 semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Namun hal berbeda terjadi pada tahun-tahun setelahnya, dimana terjadi sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah cukup baik. Namun ke depan, juga diperlukan upaya-upaya inovatif terutama dalam menghadapi kondisi pasca pandemi *Covid-19*, serta menghadapi era Revolusi 4.0.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, terhadap berbagai guncangan sosial, ekonomi, maupun bencana alam. Dalam menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks, seperti dampak perubahan iklim, disrupsi ekonomi, dan ketidakpastian global, dibutuhkan sistem perlindungan sosial yang responsif, fleksibel, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, penguatan sistem ini perlu diarahkan pada integrasi yang menyeluruh antara program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, dengan dukungan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci untuk menjamin cakupan yang luas, ketepatan

Dipindai dengan CamScanner

sasaran, dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, keberadaan sistem perlindungan sosial yang adaptif akan memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju merupakan landasan moral dan kultural dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, toleran, serta berdaya saing di tengah dinamika global. Praktik keagamaan yang moderat dan inklusif, berpadu dengan pelestarian serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal, menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat identitas nasional sekaligus membangun kohesi sosial. Di sisi lain, pengembangan kebudayaan harus mendorong pelestarian warisan budaya, inovasi seni dan tradisi lokal, serta peningkatan kontribusi sektor budaya terhadap perekonomian. Sinergi kebijakan di bidang agama dan kebudayaan secara berkelanjutan akan menciptakan tatanan masyarakat yang damai, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mencerminkan tingkat harmoni, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama di suatu wilayah. Peningkatan IKUB di Provinsi Jambi perlu terus didorong melalui dialog antaragama, pendidikan nilai toleransi sejak dini, serta dukungan terhadap kegiatan yang mempererat hubungan antar komunitas keagamaan. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan saling menghargai perbedaan.

Dipindai dengan CamScanner

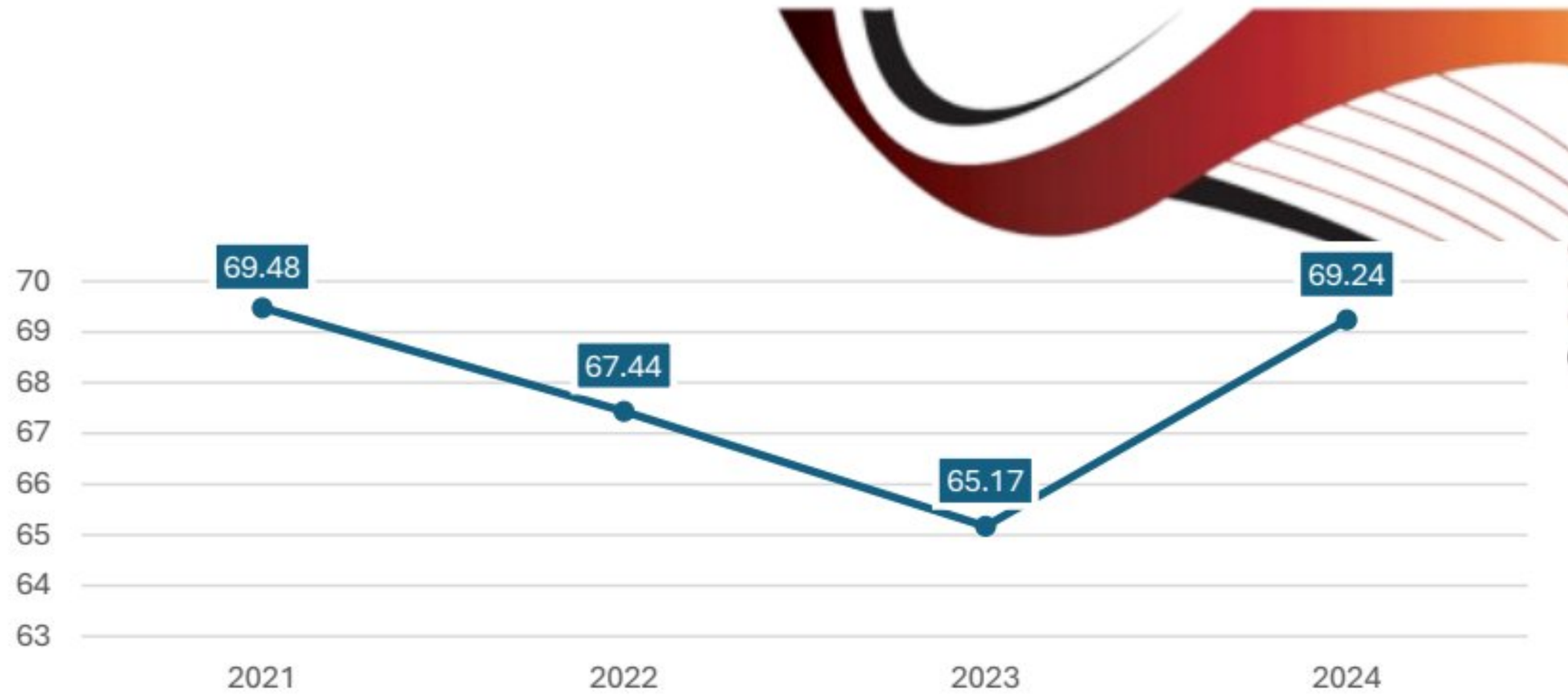

Sumber: Kementerian Agama, 2025

Gambar 2-51 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Jambi menunjukan tren fluktuaktif, dari 69,48 pada tahun 2021 menjadi 67,44 di 2022 dan terus turun menjadi 65,17 pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya persepsi masyarakat terhadap politisasi agama dan rendahnya tingkat toleransi, yang berdampak negatif pada kerukunan antarumat beragama. Namun, pada tahun 2024, IKUB Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 69,24. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan, kemungkinan berkat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mendorong dialog lintas agama, pendidikan toleransi, serta kerja sama antarumat.

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan berperan penting dalam memperkuat jati diri, membangun karakter, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mencerminkan sejauh mana nilai-nilai budaya tumbuh dan terjaga dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan IPK di Provinsi Jambi perlu didorong melalui pelestarian warisan budaya, penguatan pendidikan berbasis budaya, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Dipindai dengan CamScanner

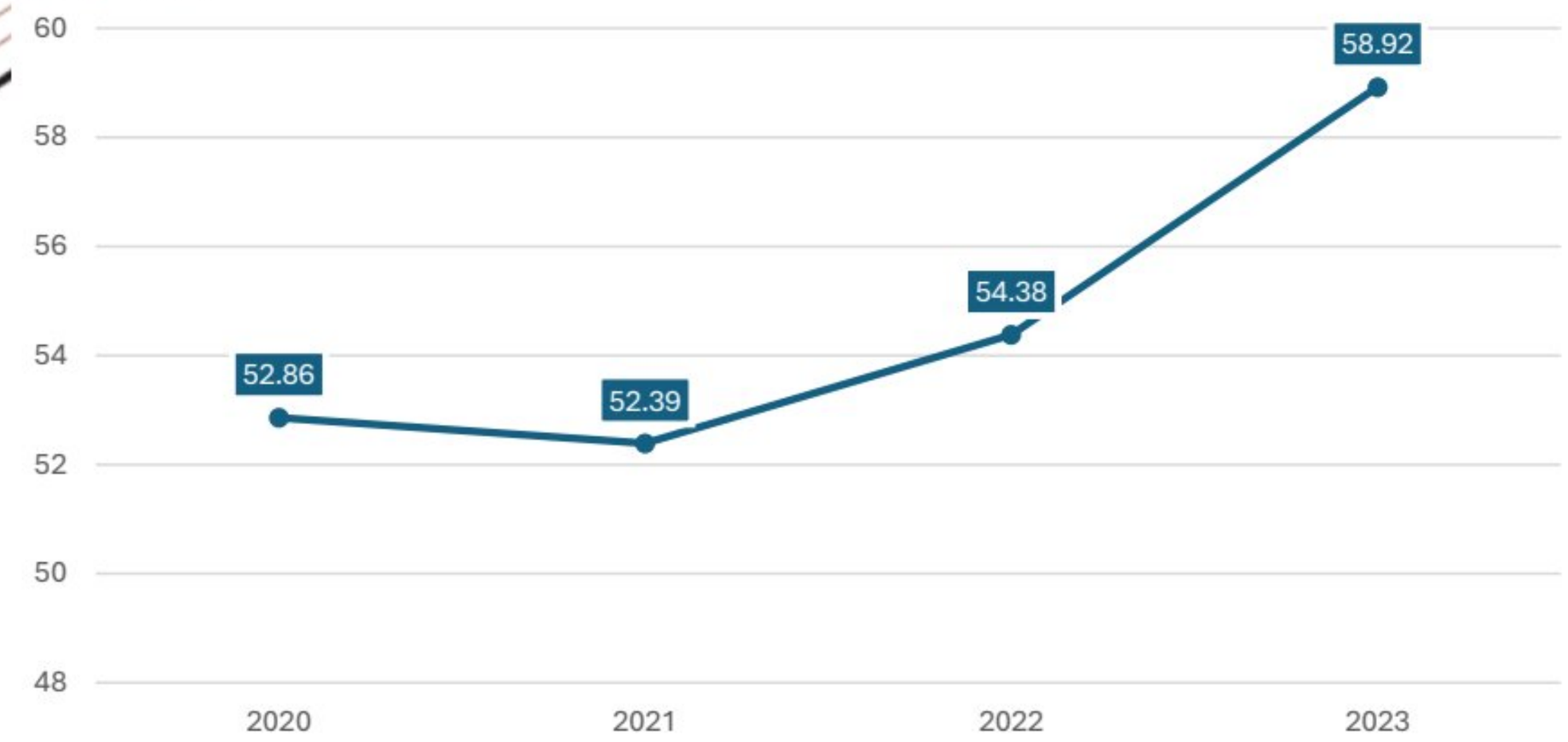

Sumber: Portal Satu Data Indonesia, 2025 (data termutakhir)

Gambar 2-52 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPK tercatat sebesar 52,86 dan sedikit menurun menjadi 52,39 pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelestarian dan pengembangan budaya, termasuk keterbatasan aktivitas budaya akibat pandemi. Namun, pada tahun 2022, IPK kembali mengalami peningkatan menjadi 54,38, dan melonjak cukup signifikan menjadi 58,92 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya kegiatan kebudayaan serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Peningkatan IPK ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

2.2.5.3 Seni Budaya

Sektor seni dan budaya memegang peranan strategis dalam memperkuat identitas daerah, memperkaya kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kreatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam konteks pembangunan daerah, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya perlu dilakukan secara terpadu melalui kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku seni, serta institusi pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya dukungan anggaran, fasilitas, serta ruang kreatif yang memadai guna menjamin kesinambungan ekosistem seni budaya yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tabel 2-15 Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jambi

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Manuskrip	106
2	Tradisi Lisan	355
3	Adat Istiadat	213
4	Ritus	208
5	Pengetahuan tradisional	587
6	Teknologi tradisional	251
7	Seni	607
8	Bahasa	80
9	Permainan rakyat	254
10	Olahraga tradisional	87
11	Cagar budaya	389

Sumber: PPKD Provinsi Jambi, 2025

Dalam rangka memajukan Objek Pemajuan Kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus menggali objek-objek tersebut serta memfasilitasi agar karya seni dan budaya Jambi mendapatkan pengakuan. Hasil penggalian objek-objek pemajuan kebudayaan tersebut tiap kabupaten/kota berbeda-beda jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor sejarah, kebijakan pelestarian yang diterapkan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya mereka. Guna memajukan seni budaya di Provinsi Jambi, maka ke depan program-program terkait internalisasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada generasi muda

Dipindai dengan CamScanner

harus dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi.

2.2.5.4 Olah Raga

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, olahraga merupakan salah satu faktor penunjang yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data tahun 2020–2022, fasilitas olahraga di Provinsi Jambi telah tersedia untuk berbagai cabang olahraga, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Ketersediaan sarana ini menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga serta mendukung pembinaan prestasi di tingkat daerah.

Tabel 2-16 Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

No	Cabang Olahraga	2022		2023*		2024*	
		Pemda	Pemda	Pemda	Swasta	Pemda	Swasta
1	Sepak Bola	19	230	19	230	19	230
2	Tenis	17	21	17	21	17	21
3	Bulu Tangkis	20	250	20	250	20	250
4	Bola Voli	122	326	122	326	122	326
5	Basket	11	44	11	44	11	44
6	Tenis Meja	15	57	15	57	15	57
7	Pencak Silat	10	16	10	16	10	16
8	Lap. Menembak	-	1	-	1	-	1
9	Angkat Besi	3	6	3	6	3	6
10	Senam	1	-	1	-	1	-
11	Kolam Renang	3	15	3	15	3	15
12	Taekwondo	1	3	1	3	1	3
13	Judo	1	2	1	2	1	2
14	Kempo	1	3	1	3	1	3
15	Gulat	2	2	2	2	2	2
16	Panjat Tebing	13	1	13	1	13	1
17	Golf	1	1	1	1	1	1
18	GOR	15	16	15	16	15	16
19	Dayung	8	3	8	3	8	3
20	Tinju	1	5	1	5	1	5
21	Sepak Takraw	3	31	3	31	3	31
22	Karate	3	5	3	5	3	5
23	Catur	2	3	2	3	2	3

Sumber: Dispora Provinsi Jambi, 2025

Dipindai dengan CamScanner

Selama ini cabang olah raga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 44 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun oleh Pihak swasta.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketiga aspek ini saling terkait dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan individu dan komunitas, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Penguatan institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, perlu disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, guna memastikan terciptanya ruang yang setara dan inklusif bagi seluruh warga. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender, serta pengembangan masyarakat yang inklusif perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, melalui kebijakan yang responsif, dukungan lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat.

2.2.6.1 Indeks Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan khusus terhadap anak merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Indeks Perlindungan Khusus Anak mencerminkan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan indeks ini menunjukkan efektivitas intervensi kebijakan yang menjamin hak-hak anak serta perlunya penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya standar perlindungan anak secara menyeluruh.

Dipindai dengan CamScanner

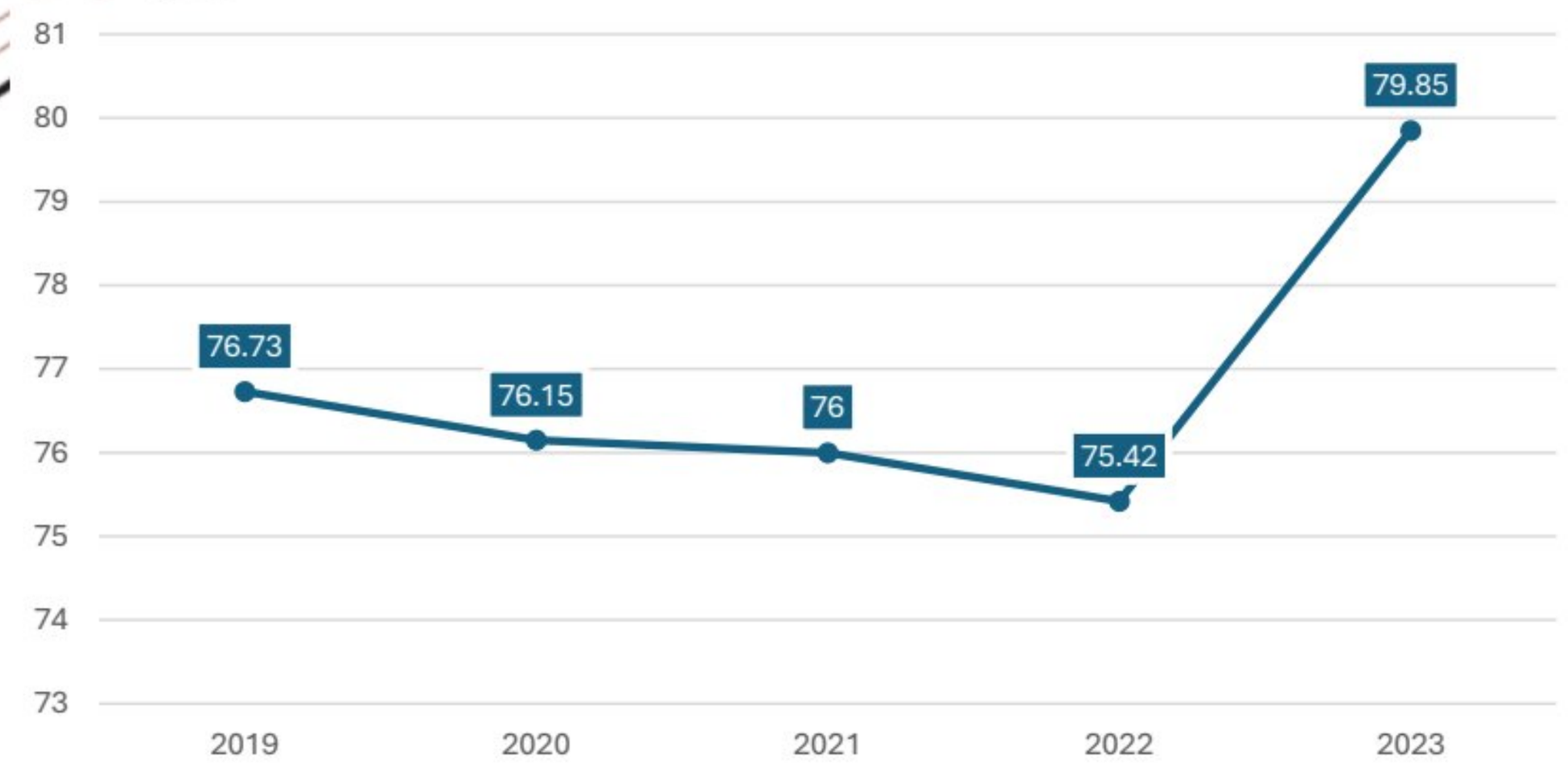

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir)

Gambar 2-53 Indeks Perlindungan Khusus Anak Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai IPKA tercatat sebesar 76,73 dan mengalami sedikit penurunan berturut-turut hingga mencapai angka 75,42 di tahun 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak, baik dari sisi kebijakan, pelayanan, maupun lingkungan sosial. Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan dengan nilai IPKA meningkat menjadi 79,85. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dan upaya nyata dalam memperkuat sistem perlindungan anak, seperti peningkatan layanan perlindungan, edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor.

2.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya secara lahir dan batin, sekaligus berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan daerah. Tujuan dari pembangunan keluarga adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, harmonis, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai fungsi sosialnya, seperti fungsi agama, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Dalam rangka

Dipindai dengan CamScanner

mengukur keberhasilan pembangunan keluarga, digunakan Indeks Kualitas Keluarga yang merupakan indikator komposit untuk menilai kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dari berbagai aspek. Indeks ini mencerminkan kemampuan keluarga dalam menjalankan perannya secara optimal, baik dari segi ketahanan ekonomi, keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, fungsi perlindungan dan pendidikan, hingga partisipasi aktif dalam lingkungan sosial.

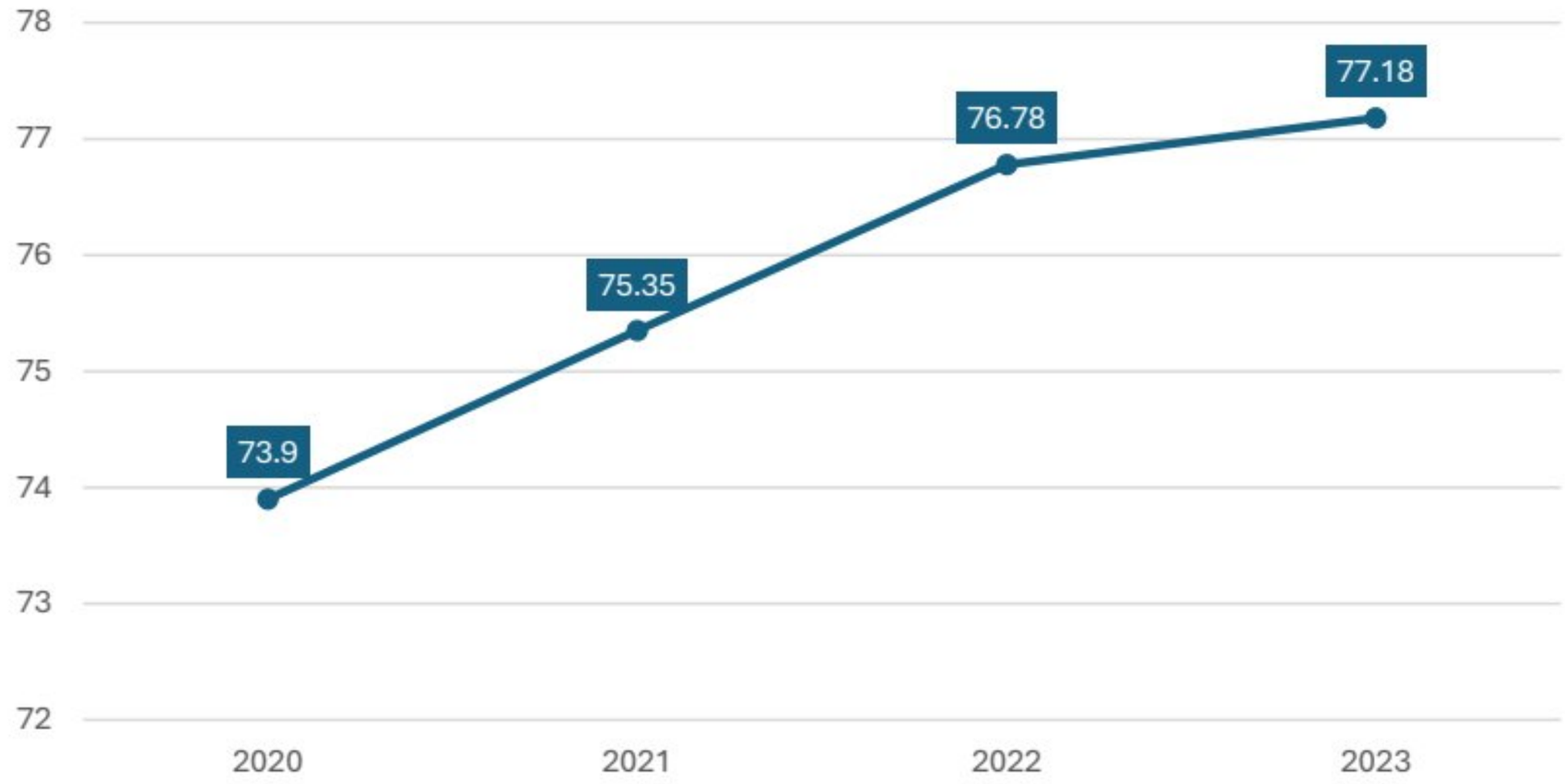

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-54 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020–2023. Pada tahun 2020, indeks kualitas keluarga tercatat sebesar 73,9, kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,35 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian indeks sebesar 76,78, dan kembali meningkat menjadi 77,18 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kesejahteraan keluarga, termasuk kesehatan, pendidikan, ketahanan ekonomi, serta keharmonisan relasi antaranggota keluarga. Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan layanan dasar, dan penguatan fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung upaya pembangunan sumber daya

Dipindai dengan CamScanner

manusia yang berkualitas, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tingkat keluarga sebagai basis ketangguhan daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kehidupan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. IKG mencerminkan keberhasilan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan akses dan kesempatan antara kedua gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Upaya penurunan nilai IKG perlu diakselerasi melalui penguatan kebijakan responsif gender yang terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah.

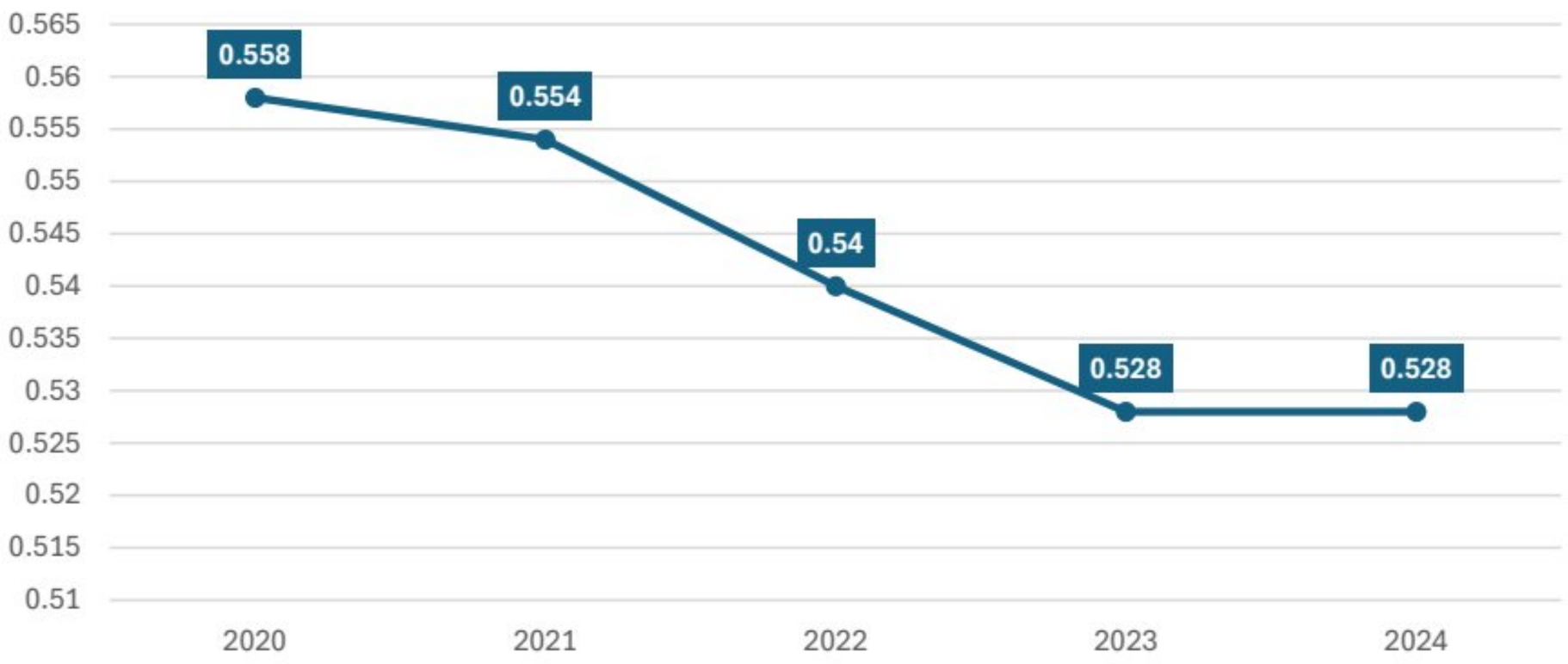

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Tahun 2025
Gambar 2-55 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,558 dan mengalami penurunan menjadi 0,554 pada tahun 2021. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 0,54, kemudian kembali menurun menjadi 0,528 pada tahun 2023 hingga stagnan di tahun 2024. Tren penurunan IKG ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih baik dalam mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun partisipasi sosial.

Dipindai dengan CamScanner

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang memperhatikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan dapat menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki. Nilai IPG dinyatakan dalam persentase dengan nilai semakin mendekati 100% menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang semakin tinggi. Sebaliknya nilai yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan.

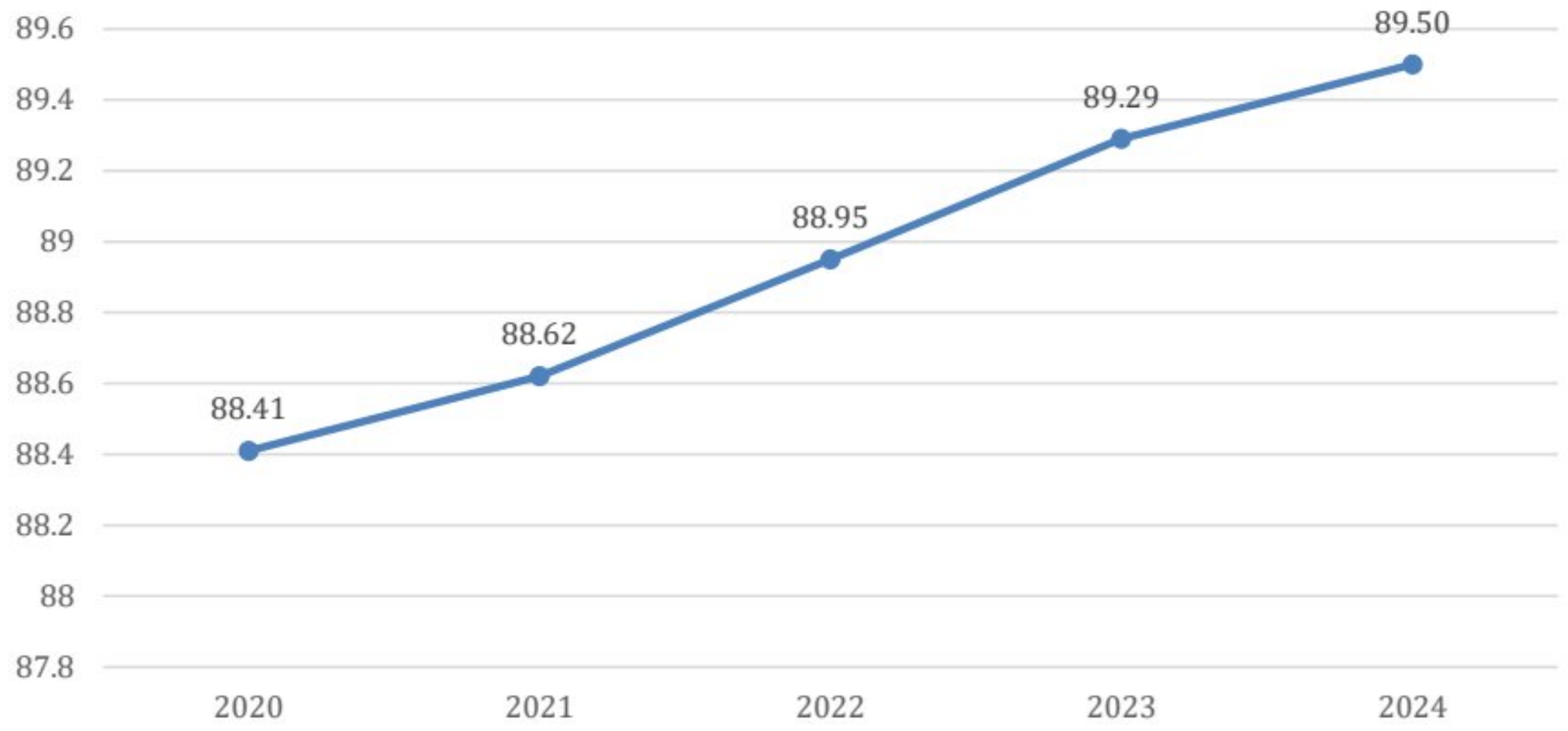

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-56 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Nilai IPG mengalami kenaikan dari 88,41 persen pada tahun 2020 menjadi 89,50 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kenaikan IPG secara bertahap menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang responsif gender telah memberikan hasil yang positif. Nilai IPG yang mendekati angka 90 persen menunjukkan bahwa perempuan di Provinsi Jambi semakin memperoleh akses dan kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur yang menggambarkan seberapa baik kualitas hidup pemuda di suatu daerah, dengan menilai seberapa besar mereka dapat mengakses pendidikan, kesempatan ekonomi, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. IPP mengukur keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan serta sejauh mana mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pemuda. Peningkatan IPP memerlukan komitmen kebijakan yang konsisten untuk memperluas ruang partisipasi, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi generasi muda secara berkelanjutan.

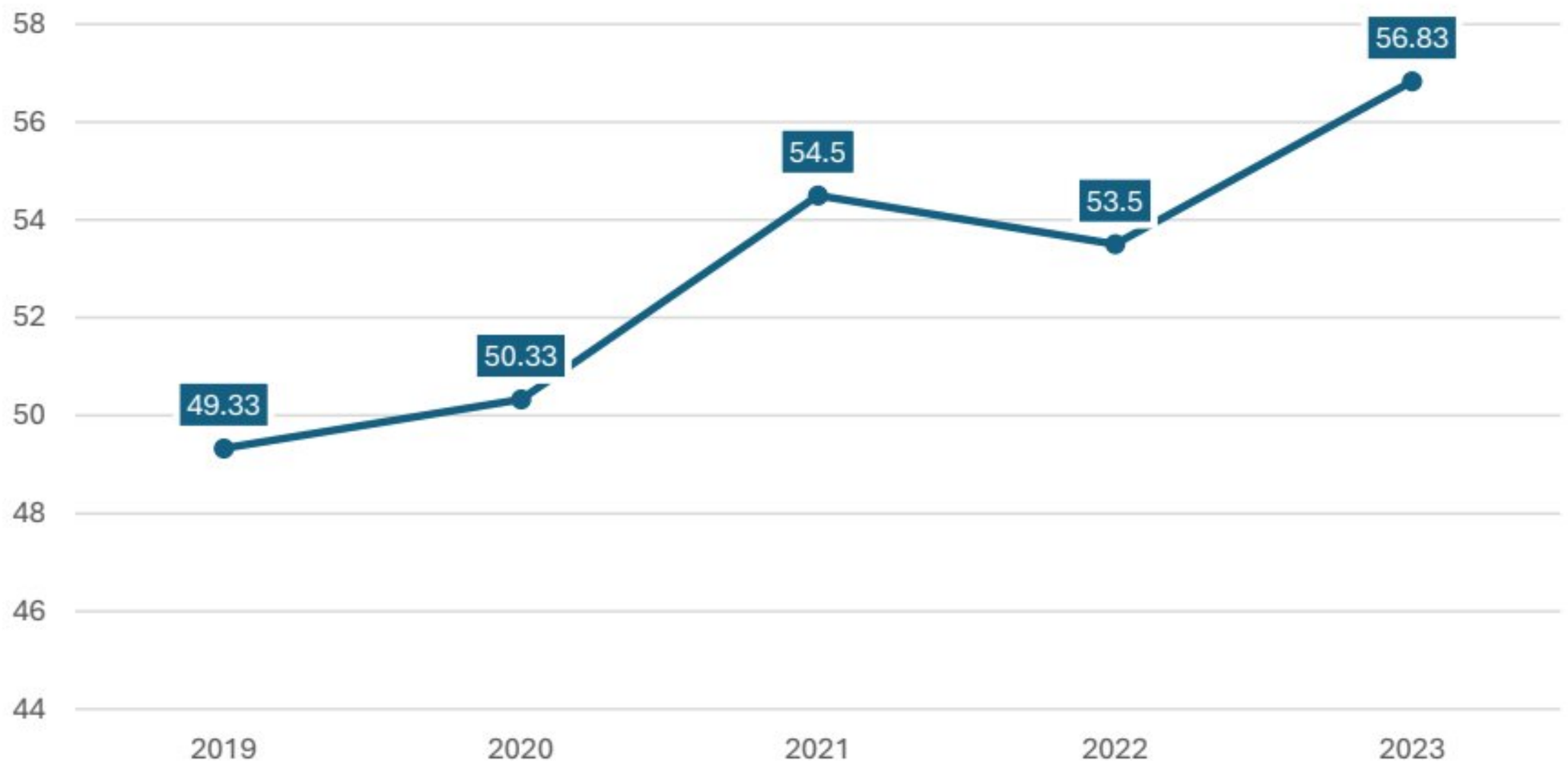

Sumber: Kementrian Olahraga dan Pemuda, 2025 (data termutakhir)

Gambar 2-57 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPP tercatat sebesar 49,33, dan terus meningkat menjadi 56,83 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Kenaikan yang terjadi secara bertahap ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam memberdayakan pemuda dan memberikan mereka akses yang lebih luas terhadap peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Meskipun terdapat sedikit

Dipindai dengan CamScanner

penurunan pada tahun 2022, peningkatan pada tahun 2023 kembali mengindikasikan keberhasilan program-program yang mendukung pembangunan pemuda di Provinsi Jambi.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks Provinsi Jambi, penguatan daya saing menjadi landasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemetaan aspek daya saing daerah diperlukan guna mengidentifikasi posisi relatif Provinsi Jambi terhadap provinsi lain, serta untuk merumuskan strategi pembangunan yang responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam konteks Provinsi Jambi, pengembangan kualitas SDM menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta kesiapan menghadapi dinamika perubahan global. Oleh karena itu, pemetaan daya saing SDM diperlukan guna mengidentifikasi kondisi aktual, tantangan struktural, serta potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan SDM yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan daerah.

2.3.1.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang menggambarkan besarnya beban penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin rendah nilai rasio ini, maka semakin ringan beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Rasio ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia, karena mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam mengelola potensi produktif sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok usia yang belum atau tidak lagi bekerja.

Dipindai dengan CamScanner

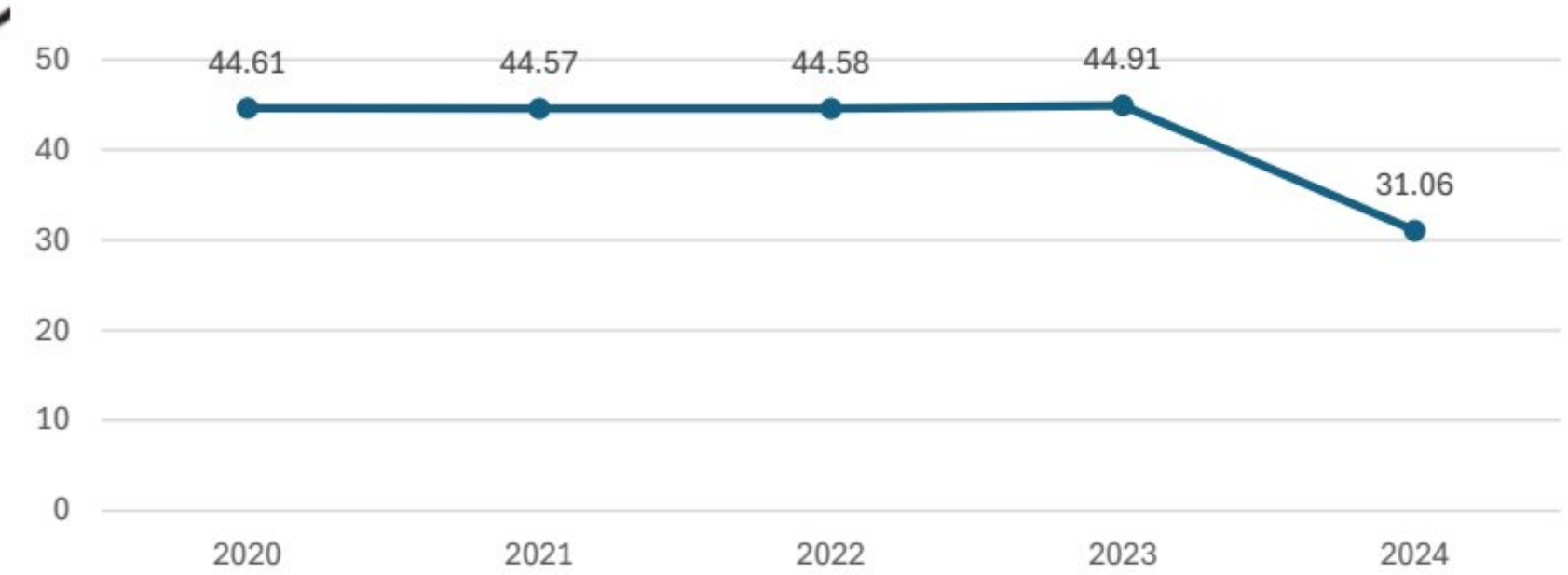

Sumber: JDA 2025, 2025 dan Data diolah

Gambar 2-58 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2023, rasio ketergantungan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, dengan nilai berturut-turut sebesar 44,61 pada tahun 2020, 44,57 pada tahun 2021, 44,58 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 44,91 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yakni menjadi 31,06. Penurunan tajam ini mengindikasikan perbaikan struktur penduduk, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan dengan kelompok usia tidak produktif. Perubahan ini dapat mencerminkan hasil dari kebijakan pembangunan yang berhasil mendorong pertumbuhan penduduk usia kerja atau menurunkan angka ketergantungan, dan sekaligus membuka peluang bagi pemanfaatan bonus demografi secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan faktor krusial dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Jambi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan ekosistem inovasi menjadi pendorong utama untuk meningkatkan efisiensi produksi, diversifikasi ekonomi, dan nilai tambah sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, pengukuran terhadap tingkat inovasi, kemampuan adaptasi teknologi, dan produktivitas tenaga kerja perlu dilakukan secara menyeluruh guna mengidentifikasi

Dipindai dengan CamScanner

hambatan struktural serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan berorientasi pada peningkatan daya saing regional.

2.3.2.1 Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta menciptakan lapangan kerja. Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana sektor ini berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

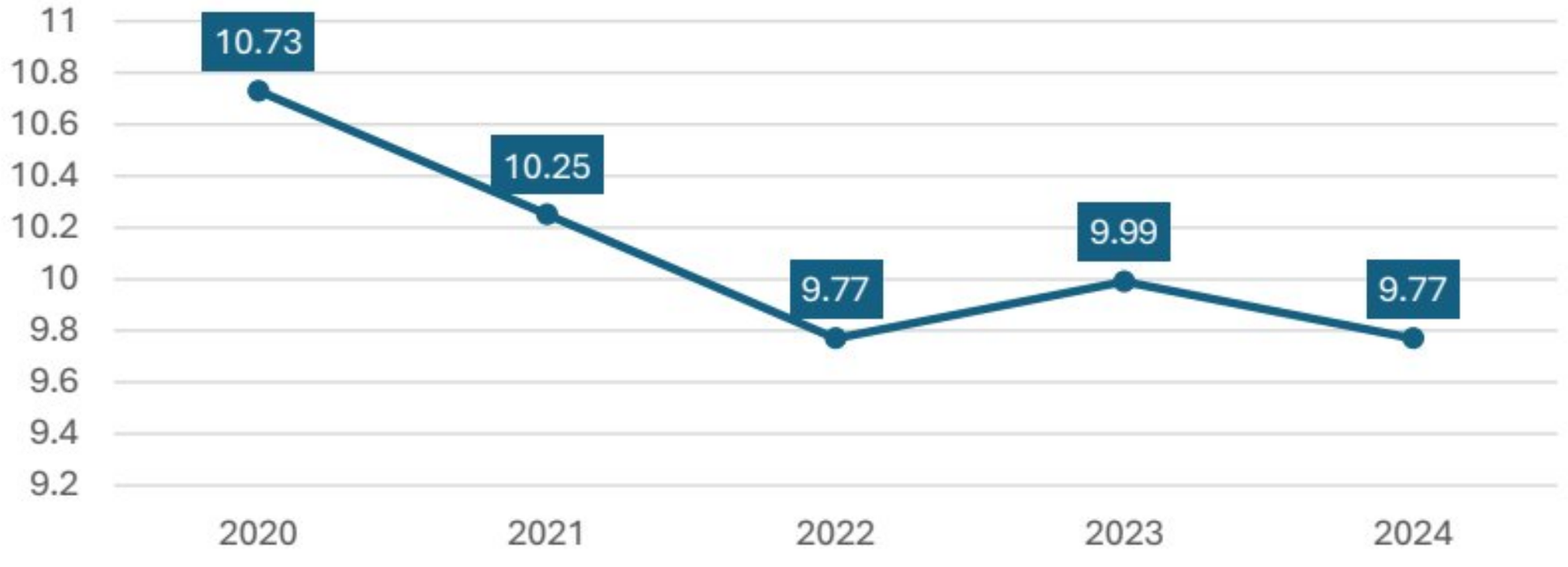

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-59 Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menunjukkan hasil capaian yang menurun. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 10,73% terhadap PDRB, namun mengalami penurunan berturut-turut menjadi 10,25% pada 2021 dan 9,77% pada 2022. Meskipun sempat mengalami peningkatan menjadi 9,99% di tahun 2023, angka ini kembali turun ke 9,77% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Jambi, baik dari sisi produktivitas, investasi, maupun daya saing. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi revitalisasi sektor industri pengolahan, termasuk penguatan kemitraan industri dengan UMKM, insentif investasi, dan peningkatan kapasitas SDM agar sektor

Dipindai dengan CamScanner

ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.2 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Penyediaan akomodasi dan makan minum adalah salah satu subsektor dalam lapangan usaha jasa yang mencakup kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan penginapan (seperti hotel, motel, losmen, wisma, dan sejenisnya) serta penyediaan makanan dan minuman (seperti restoran, rumah makan, kafe, warung, katering, dan usaha sejenis lainnya) kepada masyarakat umum, baik untuk keperluan konsumsi pribadi maupun kegiatan pariwisata dan bisnis. Secara umum, sektor ini berperan penting dalam mendukung industri pariwisata, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan perkembangan destinasi wisata di Provinsi Jambi, subsektor ini memiliki potensi strategis untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan usaha, serta integrasi dengan sektor-sektor pendukung lainnya dalam rangka memperluas kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

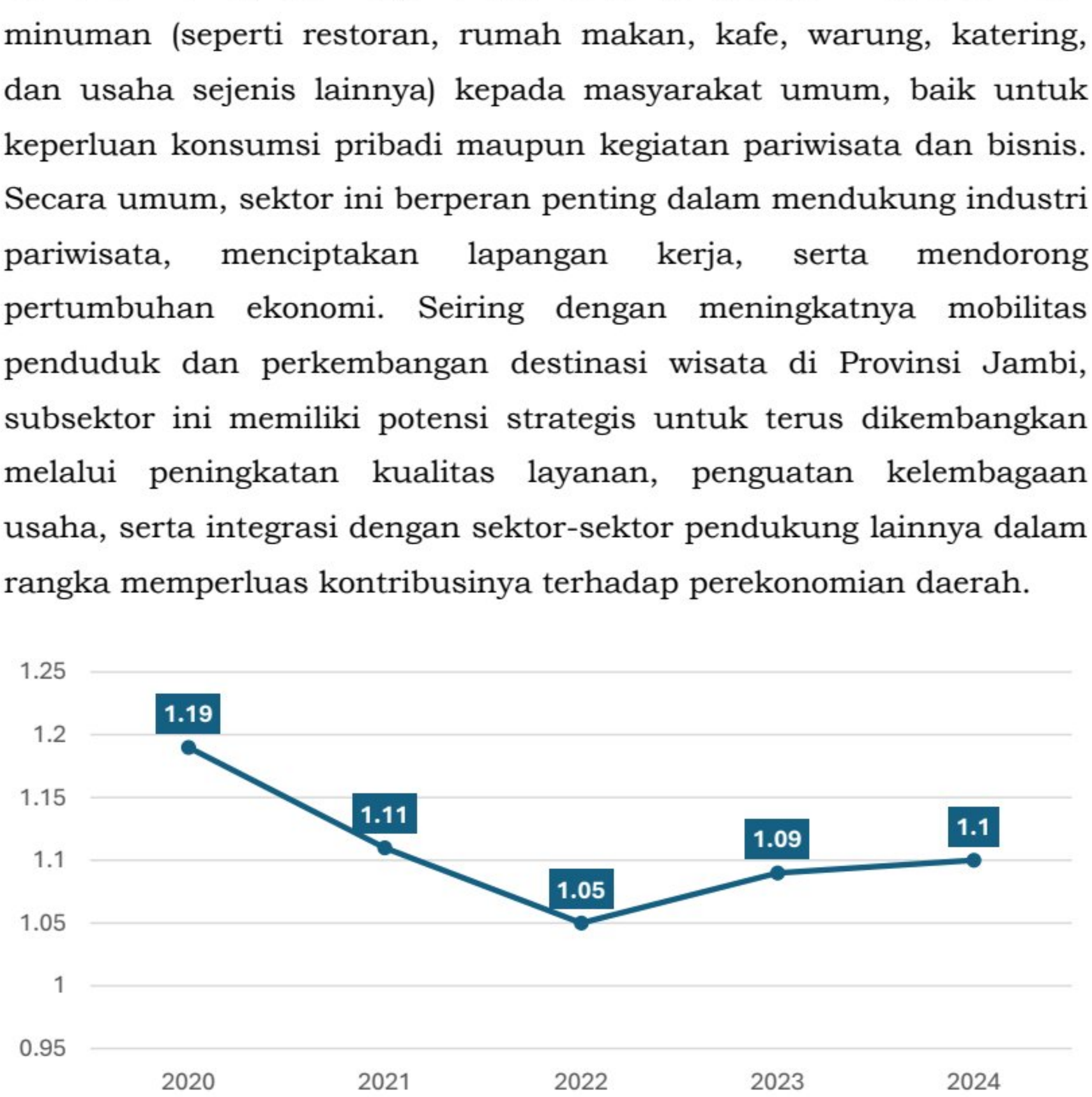

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025.

Gambar 2-60 Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rasio sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio sektor ini tercatat sebesar 1,19

Dipindai dengan CamScanner

persen, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 1,11 persen pada tahun 2021 dan 1,05 persen pada tahun 2022. Penurunan ini diduga kuat merupakan dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat dan pariwisata akibat pandemi *Covid-19*, yang secara langsung mempengaruhi permintaan terhadap jasa akomodasi dan makanan-minuman. Namun demikian, mulai tahun 2023 terjadi pemulihan dengan peningkatan rasio menjadi 1,09 persen dan kembali naik menjadi 1,10 persen pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat, serta menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali memperoleh peran dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas) dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka). TPAK memberikan gambaran sejauh mana penduduk usia kerja terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.

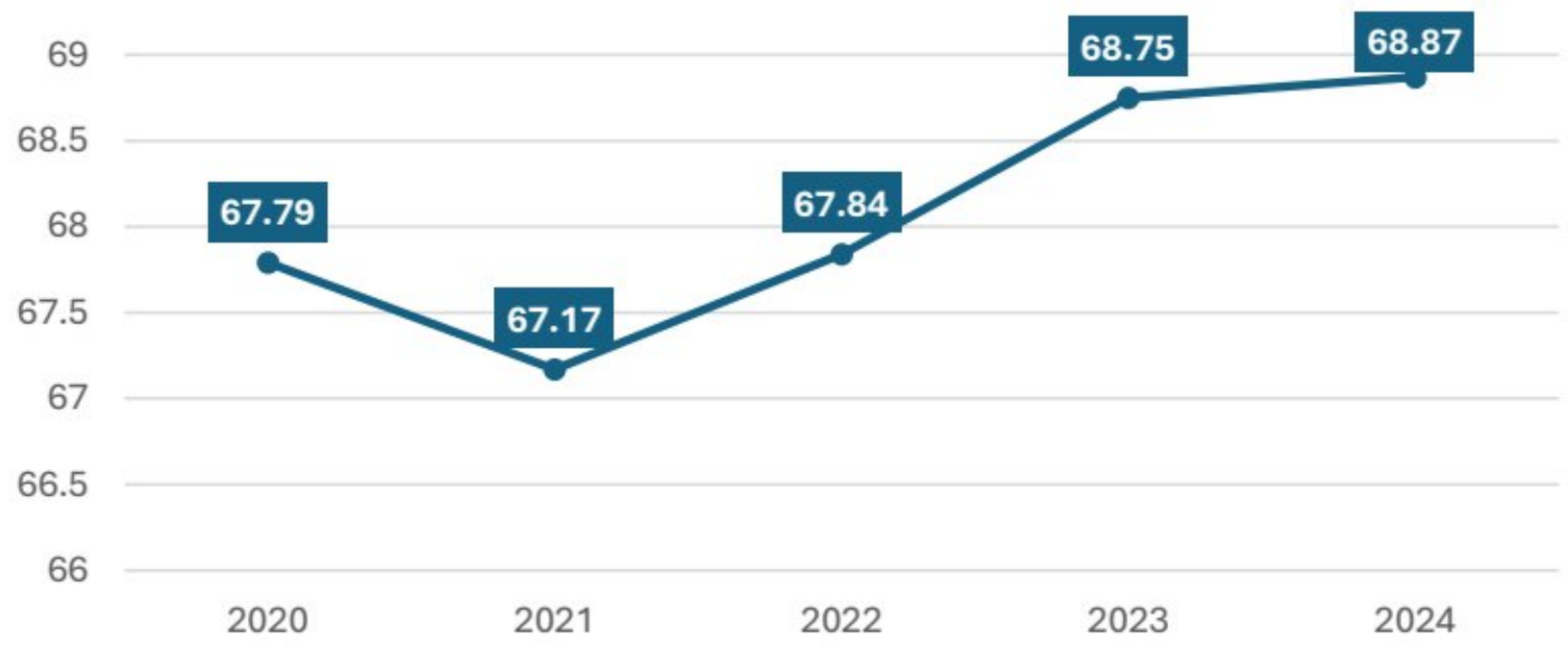

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 terlihat adanya fluktuasi namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, TPAK tercatat

Dipindai dengan CamScanner

sebesar 67,79 persen dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 67,17 persen. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan gangguan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Namun, mulai tahun 2022 nilai TPAK kembali meningkat menjadi 67,84 persen dan terus meningkat hingga mencapai 68,87 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan keberhasilan kebijakan daerah dalam mendorong keterlibatan penduduk usia kerja ke dalam pasar tenaga kerja.

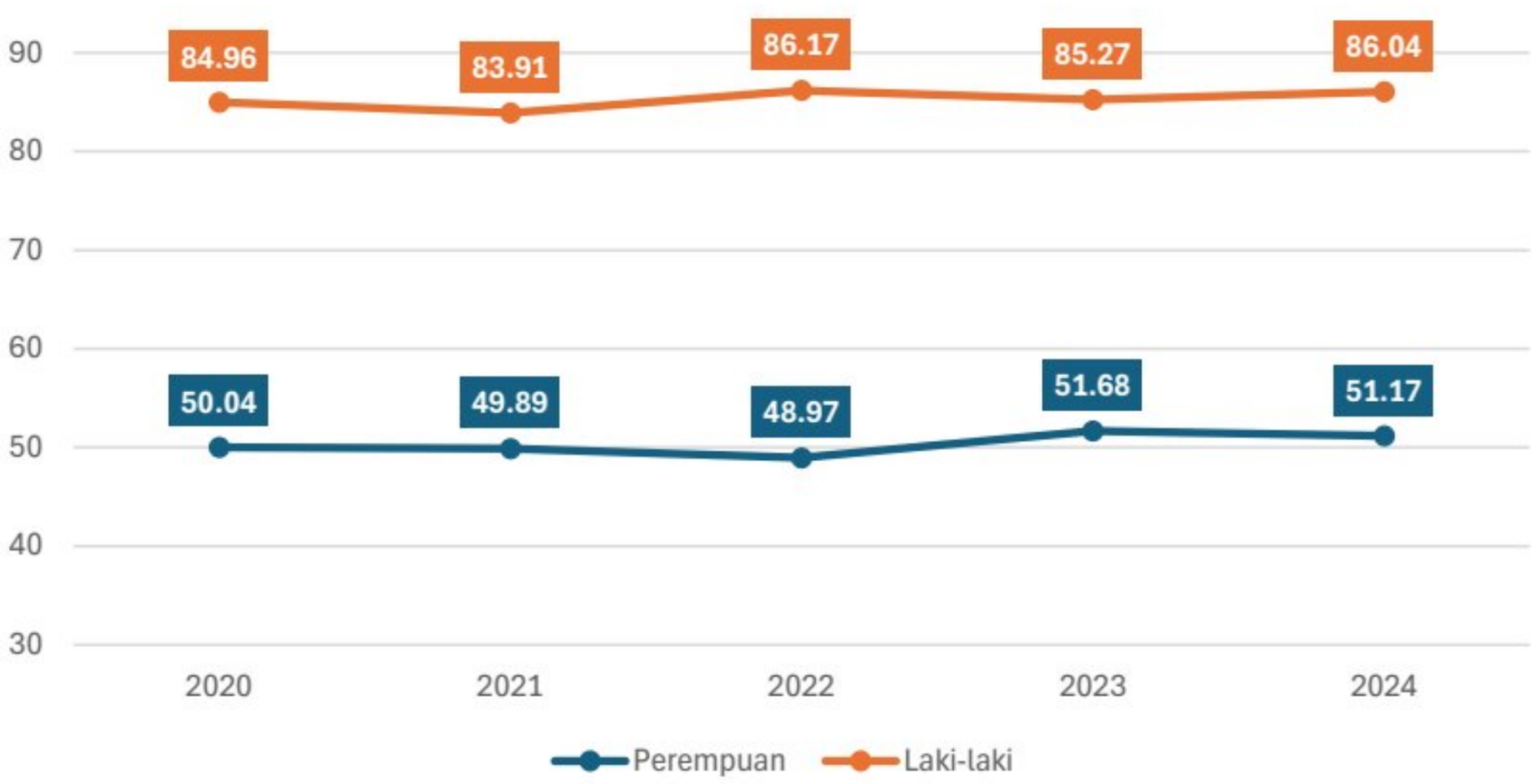

Sumber: BPS Prov. Jambi, 2025
Gambar 2-62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pasar kerja. Selama lima tahun terakhir, TPAK laki-laki berada pada kisaran 83,91 persen hingga 86,17 persen dengan tren yang relatif stabil, sedangkan TPAK perempuan jauh lebih rendah, yaitu di kisaran 48,97 persen hingga 51,68 persen. Meskipun TPAK perempuan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023, kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan terpaut jauh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi formal dan informal masih terbatas, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor sosial-budaya, beban kerja

Dipindai dengan CamScanner

domestik, dan akses yang belum merata terhadap peluang kerja produktif. Ketimpangan ini berpotensi menghambat optimalisasi bonus demografi di Provinsi Jambi, karena sebagian besar potensi tenaga kerja perempuan belum sepenuhnya diberdayakan.

Tabel 2-17 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan Utama	2020		2021		2022		2023		2024	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Berusaha Sendiri	283.943	134.319	254.974	125.462	293.383	147.164	293.481	161.604	282.247	153.762
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	172.023	67.563	187.214	67.307	177.824	56.491	165.287	63.888	175.792	65.960
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	61.480	11.339	64.657	11.137	77.785	12.747	75.953	14.190	85.504	15.613
Bruuh/Karyawan/Pegawai	389.569	185.646	390.725	197.045	431.814	197.097	423.089	212.559	453.669	208.712
Pekerja bebas	136.502	39.712	87.107	31.420	116.184	29.644	78.114	22.457	123.549	25.978
Pekerja keluarga/tak dibayar	72.364	184.543	63.072	8.281	64.327	193.159	46.686	6.006	63.635	178.846
Total	1.115.881	623.122	1.047.749	440.652	1.161.317	636.502	1.082.610	480.704	1.184.396	648.871

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025.

Partisipasi perempuan yang rendah dapat terlihat pada tabel di atas yang menunjukkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama. Selama tahun 2020 hingga 2024, struktur ketenagakerjaan Provinsi Jambi didominasi oleh kategori buruh/karyawan/pegawai, diikuti berusaha sendiri, dengan komposisi pekerjaan keluarga/tidak dibayar yang secara signifikan lebih tinggi di kalangan perempuan. Pekerja laki-laki mendominasi hampir semua kategori berbayar—khususnya buruh/karyawan/pegawai (453.669 orang di 2024) dan wirausaha sendiri (282.247 orang)—sementara perempuan mendominasi kategori pekerja keluarga/tidak dibayar (178.846 orang di 2024),

Dipindai dengan CamScanner

mencerminkan ketimpangan akses terhadap pekerjaan formal berupah. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun pekerja perempuan terus meningkat dalam sektor formal, dominasi mereka dalam pekerjaan tanpa upah dan informal masih tinggi yang kemungkinan disebabkan rendahnya akses terhadap pelatihan dan modal, serta nilai sosial-budaya yang menempatkan perempuan di ranah domestik. Dengan demikian, penguatan kebijakan seperti pelatihan vokasi gender, akses terhadap modal usaha, dan pembagian peran domestik dalam keluarga sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di Jambi.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi menjadi salah satu pilar strategis yang tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kapasitas inovatif suatu pemerintah daerah adalah Indeks Inovasi Daerah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan maupun program yang inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui pengukuran ini, dapat diidentifikasi tingkat kinerja daerah dalam menerapkan inovasi yang berdampak langsung terhadap efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2-18 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	5.244 (Sangat Inovatif)	61,03 (Inovatif)	50,45 (Inovatif)	37,91 (Inovatif)	58,59 (Inovatif)

Sumber: SK Kepmendagri Tahun 2021-2025.

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks inovasi daerah Provinsi Jambi tercatat sebesar 5,244 yang dikategorikan sebagai ”Sangat Inovatif”. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, nilai

Dipindai dengan CamScanner

indeks mengalami fluktuasi, yakni meningkat signifikan menjadi 61,03 pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 50,45 pada tahun 2022, dan terus menurun hingga 37,91 pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi pemulihan dengan peningkatan indeks menjadi 58,59 dan seluruh capaian dari tahun 2021 hingga 2024 berada dalam kategori Inovatif. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kapasitas inovatif pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja inovasi secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan terintegrasi, termasuk penguatan kelembagaan inovasi dan pengembangan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

2.3.2.5 Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2020-2024 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rata-rata proporsi pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi pangan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non-pangan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Proporsi konsumsi pangan berada pada kisaran 50–53 persen, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2022 dan 2024 sebesar 52,54 persen. Sementara itu, konsumsi non-pangan berkisar antara 47–49 persen, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 49,38 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga

Dipindai dengan CamScanner

kelompok makanan tetap menjadi komponen pengeluaran utama di Provinsi Jambi selama periode tersebut.

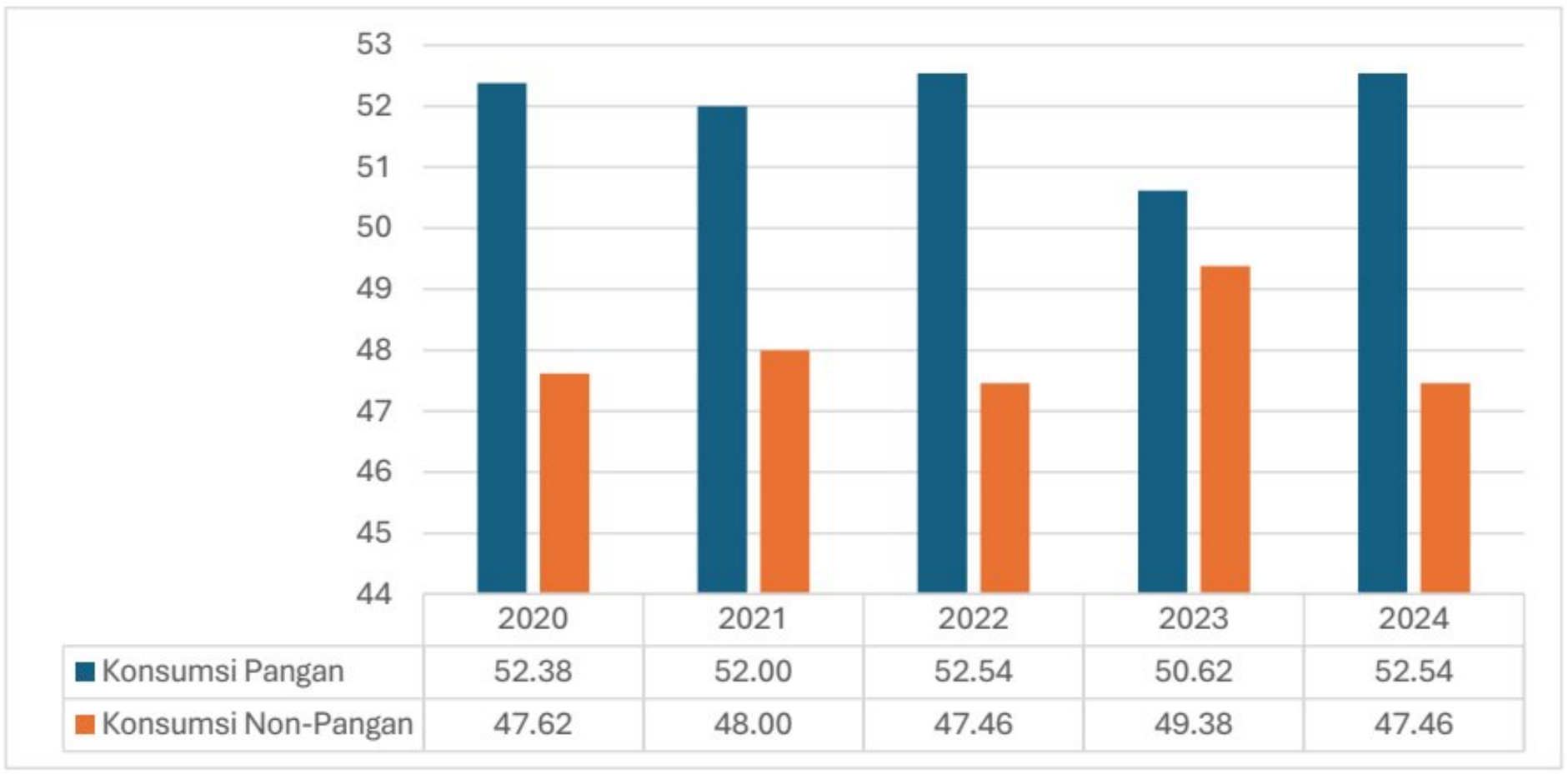

	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Pangan	52.38	52.00	52.54	50.62	52.54
Konsumsi Non-Pangan	47.62	48.00	47.46	49.38	47.46

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-63 Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Perubahan pola konsumsi ini dapat mencerminkan dinamika daya beli dan perubahan prioritas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat kebutuhan dasar maupun kebutuhan penunjang. Stabilnya proporsi konsumsi pangan mengindikasikan bahwa masyarakat masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok, sementara peningkatan konsumsi non-pangan pada tahun-tahun tertentu dapat dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap layanan dan barang sekunder, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hal ini tercermin dari data tahun 2020 hingga 2024, di mana proporsi konsumsi pangan cenderung stabil di kisaran 52 persen, sementara konsumsi non-pangan menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan respon masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketersediaan layanan penunjang.

2.3.2.6 Nilai Tukar Petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan tukar petani melalui perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). NTP secara langsung mencerminkan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen, mengingat Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menempati posisi

Dipindai dengan CamScanner

pembilang dalam rumus perhitungan. Apabila terjadi kenaikan harga komoditas pertanian, dengan asumsi volume produksi tetap, maka pendapatan petani dari hasil panen akan meningkat. Dengan demikian, perkembangan nilai It menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan petani dari sisi pendapatan. Petani juga berperan sebagai konsumen dan produsen yang dihadapkan pada pilihan alokasi pendapatan untuk dua kebutuhan utama. Pertama, pengeluaran untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga petani. Kedua, pengeluaran untuk kegiatan produksi atau budidaya pertanian, yang mencakup biaya operasional serta investasi dalam bentuk pembentukan barang modal. Pemenuhan kebutuhan konsumsi menjadi prioritas utama; oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan investasi hanya dapat dicapai apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi. Dengan demikian, investasi dalam kegiatan produksi menjadi salah satu faktor penentu penting dalam peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

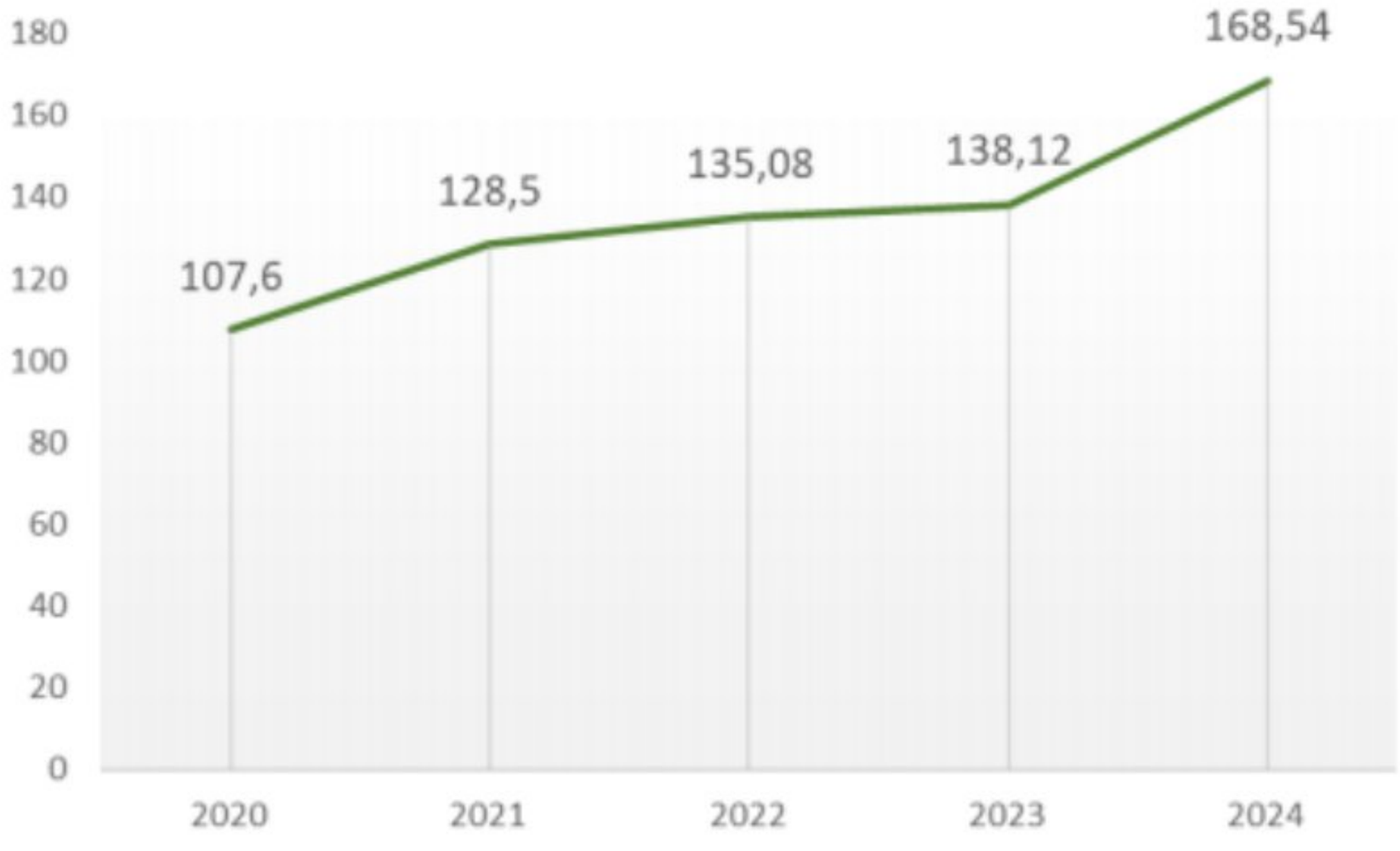

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-64 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2020- 2024

.

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2018-2024 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor tanaman

Dipindai dengan CamScanner

perkebunan dan perikanan, yang disebabkan karena adanya perbaikan harga komoditas TBS dan harga bokar, serta adanya inflasi pada beberapa komoditas ikan. Perbaikan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam konteks Provinsi Jambi, implementasi konsep ini menjadi penting untuk menjawab tantangan degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan, pertanian, kelautan, dan perairan darat. Oleh karena itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi yang rendah emisi, efisien dalam penggunaan sumber daya, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses perubahan mendalam dari cara organisasi atau wilayah menggunakan teknologi digital untuk menggantikan atau memperbaiki metode tradisional dalam beroperasi, berinteraksi, dan memberikan layanan. Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendigitalisasi berbagai aspek kehidupan, seperti layanan publik, sektor bisnis, pendidikan, dan sektor kesehatan. Dalam konteks pembangunan daerah, transformasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan data.

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Jambi memiliki perolehan skor Indeks Transformasi Digital Nasional Nasional (TDN) sebesar 42,30 dan tergolong ke dalam klasifikasi C (Cukup). Meskipun sempat mengalami penurunan nilai indeks di tahun 2019, namun Provinsi Jambi menunjukkan adanya perbaikan transformasi digital khususnya pada seluruh pilar dengan peningkatan nilai Indeks sampai tahun 2022.

Jika dianalisis berdasarkan pilar, seluruh pilar pembangunan digital pada Provinsi Jambi masih berada dalam klasifikasi C (Cukup), sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transformasi digital di berbagai sektor. Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut, pilar jaringan dan infrastruktur selalu mengalami perbaikan kondisi setiap tahunnya dan merupakan pilar dengan perolehan skor yang paling baik dibandingkan pilar-pilar lainnya di Provinsi Jambi pada tahun 2022, yaitu sebesar 48,18. Hasil pada pilar ini didorong oleh penetrasi jaringan 4G yang sudah menjangkau 75% area Jambi serta adanya inklusivitas antar gender dalam mengakses internet dan smartphone. Namun di sisi lain, untuk dapat mengoptimalkan penggunaan internet, Provinsi Jambi masih perlu untuk mendorong peningkatan rata-rata kecepatan unduh atau download speed guna memfasilitasi akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 telah mencatat sekitar 63,09% (1000 dari 1585) Desa/Kelurahan di wilayah Jambi masih termasuk dalam daerah sinyal lemah/blankspot. Pada sektor layanan kesehatan, berdasarkan data dari Kemenkes, 95,17% (197 dari 207) puskesmas di wilayah Jambi sudah terfasilitasi akses internet. Kemudian di sektor layanan pendidikan, berdasarkan data dari Kemendikdasmen sebanyak 77,42% (2787 dari 3600) telah memiliki fasilitas akses internet.

Selanjutnya, pilar masyarakat juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2018, dimana pada tahun 2022 skornya mencapai 47,21. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan dalam hal literasi digital dan kemampuan digital masyarakat di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, masih terdapat banyak ruang untuk dapat lebih mendorong penciptaan talenta digital yang unggul melalui pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan digital

Dipindai dengan CamScanner

tingkat dasar dan menengah serta memperluas akses pendidikan yang berorientasi pada teknologi digital bagi seluruh kelompok masyarakat.

Digitalisasi pada sektor bisnis dan pemerintah juga perlu didorong lebih lanjut. Pada pilar bisnis, masih ditemukan pelaku usaha yang belum melakukan shifting model bisnis dengan mengadopsi teknologi digital, dapat dilihat melalui skor indikator adopsi pembayaran digital dan pemanfaatan teknologi digital di dalam bisnis yang masih rendah. Selain itu, pertumbuhan kemampuan riset dan inovasi Provinsi Jambi juga perlu terus ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital di wilayahnya. Selanjutnya, pada pilar pemerintah, indikator e-government index, online service index, dan e-participation index masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada tata kelola pemerintahan digital dan penerapan kebijakan yang adaptif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan pembangunan digital yang berkelanjutan.

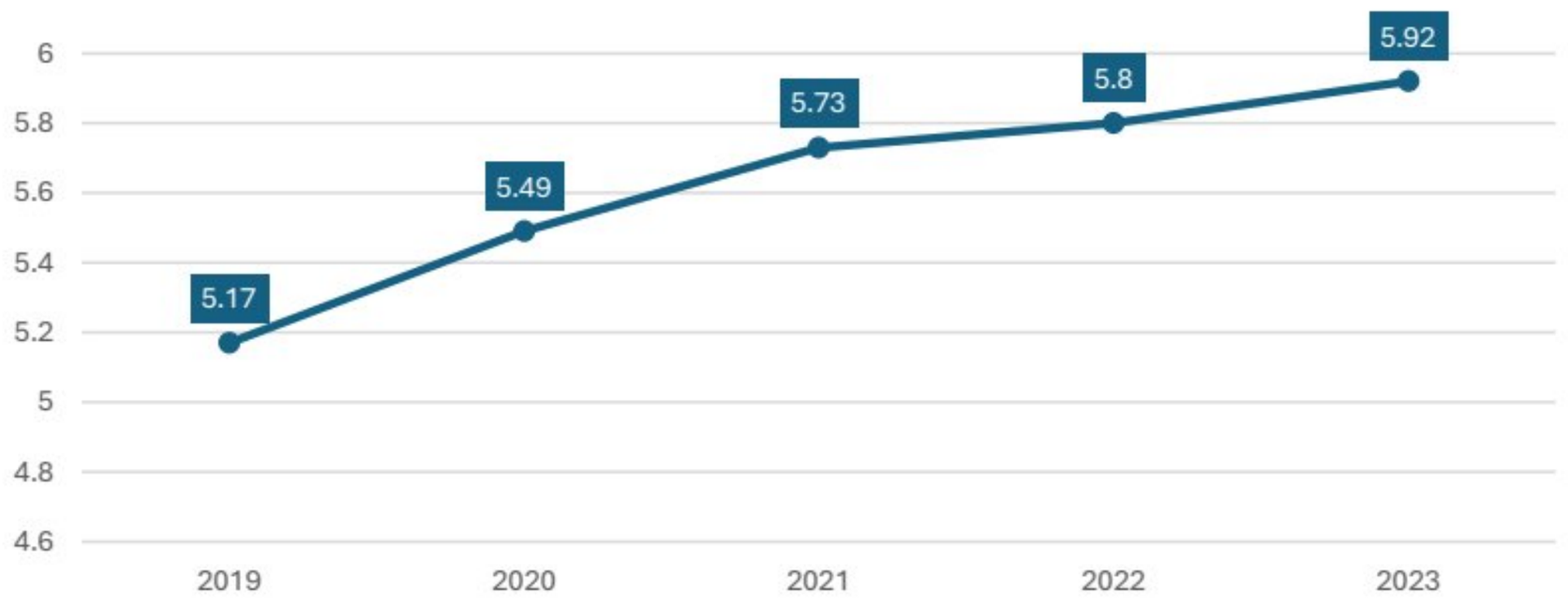

Sumber: BPS Indonesia, 2025 (data termutakhir)

Gambar 2-65 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tahun 2019–2023. Pada tahun 2019, IP-TIK Provinsi Jambi tercatat sebesar 5,17 dan mengalami peningkatan menjadi 5,49 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IP-TIK Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 5,73 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 5,92. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur TIK,

Dipindai dengan CamScanner

peningkatan kapasitas digital masyarakat, serta perluasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital daerah yang berkelanjutan serta penguatan daya saing ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah, kemajuan TIK juga berperan sebagai enabler dalam peningkatan efisiensi layanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, serta integrasi ekonomi digital secara lebih luas.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi hal yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan semakin terbukanya pasar internasional, daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada untuk dapat bersaing secara global. Integrasi ini memungkinkan daerah untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di luar negeri. Selain itu, perkembangan ekonomi global yang semakin terhubung memerlukan adaptasi dari daerah agar mampu berkompetisi dengan wilayah lain di dunia. Daya saing daerah tidak hanya diukur dari potensi ekonomi lokal, tetapi juga kemampuannya untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan ekonomi global.

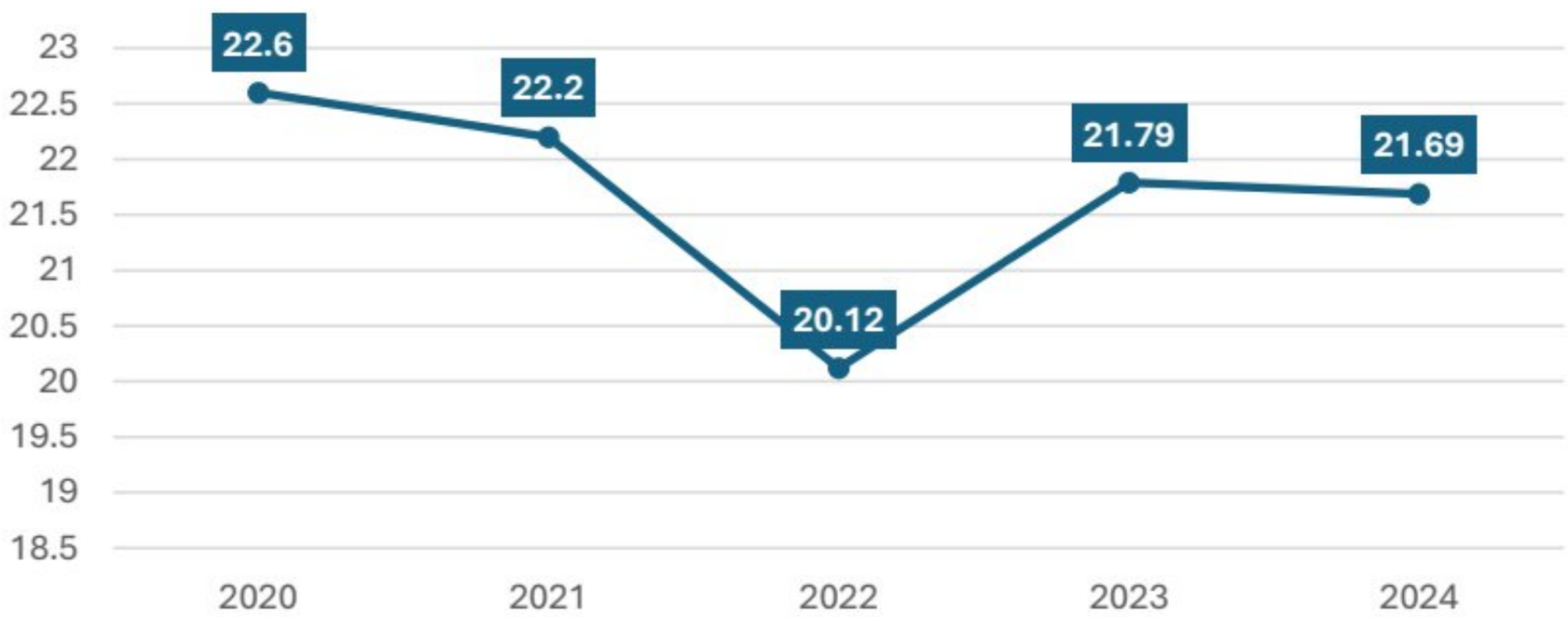

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-66 Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas memperlihatkan Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam

Dipindai dengan CamScanner

kontribusi PMTB terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020, kontribusi PMTB tercatat sebesar 22,6 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 22,2 persen pada tahun 2021. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 20,12 persen, yang diduga sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global serta penyesuaian aktivitas investasi di tingkat daerah. Namun demikian, pada tahun 2023 terdapat tren pemulihan dengan peningkatan kontribusi menjadi 21,79 persen, meskipun kembali mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 menjadi 21,69 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan iklim investasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur, masih diperlukan kebijakan yang lebih strategis dan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu terus mengoptimalkan peran sektor prioritas serta memperkuat integrasi antara ekonomi domestik dan global guna meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional maupun internasional.

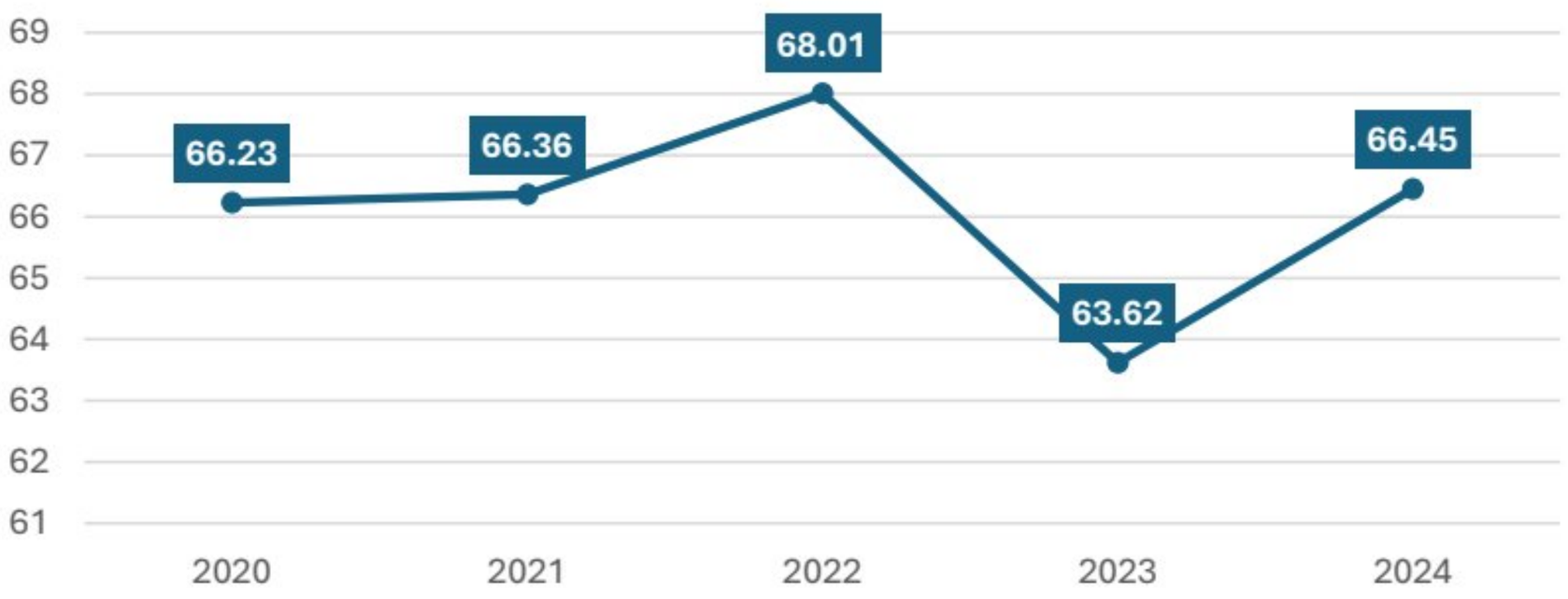

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-67 Distribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

.

Distribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, distribusi ekspor tercatat sebesar 66,23 persen dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 66,36 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kontribusi ekspor terhadap PDRB mencapai sebesar 68,01 persen, yang mencerminkan optimalisasi kinerja

Dipindai dengan CamScanner

perdagangan luar negeri seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi global. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut mengalami penurunan cukup tajam menjadi 63,62 persen akibat berbagai tantangan eksternal seperti penurunan permintaan pasar global dan fluktuasi harga komoditas unggulan daerah. Meski demikian, pada tahun 2024, kontribusi ekspor kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 66,45 persen. Dinamika ini menggambarkan pentingnya penguatan daya saing ekspor daerah melalui diversifikasi produk, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan kualitas logistik dan infrastruktur perdagangan. Dalam konteks pembangunan daerah, kinerja ekspor yang stabil dan berdaya saing menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Jambi, kawasan perkotaan memiliki potensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan industri, sementara kawasan perdesaan berperan sebagai basis produksi pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kedua kawasan ini perlu diarahkan secara terpadu dan saling melengkapi, melalui peningkatan konektivitas, penguatan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pemerataan akses terhadap layanan publik guna mendorong produktivitas wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

2.3.6.1 Kondisi Hunian Layak

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini menunjukan persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Jambi. Capaian akses terhadap hunian layak mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan

Dipindai dengan CamScanner

keberhasilan intervensi pemerintah dalam sektor perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini secara berkala menjadi penting untuk memastikan efektivitas program pembangunan perumahan serta mendorong perumusan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

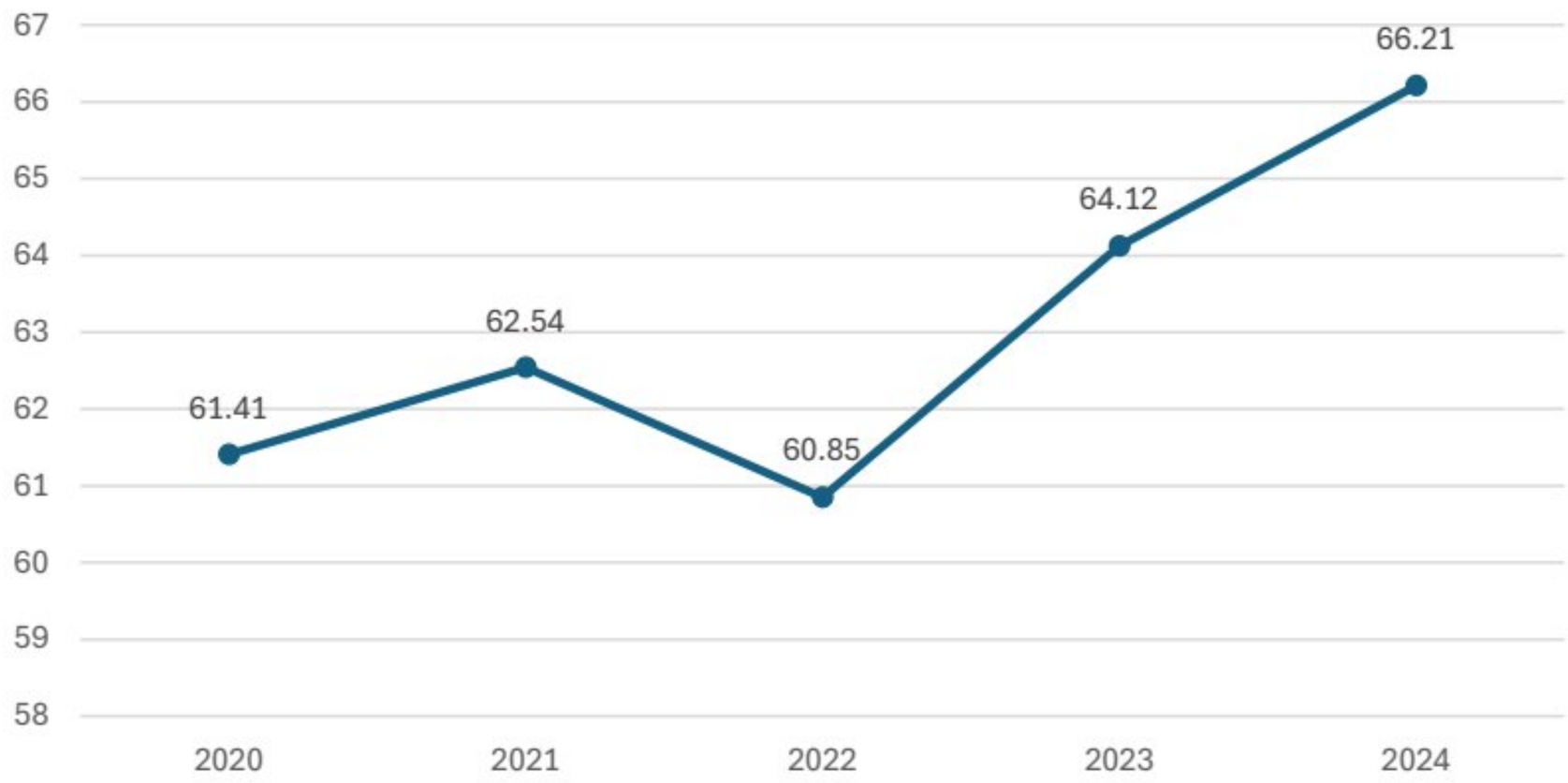

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-68 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Pada tahun 2018, rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 95,99 persen, menunjukkan capaian yang sangat baik karena hampir seluruh rumah tangga telah mendapatkan akses tersebut. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan menjadi 54,78 persen, dan hingga tahun 2022 angkanya hanya meningkat sedikit menjadi 60,85 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kepadatan penduduk, terbatasnya penyediaan sumber air yang aman, serta rendahnya keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah, sehingga ke depan pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis melalui kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan akses air bersih, dan penguatan ekonomi masyarakat.

2.3.6.2 Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dipindai dengan CamScanner

Status ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah memiliki kemandirian dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mampu menyediakan pelayanan dasar yang optimal, serta memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. IDM diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Desa Mandiri merupakan desa dengan tingkat kemandirian dan ketahanan sangat tinggi, sedangkan Desa Maju memiliki ketahanan baik dengan pelayanan dasar yang memadai. Desa Berkembang berada pada tahap transisi dengan ketahanan cukup, sementara Desa Tertinggal memiliki keterbatasan akses layanan dasar. Adapun Desa Sangat Tertinggal adalah desa dengan ketahanan sangat rendah dan memerlukan intervensi pembangunan yang lebih intensif.

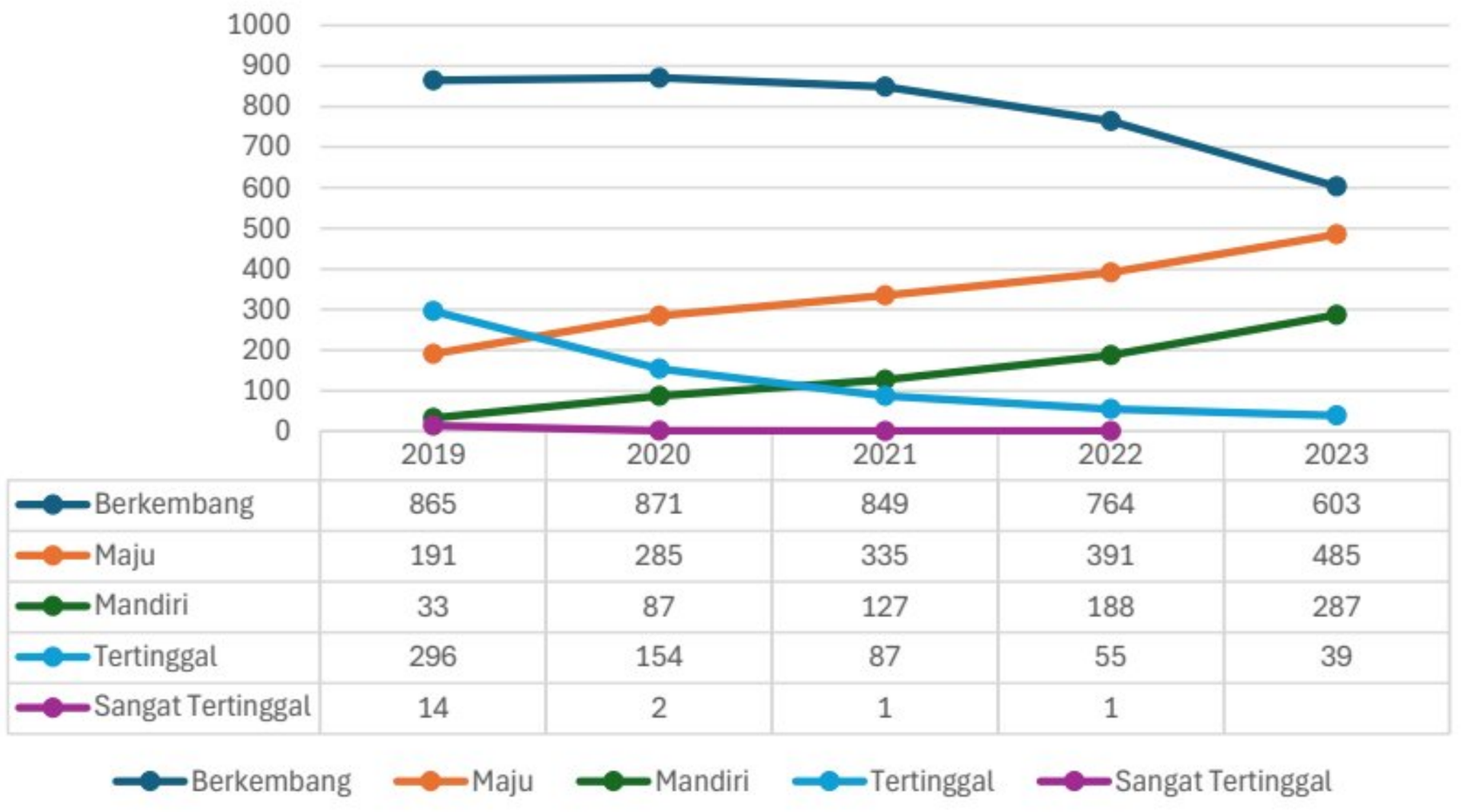

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir)

Gambar 2-69 Status Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jambi selama tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren positif dan terlihat adanya peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri dan Maju, disertai dengan penurunan signifikan desa berstatus Tertinggal dan Sangat

Dipindai dengan CamScanner

Tertinggal. Pada tahun 2019, jumlah desa Mandiri tercatat sebanyak 33 desa dan meningkat tajam menjadi 287 desa pada tahun 2023. Begitu pula desa Maju yang naik dari 191 desa di tahun 2019 menjadi 485 desa pada 2023. Sementara itu, jumlah desa Berkembang mengalami penurunan dari 865 desa di tahun 2019 menjadi 603 desa pada tahun 2023. Desa berstatus Tertinggal turun drastis dari 296 desa di tahun 2019 menjadi hanya 39 desa di tahun 2023, sedangkan desa Sangat Tertinggal berkurang dari 14 desa menjadi 1 desa pada tahun 2021 hingga 2022 yaitu 1 desa yang berada di Kecamatan Sado, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada tahun 2023 sudah tidak terdapat desa dengan status Desa Tertinggal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan desa di Provinsi Jambi berjalan efektif, terutama dalam mengurangi ketertinggalan desa dan mendorong peningkatan status desa ke kategori yang lebih maju dan mandiri. Selain itu, capaian ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan dasar, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

2.3.6.3 Proporsi Jalan Kondisi baik

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, total panjang jalan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2022, panjang jalan tercatat stabil sebesar 1.032,84 kilometer. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan panjang jalan yang cukup mencolok menjadi 1.183,79 kilometer.

Dipindai dengan CamScanner

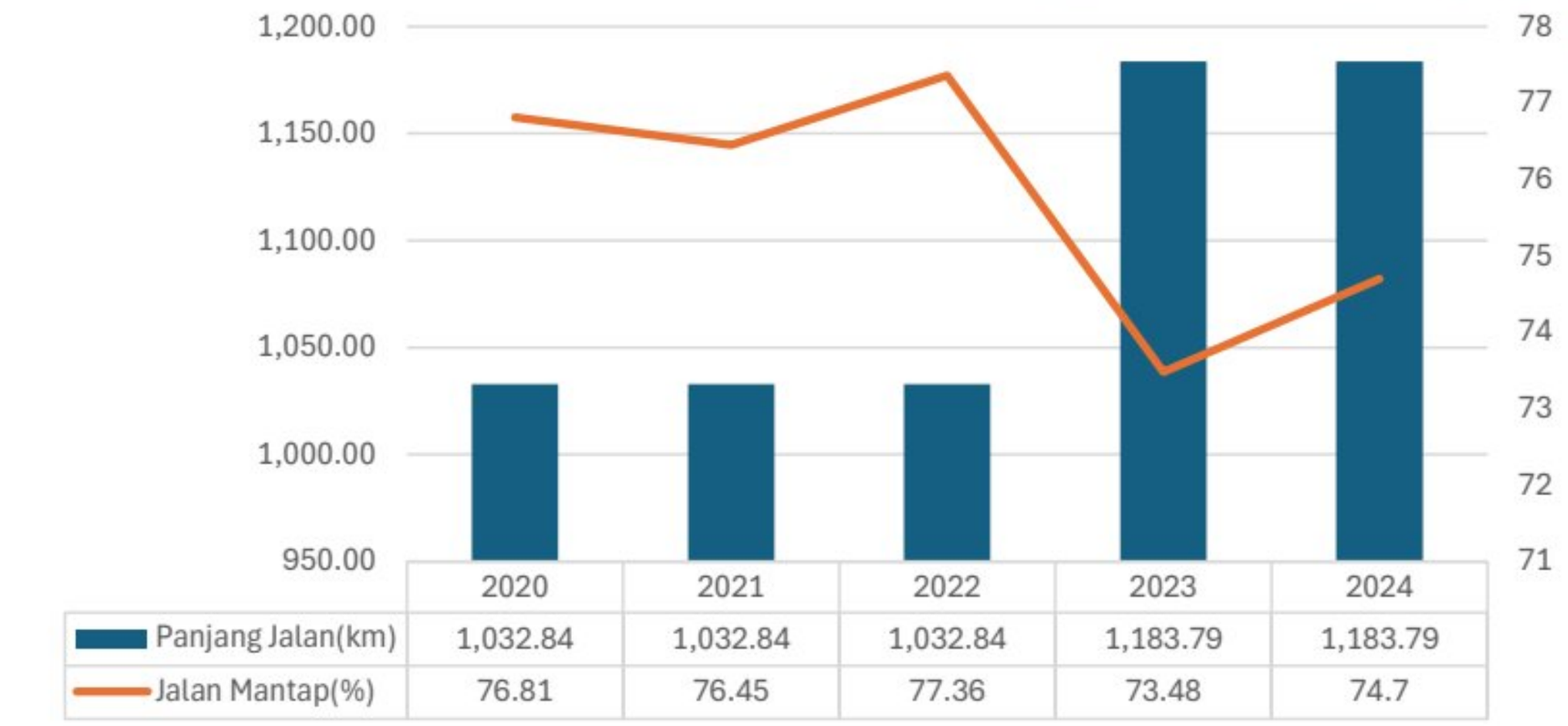

	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan(km)	1,032.84	1,032.84	1,032.84	1,183.79	1,183.79
Jalan Mantap(%)	76.81	76.45	77.36	73.48	74.7

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-70 Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Namun demikian, meskipun terjadi penambahan panjang jalan pada tahun 2023, persentase jalan dalam kondisi mantap justru mengalami penurunan, dari 77,36 persen pada tahun 2022 menjadi 72,04 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase jalan mantap kembali meningkat menjadi 74,7 persen, menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penurunan tersebut disebabkan adanya penambahan panjang jalan kewenangan provinsi yang berasal dari pengalihan jalan kabupaten/kota dengan kondisi rusak, sehingga menambah panjang jalan dalam kondisi rusak.

2.3.6.4 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Dipindai dengan CamScanner

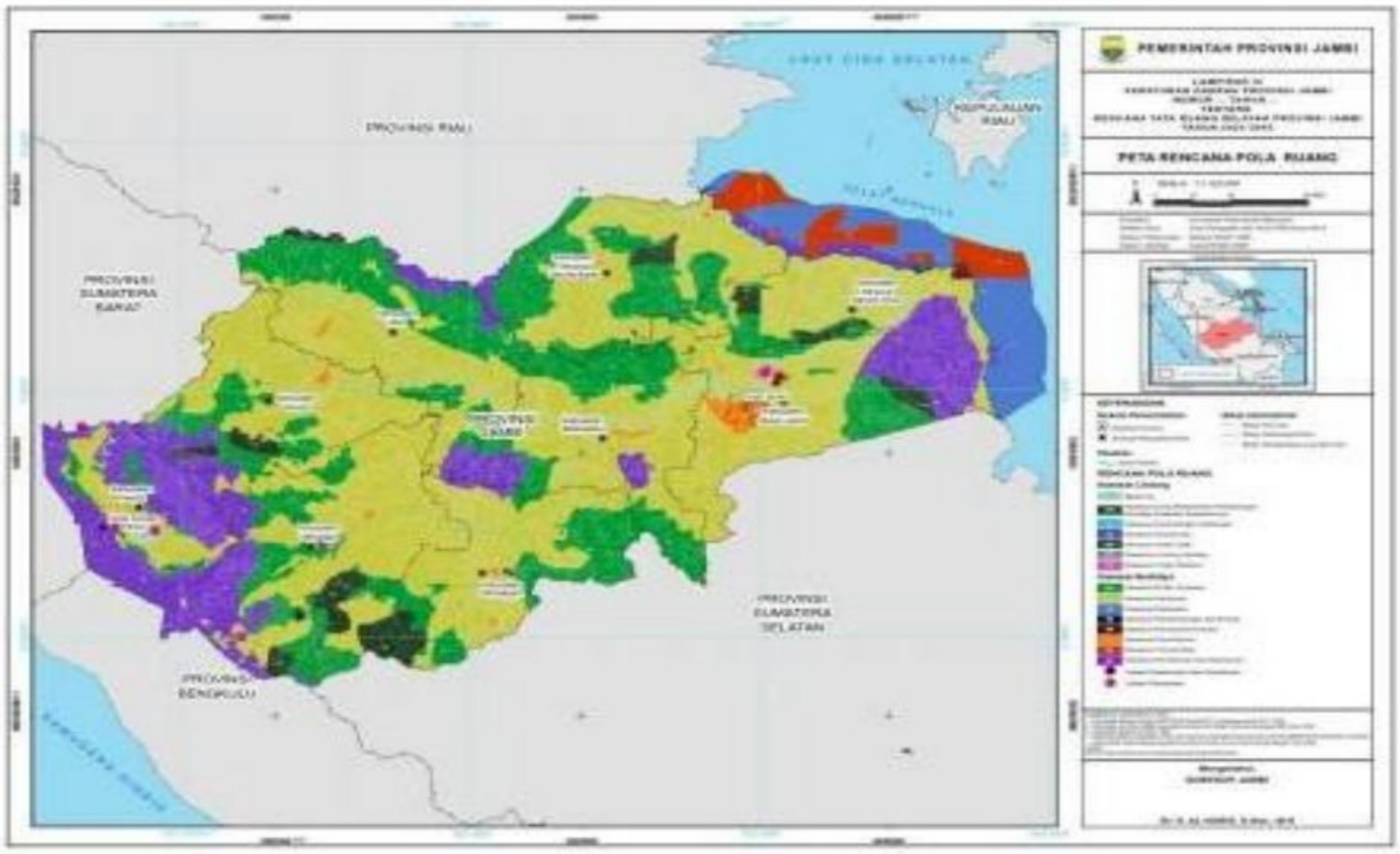

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025.

Gambar 2-71 Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi

.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidayapertanian terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan sedangkan kawasan budidaya non-pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan industri. Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. Arahan pola ruang untuk kegiatan budi daya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non- pertanian.

Dipindai dengan CamScanner

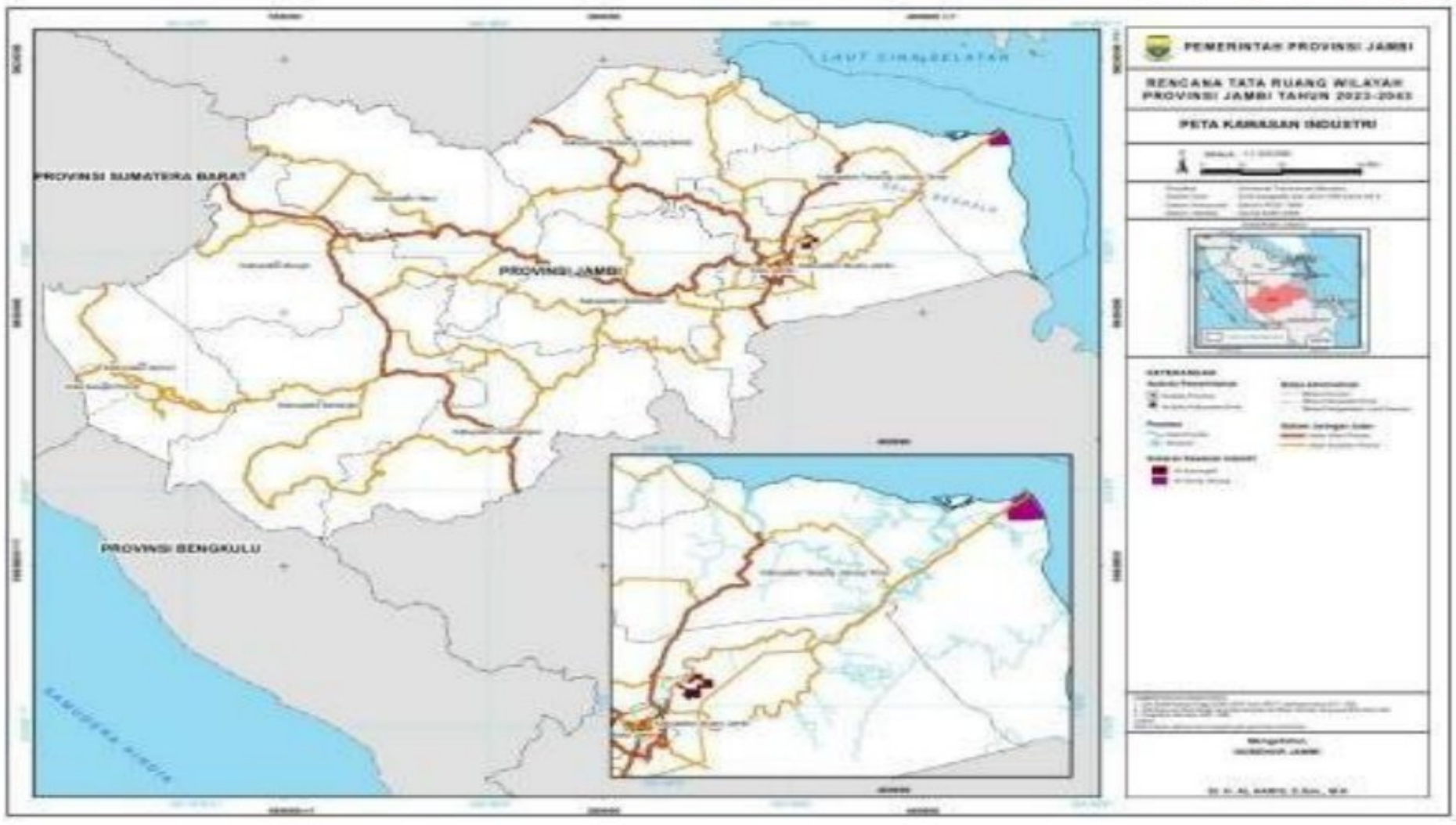

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025.

Gambar 2-72 Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi

Penetapan Kawasan industri di Provinsi Jambi dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi industri, mendorong kegiatan industri agar berlokasi di kawasan industri, serta menyediakan fasilitas lahan industri yang berwawasan lingkungan. Luas rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

a. Kawasan industri seluas kurang lebih 7.139 hektar yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. Kawasan peruntukan industri tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.

2.3.6.5 Akomodasi Penginapan

Sektor akomodasi merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah hotel di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama pada kategori hotel non-bintang. Fluktuasi ini mencerminkan sensitivitas sektor akomodasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, mobilitas wisatawan, serta kebijakan tata ruang dan investasi, sehingga

Dipindai dengan CamScanner

diperlukan pendekatan perencanaan yang adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini di tingkat regional.

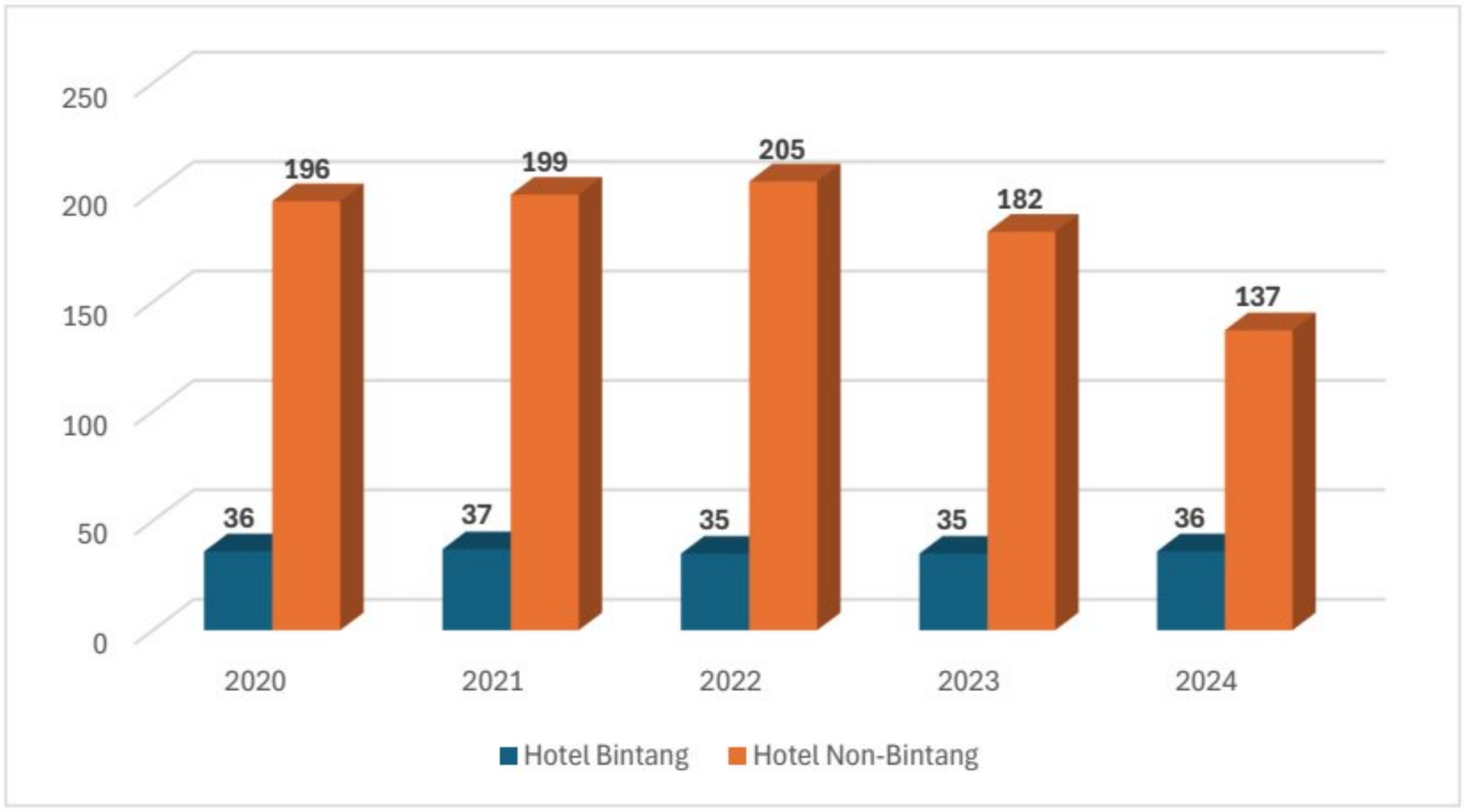

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Gambar 2-73 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Jumlah hotel bintang cenderung stabil dalam lima tahun terakhir, dengan angka berkisar antara 35 hingga 37 unit. Pada tahun 2020, terdapat 36 hotel bintang, meningkat menjadi 37 unit pada tahun 2021, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 35 unit pada tahun 2022 dan 2023, sebelum kembali naik ke angka 36 unit pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah hotel non-bintang mengalami fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020 terdapat 196 unit hotel non-bintang, meningkat menjadi 199 unit pada 2021, dan kembali naik menjadi 205 unit pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 jumlahnya menurun drastis menjadi 182 unit dan kembali turun menjadi 137 unit pada tahun 2024.

Penurunan jumlah hotel non-bintang dalam dua tahun terakhir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pasca pandemi terhadap usaha skala kecil dan menengah, pergeseran preferensi wisatawan, serta proses penyesuaian dan standarisasi usaha akomodasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang mendorong pemulihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha akomodasi skala kecil. Di sisi lain, keberadaan hotel bintang yang

Dipindai dengan CamScanner

relatif stabil mencerminkan konsistensi dalam penyediaan fasilitas yang sesuai standar dan menjadi potensi untuk terus dikembangkan guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.

2.3.6.6 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

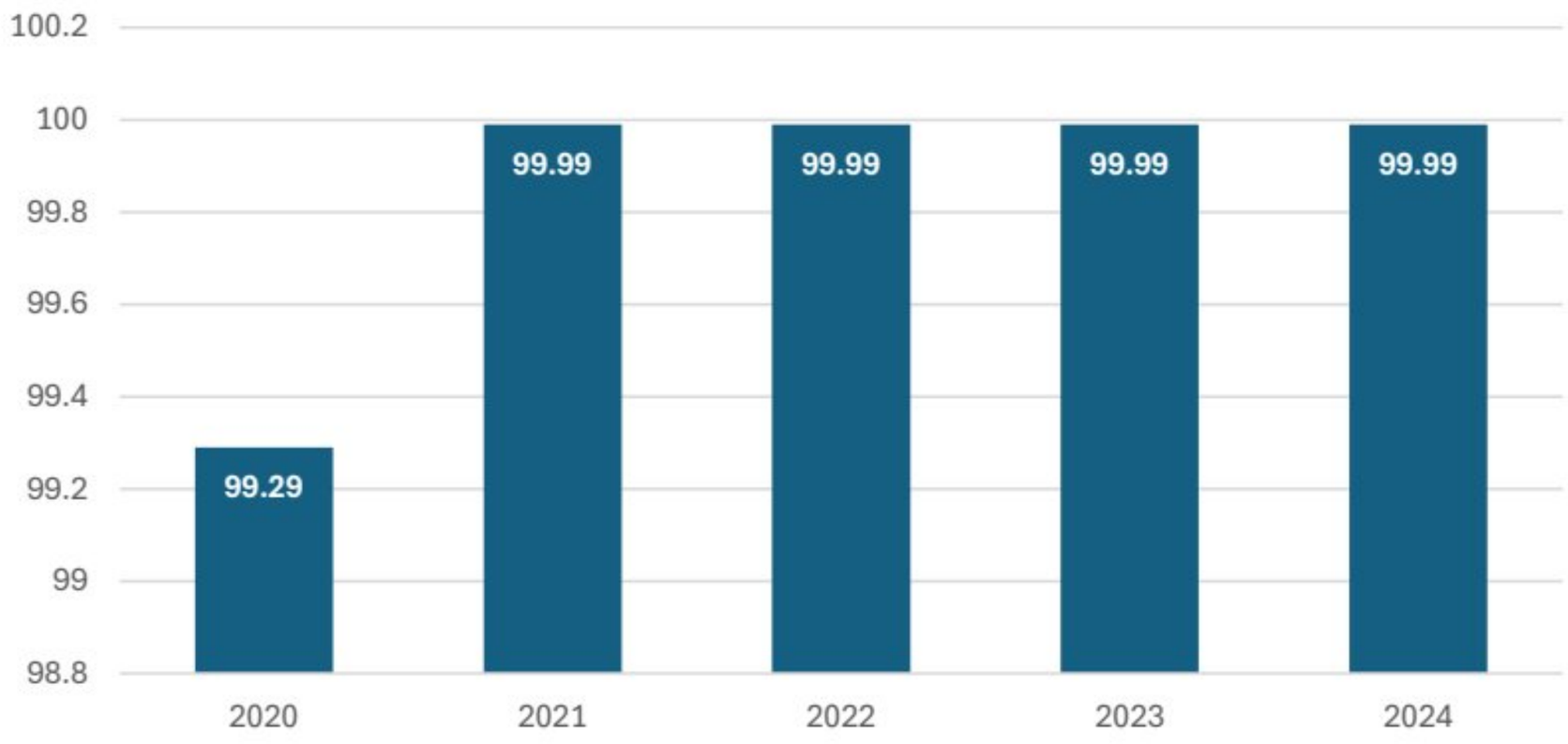

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025

Gambar 2-74 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Provinsi Jambi berhasil mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99,99 persen dari tahun 2021 dan mempertahankannya hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah menikmati akses terhadap energi listrik. Peningkatan akses terhadap energi listrik ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Provinsi Jambi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas ekonomi, serta memperluas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial masyarakat berbasis digital. Namun, Provinsi Jambi perlu untuk menjaga

Dipindai dengan CamScanner

stabilitas pasokan listrik dan memperluas jangkauan layanan ke wilayah-wilayah terpencil atau pelosok yang mungkin masih mengalami keterbatasan akses atau gangguan keandalan pasokan. Provinsi Jambi perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kebutuhan energi listrik akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan digitalisasi layanan publik di masa mendatang. Antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan keandalan jaringan distribusi listrik, termasuk pembangunan gardu induk, jalur transmisi, dan optimalisasi jaringan tegangan menengah hingga ke desa-desa, guna mengantisipasi beban listrik yang meningkat.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas. Dalam konteks Provinsi Jambi, pengelolaan indikator utama seperti inflasi menjadi landasan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi makro daerah perlu dilakukan secara berkala dan komprehensif guna memastikan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Provinsi Jambi terhadap tekanan global maupun domestik.

2.3.7.1 Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga- harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator

Dipindai dengan CamScanner

lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

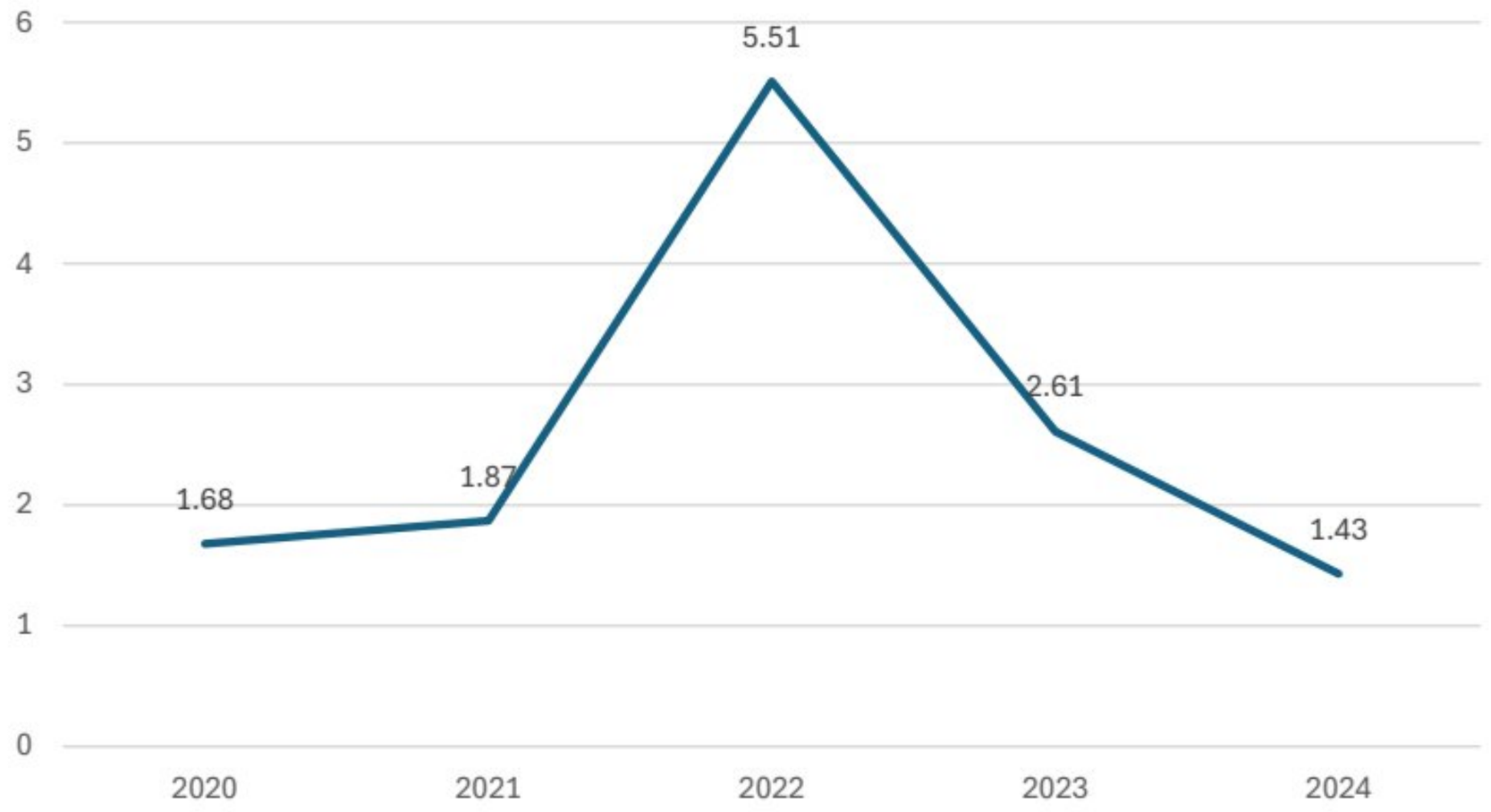

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-75 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, yang masing- masing pada tahun 2023 (*yoy*) tercatat sebesar 3,27 persen dan 2,85 persen. Tingginya inflasi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi, yaitu pada komoditas bensin, angkutan udara solar, dan cuci kendaraan. Kenaikan harga tarif angkutan udara tersebut diakibatkan kenaikan harga avtur serta kenaikan harga bensin dan solar yang ditetapkan sejak September 2022, di mana harga pertalite pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.000/liter.

Di samping itu, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau juga memberikan andil besar dalam meningkatnya inflasi di tahun 2022, terutama yang didorong oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan cabai merah, komoditas beras, rokok kretek filter, rokok kretek, rokok putih, telur ayam ras, dan ikan nila. Kenaikan inflasi dari sub-kelompok Rokok dan Tembakau dikarenakan dampak keberlanjutan dari transmisi kenaikan cukai hasil tembakau di tahun 2022 yang mendorong peningkatan harga komoditas rokok. Kenaikan harga komoditas telur ayam didorong oleh peningkatan biaya produksi

Dipindai dengan CamScanner

yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA, serta adanya gangguan produksi di beberapa sentra produksi seiring dengan perubahan cuaca.

2.3.7.2 Kemandirian Fiskal

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan asli daerah. Kemampuan kapasitas tersebut dapat dilihat dari kemandirian fiskal yang menjadi instrumen strategis untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas makroekonomi di tingkat daerah, karena daerah yang mandiri secara fiskal cenderung lebih adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional maupun global. Selain itu, kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara optimal akan mendukung terciptanya ketahanan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi nasional secara keseluruhan.

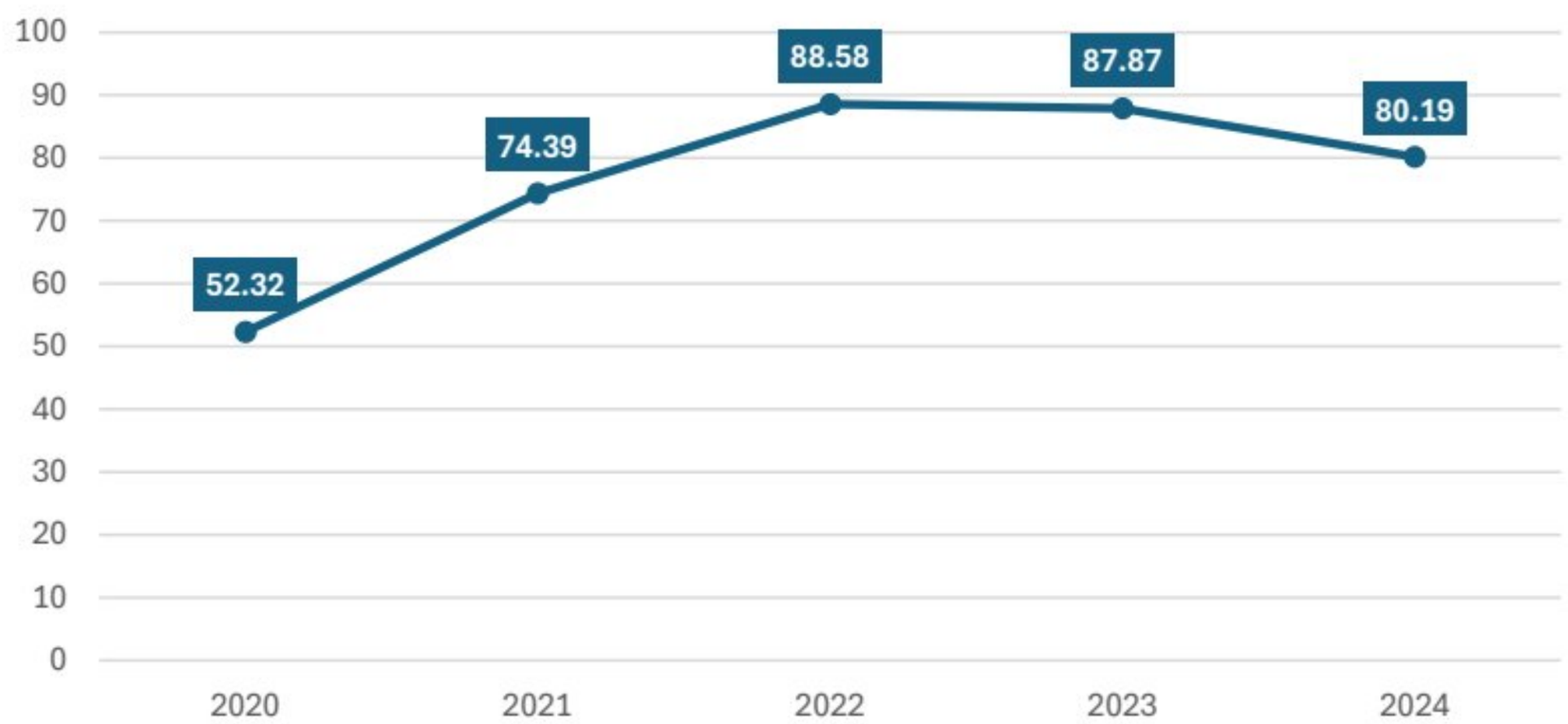

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-76 Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Dipindai dengan CamScanner

Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada awal periode, meskipun mengalami sedikit penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar 52,32%, kemudian meningkat tajam menjadi 74,39% di tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 88,58%. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya kemampuan Provinsi Jambi dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada tahun 2023 rasio kemandirian fiskal sedikit mengalami penurunan menjadi 87,87% dan kembali turun menjadi 80,19% di tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, capaian rasio kemandirian fiskal ini masih menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan perlunya konsistensi dalam optimalisasi PAD dan penguatan strategi pengelolaan keuangan daerah agar ketahanan fiskal dapat terjaga serta mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui layanan publik yang berkualitas dan merata. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen memperbaiki akses dan kualitas layanan melalui reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas aparatur. Inovasi pelayanan publik juga diarahkan untuk menjangkau wilayah terpencil dan tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan. Dengan penguatan aspek pelayanan umum, diharapkan tercipta pembangunan Provinsi Jambi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif merupakan faktor strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem regulasi yang fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus

Dipindai dengan CamScanner

menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang adaptif memberikan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk merespons tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan secara tepat waktu, termasuk dalam konteks percepatan digitalisasi layanan publik. Sementara itu, integritas dalam tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Tabel 2-19 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,21	2,19	3,31	3,05
	(Cukup)	(Cukup)	(Baik)	(Baik)

Sumber: SK Kemenpan RB, 2025.

Kinerja tata kelola dan pelayanan publik dapat tercermin melalui capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Jambi menunjukkan tren fluktuatif selama periode tahun 2021–2023. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 2,21 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,19 pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, baik dari segi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, maupun integrasi layanan elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, pada tahun 2023, capaian indeks SPBE Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai angka 3,31. Namun, Indeks SPBE Provinsi Jambi tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 3,05 dengan predikat ”Baik” yang masih sama seperti tahun sebelumnya. Meskipun sedikit mengalami penurunan, nilai indeks SPBE yang meningkat signifikan pada tahun 2023 menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola layanan digital pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kebijakan layanan elektronik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

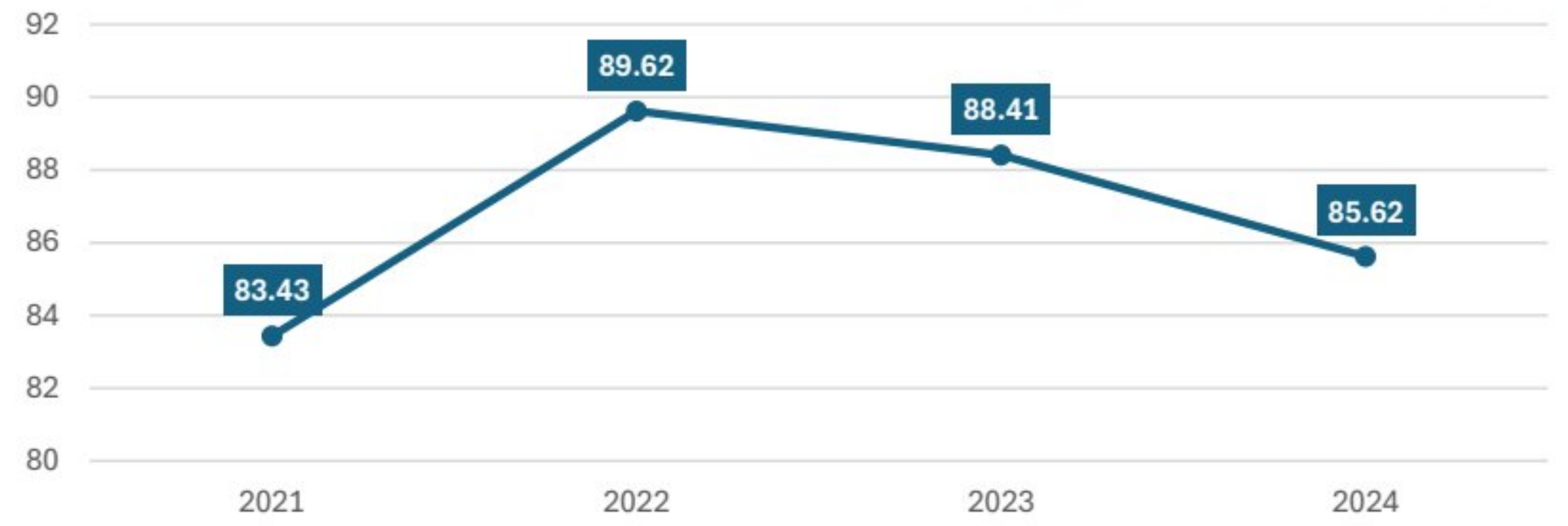

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021-2024, 2025
Gambar 2-77 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Selain indeks SPBE, tata kelola yang baik dapat dilihat melalui indeks pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi menunjukkan dinamika capaian selama periode tahun 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 83,43 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 89,62 pada tahun 2022. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, baik dari aspek kecepatan, kejelasan prosedur, hingga kenyamanan pelayanan. Namun, pada tahun 2023 nilai indeks sedikit menurun menjadi 88,41 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 85,62. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya konsistensi dan penguatan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik yang adaptif, berintegritas, serta berbasis kebutuhan masyarakat.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan elemen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi tersebut terwujud di tingkat daerah, dapat dilihat capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada masing-masing daerah. IDI mengukur perkembangan demokrasi melalui tiga

Dipindai dengan CamScanner

aspek pokok diantaranya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi dengan rentang skor 0–100, di mana semakin tinggi nilai menunjukkan semakin kuatnya praktik demokrasi.

Tabel 2-20 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021-2023

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi	72,91	77,19	74,47

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Jambi selama tahun 2021–2023 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, IDI Provinsi Jambi tercatat sebesar 72,91 dan mengalami peningkatan menjadi 77,19 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, kebebasan sipil, serta kualitas lembaga demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian, pada tahun 2023, nilai IDI Provinsi Jambi mengalami penurunan menjadi 74,47. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas demokrasi di daerah, khususnya dalam aspek-aspek tertentu seperti perlindungan hak-hak politik warga negara, efektivitas pengawasan terhadap lembaga pemerintahan, serta ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan akuntabel perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan praktik demokrasi yang sehat dan berdaya saing di Provinsi Jambi.

Dipindai dengan CamScanner

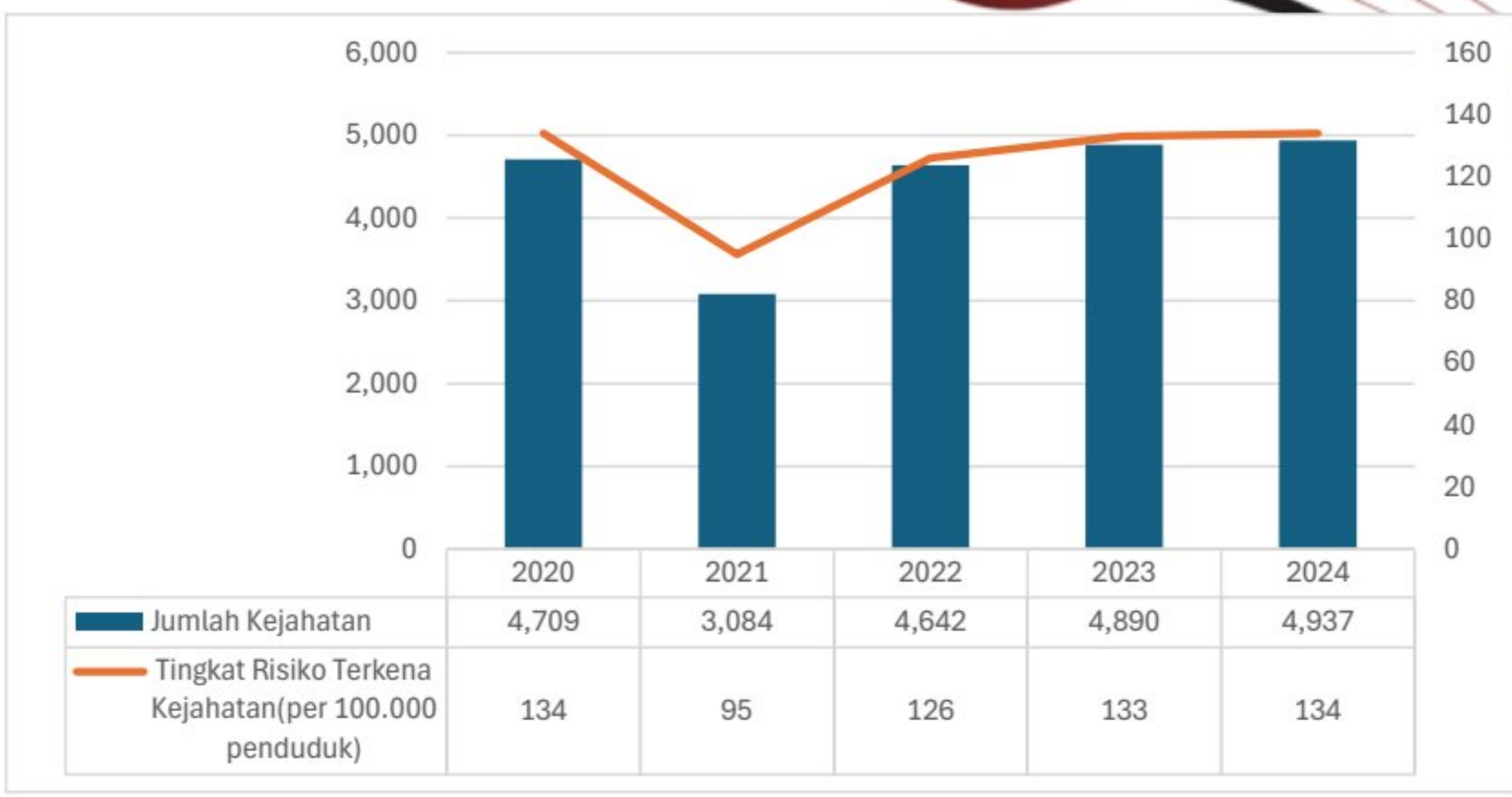

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan	4,709	3,084	4,642	4,890	4,937
Tingkat Risiko Terkena Kejahatan(per 100.000 penduduk)	134	95	126	133	134

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-78 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Aspek keamanan sebagai bagian dari pelayanan publik juga menjadi perhatian penting, khususnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.709 kasus kejahatan dengan tingkat risiko terkena kejahatan sebesar 134 per 100.000 penduduk. Jumlah ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 3.084 kasus dengan tingkat risiko sebesar 95 per 100.000 penduduk, yang merupakan angka terendah selama periode pengamatan. Namun demikian, tren tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, jumlah kejahatan meningkat menjadi 4.642 kasus dengan tingkat risiko sebesar 126 per 100.000 penduduk. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan tercatat sebanyak 4.890 kasus dan tingkat risiko sebesar 133 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2024, jumlah kejahatan kembali meningkat menjadi 4.937 kasus dengan tingkat risiko sebesar 134 per 100.000 penduduk, yang mencerminkan angka yang sama dengan tahun 2020. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan pada awal periode, upaya pengendalian kriminalitas masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan tren penurunan secara konsisten.

Dipindai dengan CamScanner

Data ini menunjukkan perlunya penguatan strategi keamanan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Provinsi Jambi.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan merupakan komponen strategis dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memperkuat posisi daerah. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik pertahanan maupun strategi hubungan antarwilayah, tetapi juga tercermin dari kondisi daya saing suatu daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana ketangguhan tersebut terbentuk. Nilai IDSD mencerminkan kapasitas daerah dalam membangun stabilitas ekonomi, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing tinggi. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin kuat pula posisi daerah dalam menghadapi tantangan eksternal, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memperluas jejaring kerjasama antarwilayah maupun antarnegara di kawasan. Dengan demikian, IDSD tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja pembangunan daerah, tetapi juga sebagai cerminan ketahanan diplomasi dan pertahanan daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi regional.

Tabel 2-21 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indesk Daya Saing Daerah	3,0615	NA	2,99	3,25	3,38

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

IDSD Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2021–2023. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 2,99 dan mengalami kenaikan menjadi 3,25 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang

Dipindai dengan CamScanner

mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada tahun 2023, nilai indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 3,38. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil utama dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Indikator ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur capaian kinerjanya secara objektif, sistematis, dan berkesinambungan. Melalui IKK, pemerintah dapat memantau efektivitas pelaksanaan program, mengevaluasi keberhasilan kebijakan, serta menentukan arah perbaikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran berikutnya. Selain itu, IKK juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-22 Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Pelayanan Urusan Wajib													
1	Kesehatan										100,00%	75,55%	100,00%
1.1	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Persentase FKTP yang terakreditasi	%	-	-	100	100	100	-	100	100		100%	100,00%
1.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
1.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.5	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	40	43	46	48	50	50,24	50,24	68,75	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio	0,2	0,24	1,24	1,28	1,32	1,38	1,33	1,27	100,00%	100,00%	100,00%
1.7	Rasio Puskesmas per Kecamatan	Rasio	-	-	0,95	0,97	1	-	-	0,99			100,00%
1.8	Persentase cakupan universal health coverage Provinsi Jambi	%	80	83	93	94	95	80,24	87,15	93,88	100,00%	100,00%	100,00%
1.9	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah	-	-	7	7	8	-	-	8			100,00%
2	Pendidikan										82,70%	77,46%	86,04%
2.1	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	59,2	60,2	-	-	-	41,43	41,42	-	69,98%	68,80%	-
2.2	Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan	%	-	-	66,2	66,35	66,5	60,51	67,16	70,1	-	-	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Asesmen Nasional												
2.3	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	28,3	29,2	-	-	-	36,35	35,83	-	100,00%	100,00%	-
2.4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	55,53	55,68	55,83	51,62	56,69	60,05	-	-	100,00%
2.5	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	62,87	63,02	63,17	57,01	63,17	64,73	-	-	100,00%
2.6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	53,13	53,28	53,43	49,39	53,87	56,19	-	-	100,00%
2.7	Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB, Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	56,75	56,9	57,05	50,84	52,73	60,42	-	-	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	45,2	45,35	45,5	41,47	45,58	54,07	-	-	100,00%
2.9	Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB, Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	62,82	62,97	63,12	56,66	50,75	55,53	-	-	88,40%
2.10	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	54,24	54,39	54,54	49,98	52,39	53,55	-	-	98,73%
2.11	Rata-rata Kompetensi Literasi SMALB, Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	51,47	51,62	51,77	45,88	47,77	57,69	-	-	100,00%
2.12	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional	%	-	-	52,2	52,35	52,5	48,31	49,55	57,91	-	-	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.13	Persentase sekolah menengah negeri yang terakreditasi	%	99,63	100	100	100	100	98,87	97,8	98,9	99,24%	97,80%	98,90%
2.14	Persentase satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	90	79,17	83,33	90,00%	79,17%	83,33%
2.15	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	100	100	100	100	100	72,51	72,46	72,46	72,51%	72,46%	72,46%
2.16	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-20 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	100	100	100	100	100	29,84	59,78	-	29,84%	59,78%	-
2.17	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	-	-	100%	100%	100%	-	-	59,78	-	-	59,78%
2.18	Jumlah SMK	sekolah	25	28	28	28	28	26	21	27	100,00%	75,00%	96,43%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Negeri yang terevitalisasi												
2.19	Jumlah SLB Negeri yang terevitalisasi	sekolah	3	3	5	5	5	11	2	2	100,00%	66,67%	40,00%
2.20	Indeks Iklim Keamanan SMA		-	-	87,35	87,5	87,65	-	71,43	70,95	-	-	81,22%
2.21	Indeks Iklim Kebinekaan SMA		-	-	89,52	89,67	89,82	-	72,42	71,08	-	-	79,40%
2.22	Indeks Inklusivitas SMA		-	-	83,93	84,08	84,23	-	57,49	58,85	-	-	70,12%
2.23	Indeks Iklim Keamanan SMK		-	-	84,32	84,47	84,62	-	67,72	67,46	-	-	80,00%
2.24	Indeks Iklim Kebinekaan SMK		-	-	87,06	87,21	87,36	-	69,07	68,65	-	-	78,85%
2.25	Indeks Inklusivitas SMK		-	-	79,69	79,84	79,99	-	54,74	55,33	-	-	69,43%
2.26	Indeks Iklim Keamanan SDLB		-	-	85,32	85,47	85,62	-	72,41	74,38	-	-	87,18%
2.27	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB		-	-	92,02	92,17	92,32	-	65,16	65,23	-	-	70,89%
2.28	Indeks Inklusivitas SDLB		-	-	84,82	84,97	85,12	-	58,71	64,31	-	-	75,82%
2.29	Indeks Iklim Keamanan SMPLB		-	-	79,04	79,19	79,34	-	63,46	65,28	-	-	82,59%
2.30	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB		-	-	70,89	71,04	71,19	-	63,43	66,62	-	-	93,98%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.31	Indeks Inklusivitas SMPLB		-	-	76,76	76,91	77,06	-	55,78	62,62	-	-	81,58%
2.32	Indeks Iklim Keamanan SMALB		-	-	74,01	74,16	74,31	-	59,63	69,18	-	-	93,47%
2.33	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB		-	-	70,43	70,58	70,73	-	61,79	68,82	-	-	97,71%
2.34	Indeks Inklusivitas SMALB		-	-	72,59	72,74	72,89	-	58,48	63,18	-	-	87,04%
3	Sosial										83,60%	83,32%	71,42%
3.1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	72,72	81,81	100	100	100	72,72	81,81	100	100,00%	100,00%	100,00%
3.2	Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)	orang	40	40	40	50	50	35	35	50	87,50%	87,50%	100,00%
3.3	peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	orang	40	40	40	50	50	141	142	141	100,00%	100,00%	100,00%
3.4	layanan data dan pengaduan	%	72,72	81,81	90,9	100	100	72,72	100	100	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	yang dimiliki												
3.5	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	badan	28	33	40	40	40	28	33	33	100,00%	100,00%	82,50%
3.6	bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	KPM	110	220	60	120	120	412	460	50	100,00%	100,00%	83,33%
3.7	keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	102.103	102.103	102.103	102.103	102.103	102,785	93.018	102.925	0,10%	91,10%	100,00%
3.8	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	orang	44	44	44	44	44	569	512	512	100,00%	100,00%	100,00%
3.9	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	lembaga	5	5	5	5	5	12	5	5	100,00%	100,00%	100,00%
3.10	Jumlah Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	jiwa	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	6.630	106390	1487	100,00%	100,00%	44,63%
3.11	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang	jiwa	550	550	150	150	150	1573	315	150	100,00%	57,27%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi												
3.12	jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	kelompok	10	10	3	3	3	3	2	3	30,00%	20,00%	100,00%
3.13	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	0rang	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%	100,00%
3.14	persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	1,8	0,92	100	100	100	1,44	1,8	2,03	100,00%	51,11%	2,03%
3.15	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,11	0,22	100	100	100	0,28	0,38	0,17	100,00%	100,00%	0,17%
3.16	persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan	%	0,35	0,36	100	100	100	0,7	0,44	0,38	100,00%	100,00%	0,38%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	dasarnya di dalam panti												
3.17	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	15,6	15,6	100	100	100	0,55	1,47	1,1	3,53%	9,42%	1,10%
4	Trantibum dan Perlindungan Masyarakat										88,70%	100,00%	100,00%
4.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
4.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	43,48	100	100	43,48%	100,00%	100,00%
4.3	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00%	-	-
4.4	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00%	-	-
4.5	Persentase pendampingan penanganan	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00%	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	pasca bencana												
5	PU dan Penataan Ruang										99,30%	93,97%	90,93%
5.1	Persentase luas sawah beririgasi	%	78	79,5	81	82,5	84	79,65	NA	62,80	100,00%		77,53%
5.2	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	79,6	83,231	82,243	83,87	85,245	77,36	72,036	74,70	97,19%	86,55%	90,83%
5.3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	79,08	83,92	83,92	85	87	80	80,02	80,02	100,00%	95,35%	95,35%
5.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak	%	78,45	81,44	81,44	82,08	82,94	79,54	83,04	83,04	100,00%	100,00%	100,00%
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										100,00%	100,00%	50,00%
6.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	224,49	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00%	100,00%	0,00%
7	Tenaga Kerja										75,37%	90,93%	91,05%
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,18	69,49	69,85	70	71	67,84	68,75	68,87	98,06%	98,94%	98,60%
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,11	4,61	4,56	4,39	4,2	4,59	4,53	4,48	89,82%	98,26%	98,25%
7.3	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker	%	58,45	12,2	12,4	12,6	12,8	16,32	43	41	27,92%	100,00%	100,00%
7.4	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	24,5	9,7	9,8	9,9	10	15,13	15,13	15,76	61,76%	100,00%	100,00%
7.5	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	985	1200	1300	1400	1600	900	1100	1350	91,37%	91,67%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7.6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	5000	5000	5000	5000	5000	1702	1930	2027	34,04%	38,60%	40,54%
7.7	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	%	62	65	67	71	75	64	67	68	100,00%	100,00%	100,00%
7.8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	87,88	88	88,5	88,7	90	88,35	97,68	NA	100,00%	100,00%	-
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										99,04%	97,86%	97,93%
8.1	Persentase ARG pada belanja APBD	%	75	75	75	75	75	75	71,36	75	100,00%	95,15%	100,00%
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,78	69,02	70,05	71,5	73	65,93	67,86	67,86	97,27%	98,32%	96,87%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8.3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
8.4	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	67	67,62	69,87	70	70	66,26	66,26	66,26	98,90%	97,99%	94,83%
9	Pangan										93,63%	91,76%	
9.1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:												
	Skor PPH	-	92,5	93,2	95,2	95,2	95,5	93,4	93,1		100,00%	99,89%	
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	88,24	-	-	100,00%	-	-
	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	%	85	85	85	85	85	-	-	-	-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:												
	Persentase penduduk beresiko rawan pangan	%	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	12,14	12,83	-	61,78%	50,66%	-
	Desa Mandiri Pangan	Desa	31	41	51	61	71	31	41	-	100,00%	100,00%	-
	Persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah	%	19,61	19,61	19,61	20,42	20,4	70,07	233,1	-	100,00%	100,00%	-
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5		2,99	-	-	100,00%	-
9.3	Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:												
	Pengembangan Distribusi Pangam	Kab/kota	11	11	11	11	11	11	11	-	100,00%	100,00%	-
9.4	Stabilitas Harga Pangan:												
	Pangan Pokok	CV %	CV<10 %	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	-	CV<6,6	-	-	-	-
	Pangan Strategis	CV %	CV<30 %	CV<30%	CV<30%	CV<30%	CV<30%	-	CV< 18,1	-	-	-	-
10	Lingkungan Hidup										99,19%	98,03%	95,45%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	72,07	72,43	72,8	73,17	73,53	70,32	68,15	73,97	97,57%	94,09%	100,00%
10.2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK)	Juta Ton CO2 eq	3,283	3,348	3,412	3,476	3,541	4	4	-	100,00%	100,00%	-
10.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan PUU LH yang diterbitkan	%	70	76	77	79	86	89,47	88,57	70	100,00%	100,00%	90,91%
11	Administrasi Kependudukan dan Capil										93,09%	100,00%	100,00%
11.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
11.2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17	%	97	98	99	100	100	95	100	99	97,94%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	tahun												
11.3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
11.4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
11.5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
11.6	Pemanfaatan data kependudukan	%	34,48	46,51	46,51	58,14	58,14	20,9	46,51	46,51	60,61%	100,00%	100,00%
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										100,00%	100,00%	85,54%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
12.1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	90	90	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%	100,00%
12.2	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90	90	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%	100,00%
12.3	Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	90	90	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%	100,00%
12.4	Jumlah desa mandiri	Desa	127	134	141	148	155	188	287	287	100,00%	100,00%	100,00%
12.5	Jumlah desa berkembang	Desa	849	807	767	731	694	764	603	603	100,00%	100,00%	78,62%
12.6	Jumlah desa tertinggal	Desa	87	84	80	76	72	55	39	39	100,00%	100,00%	48,75%
12.7	Status Perkembangan	Indeks	30	40	50	50	50	30	40	40	100,00%	100,00%	80,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	KPPN												
12.8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkembang	Desa	100	115	120	130	130	127	115	115	100,00%	100,00%	95,83%
12.9	Jumlah BUMDesa/BUM Desa Maju	Desa	0	4	6	10	12	5	4	4		100,00%	66,67%
13	Pengendalian Penduduk dan KB										97,75%	98,40%	99,99%
13.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	60,32	60,35	60,39	60,45	60,5	55,01	62,58	62,58	91,20%	100,00%	100,00%
13.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun	35	30	25	25	21	20	26,8	26,8	100,00%	100,00%	100,00%
13.3	Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)	Rata-rata anak per wanita	2,31	2,28	2,26	2,24	2,21	2,21	2,28	2,28	100,00%	100,00%	100,00%
13.4	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	65,44	65,48	65,5	65,52	65,57	63,85	65,48	65,48	97,57%	100,00%	99,97%
13.5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	%	10	10	10	10	10	12	9,2	12	100,00%	92,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	terenuhi (unmet need)												
14	Perhubungan										100,00%	95,07%	98,09%
14.1	On time Performance Layanan transportasi	%	85	85,2	88,06	89,2	90,1	85,7	85,1	85,3	100,00%	99,88%	96,87%
14.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	nilai	75	77,62	79,1	80,2	81,6	77,26	71,43	84,19	100,00%	92,03%	100,00%
14.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangatan *	Rasio	15,31	15,22	15,09	15,01	14,95	2,84	14,2	14,7	100,00%	93,30%	97,42%
15	Komunikasi dan Informasi										94,30%	99,38%	99,47%
15.1	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah daerah	%	63	75	85	92	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
15.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan	%	53	70	81	86	93	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC,ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)												
15.3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	%	75	80	85	90	95	85	90	90	100,00%	100,00%	100,00%
15.4	Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	75	80	85	90	95	28	80	80	37,33%	100,00%	94,12%
15.5	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	%	65	70	75	80	90	70	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
15.6	Persentase layanan	%	40	50	55	60	70	70	90	90	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah												
15.7	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	%	55	60	65	70	75	60	90	90	100,00%	100,00%	100,00%
15.8	daerah, termasuk program nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah	%	60	65	70	75	80	60	60,55	100	100,00%	93,15%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
15.9	Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah	%	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%
15.10	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	%	60	72	76	85	94	87,43	79,26	91,12	100,00%	100,00%	100,00%
15.11	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	%	72	76	80	84	92	86	86	86	100,00%	100,00%	100,00%
16	Koperasi dan UKM										100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
16.1	Persentase koperasi yang berkualitas	%	5,4	5,6	6	6,7	6,7	7,34	14,92	19,49	100,00%	100,00%	100,00%
16.2	Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha	%	3,38	6	95	100	100	91,61	98,53	98,53	100,00%	100,00%	100,00%
17	Penanaman Modal										100,00%	100,00%	60,02%
17.1	Realisasi PMDN		4,24	4,7	5,1	5,64	6,2	8,88	10,4	9,94	100,00%	100,00%	100,00%
17.2	Realisasi PMA	US $. juta	480	528	580	638	702	562	667,196	116,25	100,00%	100,00%	20,04%
18	Kepemudaan dan Olahraga										90,44%	72,84%	75,20%
18.1	Prestasi olahraga	Medali emas	14	15	16	17	18	13	11	18	92,86%	73,33%	100,00%
18.2	Peringkat POPNAS	Peringkat	9	8	8	7	7	10	15	15	90,00%	53,33%	53,33%
18.3	Peringkat PEPARPENAS	Peringkat	12	11	11	10	10	13	20	20	92,31%	55,00%	55,00%
18.4	Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
18.5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,033	0,041	0,052	0,063	0,074	0,029	0,088	0,092	87,88%	100,00%	100,00%
18.6	Tingkat partisipasi pemuda dalam	%	0,049	0,065	0,084	0,103	0,124	0,039	0,036	0,036	79,59%	55,38%	42,86%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan												
19	Statistik										100,00%	100,00%	100,00%
19.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
19.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
20	Persandian										66,67%	100,00%	100,00%
20.1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	3	5	7	9	11	1	7	12	33,33%	100,00%	100,00%
20.2	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti	Orang	2	4	4	4	4	2	4	4	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT												
21	Kebudayaan										67,79%	100,00%	
21.1	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,19	25	-	86,36%	100,00%	-
21.2	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	17	18	19	20	21	8,57	18	-	50,41%	100,00%	-
21.3	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan	%	0,36	0,024	0,027	0,03	0,033	0,037	0,27	-	10,28%	100,00%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun keatas)												
21.4	Persentase penduduk usa 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,65	0,04	0,046	0,049	0,052	0,037	0,046	-	2,24%	100,00%	-
21.5	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	17	18	19	20	21	17	18	-	100,00%	100,00%	-
21.6	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	2	3	4	5	6	10	7	-	100,00%	100,00%	-
21.7	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	unit	7	8	9	10	11	2	13	-	28,57%	100,00%	-
21.8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan,	unit	15	16	17	18	19	91	88	-	100,00%	100,00%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)												
21.9	Jumlah museum yang dikelola	unit	3	3	3	3	3	3	3	-	100,00%	100,00%	-
21.10	Jumlah cagarbudaya dan warisan budaya yang dilindungi	unit	2	3	4	5	6	2	3	-	100,00%	100,00%	-
22	Perpustakaan										100,00%	100,00%	97,72%
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,3	67,3	71,3	75,3	79,3	63,75	68,1	68,05	100,00%	100,00%	95,44%
22.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	21,58	62,84	65,43	100,00%	100,00%	100,00%
23	Kearsipan										77,77%	100,00%	100,00%
23.1	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	orang	350	350	350	350	350	312	419	423	89,14%	100,00%	100,00%
23.2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	250	275	300	325	350	166	4566	6514	66,40%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan													
1	Kelautan dan Perikanan										77,38%	77,13%	72,34%
1.1	kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	Ha	10.687,49	16.400,53	-	-	-	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	Jumlah kawasan konservasi perairan yang ditetapkan	Kawasan	-	-	1	3	3	-	-	NA	-	-	-
1.3	Produksi perikanan budidaya	Ton	57.168,00	58.997,00	60.885,00	62.833,00	64.843,60	49.666,00	50.807,14	49.595,00	86,88%	86,12%	81,46%
1.4	Produksi perikanan tangkap	Ton	54.480,90	54.807,80	55.136,70	55.467,50	55.800,30	55.347,50	54.807,50	45.187,80	100,00%	100,00%	81,96%
1.5	Konsumsi ikan	kg/kap / thn	40,6	41	41,5	42	42,5	40,8	40,8	40,79	100,00%	99,51%	98,29%
1.6	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	%	50	50	50	50	50	50	50	50,00	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pariwisata										96,08%	96,42%	
2.1	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. juta	350	450	550	650	750	378,45	452,32	-	100,00%	100,00%	-
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,19	1,21	1,25	1,29	1,3	1,05	1,08	-	88,24%	89,26%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.3	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	950.000	1.500.000	5.400	6.480	7.776	2.309.503	1.842.162	-	100,00%	100,00%	-
3	Pertanian										40,95%	64,39%	100,00%
3.1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	%	1,8	2	3	4	4,2	-3,35	-	-	-186,11%	-	-
3.2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah	%	2	2,23	2,45	2,68	2,9	11,73	-	-	100,00%	-	-
3.3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	9,22	4,82	5,04	5,28	5,49	3,18	2,9	8,6	65,98%	-	100,00%
3.4	Populai ternak:												
	- Populasi Sapi	Ekor	162.002	165.242	168.546	171.917	175.536	429,393	408.644	-	0,27%	100,00%	-
	- Populasi Kambing	Ekor	412.473	420.722	429.137	437.719	446.474	23,35	24,51	-	0,01%	0,01%	-
3.5	Persentase luas areal pengendalian dan	%	25,74	29,24	32,34	35,34	37,34		273.276	-		100,00%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	penanggulangan bencana OPT												
3.6	Produksi Padi	Ton GKG	416.223	435.708	463.472	497.937	533.504	289,277	20.754	-	0,07%	4,76%	-
3.7	Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	67.826	69.178	71.249	74.099	77.205	33,208	20.753,80	-	0,05%	30,00%	-
3.8	Produksi Daging:												
	- sapi	Ribu ton	5,76	5,88	5,99	6,11	6,24	5,76	4,92	-	100,00%	83,67%	-
	- kambing	Ribu ton	1	1,02	1,04	1,06	1,08	0,71	0,57	-	71,00%	55,88%	-
	- Ayam Buras	Ribu ton	6,61	7,21	7,86	8,56	9,34	10,18	4,61	-	100,00%	63,94%	-
	- Ayam Ras Petelur	Ribu ton	1,39	1,41	1,45	1,49	1,54	2,26	1,17	-	100,00%	82,98%	-
	- Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	61,65	72,64	85,71	101,14	119,35	53,48	63,23	-	86,75%	87,05%	-
	- Itik	Ribu ton	0,53	0,54	0,56	0,58	0,6	0,5	0,64	-	94,34%	100,00%	-
4	Kehutanan										100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	260	225	250	260	270	534,5	433	372,5	100,00%	100,00%	100,00%
4.2	Pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui	Ha	30.070,55	39.951,55	53.588,55	77.174,55	89.642,55	31940,79	44.095,79	55.608,12	100,00%	100,00%	100,00%

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Perhutanan Sosial												
5	ESDM										100,00%	100,00%	100,00%
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,99	99,99	99,99	100,00%	100,00%	100,00%
5.2	Porsi EBT dalam bauran energi	%	12,32	16,65	20,21	24	24,85	15	17,03	22,03	100,00%	100,00%	100,00%
5.3	Persentase desa teraliri listrik (rasio desa berlistrik)	%	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
6	Perdagangan										98,36%	100,00%	
6.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6	6	6	6	6	5,41	-	-	90,17%	-	-
6.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	93	95	97	97	100	100	-	100,00%	100,00%	-
6.3	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	40	41,8	43,25	46,6	51,1	40	-	-	100,00%	-	-
6.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan	%	60	62	66	67	70	98,28	-	-	100,00%	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	berlaku												
6.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	91	92	92	94	91	-	-	100,00%	-	-
6.6	Tertib usaha	%	60	60	60	62	62	60	-	-	100,00%	-	-
7	Perindustrian										73,67%	69,05%	
7.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas	%	0,39	0,41	0,43	0,45	0,48	0,31	0,42	-	79,49%	100,00%	-
7.2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	%	7,86	7,97	8,08	8,19	8,3	9,77	9,98	-	100,00%	100,00%	-
7.3	Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas	USD Miliar	0,966	0,983	1	1,017	1,034	0,821	0,749	-	84,99%	76,20%	-
7.4	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan	orang	250.977	257.866	264.755	271.644	278.533	75.802	-	-	30,20%	0,00%	-
8	Transmigrasi										92,82%	100,00%	
8.1	Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan	indeks	33,82	35,18	45,44	36,09	36,33	48,09	35,18	-	100,00%	100,00%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	transmigrasi yang direvitalisasi												
8.2	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	40,89	41,47	41,8	42,22	43,11	35,02	41,47	-	85,64%	100,00%	-
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
1	Perencanaan										100,00%	100,00%	
1.1	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	-
1.2	Konsistensi program RKPD dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	-
2	Keuangan										100,00%	100,00%	
2.2	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	100,00%	100,00%
2.3	Persentase SilPA terhadap LRA	%	6	5,5	5	6,7	6,7	13,22	24,48	-	100,00%	100,00%	-
2.4	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	12,5	20,21	-	100,00%	100,00%	-
2.5	Persentase belanja pendidikan	%	20	20	20	20	20	25,54	119,75	-	100,00%	100,00%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2.6	Persentase belanja kesehatan	%	10	10	10	10	10	14,49	153	-	100,00%	100,00%	-
3	Kepegawaian dan Diklat										97,51%	100,00%	100,00%
3.1	Persentase tingkat pendidikan aparatur Pemprov yang berpendidikan S1-S2-S3	%	78	79	80	81	82	76,06	83,03	83,36	97,51%	100,00%	100,00%
4	Penelitian dan Pengembangan										100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	60	65	70	75	80	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi	%	80	80	85	85	85	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%
5	Pengawasan										89,79%	51,62%	
5.1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	%	60	65	70	75	80	49,82	49,16	-	83,03%	75,63%	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5.2	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK	%	67	69	71	73	75	64,68	19,05	-	96,54%	27,61%	-

Sumber: Evaluasi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Dipindai dengan CamScanner

Capaian IKK pada setiap urusan memiliki hasil yang berbeda sesuai dengan capaian kinerja indikatornya. Pada fokus pelayanan urusan wajib, rata-rata total capaian mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Beberapa urusan yang mengalami peningkatan adalah urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang total capaiannya naik dari 88,70% menjadi 100%, dan bertahan 100% hingga 2024 meskipun total capaian ini hanya didukung oleh dua indikator kinerja daerah pada tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing memiliki capaian sebesar 100%. Kemudian terdapat urusan Tenaga Kerja yang naik dari 75,37% pada tahun 2022 ke 90,93% pada tahun 2023 dan naik menjadi 91,05% pada tahun 2024 dengan catatan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 indikator yang belum terisi capaiannya yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang total capaiannya naik dari 93,09% menjadi 100%, dan bertahan 100% hingga 2024.

Masih pada fokus pelayanan urusan wajib, urusan Pengendalian Penduduk dan KB total capaiannya naik dari 97,75% menjadi 98,40%, dan naik 99,99% pada 2024. Urusan Komunikasi dan Informasi total capaiannya naik dari 94,30% menjadi 99,38%, dan naik 99,47% pada 2024. Urusan Persandian yang total capaiannya naik dari 66,67% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 dan bertahan 100% pada tahun 2024. Urusan Kebudayaan yang total capaiannya naik dari 67,79% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023. Urusan Kearsipan yang total capaiannya naik dari 77,77% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 dan bertahan 100% pada tahun 2024.

Pada fokus pelayanan urusan pilihan, terdapat beberapa urusan yang tetap konsisten mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut, yakni urusan Kehutanan dan ESDM. Selain itu terdapat beberapa urusan yang mengalami peningkatan capaian, seperti urusan Pariwisata yang naik dari 96,08% pada tahun 2022 menjadi 96,42% pada tahun 2023. Pada fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan, data capaian indikator kinerja daerah yang sudah tersedia hingga tahun 2024 terdapat pada urusan Kepegawaian dan

Dipindai dengan CamScanner

Diklat serta Penelitian dan Pengembangan. Urusan Penelitian dan Pengembangan berhasil mempertahankan capaian sebesar 100% dari tahun 2022 hingga 2024.

2.5. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh uraian tentang kondisi umum daerah, kinerja pemerintah daerah serta potensi perekonomian dan daya saing daerah saat ini pada akhirnya membangun pencapaian target pembangunan berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jambi. Adapun pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Data dalam Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian TPB Provinsi Jambi. Dari 224 target pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan karakter yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Dari target PB tersebut, 51 target (22,76%) dapat dicapai, 121 target (54,01%) belum dapat dicapai, dan belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang tersedia adalah sebanyak 57 target (25,44% dari total target PB).

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-23 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2024

TPB		Jumlah Indikator	Status Capaian Indikator			
			Tercapai	Dilaksanakan tapi Belum Tercapai	Belum Dilaksanakan	Belum teridentifikasi
1	Tanpa kemiskinan	24	7	12	-	5
2	Tanpa kelaparan	11	4	6	-	1
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	9	19	1	5
4	Pendidikan berkualitas	10	6	4	-	-
5	Kesetaraan gender	15	4	7	-	4
7	Energi bersih dan terjangkau	6	-	6	-	-
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	8	6	-	5
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	15	-	7	4	4
10	Berkurangnya kesenjangan	9	4	2	-	3
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	2	10	-	4
6	Air bersih dan sanitasi layak	10	1	9	-	7
11	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	18	1	2	6	7
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	5	-	2	-	3

Dipindai dengan CamScanner

TPB		Jumlah Indikator	Status Capaian Indikator			
			Tercapai	Dilaksanakan tapi Belum Tercapai	Belum Dilaksanakan	Belum teridentifikasi
13	Penanganan perubahan iklim	3	-	2	1	-
14	Ekosistem lautan	4	-	2	2	-
15	Ekosistem daratan	7	1	3	3	-
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	18	4	5	-	9
	Total	224	51	104	17	57
			22,76%	46,43%	7,58%	25,44%

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025.

Keterangan:

Tujuan 1 – 5 termasuk Pilar Sosial

Tujuan 7-10 dan Tujuan 17 termasuk Pilar Ekonomi

Tujuan 6, dan Tujuan 11-15 termasuk Pilar Lingkungan

Tujuan 16 adalah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Dipindai dengan CamScanner

Sementara tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator berdasarkan pengelompokkan TPB, dimana Pilar Sosial merupakan pilar yang paling banyak mencapai target (31,91% dari total target TPB) dan Pilar Lingkungan yang paling sedikit mencapai target (4,34% dari total target TPB).

Tabel 2-24 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi berdasarkan kelompok pilar TPB Tahun 2024.

Pilar	Sudah tercapai	Belum tercapai	Belum dilaksanakan	Tidak teridentifikasi
Sosial	31,91%	51,06%	1,06%	15,96%
Ekonomi	23,37%	38,96%	5,19%	3,25%
Lingkungan	4,34%	50,00%	19,56%	36,95%
Hukum & Tata Kelola	14,28%	42,85%	42,85%	0%

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator TPB yang belum mencapai target TPB sebagian besar merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Hal-hal ini selayaknya menjadi permasalahan dan menjadi isu penting pembangunan pada periode tahun 2025-2029. Adapun target yang belum teridentifikasi menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang dalam penyediaannya untuk segera melengkapi sistem pendataannya, sehingga informasi mengenai kondisi pencapaian TPB dapat diperoleh dengan baik.

2.6. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran umum keuangan daerah merupakan deskripsi mengenai kondisi dan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jambi kurang lebih dari tahun 2020 hingga 2024. Uraian ini mencakup berbagai komponen keuangan, seperti sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja, pembiayaan, serta posisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi ini bertujuan untuk memberikan dasar yang jelas dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan keuangan di Provinsi Jambi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dipindai dengan CamScanner

2.6.1 Kinerja Keuangan Masa lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan gambaran atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama kurang lebih lima tahun. Melalui analisis terhadap capaian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengidentifikasi tren, peluang, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.6.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020-2024 cukup efektivitas dan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi, serta hibah dan dana pinjaman luar negeri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-25 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1	**PENDAPATAN**	**4.176.315.760.183**	**4.401.754.558.279**	**4.335.678.330.489**	**4.623.218.413.285**	**4.732.466.084.399**	**2,53**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.360.986.764.132**	**1.601.141.999.879**	**1.934.773.577.429**	**2.095.649.226.538**	**2.095.941.407.210**	**9,02**
1.1.1.	Pajak daerah	1.157.871.072.637	1.383.781.959.390	1.669.702.987.193	1.845.711.834.788	1.839.108.467.508	9,7
1.1.2.	Retribusi daerah	8.605.407.970	11.384.921.000	18.257.083.000	18.039.428.824	14.250.945.752	10,62
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.212.590.404	28.028.487.059	30.422.308.662	30.978.710.988	35.478.131.502	2,59
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	163.297.693.121	177.946.632.430	216.391.198.574	200.919.251.938	207.103.862.448	4,87
1.2	**Pendapatan Transfer**	**2.813.320.996.051**	**2.757.317.396.862**	**2.366.533.561.680**	**2.494.901.768.726**	**2.613.755.920.792**	**-1,46**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2.008.000.000**	**43.295.161.538**	**34.371.191.380**	**32.667.418.021**	**22.768.756.398**	**62,52**
1.3.1	Hibah	2.008.000.000	43.295.161.538	34.371.191.380	31.955.195.312	21.121.700.781	60,1
1.3.2	Sumbangan pihak ketiga/sejenis	-	-	-	-	44.353.468	-
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				712.222.709		
2	**Belanja**	**4.585.971.756.628**	**4.804.809.609.170**	**5.048.952.520.090**	**5.175.212.402.247**	**4.597.652.753.214**	**0,05**
2.1	**Belanja Operasi**	**3.037.710.623.112**	**3.384.013.148.749**	**3.116.987.609.331**	**3.061.858.926.453**	**2.833.572.488.663**	**-1,38**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.443.168.934.492	1.605.159.526.709	1.576.302.175.953	1.485.016.143.305	1.605.144.672.135	2,15
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	906.312.604.839	920.945.581.591	1.315.437.389.050	1.412.126.405.370	1.017.010.009.757	2,33
2.1.3	Belanja Subsidi	550.000.000	550.000.000	8.182.500.000	5.739.553.750	3.296.278.000	-16,63
2.1.4	Belanja Hibah	687.350.583.781	805.198.505.268	198.559.518.524	155.214.824.028	207.371.528.771	-21,31
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	328.500.000	52.159.535.180	18.506.025.803	3.762.000.000	750.000.000	-57,19
2.2	**Belanja Modal**	**628.761.734.830**	**485.312.936.606**	**975.361.703.155**	**1.039.534.897.828**	**969.771.429.676**	**9,05**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**185.286.968.857**	**124.224.875.356**	**28.884.765.344**	**1.728.565.845**	**-**	**-100**
2.4	**Belanja Transfer**	**734.212.429.830**	**811.258.648.459**	**927.718.442.260**	**1.072.090.012.121**	**794.308.834.875**	
2.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**634.365.509.830**	**717.538.648.459**	**768.618.442.260**	**899.987.022.121**	**739.643.062.875**	**3,12**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
2.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**99.846.920.000**	**93.720.000.000**	**159.100.000.000**	**172.102.990.000**	**54.665.772.000**	**-11,35**
2.4.1.2	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	99.846.920.000	93.720.000.000	159.100.000.000	172.102.990.000	54.665.772.000	-11,35
3.1	**Pembiayaan**	**409.655.996.445**	**403.055.050.891**	**664.554.605.133**	**621.327.501.413**	**53.522.386.751**	**-33,44**
3.2	Penerimaan Pembiayaan	422.155.996.445	403.055.050.891	691.761.136.315	631.461.501.413	83.682.590.909	-27,65
3.3	Pengeluaran Pembiayaan	12.500.000.000	-	27.206.531.182	10.134.000.000	30.160.204.158	19,26

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.
*Ket: * unaudited*

Dipindai dengan CamScanner

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifiksi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2020-2024 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan

Dipindai dengan CamScanner

Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.

1. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibeberapa Kabupaten, dan menyediakan beberapa gerai samsat pada pusat perbelanjaan di Kota Jambi, serta pembayaran pajak melalui ATM.
2. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
4. Mengadakan pertemuan dengan Dealer Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha Show Room kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
6. Melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber

Dipindai dengan CamScanner

pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan transfer pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Bila dilihat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), dengan membandingkan Total PAD dengan Pendapatan Transfer, maka terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah berfluktuatif. Kondisi ini disebabkan berfluktuatifnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik pajak daerah maupun retribusi.

Tabel 2-26 Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai RKKD (%)
2020	52,32
2021	74,39
2022	88,58
2023	87,87
2024	80,19

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah

Selain itu, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, terlihat bahwa pada periode tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan adalah sebesar (0,03)% dengan predikat capaian pada tahun 2024 yaitu *Under Target*. Pada komponen pendapatan, rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai sebsar (0,07)% dan Pendapatan Asli Daerah mencapai sebesar (0,06)%, sementara Pendapatan transfer terus terkoreksi dengan rata-rata tumbuh (0,00)%

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-27 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Rp)

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024*		Rata-rata Pertumbuhan(%)
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	
1	**PENDAPATAN**	**105,37**	**OT**	**107,36**	**OT**	**106,75**	**OT**	**98,75**	**UT**	**91,95**	**UT**	**-0,03**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**112,8**	**OT**	**115,13**	**OT**	**112,01**	**OT**	**100,34**	**OT**	**83,59**	**UT**	**-0,06**
1.1.1.	Pajak daerah	111,65	OT	112,6	OT	112,11	OT	100,13	OT	102,26	OT	-0,02
1.1.2.	Retribusi daerah	216,07	OT	110,82	OT	92,54	UT	95,05	UT	102,94	OT	-0,14
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	89,46	UT	100	E	100,63	OT	100,1	OT	8,66	UT	-0,37
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	119,99	OT	137,5	OT	114,48	OT	102,94	OT	72,64	UT	-0,1
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**101,77**	**OT**	**104,45**	**OT**	**103,38**	**OT**	**97,47**	**UT**	**99,98**	**UT**	**0**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**127,11**	**OT**	**5,34**	**UT**	**42,83**	**UT**	**97,47**	**UT**	**89,98**	**UT**	**-0,07**
1.3.1	Hibah	**127,11**	**OT**	**5,34**	**UT**	**42,83**	**UT**	**97,47**	**UT**	**89,98**	**UT**	**-0,07**
1.3.2	Dana darurat	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	0
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi											

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024*		Rata-rata Pertumbuhan(%)
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	
1.3.3	dan Pemerintah Daerah lainnya	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	0
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	0
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	0
1.3.6	Pendapatan luar biasa	-	E	-	E	-	E	-	E	-	E	0
2	**Belanja**	**96,61**	**UT**	**91,33**	**UT**	**92,34**	**UT**	**97,59**	**UT**	**88,43**	**UT**	**-0,02**
2.1	**Belanja Operasi**	**95,54**	**UT**	**90,88**	**UT**	**90,5**	**UT**	**97,34**	**UT**	**91,86**	**UT**	**-0,01**
2.1.1	Belanja Pegawai	96,41	UT	93,46	UT	95,8	UT	97,8	UT	96,52	UT	0
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82,01	UT	83,68	UT	84,64	UT	96,95	UT	85,85	UT	0,01
2.1.3	Belanja Subsidi	100	E	100	OT	14,92	UT	86,77	UT	87,29	UT	0,79
2.1.4	Belanja Hibah	111,53	OT	96,59	UT	90,05	UT	97,15	UT	89,24	UT	-0,04
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100	E	50,48	UT	93,02	UT	85,6	UT	-	UT	-1
2.2	**Belanja Modal**	**102,22**	**OT**	**92,66**	**UT**	**93,02**	**UT**	**96,4**	**UT**	**91,9**	**UT**	**-0,02**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**82,41**	**UT**	**41,79**	**UT**	**31,47**	**UT**	**52,18**	**UT**	**-**	**UT**	**-1**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024*		Rata-rata Pertumbuhan(%)
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	
2.4	**Belanja Transfer**	**100,71**	**OT**	**100**	**E**	**99,73**	**UT**	**99,67**	**UT**	**75,61**	**UT**	
2.4.1	**Belanja Bagi Hasil**	**99,49**	**UT**	**100**	**E**	**100**	**E**	**100**	**E**	**83,83**	**UT**	**-0,03**
2.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**101,93**	**OT**	**100**	**E**	**98,43**	**UT**	**97,95**	**UT**	**32,5**	**UT**	**-0,2**
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	99,95	UT	100	E	98,43	UT	97,95	UT	32,5	UT	-0,24
3	**Pembiayaan**	**102,6**	**OT**	**96,9**	**UT**	**105,45**	**OT**	**100**	**UT**	**75,09**	**UT**	**-0,06**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	99,57	UT	96,9	UT	105,24	OT	100	UT	84,21	UT	-0,03
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	UT	-	E	100	E	100	E	100	E	0

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah.

Keterangan: *unaudited

E = Equal (realisasi sama dengan target/anggaran)

UT = Under Target (realisasi lebih kecil dari target/anggaran)

OT = Over Target (realisasi lebih besar dari target/anggaran)

Dipindai dengan CamScanner

Kinerja realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran pada perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Secara umum pendapatan daerah pada periode ini cukup efisien dan terus memperlihatkan perbaikan, yang ditandai dengan selalu terlampauinya target pendapatan. Komponen PAD yang kinerjanya kurang baik dalam periode 2020-2024 adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, karena hanya dua tahun terealisasi melampuai target yaitu tahun 2022 dan 2023, sedangkan tahun lalinnya tidak mencapai target atau sama dengan target. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dalam pemanfaatan aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan yang potensial.

Tabel 2-28 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**34,89**	**39,01**	**46,82**	**46,56**	**44,29**
1.1.1.	Pajak daerah	29,38	32,97	40,44	41,16	38,86
1.1.2.	Retribusi daerah	0,42	0,27	0,37	0,4	0,3
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,63	0,59	0,66	0,69	0,74
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	4,45	5,18	5,35	4,31	4,38
1.2.	**Pendapatan transfer**	**65,05**	**60,94**	**52,86**	**52,98**	**55,23**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,06**	**0,05**	**0,32**	**0,46**	**0,48**
1.3.1	Hibah	0,06	0,04	0,06	0,46	0,44

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah.

Proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dari sisi pendapatan daerah menunjukkan adanya fluktuasi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020- 2024 menunjukan tren peningkatan hingga 2023 dan turun kembali pada tahun 2024, khususnya pada tahun 2022 yang naik signifikan, di mana

Dipindai dengan CamScanner

PAD berkontribusi sebesar 46,82% terhadap pendapatan. Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan transfer yang proporsinya berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, hingga terakhir pada tahun 2024 adalah sebesar 55,23% dari sebelumnya sebesar 65,05% pada tahun 2020. Gambaran ini telah sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana sumber pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Tabel 2-29 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
2.1	**Belanja Operasi**	65,5	70,08	60,5	59,3	61,63
2.1.1	Belanja Pegawai	31,4	34,19	32,39	28,62	34,91
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,78	17,56	23,88	26,55	22,12
2.1.3	Belanja Subsidi	0,01	0,01	0,03	0,11	0,07
2.1.4	Belanja Hibah	17,3	17,72	3,84	3,64	4,51
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,6	0,37	0,07	0,01
2.2	**Belanja Modal**	14,51	10,25	19,46	20,01	21,09
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	3,45	1,18	0,19	0,03	0
2.4	**Belanja Transfer**	16,54	18,49	19,84	20,65	17,27
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	14,24	16,35	16,49	17,34	16,09
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2,3	2,14	3,36	3,32	1,19
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	2,25	2,14	3,36	3,32	1,19
2.4.2.2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,04	-	-	-	-

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah.

Sementara untuk proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dari sisi belanja daerah memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi masih mendominasi belanja Pemerintah Provinsi Jambi namun dengan tren penurunan proporsi setiap tahunnya. Hal sebaliknya

Dipindai dengan CamScanner

terjadi pada belanja modal dan belanja transfer yang terus mengalami peningkatan proporsi. Komponen belanja operasi yang mengalami kecenderungan peningkatan proporsi setiap tahunnya hingga tahun 2023 adalah belanja barang dan jasa walaupun turun kembali pada tahun 2024, sedangkan komponen lainnya mengalami tren penurunan, terutama belanja hibah. Proporsi belanja hibah hanya mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021, seiring beberapa program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang salah satunya adalah Jaring Pengaman Sosial serta belanja hibah kepada penyelenggara Pemilukada dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selain bertambahnya proporsi belanja hibah, kenaikan juga terjadi pada proporsi belanja tidak terduga pada tahun 2020 sebagai antisipasi bila anggaran yang disediakan untuk penanganan dampak Covid-19 dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kurang, juga menjadi penyebab berkurangnya proporsi belanja modal pada tahun 2020 secara cukup signifikan.

2.6.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, yang terdiri atas informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penyusunan Neraca Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kondisi keuangan daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-30 Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024

KD. REK		2020	2021	2022	2023	2024*	GR(%)
1	**ASET**	**9.058.798.239.794**	**9.529.828.339.383**	**9.966.114.108.839**	**9.749.435.634.858,49**	**11.355.284.302.595,30**	**4,62**
01.01	ASET LANCAR	765.755.995.537	1.145.898.246.997	1.126.523.999.016	759.129.617.876,05	947.405.768.770,92	**4,35**
01.01.01	Kas	432.451.382.483	770.762.428.594	675.149.288.355	114.644.547.795,34	249.839.508.827,26	**-10,39**
01.01.02	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0
01.01.03	Piutang	56.138.206.655	49.782.877.651	38.482.007.587	135.272.575.841,87	38.482.007.586,92	**-7,27**
01.01.04	Belanja dibayar dimuka	661.979.657	718.057.442	952.947.118	**900.197.421,48**	**952.947.117,00**	7,56
01.01.05	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-	0
01.01.06	Persediaan	276.504.426.742	324.634.883.310	411.939.755.957	**512.993.852.965,13**	**411.939.755.956,54**	8,3
	JUMLAH ASET LANCAR	**765.755.995.537**	**1.145.898.246.997**	**1.126.523.999.016**	**763.517.024.786,82**	**1.126.523.999.015,63**	**8,03**
	PERT.ASET LANCAR (%)	-22,81	49,64	-1,69	-32,22	47,54	**-215,82**
01.02	INVESTASI JANGKA PANJANG	413.360.381.437	450.607.618.003	553.022.330.023	574.608.774.753,55	574.608.926.336,57	**6,81**

Dipindai dengan CamScanner

KD. REK		2020	2021	2022	2023	2024*	GR(%)
01.02.01	Investasi Non Permanen	12.533.929.154	12.730.368.321	12.825.541.995	17.645.716.537,87	17.645.716.537,87	7,08
01.02.02	Investasi Permanen	400.826.452.283	437.877.249.682	540.196.788.028	556.963.058.215,68	556.963.209.798,70	6,8
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**413.360.381.437**	**450.607.618.003**	**553.022.330.023**	**574.608.774.753,55**	**574.608.926.336,57**	**6,81**
	PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%)	-6,29	9,01	19,88	0,71	-3,07	**-13,35**
01.03	ASET TETAP	6.711.472.204.139	6.784.809.194.787	7.211.579.477.356	7.713.073.093.786,33	9.126.098.065.143,14	**6,34**
01.03.01	Tanah	746.820.630.097	798.880.080.685	817.996.871.480	824.881.110.245,76	1.164.939.474.828,32	9,3
01.03.02	Peralatan dan Mesin	1.667.913.033.379	1.849.155.112.542	2.040.524.282.940	2.291.355.256.162,31	2.439.937.443.824,91	7,9
01.03.03	Gedung dan Bangunan	1.720.231.317.702	1.912.539.362.543	2.274.287.391.241	2.412.190.447.479,19	2.690.023.257.472,03	9,35
01.03.04	Jalan, Jaringan dan	7.727.796.254.785	7.859.184.496.597	8.138.216.722.214	8.313.008.425.085,06	8.542.841.604.098,25	2,03
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	466.335.510.863	454.067.721.432	446.175.353.278	526.367.675.032,49	519.982.747.867,36	2,2
01.03.06	Konstruksi dalam	94.622.912.487	86.723.699.079	88.983.181.957	490.592.194.363,32	823.573.585.022,98	54,15

Dipindai dengan CamScanner

KD. REK		2020	2021	2022	2023	2024*	GR(%)
	Pengerjaan						
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	-5.712.247.455.174	-6.175.741.278.092	-6.594.604.325.754	-7.145.322.014.581,81	-7.055.200.047.970,72	4,31
	JUMLAH ASET TETAP	**6.711.472.204.139**	**6.784.809.194.787**	**7.211.579.477.356**	**7.713.073.093.786,33**	**9.126.098.065.143,14**	**6,34**
	PERT.ASET TETAP (%)	2,87	1,09	6,29	6,95	18,32	**44,85**
01.04	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	**0**
01.04.01	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH DANA CADANGAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
	PERT.DANA CADANGAN (%)	-	-	-	-	-	0
01.05	ASET LAINNYA	1.168.209.658.681	1.148.513.279.597	1.074.988.302.445	534.707.292.029	540.029.172.846	**-14,3**
01.05.01	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	702.624.148.442,58	707.171.542.344,79	0
01.05.02	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	120.562.000	120.562.000	2.257.582.116	1.882.582.116,00	1.882.582.116,00	73,26

Dipindai dengan CamScanner

KD. REK		2020	2021	2022	2023	2024*	GR(%)
01.05.03	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	397.742.089.055	397.742.089.055	399.339.429.055	1.882.582.116,00	1.882.582.116,00	-65,72
01.05.04	Aset Tidak Berwujud	10.221.497.949	10.500.155.449	14.992.603.724	10.861.406.090,86	16.709.547.424,09	10,33
01.05.05	Aset Lain-lain	915.157.760.271	905.346.198.451	968.921.927.060	20.133.823.258,46	20.470.557.306,46	-53,23
	Akumulasi Amortisasi	-7.515.137.483	-7.785.942.478,66	-8.112.020.854	807.171.515.753,40	806.420.396.753,40	-354,76
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya- Aset Lain- lain	-147.517.113.112	-157.409.782.879,88	-302.411.218.657	-307.224.617.305,47	-307.336.492.870,03	15,81
	JUMLAH ASET LAINNYA	**1.168.209.658.681**	**1.148.513.279.597,10**	**1.074.988.302.445**	**702.624.148.442,58**	**707.171.542.344,79**	**-9,55**
	PERT.ASET LAINNYA (%)	17,06	-1,69	-6,4	-34,64	0,65	-48,02
	JUMLAH ASET	**9.058.798.239.794**	**9.529.828.339.383**	**9.966.114.108.839**	**9.749.435.634.858,49**	**11.355.284.302.595,30**	**4,62**
	PERT.ASET (%)	1,31	5,2	4,58	-2,17	16,47	65,93

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.
*Keterangan: *unaudit*

Dipindai dengan CamScanner

Pertumbuhan aset lancar dalam neraca keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 4,62 persen. Rata-rata pertumbuhan aset lancar ini ditopang oleh rata-rata pertumbuhan persediaan sebesar 8,30 persen dan pertumbuhan belanja dibayar dimuka sebesar 7,56 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan kas dan piutang melambat masing-masing minus 10,39 persen dan minus 7,27 persen atau mengalami penurunan.

Investasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 6,81 persen, investasi ini didorong oleh peningkatan investasi permanen yang tumbuh rata-rata sebesar 6,80 persen dan investasi non permanen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,08 persen. Investasi ini ditempatkan dibeberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinilai mempunyai prospek yang baik. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 senilai Rp6.711.472.204.139,- menjadi senilai Rp9.126.098.065.143,- pada tahun 2024, sehingga secara rata-rata aset tumbuh sebesar 6,34 persen pertahun. Kontribusi terbesar dari asset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan. Kontribusi terbesar kedua adalah gedung dan bangunan, diikuti aset tetap peralatan dan mesin. Peningkatan kontribusi jalan, jaringan dan instalasi serta gedung dan bangunan ini disebabkan alokasi biaya infrastruktur kurun waktu 2020-2024 yang meningkat sehingga beberapa asset Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-31 Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 - 31 Desember 2024

Kode rek.		2020	2021	2022	2023	2024*	GR (%)
2	**KEWAJIBAN**	**389.279.172.270**	**381.763.642.325**	**484.743.302.036**	408.544.086.633,06	403.322.869.516,19	**0,71**
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	389.279.172.270	381.763.642.325	484.743.302.036	406.631.759.608,55	401.410.542.491,68	**0,62**
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	148.939.727,00	0	
2 . 1 . 2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
2 . 1 . 3	Utang Pajak	-	-	-	-	-	
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	160.204.157,60	160.204.157,60	
3 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	21.037.500	6.187.500,00	21.037.500,00	
4 . 1 . 6	Utang Belanja	244.663.792.362	229.780.093.222	331.833.591.188	359.421.782.041,08	354.334.654.651,21	**7,69**
5 . 1 . 7	Utang Jangka Pendek Lainnya	144.615.379.908	151.983.549.104	152.888.673.348	151.983.549.104	152.888.673.348	**1,12**

Dipindai dengan CamScanner

Kode rek.		2020	2021	2022	2023	2024*	GR (%)
6 . 1 . 8	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	46.894.646.182,87	46.894.646.182,87	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**389.279.172.270**	**381.763.642.325**	**484.743.302.036**	**406.631.759.608,55**	**401.410.542.491,68**	**0,62**
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)	**-5,29**	**-1,93**	**26,97**	**-16,11**	**-1,28**	**-24,67**
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	1.912.327.024,51	1.912.327.024,51	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	1.912.327.024,51	1.912.327.024,51	
	PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	**389.279.172.270**	**381.763.642.325**	**484.743.302.036**	**408.544.086.633**	**403.322.869.516**	**0,71**

Dipindai dengan CamScanner

Kode rek.		2020	2021	2022	2023	2024*	GR (%)
	PERT. KEWAJIBAN (%)	**-5,29**	**-1,93**	**26,97**	**-15,72**	**-1,28**	**-24,74**

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.
*Keterangan: *unaudit*

Dipindai dengan CamScanner

Pada sisi kewajiban terdapat utang jangka pendek dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari Rp144.615.379.908,- pada tahun 2020 menjadi Rp152.888.673.348,- pada tahun 2024 atau tumbuh rata-rata sebesar 1,12 persen. Pertumbuhan utang jangka pendek ini berdampak pada kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Jambi dari dari Rp Rp389.279.172.270,- pada tahun 2020 menjadi Rp406.631.759.608,- pada tahun 2024 atau tumbuh rata-rata sebesar 0,62 persen. Perbedaan antara utang jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi masih mempunyai utang belanja dan utang pada pihak ketiga. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.912.327.024,- sampai tahun 2024.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current rasio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-32 Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
1. Rasio Lancar	**1,97**	**3,00**	**2,32**	**1,88**	**2,81**
2. Quick Ratio	**1,26**	**2,15**	**1,47**	**0,61**	**1,33**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025.

Rasio Lancar (Current ratio), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Provinsi Jambi dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi hutang jangka

Dipindai dengan CamScanner

pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 selalu lebih besar dari 1,5 namun menunjukan tren peningkatan hingga 2,81 pada tahun 2024 dari 1,97 pada tahun 2020. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka quick ratio yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya quick ratio yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 masih lebih besar dari 1 kecuali tahun 2023. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Provinsi Jambi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun nilai dari quick ratio yang berfluktuatif ini kedepan perlu pengolalaan asset lancar pemerintah daerah lebih hati-hati.

Tabel 2-33 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Solvabilitas					

Dipindai dengan CamScanner

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset	**0,04**	**0,04**	**0,05**	**0,04**	**0,04**
2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	**0,04**	**0,04**	**0,05**	**0,04**	**0,04**

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap equitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset diperoleh dengan membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2020-2024 berada pada rentang 0,04 – 0,05. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap asset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 cukup kuat jika untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Sementara rasio kewajiban terhadap ekuitas didapat dengan membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2020-2024 berada pada rentang 0,04-0,05. Nilai rasio ini sama dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Dipindai dengan CamScanner

selama tahun 2020- 2024 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Rasio aktivitas untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-34 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Aktivitas					
1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang	13,46	2,33	2,10	1,52	5,22
2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan	11,03	5,30	5,94	7,71	8,24

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025.

Rasio rata-rata umur piutang menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2020-2024 berada pada rentang 2,10 – 13,46. Tabel di atas menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 relatif berfluktuasi, namun cenderung turun.

Nilai Rasio rata-rata umur persediaan menunjukan jumlah perputaran persediaan dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relatif rendah dan dapat menganggu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relatif besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami

Dipindai dengan CamScanner

kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tersebut pada tahun 2020-2024 berada pada rentang 5,94 – 11,03. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.

2.6.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu merupakan rangkaian keputusan dan langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode sebelumnya. Pada pemerintah Provinsi Jambi, kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang.

2.6.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2020-2024 menunjukan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sehingga proporsi belanja program selama tahun 2020-2024 sedikit terganggu. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus di periode yang akan datang agar proporsi belanja terus fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Kondisi alokasi

Dipindai dengan CamScanner

anggaran tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 belum sepenuhnya berhasil mengarahkan prioritas belanja daerah pada sektor-sektor publik yang strategis, khususnya dalam rangka mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Tabel 2-35 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	2020	1.443.168.934.492	4.995.627.753.073	28,89
2	2021	1.605.159.526.709	5.207.864.660.061	30,82
3	2022	1.576.302.175.953	5.713.507.125.223	27,59
4	2023	1.485.016.143.305	5.796.539.903.660	25,62
5	2024	1.605.144.672.135	4.651.175.139.966	34,51

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.

2.6.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-36 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	4.176.315.760.183	4.401.754.558.279	4.335.678.330.489	4.623.218.413.285	4.732.466.084.399	2,53
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	4.585.971.756.628	4.804.809.609.170	5.048.952.520.090	5.175.212.402.247	4.597.652.753.214	0,05
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.500.000.000	-	27.206.531.182	10.134.000.000	30.160.204.158	0
	Defisit riil	(422.155.996.445)	(403.055.050.891)	(740.480.720.783)	(562.127.988.962)	104.653.127.027	-175,66

Sumber: BPKPD Provins Jambi, 2025, Data diolah.

Dipindai dengan CamScanner

Defisit riil anggaran Provinsi Jambi selama tahun 2020 hingga 2023 konsisten mengalami defisit hingga mencapai sebesar 562,12 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, anggaran mengalami surplus yang mencapai sebesar 104,65 miliar rupiah.

Tabel 2-37 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran sebelumnya	1,00	1,00	0,93	1,12	0,80
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025

Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Hasil memperlihatkan bahwa pembiayaan APBD Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

2.6.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu bagian penting dari kerangka keuangan yang memiliki hubungan erat dengan kapasitas pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Penyusunan kerangka pendanaan bertujuan untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam proses perencanaan kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode, sehingga tercapai sinkronisasi dan keselarasan antara target-target

Dipindai dengan CamScanner

pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Selain itu, analisis terhadap kerangka pendanaan dilakukan untuk menghitung kapasitas keuangan riil daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan jangka menengah daera

2.7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah, aspek pendapatan daerah memegang peranan yang sangat krusial. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa didahului oleh identifikasi dan pengukuran sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Oleh karena itu, penyusunan pendapatan daerah harus menjadi langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan, yang kemudian diikuti dengan tahapan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi terhadap seluruh komponen pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Dana Bagi Hasil Provinsi, perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Sejalan dengan itu, rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2026–2030 disusun berdasarkan estimasi yang terukur dan rasional, dengan memperhatikan potensi riil dari masing-masing sumber pendapatan. Adapun sumber utama pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kontribusi terbesar masih berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk dana transfer. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2030, meskipun proporsinya belum menjadi yang dominan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi hingga saat ini masih sangat bergantung pada alokasi dari Pemerintah Pusat, khususnya untuk belanja pegawai yang sebagian besar ditopang melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dipindai dengan CamScanner

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, direncanakan peningkatan investasi sebesar Rp115 miliar selama periode lima tahun, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.

Untuk mendukung target tersebut, strategi peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Strategi intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama instansi pemungut, serta penguatan profesionalisme dan kompetensi aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Sementara itu, strategi ekstensifikasi dilaksanakan melalui perluasan basis pemungutan yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-38 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2026-2030

No.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**4.732.466.084.399**	**4.463.169.552.167**	**4.521.629.605.743**	**4.652.499.551.321**	**4.781.780.845.668**	**4.913.877.487.090**	**1,94**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.095.941.407.210**	**2.044.276.611.767**	**2.065.129.905.751**	**2.111.473.004.005**	**2.157.250.131.954**	**2.202.939.853.536**	**1,51**
1.1.1.	Pajak daerah	1.839.108.467.508	1.683.672.147.921	1.700.543.089.336	1.742.574.187.969	1.783.958.076.305	1.825.171.693.481	**1,63**
1.1.2.	Retribusi daerah	14.250.945.752	199.117.628.465	203.099.981.034	207.161.980.655	211.305.220.268	215.531.324.673	**1,6**
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	35.478.131.502	125.359.863.220	125.359.863.220	125.359.863.220	125.359.863.220	125.359.863.220	**0**
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	207.103.862.448	36.126.972.161	36.126.972.161	36.376.972.161	36.626.972.161	36.876.972.161	**0,41**
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**2.613.755.920.792**	**2.402.397.940.400**	**2.454.699.699.992**	**2.539.208.547.316**	**2.622.694.533.714**	**2.709.083.091.754**	**2,43**
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah		2.402.397.940.400	2.454.699.699.992	2.539.208.547.316	2.622.694.533.714	2.709.083.091.754	**2,43**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Pusat							
1.2..	Dana Insentif Daerah		-	-	-	-	-	**0**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.768.756.398**	**16.495.000.000,00**	**1.800.000.000**	**1.818.000.000**	**1.836.180.000**	**1.854.541.800**	**-35,41**
1.3.1	Hibah	21.121.700.781	16.495.000.000,00	1.800.000.000,00	1.818.000.000,00	1.836.180.000,00	1.854.541.800,00	**-35,41**
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah	44.353.468	-	-	-	-	-	**0**
2	**BELANJA**	**4.597.652.753.214**	**4.513.022.450.088**	**4.556.482.503.664**	**4.687.352.449.243**	**4.836.633.743.589**	**4.948.730.385.011**	**1,86**
2.1	**Belanja Operasi**	**2.833.572.488.663**	**2.438.519.936.109**	**2.360.574.916.489**	**2.377.140.665.655**	**2.671.521.592.125**	**2.484.165.808.046**	**0,37**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.605.144.672.135	1.640.173.184.643	1.645.093.704.197	1.652.496.625.866	1.669.021.592.125	1.685.711.808.046	**0,55**
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.017.010.009.757	694.346.751.466	611.981.212.292	621.144.039.789	500.000.000.000	694.954.000.000	**0,02**
2.1.3	Belanja Subsidi	3.296.278.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	**0,00**
2.1.4	Belanja Hibah	207.371.528.771	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	500.000.000.000	100.000.000.000	**0,00**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000	3.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	**(3,04)**
2.2	**Belanja Modal**	**969.771.429.676**	**1.141.344.603.535**	**1.097.545.824.994**	**1.191.778.825.553**	**1.098.258.098.683**	**1.379.434.635.551**	**3,86**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**-**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**25.000.000.000**	**0,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**794.308.834.875**	**908.157.910.444**	**1.073.361.762.181**	**1.093.432.958.035**	**1.041.854.052.782**	**1.060.129.941.414**	**3,14**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	**739.643.062.875**	729.203.910.444	894.407.762.181	914.478.958.035	862.900.052.782	881.175.941.414	**3,86**
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	**54.665.772.000**	178.954.000.000	178.954.000.000	178.954.000.000	178.954.000.000	178.954.000.000	**0,00**
	Surplus (defisit)	104.653.127.027	(49.852.897.921)	(34.852.897.921)	(34.852.897.921)	(54.852.897.921)	(34.852.897.921)	**(6,91)**
3	**PEMBIAYAAN**	**53.522.386.751**	**49.852.897.921**	**34.852.897.921**	**34.852.897.921**	**54.852.897.921**	**34.852.897.921**	**-6,91**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	83.682.590.909	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	**0**
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	**0**
3.1.2	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-	-	**0**

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			2026	2027	2028	2029	2030	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Daerah							
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-	-	-	-	**0**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	30.160.204.158	15.147.102.079	30.147.102.079	30.147.102.079	10.147.102.079	30.147.102.079	**14,76**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo		147.102.079	147.102.079	147.102.079	147.102.079	147.102.079	**0**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda		15.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000	**14,87**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN			0	0	0	0	0	**0**

Sumber: Hasil Proyeksi BPKPD dan Analisa Bappeda, 2025

Dipindai dengan CamScanner

Pendapatan daerah ditargetkan akan meningkat rata-rata 1,94% tahun dalam kurun waktu 2026-2030, dengan target rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sebesar 2,43 persen per tahun, target rata-rata pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didorong sebesar 1,51 persen per tahun. Pertumbuhan target PAD tersebut didukung pertumbuhan rata-rata pajak daerah sebesar 1,63 persen dan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah sebesar 1,60 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan rata-rata PAD yang diproyeksikan lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer mengakibatkan ketergantungan Provinsi Jambi terhadap pendapatan transfer belum dapat berkurang hingga 5 tahun kedepan. Proporsi PAD diproyeksikan menurun dari 45,80 persen pada rencana tahun 2026 menjadi 44,83 persen pada tahun 2030 atau turun 0,97 persen. Sedangkan proporsi pendapatan transfer diproyeksikan naik dari target 53,83 persen tahun 2026 menjadi 55,13 persen pada tahun 2030 atau meningkat sebesar 1,30 persen.

Kontribusi rencana anggaran belanja dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,86 persen. Peningkatan ini didorong oleh belanja operasi yang diproyeksikan tumbuh rata-rata 0,37 persen, yang salah satunya didukung oleh pertumbuhan rata-rata belanja pegawai hanya 0,55 persen. Pertumbuhan belanja pegawai yang tidak terlalu besar ini dalam rangka memenuhi kewajiban daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30 persen paling lambat tahun 2027. Sementara pertumbuhan rata-rata belanja modal sebesar 3,86 persen serta rata- rata pertumbuhan belanja transfer sebesar 3,14 persen selama kurun waktu 2026-2030. Melalui proporsi belanja modal yang cukup, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Jambi pada periode RPJMD ini.

Sementara pada belanja bantuan keuangan direncanakan untuk penunjang pelaksanaan program PRO JAMBI setiap tahunnya untuk

Dipindai dengan CamScanner

diberikan kepada 1585 desa/ kelurahan, kecamatan serta insentif Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam rangka mendukung pembentukan Desa BERSINAR (Bersih Narkoba) dan pemberantasan Judi online di Desa/ Kelurahan yang akan dialokasikan secara proporsional dalam Bantuan Keuangan untuk kecamatan. Bantuan keuangan ini menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan di desa/kelurahan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun dengan besaran indikatif.

2.7.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari penghitungan kerangka pendanaan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2-39 Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Jambi Tahun 2026-2030

No	Uraian	2025 (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.843.726.203.467	0,02	1.948.726.203.467	2.046.162.513.640	2.107.547.389.050	2.128.622.862.940	2.192.481.548.828
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0
3	Belanja bagi hasil	729.203.910.444	0,04	729.203.910.444	894.407.762.181	914.478.958.035	862.900.052.782	881.175.941.414
4	Belanja PRO JAMBI	0	0	478.954.000.000	478.954.000.000	478.954.000.000	478.954.000.000	478.954.000.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	15.147.102.079	0,15	15.147.102.079	30.147.102.079	30.147.102.079	10.147.102.079	30.147.102.079
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
b	Pembayaran pokok utang	147.102.079	0	147.102.079	147.102.079	147.102.079	147.102.079	147.102.079
c	Penyertaan Modal	15.000.000.000	0,15	15.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	30.000.000.000
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	**2.588.077.215.990**	**0,02**	**3.172.031.215.990**	**3.449.671.377.900**	**3.531.127.449.163**	**3.480.624.017.801**	**3.582.758.592.322**

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.

Dipindai dengan CamScanner

Rencana anggaran belanja wajib Provinsi jambi pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp3.172.031.215.990,- dan direncanakan tumbuh rata-rata 0,02 persen hingga menjadi Rp3.582.758.592.322,- pada tahun 2030. Belanja pegawai akan menjadi salah satu komponen belanja yang memiliki nilai yang besar yaitu pada tahun 2026 akan mencapai sebesar Rp1.948.726.203.467,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp2.192.481.548.828,- di tahun 2030.

Tabel 2-40 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1.	Pendapatan	4.176.315.760.183	4.401.754.558.279	4.335.678.330.489	4.623.218.413.285	4.732.466.084.399
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	49.852.897.921	34.852.897.921	34.852.897.921	54.852.897.921	34.852.897.921
	Total penerimaan	4.226.168.658.104	4.436.607.456.200	4.370.531.228.410	4.678.071.311.206	4.767.318.982.320
	Dikurangi:	3.187.178.318.069	3.479.818.479.979	3.561.274.551.242	3.490.771.119.880	3.612.905.694.401
4.	Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	3.172.031.215.990	3.449.671.377.900	3.531.127.449.163	3.480.624.017.801	3.582.758.592.322
5.	Pengeluaran Pembiayaan	15.147.102.079	30.147.102.079	30.147.102.079	10.147.102.079	30.147.102.079
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.038.990.340.035	956.788.976.221	809.256.677.168	1.187.300.191.326	1.154.413.287.919

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jambi, 2025

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama tersebut, maka didapatkan realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2026 adalah sebesar Rp1.038.990.340.035,- dengan rencana pertumbuhan rata- rata minus 0,02 persen hingga menjadi Rp1.154.413.287.919,- pada tahun 2030.

Tabel 2-41 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.038.990.340.035	956.788.976.221	809.256.677.168	1.187.300.191.326	1.154.413.287.919
	Prioritas I	832.791.584.711	708.958.227.843	757.372.102.158	653.656.827.867	872.664.894.768
	Prioritas II	206.198.755.324	247.830.748.378	51.884.575.010	533.643.363.459	281.748.393.152

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jambi, 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi direncanakan untuk mendanai pembangunan di Provinsi Jambi dengan proporsi belanja prioritas I pada tahun 2026 akan mencapai sebesar Rp832.791.584.711,- yang diantaranya untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Dipindai dengan CamScanner

Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun. Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 5 tahun kedepan (tahun 2026-2030) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Jambi pada tahun 2026-2030 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, atau pada Bank Jambi.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan bidang usaha BUMD.

Dipindai dengan CamScanner

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Jambi untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jambi diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan emudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (foreign direct investment).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN.
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah.

2.7. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Permasalahan pembangunan Provinsi Jambi dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan sesuai data gambaran umum dan Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjaringan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Permasalahan tersebut kemudian disandingkan dengan temuan KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, serta isu lingkungan dinamis di tingkat global, nasional, dan daerah, untuk menghasilkan rumusan isu strategis yang menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan kinerja RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029.

Dipindai dengan CamScanner

2.7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Mengacu capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi selama periode sebelumnya, beberapa permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut.

2.7.1.1 Volatilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Akibat Fluktuasi Harga serta Produksi Komoditas Unggulan

Periode 2019–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi dan konsisten di bawah angka nasional, kecuali pada masa pandemi 2020 (–0,51% versus nasional –2,07%). Setelah kontraksi terdalam pada 2020, ekonomi Jambi pulih ke 3,71% (2021) dan mencapai puncak 5,12% (2022), kemudian melambat menjadi 4,67% (2023) dan 4,51% (2024), sedangkan LPE nasional stabil di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi Jambi juga cenderung tidak stabil (1,4% pada tahun 2019, melonjak ke 6,35% pada tahun 2022, lalu turun ke 1,43% pada tahun 2024) dibandingkan nasional yang berkisar antara 1,57–5,51%. Perbedaan tren ini menandakan kerentanan Jambi terhadap guncangan eksternal dan dinamika domestik. Secara eksternal, ekonomi Jambi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas primer (sawit, karet, batu bara) di pasar internasional, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Disrupsi rantai pasok global dan tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi turut mendorong volatilitas. Selain itu, tren digitalisasi dan adaptasi teknologi di sektor riil masih berlangsung lambat, sehingga potensi pertumbuhan nilai tambah belum optimal.

Dipindai dengan CamScanner

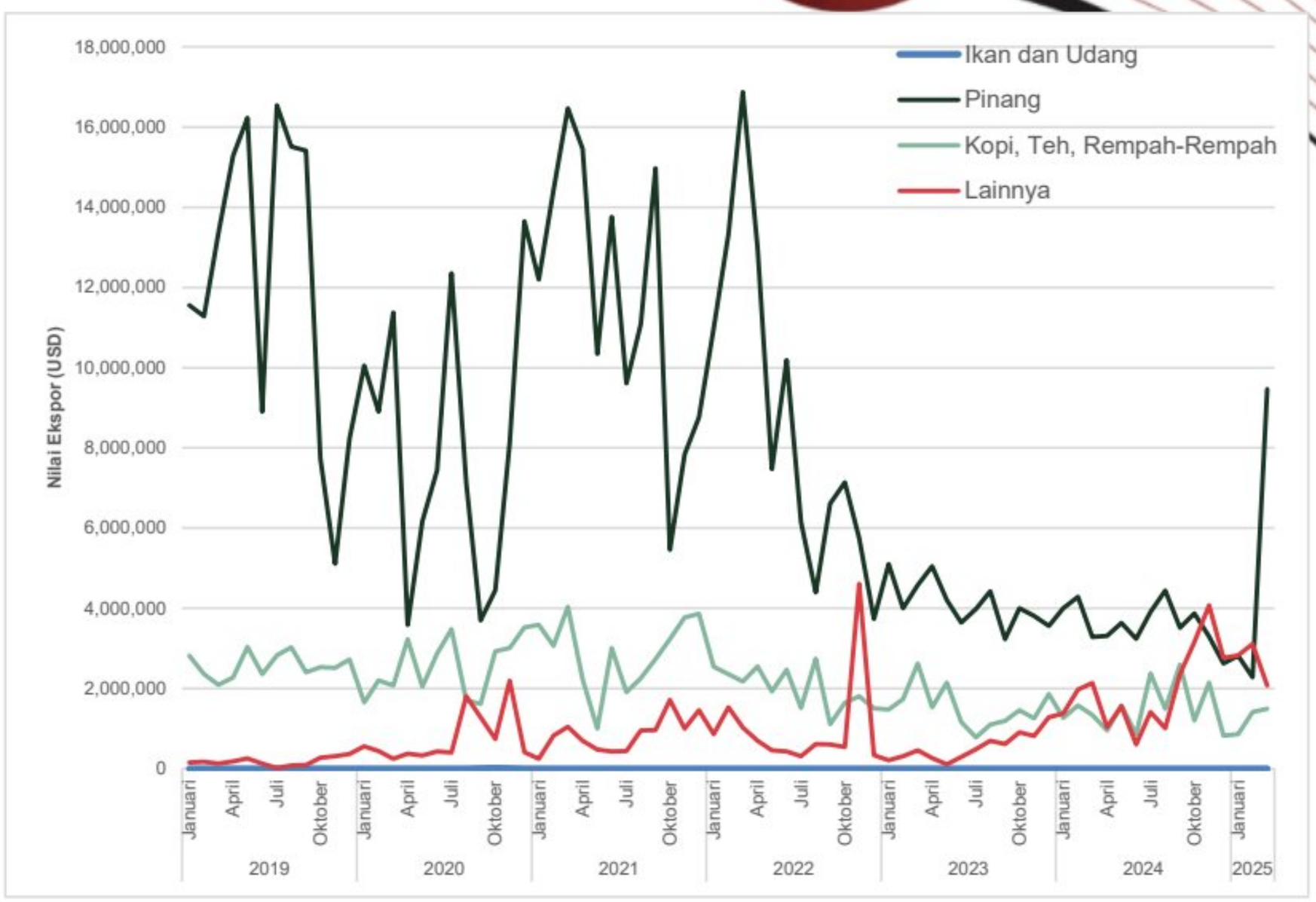

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-79 Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Utama Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025

Pada sektor primer (pertanian, perkebunan, dan perikanan), berdasarkan empat kelompok komoditas utama dari tahun 2019 hingga Maret 2025 (Ikan dan Udang, Pinang, Kopi, Teh, dan Rempah-rempah, serta komoditas lainnya), terlihat bahwa komoditas pinang menjadi penopang utama nilai ekspor sektor pertanian dengan kontribusi nilai yang jauh lebih besar dibandingkan komoditas lain, meskipun nilainya sangat fluktuatif. Fluktuasi tersebut cukup signifikan, namun dengan deviasi bulanan yang cenderung menurun sejak akhir 2022, menunjukkan stabilisasi nilai ekspor. Sebaliknya, komoditas seperti kopi, teh, dan rempah-rempah, serta ikan dan udang, menunjukkan nilai ekspor yang relatif lebih kecil namun stabil, meskipun terdapat beberapa lonjakan.

Jika dibandingkan antara periode sebelum COVID-19 (2019–awal 2020) dan sesudahnya, terlihat adanya penurunan dan ketidakstabilan nilai ekspor pinang yang signifikan selama tahun 2020 akibat terganggunya rantai pasok dan permintaan global saat pandemi. Namun, pada 2021 hingga pertengahan 2023, terjadi pemulihan yang cukup baik, meski tidak sepenuhnya stabil. Di sisi lain, peningkatan nilai ekspor "komoditas lainnya" setelah 2022 menunjukkan mulai

Dipindai dengan CamScanner

munculnya diversifikasi sumber ekspor sektor pertanian. Terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi, **fluktuasi harga ekspor pertanian, terutama pinang, berpotensi berdampak pada pendapatan petani dan pelaku usaha agrikultur di daerah**. Ketika harga ekspor meningkat, maka pendapatan daerah dan rumah tangga pertanian juga dapat meningkat, sehingga turut menekan inflasi dari sisi penawaran. Namun, ketergantungan terhadap komoditas tertentu yang harganya berfluktuasi juga bisa menciptakan ketidakpastian dan berisiko menekan pertumbuhan ekonomi daerah jika harga jatuh secara drastis.

Pasca-pandemi, harga ekspor pinang Provinsi Jambi mengalami penurunan drastis dari puncaknya yang kerap di atas 16 juta USD per bulan menjadi hanya sekitar 3–4 juta USD (Juni 2024, BPS Provinsi Jambi tahun 2025). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pasar India yang melemah dan struktur rantai pasok yang panjang, di mana pinang Jambi dikirim melalui negara ketiga sebelum mencapai konsumen akhir. Akibatnya, petani hanya menerima kurang dari 10% harga dunia (di bawah Rp 6.500/kg), walaupun kualitasnya diakui setara pinang premium global. Kelebihan pasokan lokal tanpa saluran distribusi langsung juga memperburuk dampak depresiasi harga, sehingga banyak petani mulai beralih ke tanaman lain seperti kelapa sawit untuk mengejar stabilitas pendapatan. Penurunan nilai ekspor pinang ini berimplikasi ganda pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jambi. Pendapatan ekspor komoditas primer yang menyusut menekan daya beli masyarakat agraris, mengurangi konsumsi domestik di pedesaan, dan memperlambat pemulihan pasca-COVID-19. Selain itu, volatilitas harga pinang turut memengaruhi stabilitas ekonomi makro, karena sektor pertanian/perkebunan masih menyumbang hampir sepertiga PDRB pertanian Jambi.

Dipindai dengan CamScanner

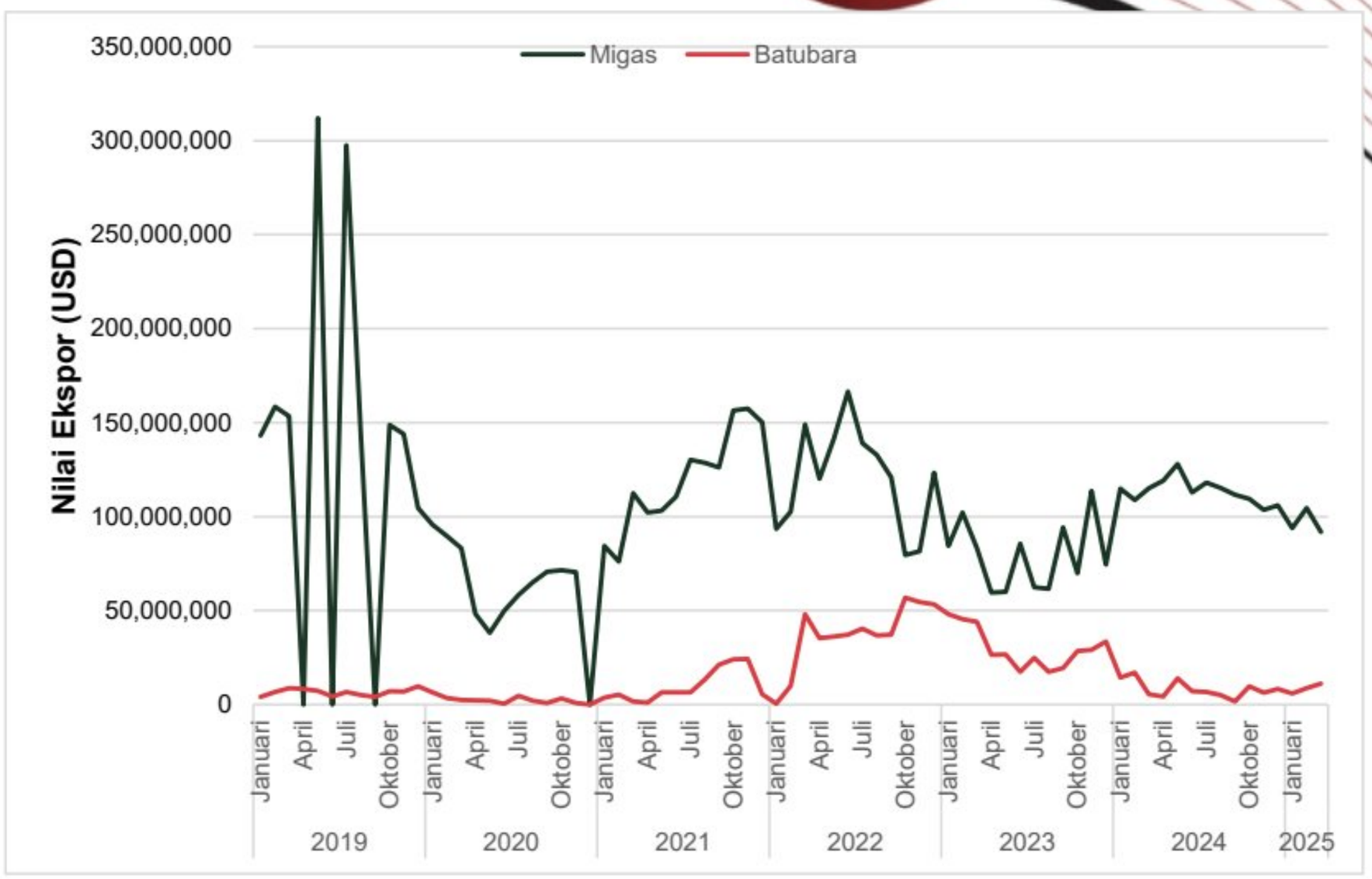

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-80 Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Pertambangan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025

Pada sektor pertambangan, nilai ekspor migas Provinsi Jambi jauh melampaui komoditas lain yaitu di atas 100 juta USD per bulan sejak 2021. Sementara itu, ekspor batu bara hanya memiliki total juta hingga puluhan juta USD. Sebelum pandemi, fluktuasi migas sangat tajam (melonjak ke 310 juta USD pada pertengahan 2019 yang kemudian diikuti penurunan drastis), dipicu oleh perubahan kuota lifting nasional, harga minyak mentah dunia yang bergejolak, dan pemeliharaan lapangan yang menurunkan produksi. Setelah pandemi, volatilitas ekspor migas mereda, dengan nilai ekspor yang stabil di kisaran 80–160 juta USD per bulan. Kondisi yang mulai stabil ini diperkirakan dipengaruhi oleh kontrak jangka panjang dan mekanisme lindung nilai (*hedging*) yang mulai diterapkan oleh pemerintah nasional dan provinsi. Di saat bersamaan, sektor batu bara mencatat lonjakan sementara pada awal 2022, akibat krisis energi Eropa yang mendorong harga Newcastle Index ke rekor tertinggi, meskipun kembali menurun setelah permintaan global menurun. Pola ini memperlihatkan bahwa meski batu bara sempat menjadi penyumbang pendapatan tambahan, sifatnya yang sementara dan terpengaruh kebijakan pembatasan ekspor menjadikan komoditas pertambangan kurang dapat diandalkan sebagai pilar utama ekonomi Provinsi Jambi.

Dipindai dengan CamScanner

Ketergantungan berlebih pada migas dan batu bara menimbulkan risiko fiskal, dengan pendapatan daerah yang sangat tergantung pada dua komoditas primer sehingga fluktuasi harga internasional langsung memengaruhi kemampuan belanja pemerintah, khususnya belanja modal dan program pembangunan. Selain itu, rantai pasok migas dan batu bara yang panjang dan terkadang dikontrol hanya oleh pemerintah pusat menimbulkan tantangan bagi Otoritas Provinsi dalam mengelola dan merencanakan anggaran jangka panjang. Ketika harga jatuh, defisit pendapatan harus ditutup dengan pemotongan anggaran atau pinjaman daerah, yang pada akhirnya dapat menunda proyek strategis daerah.

Kondisi perekonomian Provinsi Jambi saat ini masih sangat bergantung pada komoditas primer seperti migas dan batu bara, yang minim proses hilirisasi dan memiliki rantai nilai pendek. Kurangnya industri pengolahan migas menjadi produk bernilai tambah seperti petrokimia maupun gasifikasi menyebabkan potensi ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun sektor batu bara masih terbatas pada ekspor bahan mentah tanpa pemrosesan lanjut seperti coal-to-liquid, sehingga manfaat ekonomi yang diterima oleh Provinsi Jambi relatif kecil dibanding potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu, ketergantungan pada pelabuhan di luar provinsi dan lemahnya infrastruktur logistik menghambat kelancaran ekspor langsung, meningkatkan biaya distribusi, serta membatasi daya saing produk ekspor asal Provinsi Jambi di pasar global. Ketidaksiapan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jambi masih rentan terhadap guncangan eksternal dan belum mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Di tingkat domestik, struktur fiskal Jambi menghadapi tantangan serius. Rasio pajak daerah terhadap PDRB masih rendah, sementara alokasi belanja modal dan transfer ke daerah belum sepenuhnya diarahkan ke proyek produktif. Belanja rutin yang besar membatasi ruang fiskal untuk stimulus infrastruktur dan dukungan UMKM, sedangkan kedua sektor tersebut sangat penting untuk memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan *resilient*. Dari sisi inflasi, ketergantungan pasokan pangan pada luar daerah dan terbatasnya infrastruktur logistik turut memicu lonjakan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang merupakan

Dipindai dengan CamScanner

kontributor utama inflasi Jambi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa perubahan iklim turut menyebabkan musim tanam tidak menentu, sehingga memperburuk pasokan dan daya tahan harga pangan lokal.

Dipindai dengan CamScanner

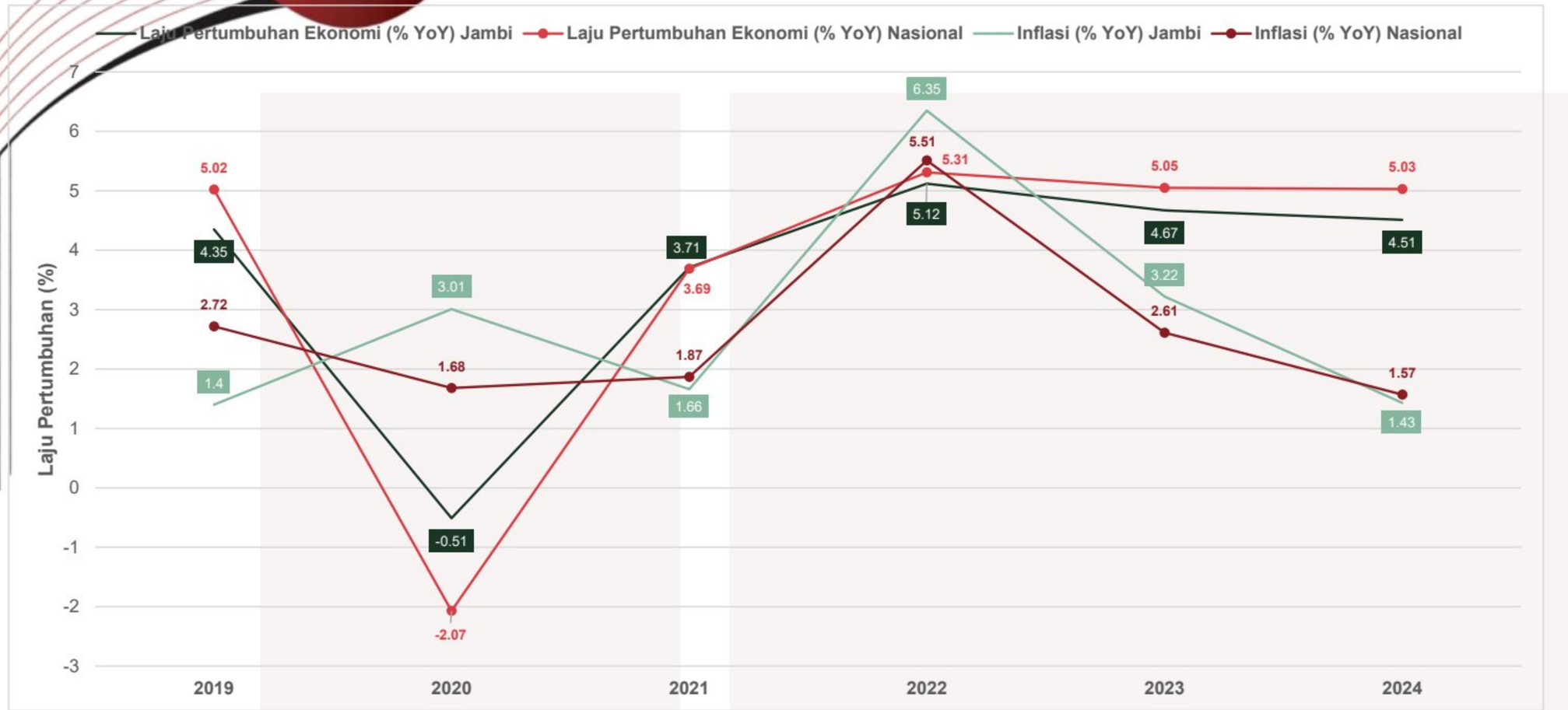

Gambar 2-81 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Provinsi Jambi terhadap Nasional, Tahun 2019 - 2024

Dipindai dengan CamScanner

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang paling sering menyumbang inflasi di Provinsi Jambi. Hal ini turut dipengaruhi oleh pasokan bahan makanan Provinsi Jambi yang masih bergantung dengan daerah lain serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan musim panen tidak menentu.

2.7.1.2 Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian IPM Provinsi Jambi masih di bawah beberapa provinsi lain seperti Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu serta masih di bawah capaian nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

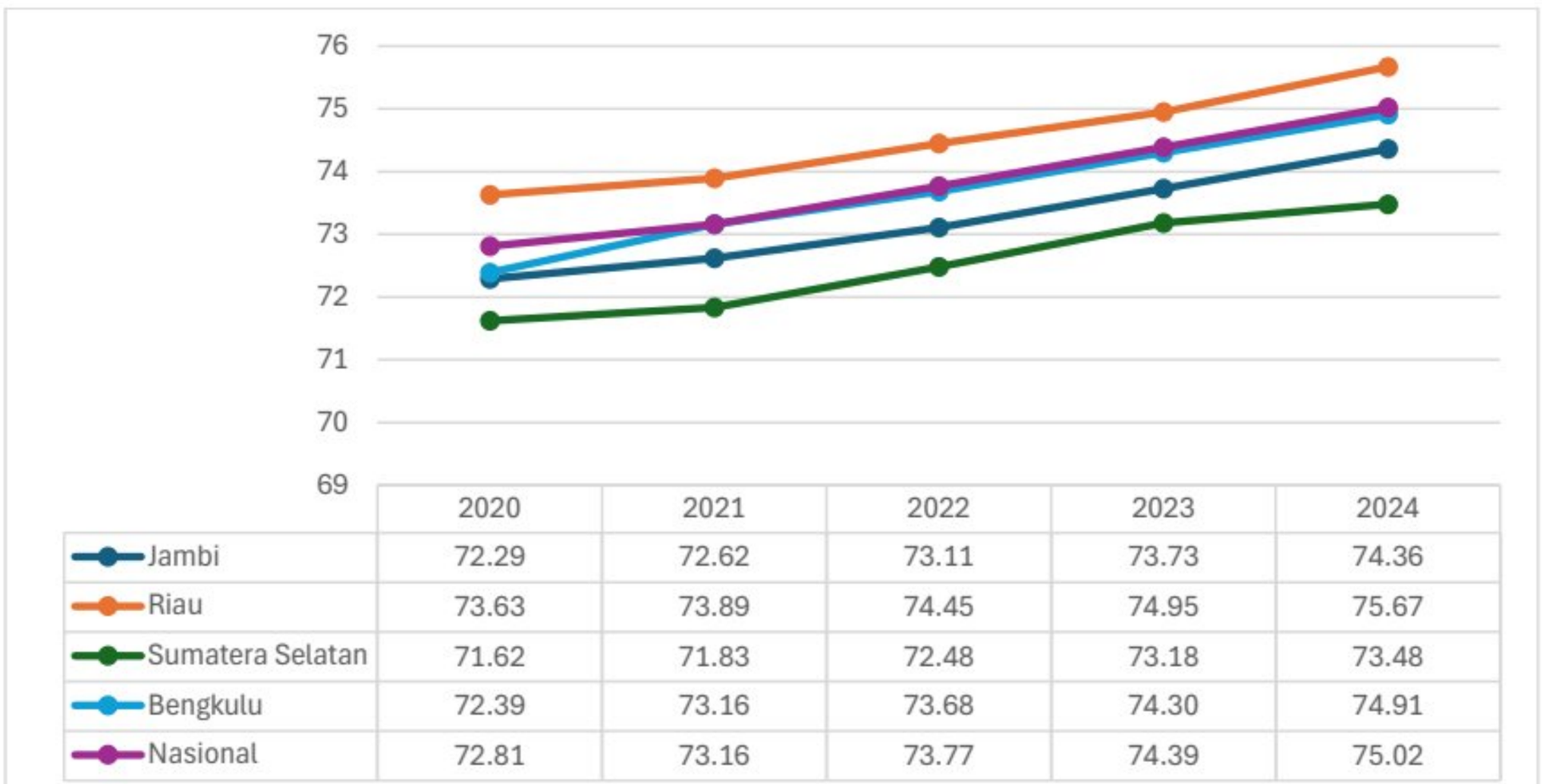

	2020	2021	2022	2023	2024
Jambi	72.29	72.62	73.11	73.73	74.36
Riau	73.63	73.89	74.45	74.95	75.67
Sumatera Selatan	71.62	71.83	72.48	73.18	73.48
Bengkulu	72.39	73.16	73.68	74.30	74.91
Nasional	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Gambar 2-82 Perbandingan IPM Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS Provinsi Jambi hingga tahun 2024 mencapai 9,26 tahun dan hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Meskipun capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian RLS nasional, namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu, capaian RLS Provinsi Jambi masih berada di bawahnya. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.

	2020	2021	2022	2023	2024
Jambi	8.97	9.03	9.07	9.16	9.26
Riau	9.47	9.52	9.54	9.60	9.69
Sumatera Selatan	8.68	8.78	8.82	8.90	8.98
Bengkulu	9.20	9.26	9.28	9.35	9.40
Nasional	8.90	8.97	9.08	9.13	9.22

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Gambar 2-83 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam hal keterbatasan akses masyarakat Provinsi Jambi terhadap lapangan kerja formal yang umumnya menawarkan tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Hingga tahun 2024, sebagian besar penduduk Provinsi Jambi masih bekerja di sektor informal, terutama di bidang pertanian dan jasa. Meskipun terjadi penurunan persentase pekerja informal dibandingkan tahun 2019, dominasi sektor ini masih cukup signifikan. Selain itu, masih terdapat fenomena pengangguran terselubung, yang ditunjukkan oleh tingginya proporsi tenaga kerja tidak dibayar pada usaha berskala mikro dan kecil milik keluarga atau kerabat, khususnya di sektor pertanian dan jasa.

Tabel 2-42 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2024

Lapangan Usaha	2019 (Feb)	2024 (Feb)	Perubahan
Pertanian	46,47	40,72	-5,75

Dipindai dengan CamScanner

Lapangan Usaha	2019 (Feb)	2024 (Feb)	Perubahan
Perdagangan	16,19	17,07	0,88
Administrasi Pemerintahan	5,26	3,44	-1,82
Jasa Pendidikan	4,85	5,67	0,82
Industri Pengolahan	6,53	8,26	1,73
Konstruksi & Real Estate	3,31	5,01	1,7
Akomodasi & Makan Minum	4,56	4,67	0,11
Pertambangan Dan Penggalian	2,2	5,27	3,07
Transportasi & Pergudangan	2,93	2,21	-0,72
Jasa Lainnya	3,39	3,15	-0,24
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	1,55	1,46	-0,09
Jasa Keuangan Asuransi	0,88	0,94	0,06
Jasa Perusahaan	0,9	1,15	0,25
Listrik, Gas Dan Air	0,47	0,13	-0,34
Informasi & Komunikasi	0,49	0,8	0,31

Sumber: BPS, 2024.

Belum optimalnya kualitas SDM juga berkaitan dengan revitalisasi SMK. Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif, peralatan praktik, dan tenaga pengajar yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Selain itu, jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja (kurangnya *link and match*) serta dominasi pembelajaran teori membuat lulusan kurang siap bersaing dan sulit terserap di dunia kerja.

Dipindai dengan CamScanner

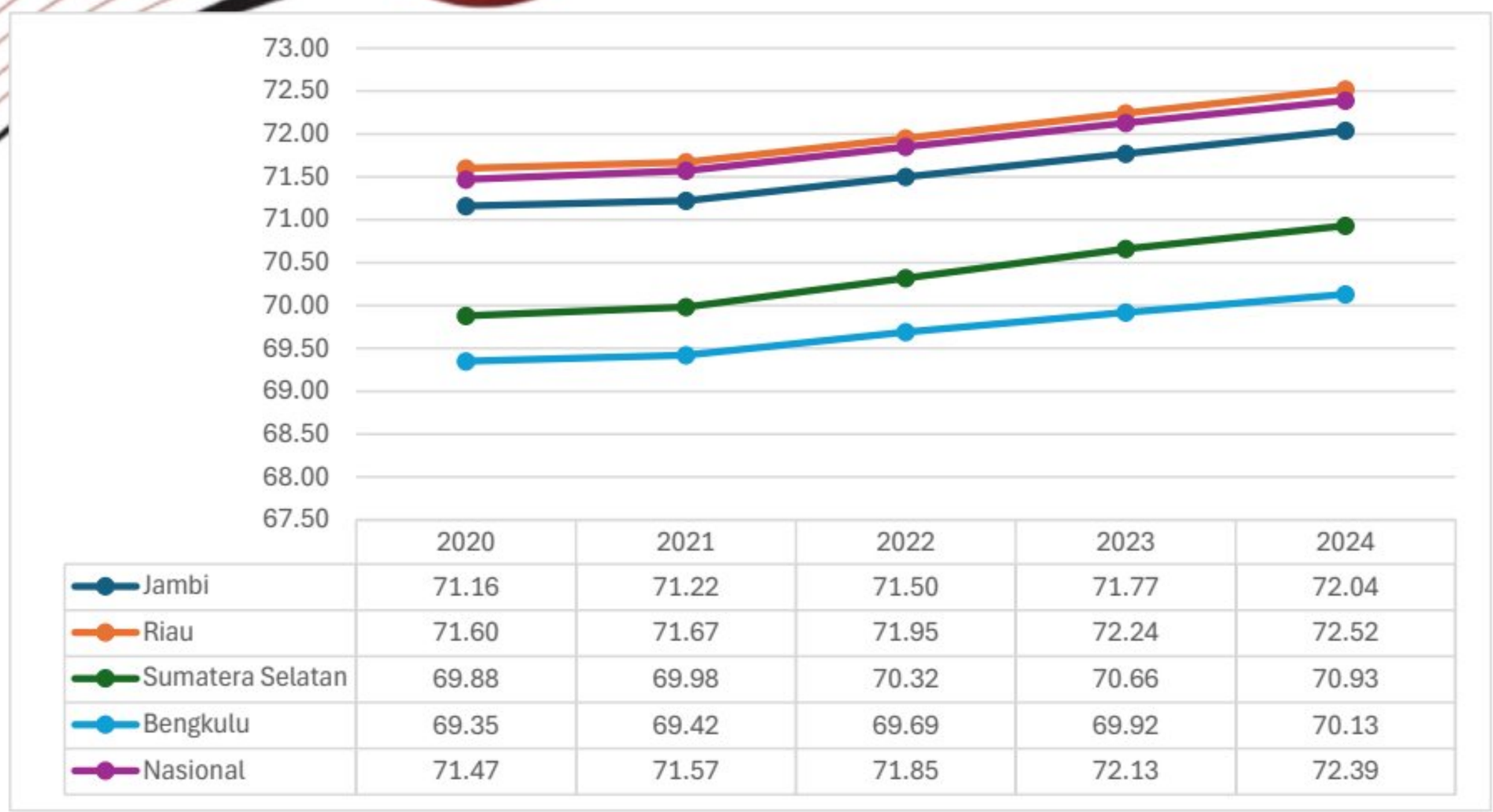

	2020	2021	2022	2023	2024
Jambi	71.16	71.22	71.50	71.77	72.04
Riau	71.60	71.67	71.95	72.24	72.52
Sumatera Selatan	69.88	69.98	70.32	70.66	70.93
Bengkulu	69.35	69.42	69.69	69.92	70.13
Nasional	71.47	71.57	71.85	72.13	72.39

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Gambar 2-84 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024

Rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Jambi berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan usaha formal yang menawarkan penghasilan relatif tinggi, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh aspek pendukung kesejahteraan lain (termasuk layanan kesehatan). Beberapa indikator pembangunan daerah terkait kesehatan juga menunjukkan beberapa tantangan, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi meningkat dari 71,16 tahun pada 2020 menjadi 72,04 tahun pada 2024, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 74,15 tahun dan capaian Provinsi Riau yang mencapai 74,41 tahun pada periode yang sama. Selain itu, angka kematian ibu (AKI) di Jambi tercatat 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) 17 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak usia 1–4 tahun sebesar 2,99 per 1.000 anak, yang menunjukkan masih tingginya risiko kesehatan ibu dan anak akibat rendahnya akses ke fasilitas kesehatan berkualitas.

Di samping itu, prevalensi perilaku merokok masyarakat Provinsi Jambi yang cukup tinggi juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Data Riskesdas dan BPS 2023 menunjukkan bahwa 28,67% penduduk usia 15 tahun ke atas di Jambi merokok setiap hari, bahkan rata-rata perokok menghabiskan 128,17 batang rokok per minggu. Kebiasaan ini meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti

Dipindai dengan CamScanner

penyakit kardiovaskular dan kanker, sehingga menambah beban sistem kesehatan dan memperpanjang kesenjangan kualitas SDM.

2.7.1.3 Kesenjangan Layanan Dasar dan Infrastruktur

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menunjukan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu.

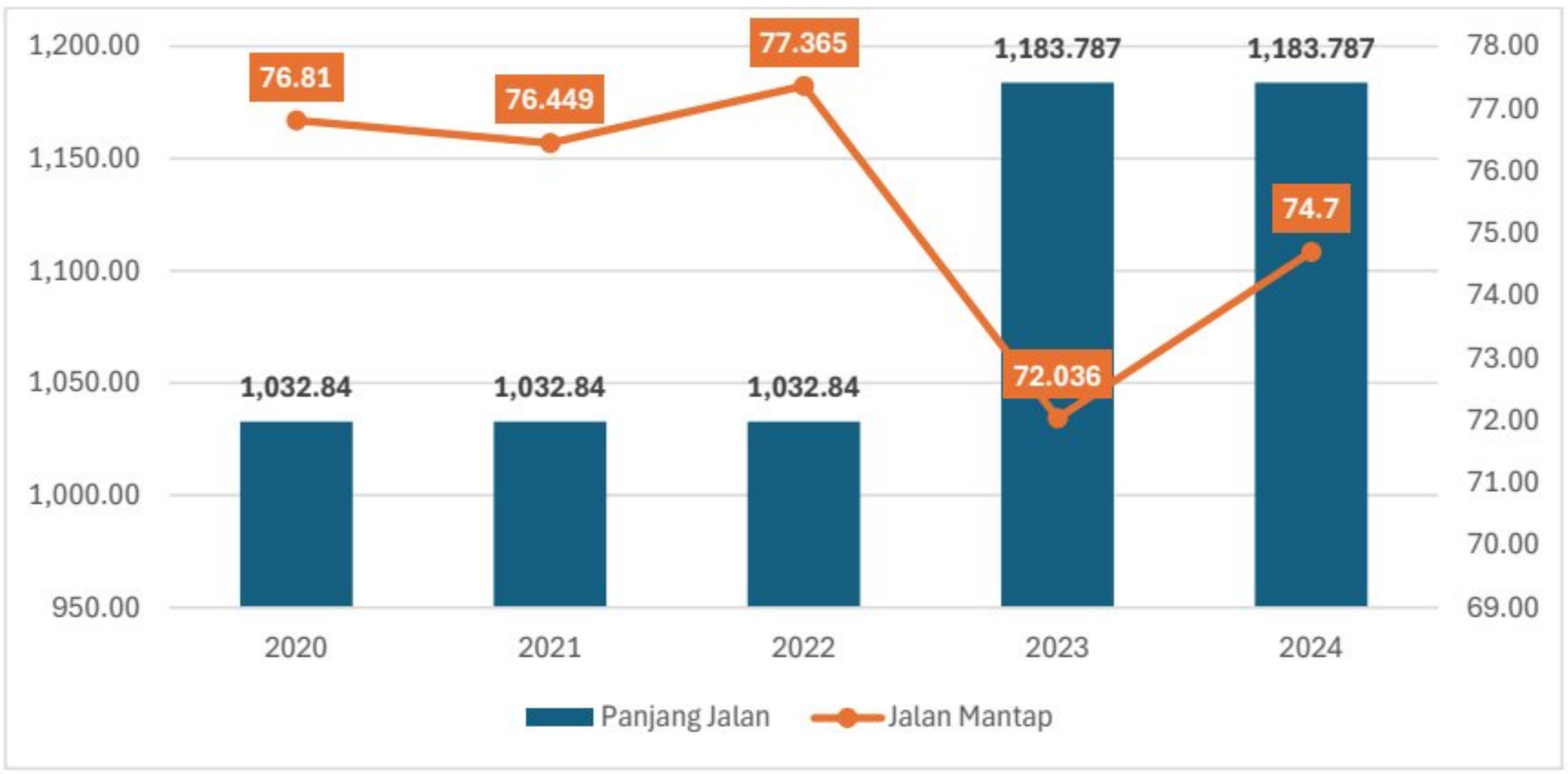

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, Tahun 2025

Gambar 2-85 Panjang Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024

Dipindai dengan CamScanner

Keterbatasan akses jalan dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur fisik dan sosial tetap menjadi elemen vital yang menentukan kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah yang berbasis sumber daya alam namun kurang didukung fasilitas penunjang. Kurangnya pendanaan dan lemahnya tata kelola berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, yang pada gilirannya menahan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi jalan di Provinsi Jambi hingga saat ini masih menunjukkan kualitas yang belum optimal, terutama pada ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten yang menghubungkan wilayah produksi dengan pusat distribusi. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat seperti berlubang, permukaan bergelombang, hingga kerusakan struktur akibat genangan air. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di koridor-koridor logistik utama, mencerminkan permasalahan struktural dalam pemeliharaan infrastruktur transportasi. Ketidakmantapan jalan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam kelancaran arus barang dan jasa, sekaligus menciptakan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah tingginya intensitas curah hujan di wilayah Jambi yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Genangan air yang kerap terjadi mempercepat degradasi lapisan aspal dan pondasi jalan. Selain itu, beban kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas jalan turut memperparah kondisi fisik infrastruktur. Dalam beberapa kasus, keterlambatan perbaikan juga disebabkan oleh keterbatasan material konstruksi di lokasi proyek serta ketergantungan pada proses pengadaan yang lama, sehingga kerusakan terus memburuk sebelum ada penanganan.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan rendahnya kapasitas pelaksanaan teknis turut menjadi faktor penghambat perbaikan jalan secara menyeluruh. Anggaran infrastruktur yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan riil perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala. Selain itu, distribusi alokasi dana cenderung terfokus pada proyek-proyek besar atau simbolik, sementara jalan-jalan penghubung desa dan sentra produksi perkebunan dibiarkan dalam kondisi rusak dalam jangka waktu

Dipindai dengan CamScanner

yang lama. Kurangnya koordinasi antarpihak dalam pemeliharaan jalan juga menjadi faktor yang memperlambat respon terhadap kerusakan yang ada.

Dampak dari buruknya kondisi jalan sangat luas, mulai dari peningkatan biaya logistik dan keterlambatan distribusi hasil pertanian dan perkebunan, hingga menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi pelaku usaha, kerusakan jalan memperbesar biaya operasional dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar nasional. Sementara bagi masyarakat umum, kondisi ini menurunkan kualitas hidup karena perjalanan menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan berisiko tinggi, terutama saat musim hujan. Akumulasi dari permasalahan ini dapat memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Akses air minum layak di Provinsi Jambi memang menunjukkan tren peningkatan, tetapi capaian 79,19% pada tahun 2022 masih jauh dari ideal dan memperlihatkan disparitas antarkabupaten/kota: Kota Jambi mencapai 95,30%, sedangkan Merangin hanya 51,26%. Demikian pula akses sanitasi layak, meski meningkat dari 77,82% (2020) menjadi 79,54% (2022), beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 69,75%. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di daerah terpencil atau perdesaan belum menikmati layanan dasar yang memadai.

Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-86 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi air bersih karena terdapat banyak desa belum terkoneksi dengan sistem perpipaan PAM dan mengandalkan sumber air permukaan atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, kapasitas instalasi pengolahan air minum di PDAM regional belum mencukupi kebutuhan, sementara dana perbaikan dan penggantian pipa tua sering tertunda akibat prosedur pengadaan yang kompleks. Pada sektor sanitasi, rendahnya budaya penggunaan jamban sehat dan kurangnya fasilitas pengelolaan limbah domestic (terutama sistem septik tank terpadu) memperburuk kualitas lingkungan permukiman.

Dampak keterbatasan ini amat serius bagi kesehatan Masyarakat karena dapat menyebabkan tingginya insiden penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut di daerah berakses rendah berkorelasi dengan kurangnya air bersih dan sanitasi. Anak-anak di wilayah dengan akses sanitasi di bawah rata-rata provinsi juga menunjukkan angka stunting yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa sanitasi yang buruk turut memperburuk status gizi. Selain itu, beban biaya untuk membeli air kemasan ataupun pengobatan penyakit menular menambah tekanan ekonomi rumah tangga miskin.

Kelemahan pada tata kelola dan partisipasi Masyarakat dapat menjadi penghambat dalam pemeliharaan berkelanjutan. Meskipun program seperti PAMSIMAS telah diimplementasikan di beberapa desa, evaluasi menunjukkan masih banyak kendala dalam perencanaan lokasi,

Dipindai dengan CamScanner

pelibatan warga, serta pemeliharaan sarana setelah pembangunan. Akibatnya, beberapa instalasi air dan sanitasi baru tidak berfungsi optimal setelah masa garansi habis, sehingga perlahan kembali ke kondisi semula. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tanpa penataan kelembagaan dan sistem pengelolaan yang kuat, peningkatan indikator akses air minum dan sanitasi layak sulit dipertahankan.

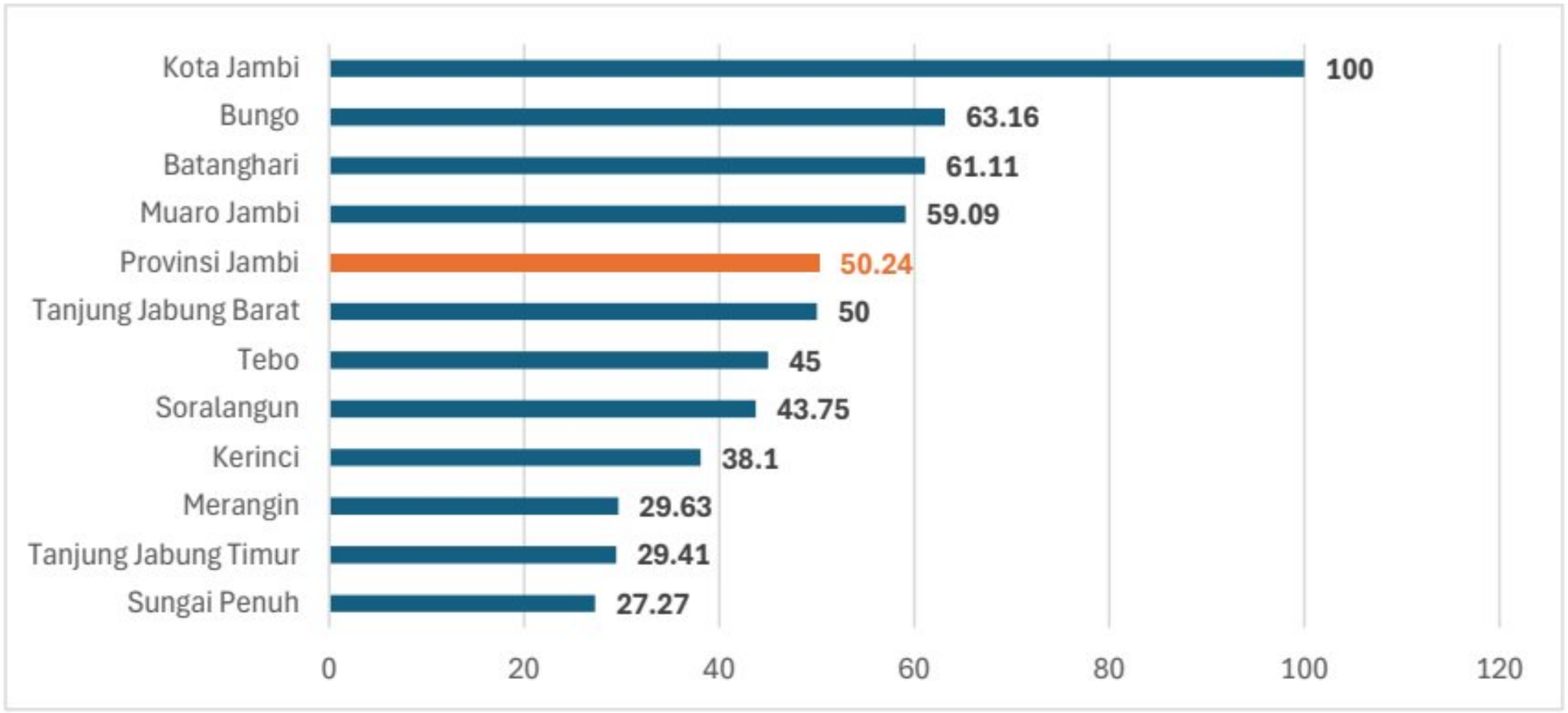

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2024

Gambar 2-87 Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa rata-rata cakupan Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional baru mencapai 50,24% pada tahun 2024. Sebaran tenaga kesehatan ini sangat timpang antarkabupaten/kota: di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, cakupannya masing-masing 100% dan 63,16%, sementara di kabupaten perbatasan seperti Merangin (29,63%), Tanjung Jabung Timur (29,41%), dan Sungai Penuh (27,27%) masih jauh di bawah standar . Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil, rendahnya insentif dan tunjangan, serta fasilitas penunjang yang belum memadai.

Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, perawat, bidan, serta tenaga gizi dan sanitasi, sangat penting untuk kelancaran layanan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. WHO merekomendasikan rasio minimal 1 dokter per 1.000 penduduk dan 2,5 tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) per 1.000 penduduk untuk menjamin cakupan layanan yang optimal. Di Provinsi Jambi, kekurangan

Dipindai dengan CamScanner

sebagian besar jenis tenaga kesehatan ini memaksa Puskesmas bekerja dengan staf yang multitugas, sehingga kualitas skrining, konseling gizi, imunisasi, dan penanganan gangguan kesehatan ibu-anak tertekan.

Kondisi ini jika terus berlanjut akan memberikan dampak yang nyata seperti seperti angka kematian ibu dan bayi di kabupaten dengan cakupan Puskesmas rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah yang memenuhi standar staf. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekurangan bidan dan perawat berkontribusi pada rendahnya cakupan kunjungan antenatal lengkap dan pemeriksaan pertumbuhan balita, sehingga risiko stunting dan malnutrisi anak dapat meningkat. Di samping itu, keterbatasan tenaga laboratorium dan sanitasi juga mempengaruhi deteksi dini penyakit seperti tuberculosis dan diare.

Ketidakseimbangan distribusi SDM kesehatan ini semakin diperparah oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas wilayah terpencil, memicu kelelahan dan *turnover* pada tenaga kesehatan. Tanpa intervensi strategis—seperti skema insentif khusus, fasilitas hunian yang layak, dan program pemagangan tenaga kesehatan—kabupaten/kota dengan cakupan sangat rendah akan terus mengalami kesulitan menjaga mutu layanan. Akibatnya, kesenjangan akses dan hasil kesehatan antardaerah di Provinsi Jambi berpotensi melebar, menghambat capaian target pembangunan kesehatan daerah.

2.7.1.4 Penurunan Produktivitas Sektor Unggulan

Produksi tanaman padi di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 – 2022, yang dimulai di tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen, serta terjadi penurunan luas panen akibat alih fungsi lahan Penurunan produksi juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. Perlu kebijakan yang mendukung terwujudnya ke daulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani, sehingga kerugian akibat bencana pertanian dapat diminimalisir.

Dipindai dengan CamScanner

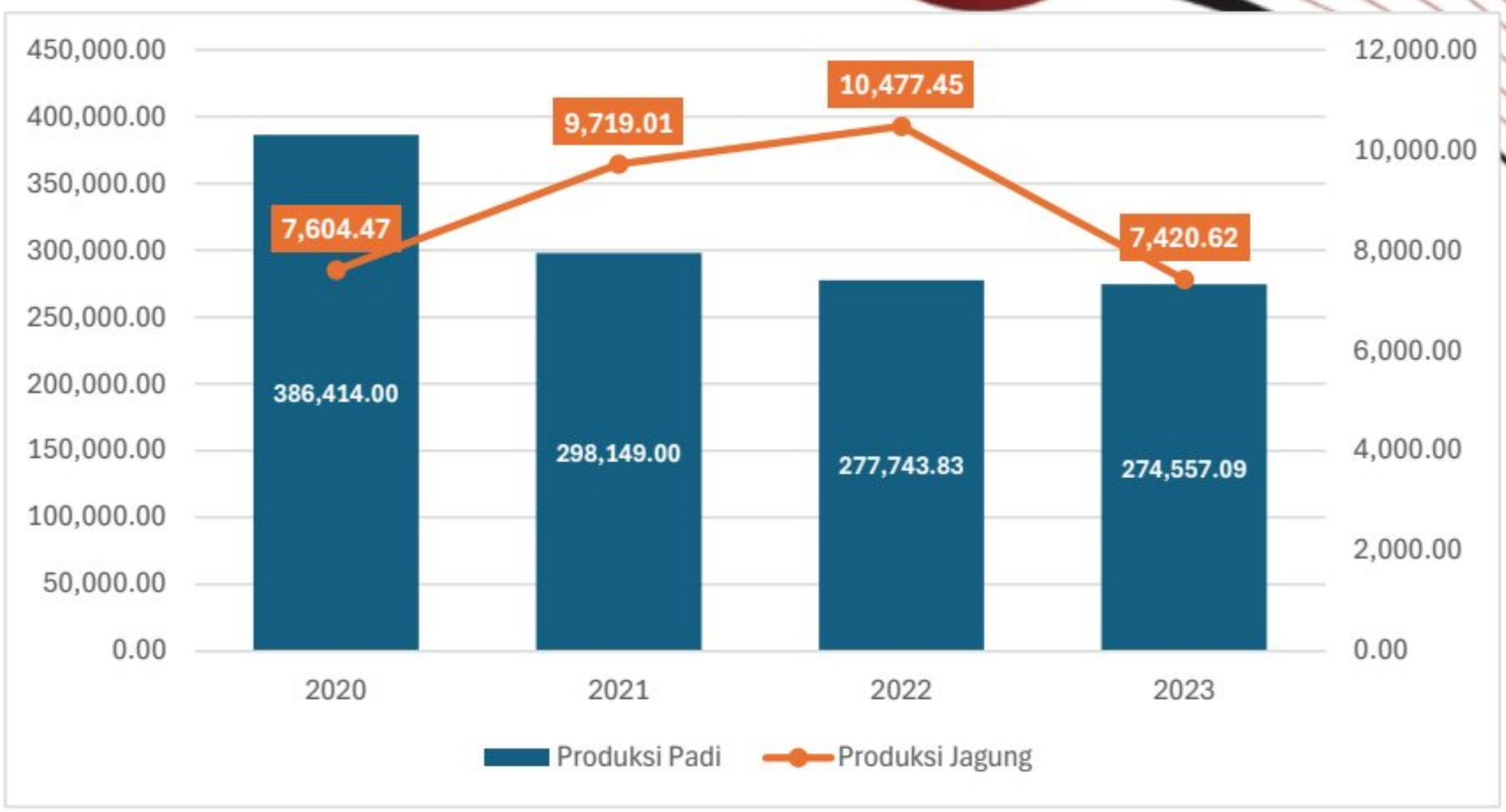

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Jambi, 2024

Gambar 2-88 Produksi Padi dan Jagung Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2023

Sektor perkebunan masih belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2019 – 2023. Hal ini terlihat pada produksi komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan dan hanya kinerja komoditas sawit yang cukup baik dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.

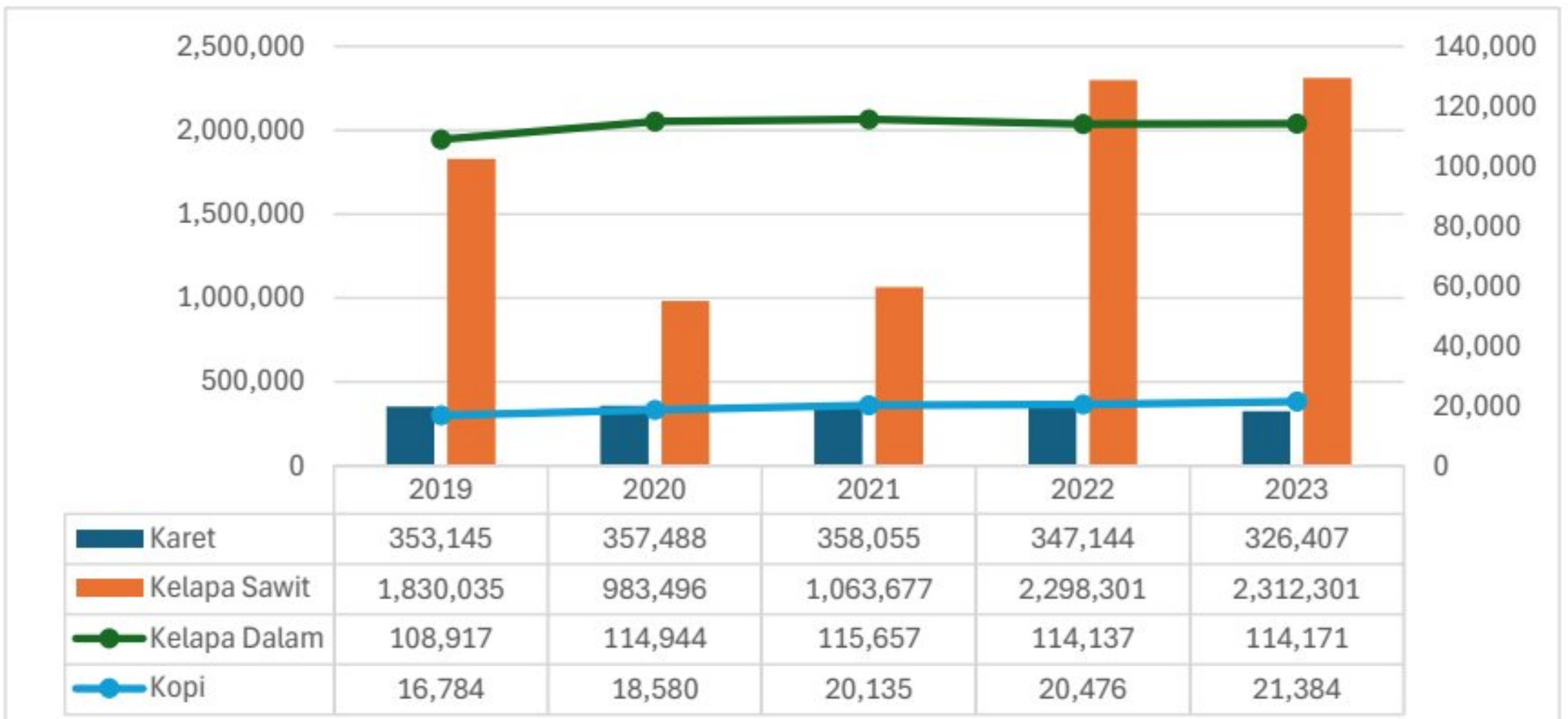

	2019	2020	2021	2022	2023
Karet	353,145	357,488	358,055	347,144	326,407
Kelapa Sawit	1,830,035	983,496	1,063,677	2,298,301	2,312,301
Kelapa Dalam	108,917	114,944	115,657	114,137	114,171
Kopi	16,784	18,580	20,135	20,476	21,384

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024

Gambar 2-89 Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Dipindai dengan CamScanner

Pada sisi usaha yang dilihat dari aspek aset, omzet usaha, maupun penyerapan tenaga kerja, menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Puncak kinerja terjadi pada tahun 2021 yaitu pada nilai aset yang melonjak dari Rp2.542,066 miliar di 2020 menjadi Rp58.032,529 miliar diikuti oleh lonjakan omzet usaha dari Rp 4.354,751 miliar menjadi Rp 309.081,090 miliar. Peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan tenaga kerja dari 101.972 orang di 2020 menjadi 289.569 orang pada 2021. Namun, setelah tahun 2021, nilai aset dan omzet usaha mengalami normalisasi. Pada tahun 2022 dan 2023, aset tercatat stabil di kisaran Rp 3.394 – 3.560 miliar, sementara omzet usaha berada di angka Rp 39.311 – 39.405 miliar. Sementara itu, jumlah tenaga kerja terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten hingga mencapai 373.659 orang di tahun 2023. Masih belum optimalnya kesinambungan pertumbuhan aset dan omzet usaha setelah tahun 2021 serta perlunya penguatan ketahanan ketenagakerjaan, menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja di Provinsi Jambi.

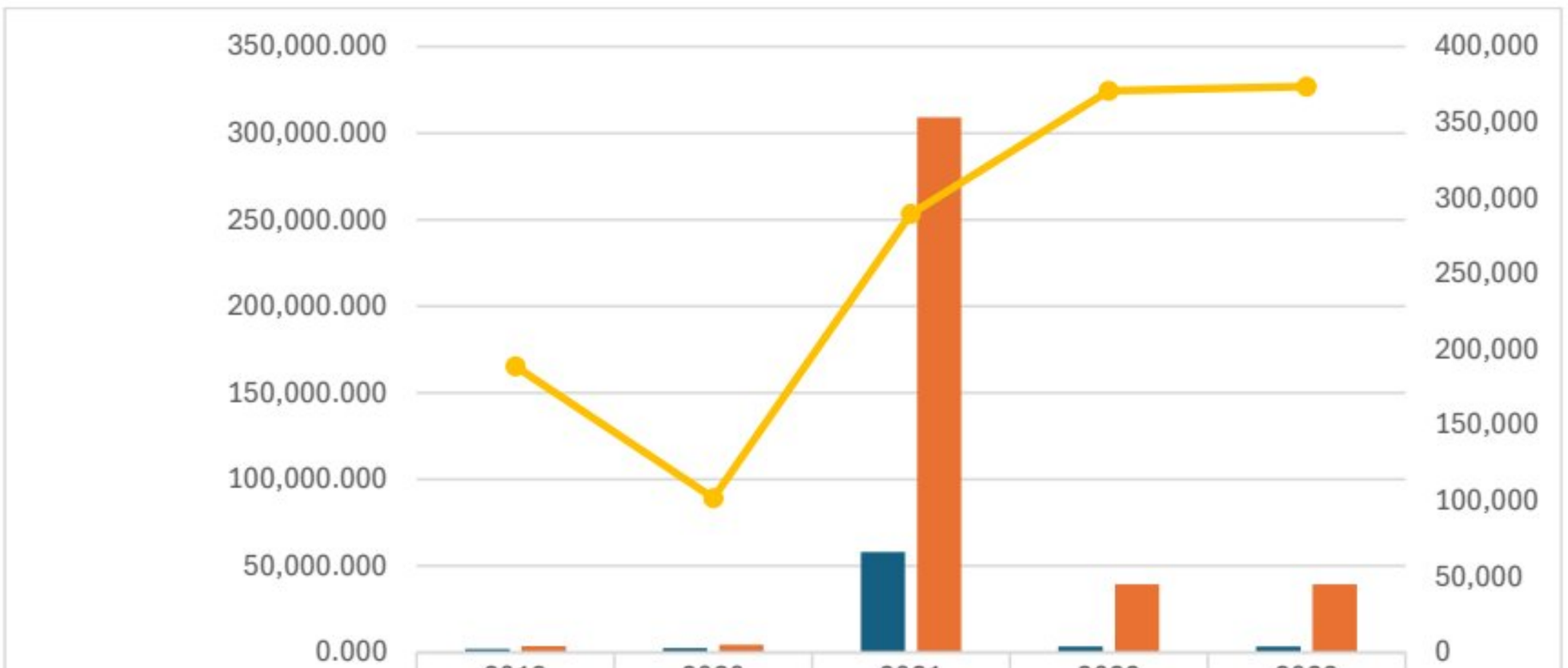

	2019	2020	2021	2022	2023
Aset (Rp M)	1,923.348	2,542.066	58,032.529	3,560.921	3,394.973
Omset Usaha (Rp M)	3,830.799	4,354.751	309,081.090	39,405.758	39,311.050
Tenaga Kerja (orang)	188,947	101,972	289,569	370,831	373,659

Sumber: Dinas KUKM Provinsi Jambi, 2024.

Gambar 2-90 Perkembangan Aset, Omset Usaha dan Serapan Tenaga Kerja UMKM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Perkembangan produksi perikanan tahun 2019–2022 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 53.029 ton dan mengalami penurunan

Dipindai dengan CamScanner

di tahun 2020 menjadi 52.686 ton. Kemudian produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 55.892 ton, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 54.859 ton. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam, terutama cuaca ekstrem yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut semakin berkurang.

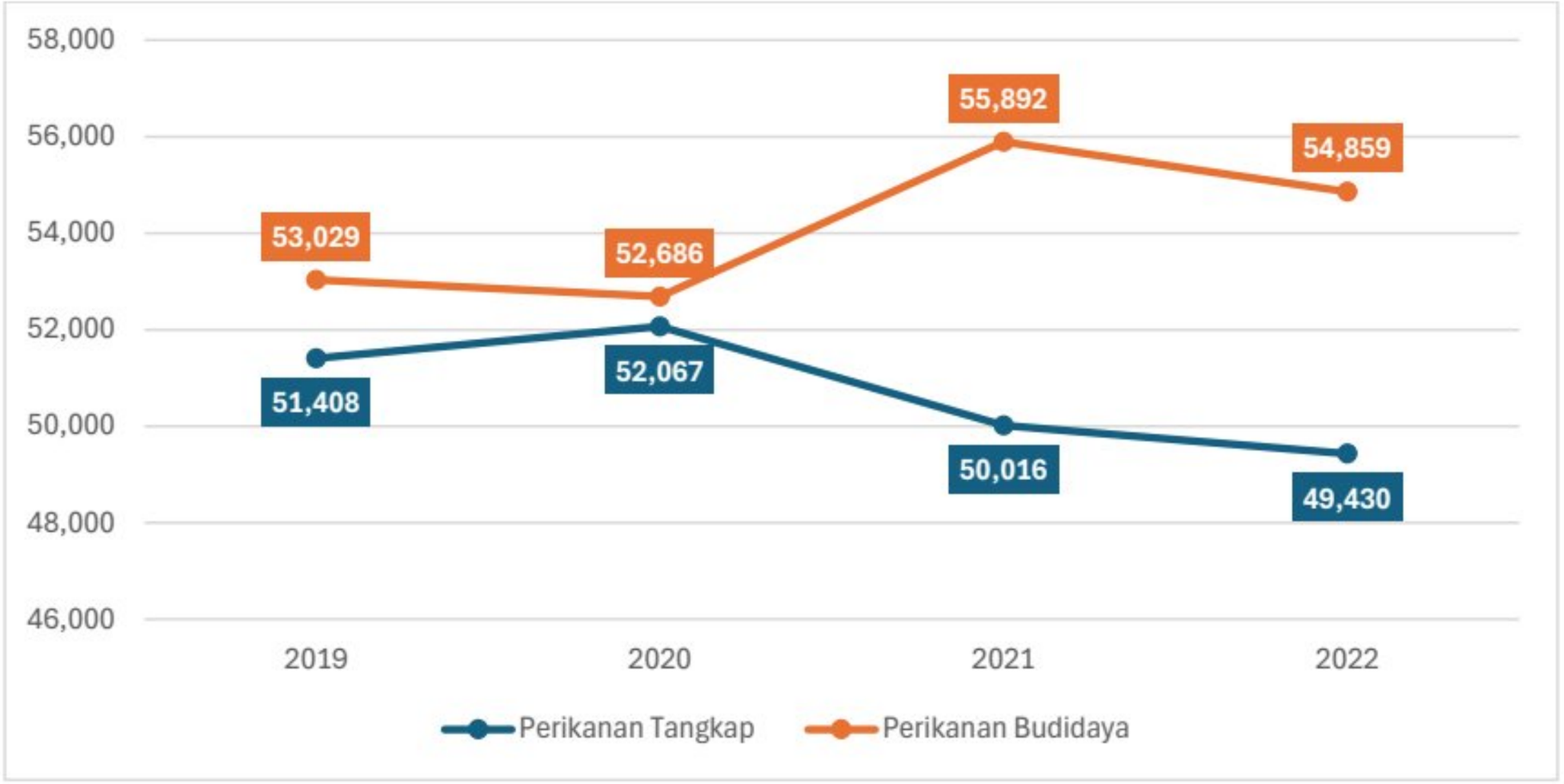

Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2024.

Gambar 2-91 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Demikian juga dengan produksi perikanan tangkap, perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2019-2022 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2020 sebanyak 52.067 ton menjadi 49.430 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

2.7.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini adalah ketimpangan antarwilayah dan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin dari data Gini Ratio Provinsi Jambi yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif dan belum stabil. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Jambi berada pada angka 0,316, kemudian sedikit menurun ke 0,315 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, ketimpangan meningkat tajam hingga 0,335 dan kembali naik menjadi 0,343 di tahun 2023. Pada 2024, nilai tersebut menurun ke

Dipindai dengan CamScanner

0,315. Meskipun posisi terakhir menunjukkan penurunan, tren fluktuatif ini mencerminkan kondisi ketimpangan yang masih belum stabil dan berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan yang merata di wilayah Provinsi Jambi.

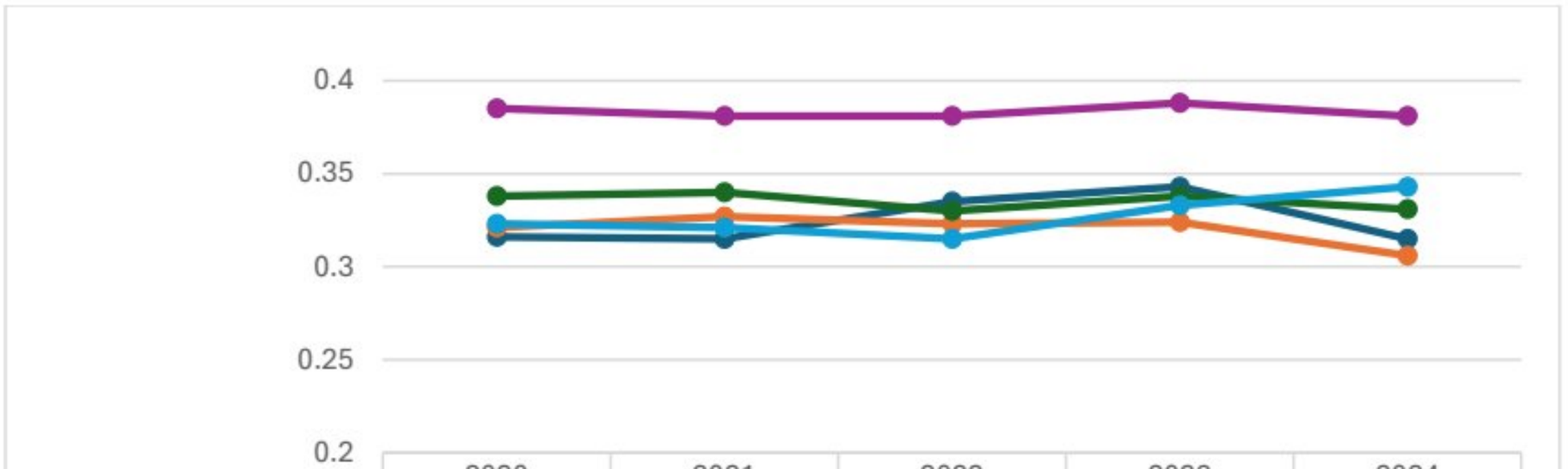

	2020	2021	2022	2023	2024
Jambi	0.316	0.315	0.335	0.343	0.315
Riau	0.321	0.327	0.323	0.324	0.306
Sumatera Selatan	0.338	0.34	0.33	0.338	0.331
Bengkulu	0.323	0.321	0.315	0.333	0.343
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Gambar 2-92 Indeks Gini Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga di Sumatera, angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Selatan (0,331 di 2024) namun lebih tinggi dari Provinsi Riau (0,306 di 2024). Sementara Provinsi Bengkulu justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dari 0,315 pada tahun 2022 menjadi 0,343 di tahun 2024. Secara nasional, Gini Ratio berada pada kisaran 0,381 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi masih berada di bawah angka nasional, kondisi ketimpangan yang berfluktuasi ini perlu menjadi perhatian, terutama karena menunjukkan adanya potensi ketimpangan antarwilayah maupun antar kelompok pendapatan di dalam daerah.

Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek pendapatan antarpenduduk, tetapi juga antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Provinsi Jambi. Berdasarkan daerah tinggal, Gini Ratio tahun 2024 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,353 dan 0,279. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi yang lebih baik cenderung menikmati

Dipindai dengan CamScanner

tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang minim akses dan fasilitas dasar. Hal ini diperkuat dengan ketimpangan kontribusi ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di wilayah tertentu.

Permasalahan ketimpangan ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Tanpa intervensi yang efektif, ketimpangan pendapatan dan antarwilayah berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tertinggal, kesenjangan akses layanan dasar, serta ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif dan berbasis wilayah, mendorong pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik di seluruh wilayah provinsi.

2.7.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana padaSumber: Kemenpan RB, 2024

Gambar 2-93 gambar di bawah, separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian. Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral,indeks sistem merit, dan indeks berahlak. Untuk itu kedepan pencapaian indikator-indikator ini harus menjadi perhatian, disamping terus meningkatkan capaian indikator lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

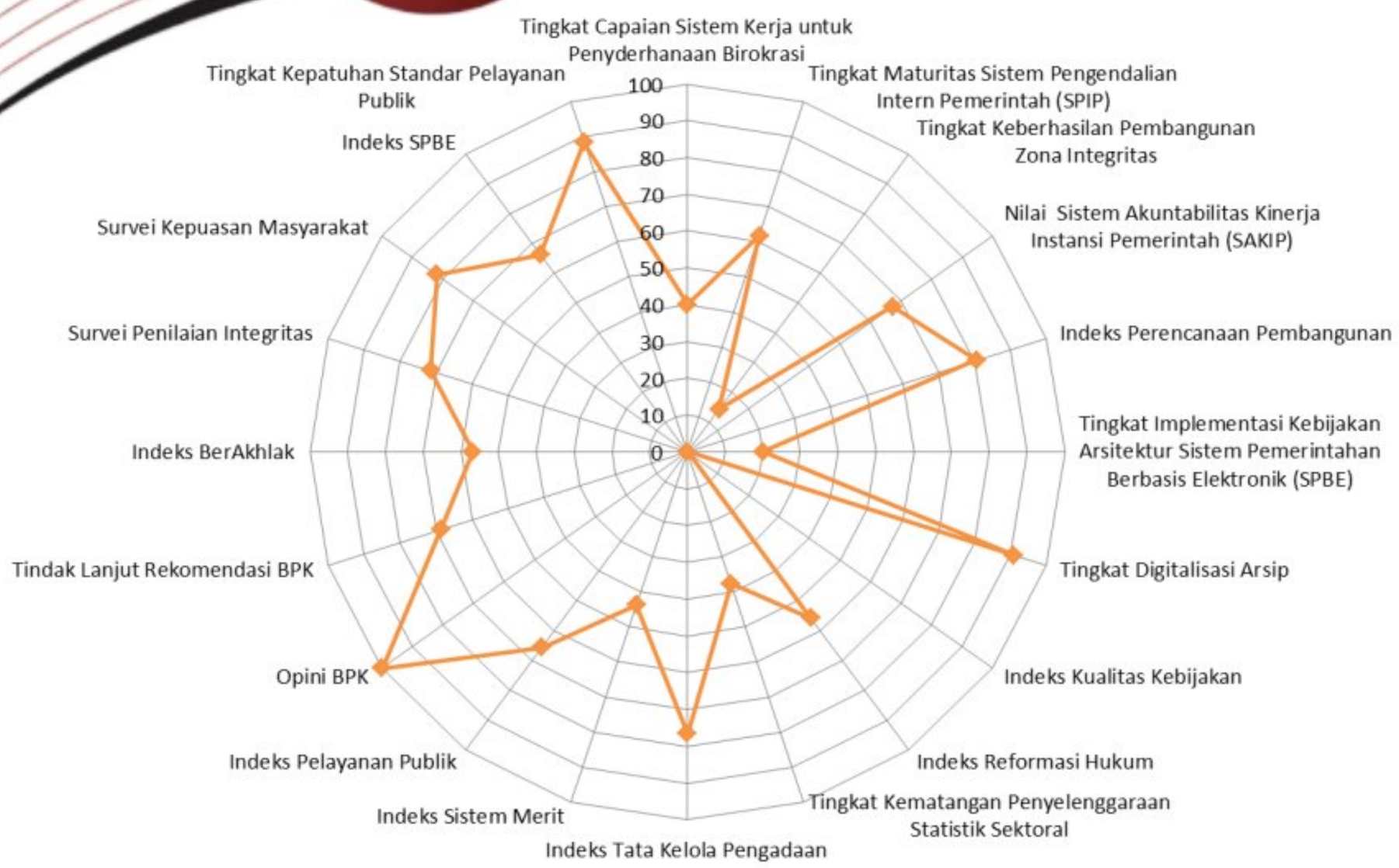

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Gambar 2-93 Capaian Indikator-Indikator Penerapan Reformasi Birokasi Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2-43 Deviasi capaian Aspek sistem Merit dibanding Target Ideal

NO	ASPEK SISTEM MERIT	BOBOT ASPEK	TARGET IDEAL (SKOR 350)	SKOR CAPAIAN SAAT INI	DEVIASI
1	Perencanaan Kebutuhan	10	35.00	37.50	2.5
2	Pengadaan Kebutuhan	10	35.00	34	-1
3	Pengembangan Karir	30	105.00	37.50	-67.6
4	Promosi dan Mutasi	10	35.00	20	-15
5	Manajemen Kinerja	20	70.00	60	-10
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10	35.00	35	0
7	Perlindungan dan Pelayanan	4	14.00	14	0
8	Sistem Informasi	6	21.00	15	-6
JUMLAH (TARGET & CAPAIAN)		**100**	**350**	**253**	**-97**

Sumber: BKD, 2024

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hasil capaian penerapan sistem merit, diperoleh skor total sebesar 253 dari target ideal 350, dengan deviasi sebesar -97. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan, agar sistem merit dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Aspek dengan deviasi tertinggi terdapat pada Pengembangan Karir, dengan skor capaian 37,5 dari target 105, sehingga deviasinya mencapai -67,6. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya efektivitas program pengembangan karir pegawai, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, aspek Promosi dan Mutasi juga menunjukkan deviasi sebesar -15, yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan mekanisme seleksi, mutasi, dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja.

Aspek Manajemen Kinerja tercatat memiliki deviasi -10, meskipun skornya telah mencapai 60 dari target 70. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan telah mencapai target sepenuhnya dengan deviasi 0, menandakan pengelolaan di kedua aspek ini sudah sesuai standar yang ditetapkan. Adapun aspek Sistem Informasi masih mencatat deviasi -6, yang perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penguatan sistem informasi kepegawaian yang mendukung proses manajemen ASN secara digital, akurat, dan terintegrasi.

2.7.1.7 Degradasi Lingkungan

Provinsi Jambi sudah mengalami kehilangan air baik di bagian Jambi sebelah barat (dataran lebih tinggi) dan di bagian Jambi sebelah timur (dataran lebih rendah). Gambaran kehilangan air ini menunjukkan bahwa daerah Timur Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan sebagian Kabupaten Batanghari mengalami kehilangan air terbesar (secara kumulatif berkisar antara 2.356-2.687 Km3). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kehilangan air di daerah ini tidak berhubungan dengan pola curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Maka disimpulkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi (dugaan: anthropogenik) – wilayah tersebut didominasi oleh lahan gambut dengan

Dipindai dengan CamScanner

aktivitas perkebunan yang terbentuk pada wilayah tersebut seperti drainase berlebih mendorong perubahan total perubahan simpanan air yang tidak terkait dengan curah hujan. Hal ini didukung dengan pola tahunan defisit simpanan air yang tidak menunjukkan pola khas, tetapi defisit terbesar terjadi pada tahun 2014 diikuti tahun 2019, yang mana pada tahun tersebut adalah tahun-tahun yang berkaitan dengan El-Nino.

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan kualitas air. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di Provinsi Jambi terhadap sungai lintas kabupaten/kota maupun sungai lintas provinsi menunjukkan adanya bahan pencemar dari berbagai aktivitas yang mengalir kedalam aliran 7 (tujuh) sungai di wilayah Provinsi Jambi yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan jenisnya, diketahui bahwa aktivitas pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (salah satunya adalah pabrik CPO) dan domestik (rumah tangga) menjadi sumber pencemaran kualitas air sungai- sungai tersebut. Kondisi ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (water catchment area) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Provinsi Jambi juga relatif masih rendah.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Dipindai dengan CamScanner

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

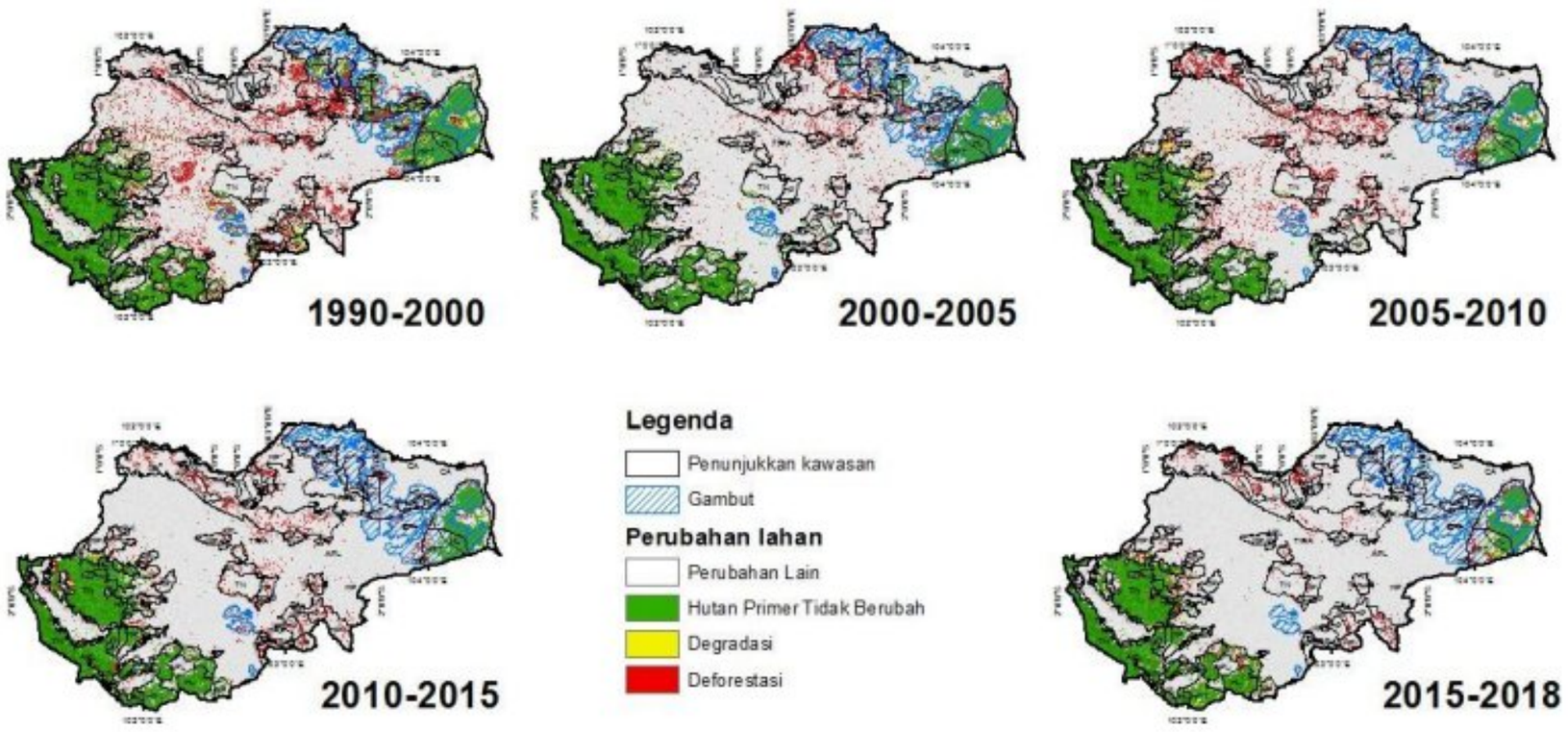

Sumber: GGP, 2019.

Gambar 2-94 Deforestasi Dan Degradasi Hutan Yang Terjadi Tahun 1990 – 2018

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, di mana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagi intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

2.7.2 Penyelerasan terhadap RTRW

Pengembangan wilayah merupakan salah satu aspek strategis dalam perencanaan tata ruang, yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Potensi yang dimiliki oleh daerah, seperti potensi sumber daya alam, posisi geografis strategis, serta kekayaan budaya dan sosial ekonomi, dapat menjadi modal utama dalam mendorong pengembangan wilayah.

Dipindai dengan CamScanner

2.7.2.1 Potensi

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan pemetaan potensi wilayah secara komprehensif sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengembangan wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta keunggulan masing-masing yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun potensi-potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu provinsi secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha, Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi Jambi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
2. Mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi asset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
3. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas

Dipindai dengan CamScanner

serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industry yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

2.7.2.2 Permasalahan

Dalam upaya mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, tidak hanya diperlukan optimalisasi potensi daerah, tetapi juga pengelolaan berbagai permasalahan strategis yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah strategis di kawasan Sumatra memiliki sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dan ditangani secara terpadu. Adapun beberapa permasalahan strategis yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumberdaya lahan terkait dengan fisiografi perbukitan dan pegunungan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan bencana alam, khususnya di kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Jambi yang rawan terhadap bahaya bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor dan banjir.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial di Provinsi Jambi karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti eksploitasi bahan tambang batubara dan lainnya.
3. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (hinterland) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya.
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, seperti dijumpai pemanfaatan ruang non kehutanan di kawasan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
5. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

2.7.3 Isu Strategis

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan fondasi awal untuk mewujudkan transformasi di Provinsi Jambi dalam rangka mencapai Visi Jambi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan pada tahun 2045. Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah tersebut akan menghadapi isu dan tatangan yang penuh ketidakpastian dan dinamis. Oleh karena itu perlu

Dipindai dengan CamScanner

mitigasi agar isu dan tantangan tersebut menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah yang diinginkan.

2.7.3.1 Isu Global

Isu-isu strategis internasional merujuk pada peristiwa penting yang memiliki dampak luas di tingkat global atau antarnegara, yang perlu diidentifikasi dan dianalisis dalam menyusun isu strategis di daerah. Kajian terhadap isu-isu global ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah agar lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Provinsi Jambi berupaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terjadi, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, 2024
Gambar 2-95 Risiko Global Jangka Menengah

Berdasarkan *World Economic Forum Global Risk Report 2024*, terdapat sejumlah risiko global jangka menengah yang diperkirakan akan menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan. Risiko tersebut mencakup cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, serta perubahan kritikal terhadap ekosistem yang berdampak pada keseimbangan lingkungan. Selain itu, ancaman hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) dan krisis sumber daya alam seperti air, energi, dan pangan diperkirakan akan menjadi tantangan serius di masa depan. Di sisi sosial dan teknologi, penyebaran misinformasi dan disinformasi berpotensi memecah belah masyarakat, sementara dampak buruk teknologi kecerdasan buatan

Dipindai dengan CamScanner

(*Artificial Intellegent*/AI) dapat memengaruhi lapangan kerja dan keamanan data. Risiko migrasi paksa (*involuntary migration*) akibat konflik dan bencana, serta ancaman *cyber insecurity* terhadap sistem digital dan infrastruktur juga harus menjadi perhatian. Selain itu, polarisasi sosial yang semakin menguat dan masalah polusi lingkungan yang terus meningkat, diprediksi turut memberikan tekanan terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh potensi risiko global ini perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan kesiapsiagaan, keberlanjutan, serta ketahanan sosial-ekonomi dan lingkungan di masa mendatang.

2.7.3.2 Isu Nasional

Isu strategis nasional adalah permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Isu strategis nasional bersifat lintas sektoral dan memerlukan perhatian serta penanganan prioritas secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat menjadi potensi untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, identifikasi terhadap isu-isu strategis jangka menengah menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa isu strategis yang diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan nasional maupun daerah dalam beberapa tahun ke depan. Mengacu pada isu-isu jangka menengah nasional, Provinsi Jambi sebagai bagian dari konstelasi wilayah Koridor Sumatra perlu menyelaraskan arah pembangunan berdasarkan isu strategis nasional, guna memastikan sinergi antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Dipindai dengan CamScanner

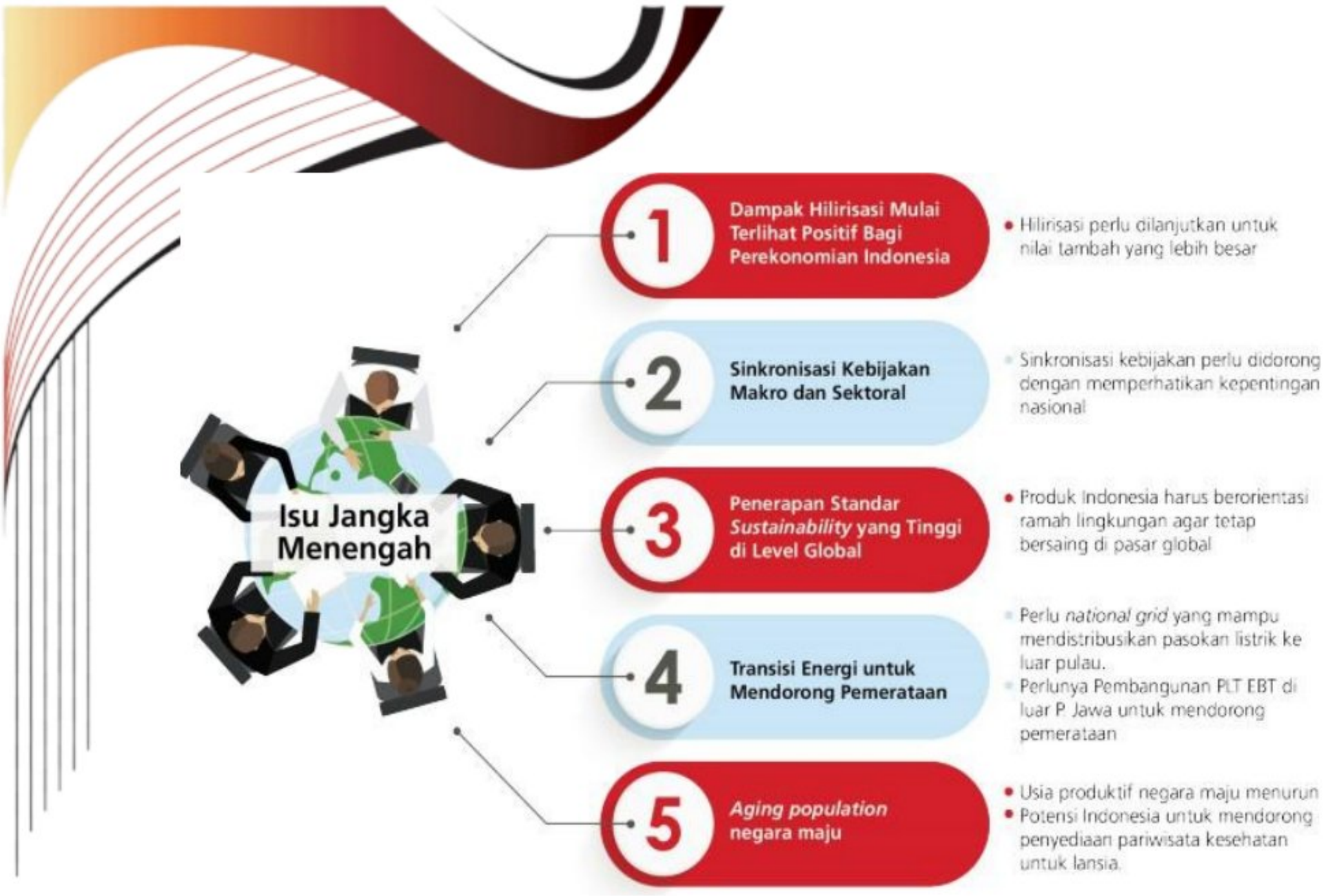

Sumber: RPJMN 2025-2029, 2024

Gambar 2-96 Isu Strategis Jangka Menengah Nasional

2.7.3.2.1 Dampak Positif Hilirisasi Untuk Nilai Tambah Yang Lebih Besar.

Pelaksanaan hilirisasi di sektor primer, seperti pengolahan sumber daya mineral dan kelapa sawit, telah menunjukkan timbal balik melalui peningkatan nilai tambah produk nasional. Di koridor Pulau Sumatra, khususnya di Provinsi Jambi, pembangunan pabrik pengolahan bijih timah dan minyak sawit mentah (CPO) telah menyerap tenaga kerja lokal serta menambah devisa melalui ekspor produk turunan. Dalam jangka menengah, penerusan kebijakan hilirisasi akan memperkuat ekosistem industri regional, meningkatkan serapan tenaga kerja terampil, dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku mentah. Namun, salah satu faktor penghambat upaya hilirisasi di koridor Sumatra adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung, mulai dari akses jalan tol Lintas Sumatra hingga fasilitas pelabuhan di Teluk Bayur dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang masih perlu percepatan. Dalam konteks pengembangan hilirisasi di Provinsi Jambi, sinergi pembangunan infrastruktur ini akan membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi, memperkuat klaster industri lokal, dan memastikan distribusi produk bernilai tambah ke pasar domestik maupun internasional secara lebih efisien.

Dipindai dengan CamScanner

2.7.3.2.2 Sinkronisasi Kebijakan Makro Dan Sektoral

Sinkronisasi kebijakan makro-ekonomi dan sektoral di tingkat nasional perlu diacu dalam rencana pembangunan wilayah koridor Pulau Sumatra. Untuk Provinsi Jambi, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal provinsi seperti insentif investasi dan pemungutan pajak daerah dengan kebijakan moneter serta kebijakan perdagangan nasional. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan skema kemudahan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat tidak kontradiktif dengan regulasi daerah, sehingga iklim usaha di Sumatra dan Provinsi Jambi semakin kondusif. Dalam konteks isu jangka menengah, koordinasi lintas-lembaga di Pulau Sumatra masih perlu diperkuat melalui forum-forum seperti Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Regional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah. Bagi Provinsi Jambi, partisipasi aktif dalam kerangka Sinergi Strategis Sumatra akan memastikan kebijakan pembangunan di sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, didorong sesuai visi nasional tanpa mengabaikan karakteristik lokal serta potensi sumber daya setempat.

2.7.3.2.3 Penerapan Standar Sustainability Yang Tinggi Di Level Global

Tuntutan pasar internasional terhadap sertifikasi keberlanjutan, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), menuntut produsen di koridor Sumatra untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Di Provinsi Jambi, pelaku industri kelapa sawit dan karet tengah mengadopsi sistem tata kelola berkelanjutan (Good Agricultural Practices/GAP) serta memperkuat program restorasi lahan gambut. Dalam jangka menengah, perbaikan kualitas lingkungan hidup ini bukan hanya meningkatkan akses pasar ekspor, tetapi juga mengurangi risiko konflik sosial dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, pengembangan ekonomi hijau di Sumatra dapat diperkuat melalui insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi rendah karbon, serta peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi lokal. Provinsi Jambi, sebagai bagian koridor Sumatra, masih perlu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi petani plasma dan industri pengolahan agar memenuhi standar global. Dengan demikian, poros ekonomi di Sumatra dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Dipindai dengan CamScanner

2.7.3.2.4 Transisi Energi Untuk Mendorong Pemerataan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah mengamanatkan perluasan National Electricity Grid (N-national) ke Pulau Sumatra sebagai upaya pemerataan energi. Untuk Provinsi Jambi, pembenahan jaringan transmisi antar-provinsi di Sumatra bagian tengah akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, mengurangi defisit daya, dan menurunkan biaya energi bagi industri lokal. Dalam jangka menengah, konektivitas grid ini juga memungkinkan penyerapan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah Tapanuli atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai Batanghari ke provinsi lain di Sumatra. Lebih lanjut, percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT), terutama PLTS terapung di waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di areal kebun kelapa sawit, merupakan fokus percepatan di Koridor Sumatra. Untuk Provinsi Jambi, potensi EBT dapat dioptimalkan melalui skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta, sekaligus mendukung tujuan nasional transisi energi rendah karbon.

2.7.3.2.5 Aging Population Negara Maju

Fenomena penurunan proporsi usia produktif di negara-negara maju membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata kesehatan (*health tourism*). Koridor Pulau Sumatra, termasuk Jambi, memiliki modal alam berupa pemandian air panas, hutan tropis, dan pusat spa tradisional berbasis rempah. Dalam jangka menengah, pengembangan destinasi pariwisata kesehatan dapat difokuskan pada penyediaan layanan medis komplementer, seperti terapi herbal dan rehabilitasi lansia, yang terintegrasi dengan paket wisata budaya lokal. Untuk mewujudkan potensi ini, Provinsi Jambi perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan dan akomodasi yang ramah lansia, serta menjalin kerja sama dengan jaringan rumah sakit dan klinik internasional. Selain itu, program pelatihan bahasa asing bagi tenaga hospitality dan tenaga medis akan memperkuat citra Sumatra sebagai destinasi pariwisata kesehatan kelas dunia. Dengan demikian, sektor pariwisata di Jambi dan koridor Sumatra dapat tumbuh diversifikasi, sekaligus menyerap devisa dan memperluas lapangan kerja.

2.7.3.3 Isu Pembangunan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Isu strategis Provinsi Jambi tidak bisa terlepas dari risiko global dan isu jangka menengah nasional sebagaimana terlihat pada **Sumber:** Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, 2024

Gambar **2-95** dan **Sumber:** RPJMN 2025-2029, 2024

Gambar 2-96. Selain itu, isu strategis tersebut juga berhubungan langsung dengan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan.

Tabel 2-44 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	
Komoditas ekspor unggulan (kelapa sawit, karet, pinang, kopi)	Volatilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Akibat Fluktuasi Harga serta Produksi Komoditas Unggulan	Keterbatasan Infrastruktur	*Biodiversity loss* dan Gangguan Ekosistem	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia	Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan
Produktivitas sektor pertambangan					
Hilirisasi produk perkebunan dan pengembangan agroindustri	Penurunan Produktivitas Sektor Unggulan	Kerentanan Bencana			Rantai Nilai Komoditas Unggulan Provinsi Jambi
Produktivitas sektor perikanan tangkap					
Pengembangan SDM di sektor usaha dan industri	Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia	Tingginya Tingkat Kemiskinan	*Involuntary Migration*	*Aging Population* Negara Maju	Kualitas Sumber Daya Manusia
Ekspansi lapangan pekerjaan baru melalui pelatihan dan sertifikasi					
Digitalisasi layanan publik dan integrasi data sistem pemerintaha	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	Tata Kelola yang belum Optimal	Polarisasi Sosial	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Tata Kelola Pemerintahan
			Cyber Insecurity		
			Dampak		

Dipindai dengan CamScanner

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	
(SPBE)			Buruk Teknologi AI		
Pengembangan konektivitas antarwilayah yang berada di jalur utama perdagangan antarwilayah di Sumatera dan Indonesia					
Pengembangan pusat distribusi dan logistik antarwilayah dari letak geografis dan akses pelabuhan Muara Sabak sebagai pelabuhan ekspor-impor komoditas unggulan dan perdagangan internasional	Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan	Tingginya Tingkat Kemiskinan	Misinformasi dan Disinformasi	Transisi energi untuk Mendorong Pemerataan	Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan
Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak di daerah terpencil	Kesenjangan Layanan Dasar dan Infrastruktur	Keterbatasan Infrastruktur		Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global	Kualitas Sumber Daya Manusia
Sektor kehutanan, lahan gambut, sungai, dan sumber air sebagai penyokong jasa lingkungan dan ekosistem	Degradasi Lingkungan	Degradasi Lingkungan	Cuaca Ekstrem	Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global	Degradasi Lingkungan
			Perubahan Kritikal terhadap Ekosistem		
		Kerentanan Bencana	Krisis Sumber Daya Alam		
			Polusi		

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2025-2029 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai isu strategis pembangunan Provinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut:

2.7.3.3.1 Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan

Produktivitas ekonomi di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat sebesar 4,66 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,13 persen. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 4,51 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif, perlambatan yang terjadi menunjukkan adanya tantangan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi secara berkelanjutan, khususnya di sektor-sektor strategis daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur melalui Indeks Gini (Gini Ratio) juga mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai. Pada Maret 2023, Indeks Gini Provinsi Jambi tercatat sebesar 0,343, meningkat dari 0,335 pada September 2022. Meskipun terjadi perbaikan di Maret 2024 menjadi 0,321, ketidakstabilan angka ini merefleksikan bahwa pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan distribusi pendapatan yang masih terjadi ini dapat berdampak terhadap penguatan daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan, dan produktivitas ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang.

Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor-sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 33,93 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan ketahanan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, serta tekanan eksternal lainnya. Oleh karena itu, diversifikasi sektor ekonomi menjadi tantangan penting agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas, stabil, dan inklusif.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jambi masih menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terdapat perbedaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini turut mempengaruhi ketimpangan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi secara umum. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dan strategi pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, ketimpangan ini berpotensi melebar dan menjadi hambatan bagi upaya pencapaian target-target pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dirumuskan sejumlah strategi prioritas, di antaranya adalah mendorong diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor industri pengolahan, pariwisata, dan jasa berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan vokasional. Selain itu, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, serta kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif bagi kelompok rentan, diharapkan dapat mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan dan mendorong produktivitas ekonomi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

2.7.3.3.2 Rantai nilai komoditas unggulan Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi yang signifikan dalam sektor pertanian, kehuitanan dan perikanan, yang tercemin dalam kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan pinang memainkan peran penting dalam perekonomian regional. Komoditas kelapa sawit sebagai sub-sektor perkebunan dengan volume produksi tertinggi mencapai 2.496,3 ribu ton, menjadikannya komoditas dengan kontribusi 17,8% terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Dipindai dengan CamScanner

Sektor pertambangan, terutama komoditas batu bara, minyak bumi dan gas alam juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan Provinsi Jambi terutama melalui aktivitas ekspor. Meskipun mengalami penurunan dari 15,31 pada tahun 2023 sektor pertambangan dan penggalian masih menempati nilai kontribusi terbesar kedua sebesar 13,41 pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batu bara.

Penguatan rantai nilai komoditas unggulan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jambi. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, perbaikan infrastruktur logistik, dan peningkatan akses pasar. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku dalam rantai nilai, serta penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan. Optimalisasi rantai nilai komoditas unggulan di Provinsi Jambi masih belum sepenuhnya tercapai. Komoditas strategis seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan pinang masih didominasi oleh penjualan dalam bentuk bahan mentah, yang berdampak pada rendahnya daya saing daerah dan kesejahteraan petani. Selain itu, infrastruktur pendukung, teknologi pengolahan, serta kapasitas kelembagaan pelaku usaha, khususnya UMKM dan koperasi, masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok. Secara umum, belum terbangunnya sistem rantai nilai yang terintegrasi dan berkelanjutan menyebabkan potensi ekonomi dari komoditas unggulan Provinsi Jambi belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7.3.3.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi masih menjadi tantangan utama dalam mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun demikian, capaian IPM pada tahun 2024 masih terdapat ketimpangan antar wilayah

Dipindai dengan CamScanner

kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan capaian IPM sebesar 70,77 dan capaian IPM ini baru masuk ke dalam kategori "Tinggi" dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mencapai sebesar 72,01. Sedangkan pada tingkat kota, terdapat capaian IPM Kota Jambi yang telah mencapai sebesar 81,77 dengan kategori "Sangat Tinggi", bahkan70,77 dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan capaian IPM sebesar 72,01 dua capaian IPM tersebut berada di atas IPM Provinsi Jambi yaitu 74,36. Hal ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pendidikan dan ketenagakerjaan. Meskipun terdapat tren positif dalam indikator pendidikan, ketimpangan antarwilayah dan rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja masih menjadi permasalahan utama. Data dari BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Jambi meningkat dari 8,97 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,26 tahun pada tahun 2024. Namun, peningkatan ini belum merata di seluruh kabupaten/kota, yang berdampak pada ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah.

Di sektor ketenagakerjaan, komposisi tenaga kerja Provinsi Jambi masih didominasi oleh pekerja sektor informal dan berpendidikan rendah. Pada tahun 2024, dari total angkatan kerja sebanyak 1.919.342 orang, sebanyak 1.833.267 orang bekerja, dengan sebagian besar berada di sektor informal. Rendahnya akses terhadap pelatihan vokasi dan keterampilan kerja praktis, serta minimnya pusat pelatihan kerja yang terstandar, menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 menunjukan nilai 4,53 yang menurun 0,06 dari tahun 2023 yang menunjukan nilai 4,59. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Upaya peningkatan mutu pendidikan harus diiringi

Dipindai dengan CamScanner

dengan pengembangan sistem pelatihan vokasi yang relevan dan aksesibel, guna meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jambi.

2.7.3.3.4 Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan hidup di Provinsi Jambi merupakan tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan berkurangnya kawasan lindung menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Tekanan berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian, dan permukiman menyebabkan deforestasi, berkurangnya tutupan hutan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Kegiatan penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, serta lemahnya pengawasan terhadap perizinan semakin mempercepat laju degradasi kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung dan konservasi. Selain itu, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sering terjadi pada musim kemarau menimbulkan kerusakan ekosistem, polusi udara lintas wilayah, serta gangguan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat.

Ekosistem gambut di Provinsi Jambi yang bersifat rentan juga mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan dan sistem drainase yang tidak terkendali, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Batanghari sebagai tulang punggung hidrologis wilayah, turut mengalami degradasi serius akibat sedimentasi, pencemaran air, dan aktivitas pertambangan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Pencemaran lingkungan semakin meningkat dari berbagai sumber, baik limbah domestik, limbah industri, maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang belum sepenuhnya dikelola dengan sistem pengolahan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Kualitas air sungai mengalami penurunan yang berkelanjutan, sementara sistem

Dipindai dengan CamScanner

pengelolaan air limbah terpadu yang mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan belum sepenuhnya tersedia.

Perubahan iklim memperparah kondisi lingkungan yang ada, yang ditandai dengan meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Hal ini menunjukkan lemahnya ketahanan iklim daerah, serta belum optimalnya kebijakan adaptasi dan mitigasi yang berbasis ekosistem dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan minimnya edukasi lingkungan semakin memperburuk kondisi tersebut, sementara kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan juga masih terbatas.

Permasalahan-permasalahan tersebut tercermin dalam fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (2023), IKLH Provinsi Jambi mengalami perubahan dari tahun 2019 sebesar 68,06, meningkat menjadi 70,87 pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 69,04 pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 70,32 pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 68,15 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada beberapa tahun, upaya perbaikan kualitas lingkungan belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Degradasi lingkungan hidup merupakan isu strategis yang mendesak untuk ditangani secara lintas sektor, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jambi memerlukan penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan efektivitas pengawasan, pemulihan ekosistem yang kritis, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal dasar bagi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

2.7.3.3.5 Tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap efektivitas

Dipindai dengan CamScanner

penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kinerja birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Reformasi birokrasi yang telah diupayakan belum sepenuhnya menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masih bervariasi antar perangkat daerah, dan belum seluruh unit pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terukur serta sistem pengaduan yang responsif.

Disparitas kapasitas kelembagaan antar kabupaten/kota serta lemahnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan turut menghambat terwujudnya pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi belanja, efektivitas alokasi anggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, capaian indeks SPBE Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai angka 3,31. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola layanan digital pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kebijakan layanan elektronik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kenaikan tersebut berbanding terbalik dengan Indeks Pelayanan Publik yang terus mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan nilai 89,62 menjadi 88,41 pada tahun 2023 dan kembali mengalami penurunan menjadi 65,62 pada tahun 2024. Penurunan Indeks Pelayanan Publik ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik yang adaptif, berintegritas, serta berbasis kebutuhan masyarakat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui sistem pengawasan internal yang lebih efektif, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan etika publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan juga perlu terus dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis yang krusial untuk

Dipindai dengan CamScanner

diwujudkan melalui penguatan kapasitas birokrasi, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, akselerasi digitalisasi layanan, serta pengembangan budaya kerja yang bersih, melayani, dan berorientasi hasil. Perwujudan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

2.7.3.4 Penyelarasan KLHS RPJMD Provinsi Jambi terhadap RPJMD Provinsi Jambi

Penyelarasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara efektif terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Dipindai dengan CamScanner

2.7.3.4.1 Integrasi Gambaran Umum

Tabel 2-45 Matriks Penelaahan Integrasi KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 ke RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

	Daya Dukung Air	Hal	Daya Dukung Pangan	Hal	Jasa Lingkungan	Hal
Laporan KLHS RPJMD	Ketersediaan Air di Provinsi Jambi pada tahun 2023 sebesar 57.037.404.911,36 m3 sedangkan total kebutuhan air pada tahun 2023 adalah sebesar 17.598.569.327,95 m3 .Berdasarkan data tersebut diketahui selisih ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 39.438.835.583,41 m3 maka status daya dukung air di Provinsi Jambi belum terlampaui pada tahun 2023. Berdasarkan Data Kajian Daya Dukung Air di Provinsi Jambi tahun 2022 (SK 146 TH 2023), daerah dengan tingkat jasa penyedia air yang rendah hingga sangat rendah umumnya berada di dataran rendah, terutama di tiga kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan sebagian Muaro Jambi. Wilayah-wilayah ini	III-31	Berdasarkan Kajian Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2022, DDDT penyedia pangan terbagi statusnya menjadi status surplus, seimbang, dan defisit. Di Provinsi Jambi status daya dukung luasan lahan didominasi oleh lahan seimbang (2.814.699,40 ha). Sebagian besar daya dukung pangan berada pada lahan dengan status defisit (2.041.136,22 ha). Sedangkan sebagian kecil berada pada status surplus (51.560,1 ha)	III-34	Di provinsi Jambi terdapat 20 Kinerja layanan atau jasa ekosistem, yang diukur berdasarkan overlay peta jasa ekosistem dengan peta wilayah provinsi Jambi. Dari 20 jasa ekosistem tersebut, pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 ini difokuskan jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih, dan jasa keanekarangaman hayati.	III-107

Dipindai dengan CamScanner

	Daya Dukung Air	Hal	Daya Dukung Pangan	Hal	Jasa Lingkungan	Hal
	didominasi oleh lahan gambut, sehingga permasalahan ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan.					
	Daya Dukung Air	**Hal**	**Daya Dukung Pangan**	**Hal**	**Jasa Lingkungan**	**Hal**
Dokumen RPJMD	Neraca air yang dihitung berdasarkan data curah hujan dan geohidologi menunjukan beberapa wilayah dengan kebutuhan air yang lebih besar daripada ketersediaannya (defisit) sehingga memerlukan pengolahaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung kebutuhan pertanian, domestik, dan industri.		Provinsi Jambi memiliki struktur wilayah yang ditandai oleh beragam karakteristik penggunaan lahan yang mencerminkan potensi dan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, termasuk ketersediaan pangan. Dari total luas wilayah Provinsi Jambi, yaitu sebesar 4.907.395,72 hektar, sebagian besar lahan termasuk dalam kategori daya dukung seimbang, yaitu seluas 2.814.699,40 hektar. Artinya, lahan pada kawasan tersebut secara umum mampu		Kawasan strategis di Provinsi Jambi dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, dengan arah pengembangan untuk penyediaan infrastruktur regional pendukung kegiatan ekonomi; penyediaan sarana, prasarana dan utilitas; dan pengendalian pemanfaatan ruang.	
					Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dengan arah pengembangan pemanfaatan sumber	

Dipindai dengan CamScanner

	Daya Dukung Air	Hal	Daya Dukung Pangan	Hal	Jasa Lingkungan	Hal
			memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya secara relatif seimbang antara kapasitas produksi dengan konsumsi. Namun demikian, tantangan nyata terlihat dari masih luasnya kawasan yang berada dalam status defisit, yaitu sebesar 2.041.136,22 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada area tersebut, kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan pangan, Sementara itu, hanya sebagian kecil wilayah yang tergolong dalam status surplus, yakni 51.560,1 hektar, yang mencerminkan		daya energi non-fosil dan pengembangan teknonlogi. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan pengembangan kawasan taman nasional sebagai wilayah konservasi. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya.	

Dipindai dengan CamScanner

	Daya Dukung Air	Hal	Daya Dukung Pangan	Hal	Jasa Lingkungan	Hal
			adanya kelebihan kapasitas produksi pangan dibandingkan kebutuhan di wilayah tersebut.			

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Tabel 2-45, dapat disimpulkan bahwa penyelarasan aspek lingkungan telah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada tiga komponen utama, yaitu air, pangan, dan jasa lingkungan. Dalam aspek daya dukung air, data menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi memiliki ketersediaan air yang jauh melebihi kebutuhan secara agregat pada tahun 2023 (surplus sebesar ±39,4 miliar m^3), distribusinya tidak merata dengan wilayah-wilayah di dataran yang rendah mengalami defisit akibat keterbatasan pasokan dan dominasi lahan gambut. Hal ini mendorong perlunya pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian, domestik, dan industri.

Pada aspek daya dukung pangan, luas lahan dengan status seimbang mendominasi (±2,8 juta ha), tetapi terdapat tantangan signifikan berupa lahan dengan status defisit yang mencapai lebih dari 2 juta ha, menandakan perlunya intervensi melalui pemanfaatan lahan yang adaptif, peningkatan produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Sementara itu, dalam aspek jasa lingkungan, KLHS telah mengidentifikasi 20 jenis layanan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah provinsi dan menjadi dasar bagi perencanaan ruang dan pembangunan wilayah. RPJMD merespons hal ini melalui strategi pengembangan kawasan strategis yang memperhatikan penyediaan infrastruktur ekonomi, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, baik dari sisi ekologis maupun sosial budaya.

Penyelarasan gambaran umum dalam dokumen RPJMD dengan hasil KLHS menjadi sangat penting mengingat bahwa pembangunan yang tidak disertai pemahaman terhadap batas daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas. Oleh karena itu, keselarasan antara gambaran umum pembangunan daerah dengan kondisi faktual lingkungan merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang

Dipindai dengan CamScanner

diambil bersifat responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Penyelarasan ini juga memperkuat integrasi antara perencanaan sektoral dan tata ruang, sehingga program-program prioritas tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berimbang.

2.7.3.4.2 Integrasi Isu Strategis

Integrasi isu strategis dilakukan dengan merujuk pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kualitas dan kuantitas sumber daya alam, perubahan iklim, kerentanan bencana, serta ketimpangan sosial-ekonomi. Isu-isu ini telah dipadukan dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas daerah, sehingga pembangunan yang dirancang tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi, tetapi juga adaptif terhadap risiko lingkungan dan sosial. Proses integrasi ini turut memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup yang bijak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat terdampak.

Tabel 2-46 Matriks Penelaahan Isu Strategis

	Isu Strategis	Hal
Laporan KLHS RPJMD	Degradasi Lingkungan	IV-72
Dokumen RPJMD	Provinsi Jambi menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang kompleks, meliputi kehilangan air, penurunan kualitas air, degradasi ekosistem pesisir, serta kebakaran hutan dan lahan. Kehilangan air yang signifikan terjadi baik di wilayah barat maupun timur, dengan akumulasi terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan sebagian Kabupaten Batanghari, yang tidak berkaitan langsung dengan curah hujan, melainkan diduga kuat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik seperti perkebunan di lahan gambut dan sistem	II.6.3.3.4

Dipindai dengan CamScanner

	Isu Strategis	Hal
	drainase yang berlebihan. Selain itu, kualitas air sungai di Jambi mengalami penurunan akibat pencemaran dari aktivitas pertanian, pertambangan, industri pengolahan seperti pabrik CPO, serta limbah domestik, yang mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan dan rendahnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Wilayah pesisir, khususnya ekosistem mangrove, juga mengalami penurunan luasan, kerapatan vegetasi, dan keanekaragaman hayati, yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir, termasuk nelayan yang sebagian besar tergolong masyarakat miskin. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, masih terjadi dan menyebabkan kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara, degradasi kesuburan tanah, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.	
Laporan KLHS RPJMD	Kerentanan Bencana	IV-83
Dokumen RPJMD	Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan pinang. Kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 17,8%. Sektor pertambangan, khususnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam, juga berperan penting meskipun mengalami penurunan kontribusi akibat gangguan distribusi oleh musim kemarau. Namun, penguatan rantai nilai komoditas unggulan masih menjadi tantangan. Sebagian besar produk dijual dalam bentuk mentah, dengan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas pelaku usaha yang masih terbatas. Kurangnya integrasi dan keberlanjutan dalam sistem rantai nilai menyebabkan potensi ekonomi Jambi belum termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan	II.6.3.3.2

Dipindai dengan CamScanner

	Isu Strategis	Hal
	masyarakat.	
Laporan KLHS RPJMD	Keterbatasan Infrastruktur	IV-87
Dokumen RPJMD	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat ketimpangan antar wilayah, terutama antara kota dan kabupaten. Kualitas pendidikan yang belum merata serta rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja menjadi tantangan utama. Rata-rata lama sekolah meningkat, namun belum signifikan di seluruh daerah. Di sektor ketenagakerjaan, tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal dan berpendidikan rendah, dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,53% pada tahun 2024, upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM masih diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi strategis yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dan mudah diakses.	II.6.3.3.3
Laporan KLHS RPJMD	Tata Kelola yang belum Optimal	IV-92
Dokumen RPJMD	Tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan ASN yang profesional dan berorientasi pelayanan, sementara kepatuhan	II.6.3.3.5

Dipindai dengan CamScanner

	Isu Strategis	Hal
	terhadap standar pelayanan publik masih belum merata. Disparitas kapasitas kelembagaan antar daerah dan lemahnya integrasi perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pembangunan turut menghambat efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun capaian indeks SPBE meningkat menjadi 3,31 pada tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik justru mengalami penurunan signifikan, mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pelayanan yang lebih adaptif dan responsif. Pengelolaan keuangan daerah juga masih menghadapi kendala dalam efisiensi belanja dan optimalisasi PAD. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan melalui pengawasan internal yang kuat dan budaya kerja yang berintegritas. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis melalui peningkatan kapasitas birokrasi, akselerasi digitalisasi, dan pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani, guna mewujudkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.	
Laporan KLHS RPJMD	Tingginya Tingkat Kemiskinan	IV-93
Dokumen RPJMD	Produktivitas ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan perlambatan dalam dua tahun terakhir, dengan pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,13% pada 2022 menjadi 4,66% pada 2023, dan kembali turun menjadi 4,51% pada 2024. Ketimpangan pendapatan juga masih menjadi tantangan, tercermin dari fluktuasi Indeks Gini yang meskipun membaik di 2024 menjadi 0,321, tetap mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang belum merata. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer menjadikan ketahanan ekonomi rentan terhadap gangguan eksternal. Selain itu, kesenjangan antarwilayah dalam akses layanan dasar turut memperbesar ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, strategi	II.6.3.3.1

Dipindai dengan CamScanner

	Isu Strategis	Hal
	pembangunan ke depan perlu difokuskan pada diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, dan perlindungan sosial yang menyasar kelompok rentan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.	

Berdasarkan Tabel 2-46, isu strategis yang tercantum menunjukkan adanya keselarasan dan keterkaitan yang erat, khususnya dalam hal degradasi lingkungan. KLHS mengidentifikasi degradasi lingkungan sebagai isu yang berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Isu ini kemudian diperdalam dalam dokumen RPJMD yang menjabarkan secara komprehensif berbagai persoalan lingkungan, seperti kehilangan air, penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran akibat aktivitas industri, serta kebakaran hutan dan lahan. Keterkaitan antara KLHS dan RPJMD terlihat dari kesamaan fokus terhadap faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan, baik yang bersifat alami maupun disebabkan oleh kelalaian manusia. Aktivitas seperti perluasan lahan perkebunan, pertambangan, pengolahan limbah, dan konversi lahan menjadi sorotan dalam kedua dokumen, dengan penekanan pada dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis terkait kerentanan bencana yang termuat dalam KLHS dan RPJMD Provinsi Jambi menunjukkan keterkaitan yang erat, khususnya terhadap keberlanjutan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. KLHS menyoroti tingginya ketergantungan Jambi pada sektor-sektor yang rentan terhadap bencana, sementara RPJMD menegaskan bahwa kontribusi besar sektor seperti kelapa sawit terhadap PDRB sangat rentan terganggu oleh musim kemarau dan gangguan distribusi. Keduanya menggarisbawahi tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, kapasitas pelaku usaha, serta

Dipindai dengan CamScanner

kurangnya integrasi rantai nilai dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penyelarasan isu ini penting untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana.

Isu mengenai Keterbatasan infrastruktur yang diangkat dalam KLHS Provinsi Jambi memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, ketimpangan wilayah dan kualitas pendidikan yang belum merata masih menjadi tantangan utama, terutama akibat rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Hal ini diperburuk oleh dominasi sektor informal dalam ketenagakerjaan dan minimnya akses terhadap pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Keterbatasan infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan layanan pendidikan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penyelarasan isu strategis antara KLHS dan RPJMD sangat penting untuk memperkuat sinergi pembangunan SDM melalui peningkatan infrastruktur yang mendukung pendidikan, pelatihan, serta akses kerja yang berkualitas dan inklusif.

Isu strategis berikutnya juga menjadi fokus dalam KLHS yaitu mengenai tata kelola yang belum optimal memiliki keselarasan kuat dengan permasalahan yang diuraikan dalam RPJMD, terutama terkait efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. KLHS menyoroti lemahnya kinerja birokrasi dan disparitas pelayanan antarwilayah, sementara RPJMD mempertegas tantangan tersebut melalui data penurunan Indeks Pelayanan Publik dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua dokumen menekankan pentingnya reformasi birokrasi, integrasi perencanaan, serta akselerasi digitalisasi dan penguatan budaya kerja bersih dan profesional sebagai respons terhadap rendahnya efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, penyelarasan isu ini

Dipindai dengan CamScanner

menjadi penting guna mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tingginya tingkat kemiskinan yang tercantum dalam KLHS Provinsi Jambi menunjukkan keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang diuraikan dalam RPJMD, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketimpangan distribusi hasil pembangunan. KLHS menyoroti rendahnya produktivitas dan ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini. RPJMD memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa struktur ekonomi Jambi yang masih didominasi sektor primer membuat ketahanan ekonomi rentan terhadap gangguan eksternal, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah dalam akses layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan isu strategis melalui diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, guna menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan.

Penyelarasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mempertimbangkan kapasitas lingkungan, ketahanan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Isu-isu seperti degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, mencerminkan adanya tantangan multidimensi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, integrasi isu-isu strategis ini dalam RPJMD menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan menekankan penguatan tata kelola, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi MANTAP : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Dipindai dengan CamScanner

Berdaya saing : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

3.2 Misi

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi,

Dipindai dengan CamScanner

yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia,** yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

3.3 Tujuan dan Sasaran

3.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif.**

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, melibatkan seluasnya-luasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan serta adaptif dengan perubahan zaman. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dipindai dengan CamScanner

2 **Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah**

Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut. Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas pada tiga lini, yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Sektor-sektor dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata adalah sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan dukungan infrastruktur yang handal, akses permodalan dan pasar serta ekosistem inovasi yang baik. Ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan daya saing daerah ini adalah Indeks Daya Saing Daerah.

3 **Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial**

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca telah menjadi ancaman serius yang memerlukan tindakan segera. Sistem perekonomian rendah karbon merupakan platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan emisi GRK yang rendah. Melalui penerapan sistem perekonomian yang rendah karbon, diantaranya dengan pemanfaatan teknologi bersih dan praktik berkelanjutan pada berbagai sektor maka akan mengefisienkan penggunaan energi konvensional sehingga secara jangka panjang manfaat yang akan diterima jauh lebih besar dibanding biaya yang harus dikeluarkan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan inklusi secara sosial. Indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan tujuan ini adalah Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru.

4 **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.**

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar

Dipindai dengan CamScanner

tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan ini tercapai.

3.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital**

   Birokrasi yang melayani, berintegritas dan berbasis digital menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab dengan hasil kinerja yang terukur. Selain itu, sebagai wujud transparansi, masyarakat diberikan ruang untuk mendapatkan informasi pembangunan dalam berbagai platform yang adaptif. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan indeks pelayanan publik, dan Indeks Keterbukaan Informasi

2. **Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**

   Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas dan Indeks daya saing infrastruktur.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi**

Transformasi digital merupakan perubahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk merancang ulang proses-proses tradisional sehingga bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Transfromasi digital tidak hanya mereplikasi proses atau layanan yang ada menjadi bentuk digital, namun juga mengubah proses tersebut menjadi lebih baik. Terwujudnya transformasi digital di Provinsi Jambi ditandai oleh indikator Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi, Tingkat inklusi keuangan Provinsi, serta Indeks Pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi.

4. **Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi**

Upaya yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi di Provinsi Jambi adalah dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, swasembada pangan, serta meningkatkan investasi di daerah. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah inflasi, rasio kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks ketahanan pangan, ICOR dan PDRB perkapita.

5. **Meningkatnya produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata**

Skala ekonomi masyarakat dan daerah didorong dengan meningkatkan nilai tambah lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong industrialisasi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Tidak hanya mendorong sektor sekunder, sektor pariwisata dan sektor tersier lainnya juga akan didorong agar mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang besar terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu, UMKM yang ada di Provinsi Jambi akan

Dipindai dengan CamScanner

didorong untuk lebih produktif melalui pemberian akses permodalan yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio PDRB penyediaan akomodaasi, makan dan minum; distribusi PDRB sektor tersier, rasio PDRB industri pengolahan, pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

6. **Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi**

   Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, korporasi, komunitas, institusi pendidikan dan lain-lain akan berkolaborasi mewujudkannya. Melalui jaringan informasi yang terbentuk dalam ekosistem inovasi, masing-masing pemangku kepentingan dapat berbagi informasi dan sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi akan ditandai oleh indikator meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya indeks inovasi daerah dan pengeluaran IPTEK dan Inovasi (Persen APBD).

7. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

   Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.

8. **Meningkatnya kualitas lingkungan**

   Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk

Dipindai dengan CamScanner

menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

9. **Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat**

   Pesisir dan dan sumber daya kelautan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun sumber daya laut yang banyak belum bisa menjamin penduduk di wilayah pesisir dapat hidup dengan layak karena pemanfaatan sumber daya yang kurang baik. Keberhasilan sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari indikator peran sektor perikanan dalam PDRB, rata-rata konsumsi kalori ikan perkapita perhari dan persentase penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir.

10. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

    Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup dan prevalensi stunting menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

11. **Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender**

    Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah. Selain itu, kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkebudayaan menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam

Dipindai dengan CamScanner

RPJMD ini, yang ditandai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Sementara sebagai bentuk pengarusutamaan gender, optimalisasi peran perempuan perlu terus didorong. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3-1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi

Visi: Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi			BB (78,88)	BB (79,00)	BB (79,5)	A (80,01)	A (81,0)	A (82,0)	A (83,0)	A (83,0)
			Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Nilai AKIP	B (68,42)	B (69,2)	BB (70,50)	BB (71,50)	BB (73,01)	BB (74,6)	BB (76,5)	BB (76,5)
				Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas (SPI))	65,36	73,97	73,99	74,55	75,7	77	77,75	77,75
				Indeks SPBE	3,05	3,85	4,0	4,20	4,41	4,81	4,85	4,85
				Indeks Pelayanan Publik	3,67*	3,33	3,35	3,39	3,42	3,45	3,50	3,50
				Indeks Keterbukaan Informasi	79,3 (sedang)	79,5	80,01	80,8	81,3	81,9	82,25	82,25
Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah			3,38	3,42	3,47	3,58	3,76	3,85	3,99	3,99
			Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	0.5874	0,588	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63	0,63
				Indeks Daya Saing Infrastruktur	2,38	2,5	2,56	2,62	2,67	2,73	2,79	2,79
			Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi	Indeks Transformasi Digital Nasional	42,3**	50,80	51,23	51,67	52,10	52,53	52,65	52,65

Dipindai dengan CamScanner

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Jambi	Provinsi Jambi								
				Tingkat inklusi keuangan Provinsi	85*	91,35	91,86	92,5	93,1	93,72	94,25	94,25
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,92*	5,9	6,1	6,27	6,5	6,8	6,85	6,85
			Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi	Inflasi	1,43	3,1-3,7	3,0-3,7	2,9-3,7	2,5-3,7	1,6-3,7	1,5-3,5	1,5-3,5
				Rasio kapasitas fiskal daerah	1,542 (rendah)	1,550	1,625	1,657	1,691	1,725	1,795	1,795
				Pertumbuhan Ekonomi	4,51	4,8-5,2	4,80 - 5,40	4,95 - 5,50	5,10 - 5,6	6,25-7,0	5,25-5,50	5,25-5,50
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	4,27-4,38	4,20-4,35	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65 - 4,00	2,65 - 4,00
				Indeks Ketahanan Pangan	74,94	75,10	76,94	77,5	78,5	79,50	80,50	80,50
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	5,55	5,50	5,05	4,83	4,75	4,50	4,32	4,32
				PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)	86,72	92,2	96,53	108,48	123,05	132,70	140,68	140,68

Dipindai dengan CamScanner

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	1,10	1,21	1,22	1,23	1,24	1,26	1,27	1,27
				Distribusi PDRB sektor tersier	35,28	35,29	35,30	35,34	35,40	35,45	35,5	35,5
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	9,77	9,78-10,1	9,8 -10,1	9,85 - 10,1	9,9 -10,1	9,99-10,1	9,99-10,1	9,99-10,1
				Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan	4,25	5,5	5,60	6,00	7,01	8,10	8,10	8,1
			Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Indeks Inovasi Daerah	58,59	58,75	58,89	59	59,25	60,1	61	61
Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya,	Indeks Ekonomi Hijau			57,92**	61,39	63,65	65,54	66,46	68,55	68,60	68,60
			Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,1	6,3-6,8	6,25 - 6,76	5,9 - 6,5	4,98-5,75	3,66-4,66	3,65-4,63	3,65-4,63
			Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini	0,321	0,337-0,341	0,330 – 0,337	0,318 – 0,325	0,314 - 0,318	0,311-0,315	0,311-0,315	0,311-0,315

Dipindai dengan CamScanner

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan inklusif secara sosial		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,15*	73,71	73,92	74,13	74,34	74,56	74,77	74,77
				Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	77,27*	78,5	80,76	83,58	86,14	86,55	88,70	88,70
		Indeks Ekonomi Biru			14,03*	15,26	15,35	16,26	17,27	18,29	19,01	19,01
			Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Distribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%)	2,16	2,16	2,17	2,175	2,18	2,19	2,2	2,2
				Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari	55,63	56,0	57,52	59,48	60, 45	62,37	64,25	64,25
				Persentase Penduduk miskin ekstrim di wilayah Pesisir (%)	4,19	4,05	3,84	3,50	3,16	2,81	2,46	2,46
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan	Indeks Modal Manusia			0,54*	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,6
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,06	74,14	74,25	74,50	74,94	75,18	75,45	75,45
				Prevalensi Stunting	13,5	11,9	11,5	11	10.25	9.3	9.1	9.1

Dipindai dengan CamScanner

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berkesetaraan gender		Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,9	9,38-9,4	9,5	9,60	9,76	9,86-9,89	9,93	9,93
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	58,92*	60,15-60,23	60,73-60,85	61.29-61.44	61,83-62.02	62,38-62,6	62,7-63,0	62,7-63,0
				Indeks Ketimpangan Gender	0,528	0,514	0,504	0,489	0,469	0,467	0,465	0,465

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran–sasaran di atas diharapkan dapat meningkatkan daya saing Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pada indikator makro Provinsi Jambi.

Tabel 3-2 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMN untuk Provinsi Jambi	
		2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8	7,0
2	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	92,2	132,7
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,5	1,4
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,30 – 6,80	3,66 – 4,66
5	Rasio Gini	0,337 – 0,341	0,311 – 0,315
6	Indeks Modal Manusia	0,56	0,59
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	78,5	86,55
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,71	74,56
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,27 – 4,38	2,78 – 4,07

Sumber: RPJMN 2025-2029

Strategi mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi dan berkelanjutan yaitu:

1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
2. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan;
3. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mendorong ekonomi biru dan ekonomi hijau;
6. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
7. Transformasi digital;
8. Investasi;
9. Belanja pemerintah untuk produktivitas.

Strategi penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Pemanfaatan Data terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penentuan sasaran penerima bantuan program pemerintah (PRO JAMBI dan bantuan lainnya)
2. Menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan inklusif;
3. Penguatan wirausaha dan penciptaan lapangan kerja;
4. Penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah;
5. Memperluas pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja di sektor jasa, manufaktur dan digital yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi unggulan daerah;
6. Reskilling dan upskilling untuk memenuhi dinamika pekerjaan baru;
7. Pemagangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
8. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender dan inklusif;
9. Jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi masyarakat miskin dan dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Sedangkan strategi peningkatan Indeks Modal Manusia adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan stunting;
2. Pencegahan dan deteksi dini penyakit serta pembudayaan hidup sehat;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan akses layanan pendidikan;
5. Penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan berkualitas.

Berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta memperhatikan strategi yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penyelarasan terhadap sasaran tersebut sehingga tercipta sinergi dan keselarasan perencanaan antara pusat dan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3-3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2030

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	4,80 - 5,40	4,95 - 5,50	5,10 - 5,6	5,23 - 7,0	5,25 - 5,50
2	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	92,2	96,53	108,48	123,05	132,70	140,68
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,30 – 6,80	6,25 - 6,76	5,9 - 6,5	4,98-5,75	3,66-4,66	3,65-4,63
5	Rasio Gini	0,337–0,341	0,330 – 0,337	0,318 – 0,325	0,314 -0,318	0,311-0,315	0,311-0,315
6	Indeks Modal Manusia	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	78,5	80,76	83,58	86,14	86,55	88,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,71	73,92	74,13	74,34	74,56	74,77
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,27 – 4,38	4,20-4,40	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65 - 4,00

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Analisis KEMD Bappeda Prov. Jambi, 2025

Dipindai dengan CamScanner

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-4 Arah Kebijakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
	Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	
	Meningkatkan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Meningkatkan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal	
	Menyelesaikan penataan batas wilayah provinsi	
	penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah	
	Meningkatkan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi digital, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	
	Menerapkan budaya kerja inovatif	
	Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK	
	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	
	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis *e-government*	
	meningkatkan efektivitas penerapan manajemen SPBE, seperti pengelolaan data, aset dan infrastruktur TIK, dan peningkatan kualitas SDM pengelola SPBE	
	Meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola SPBE, mulai dari tingkat kematangan arsitektur SPBE hingga konektivitasnya terhadap jaringan intra, sistem penghubung layanan dan kebijakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
	meningkatkann kualitas sarana komunikasi berbasis digital yang memadai untuk diseminasi infromasi yang efisien dan menjangkau publik lebih luas serta mudah diakses oleh seluruh segmen masyarakat	
	Adopsi TIK dalam pemerintahan dan pelayanan publik	
	Menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, prima dan terjangkau	
	menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, dan menajemen TIK dalam rangka meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pengetahuan mengenai SPBE	
	Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, musrenbang dan forum penyusunan kebijakan lainnya	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Memberikan wadah/ saluran pengaduan bagi masyarakat, yaitu Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) (Himpunan Aspirasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat)	
	Peningkatan peran da'i dalam pembangunan	
	Menginformasikan tahapan pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan (perencanaan, pelaksanaan, hasil) kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah sesuai aturan yang berlaku	
Misi 2 : Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Fasilitasi dan peningkatan kualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara	
	Pembangunan Fly Over di Kota Jambi	
	Meningkatkan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan	
	Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi	
	Fasilitasi dan pembangunan jembatan Batang Hari 3 dan Jembatan Sungai Rambut	
	Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara	
	Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol	
	Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung	
	Mendorong percepatan pembangunan railways yang melewati Provisi Jambi	
	Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional	
	Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang	
	Fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati Parbo	
	Mengembangkan dan meningkatkan Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional	
	Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi	
	Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan	
	Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak	
	Fasilitasi pengambangan dan penataan kawasan perkotaan	
	Fasilitasi akses terhadap jaringan internet	
	Melakukan digitalisasi UMKM dan usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif	
	Penerapan kebijakan untuk penyederhaan proses perizinan dalam penggelaran infrastruktur digital oleh penyedia telekomuniasi di daerah	
	Penyediaan akses internet gratis (wifi) di fasilitas umum (kantor pemerintahan, sekolah, RS)	
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internal untuk mengembangkan keterampilan technopreneur bagi para pelaku usaha lokal	
	Fasilitasi adopsi teknologi digital bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM	
	Mendorong pengembangan riset dan inovasi melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga riset, maupun industri	
	Fasilitasi pembinaan *startup* digital lokal.	
	Penerapan kebijakan pemerintah daerah untuk mempermudah penanaman modal bagi para pelaku usaha lokal maupun startup.	
	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan digital tingkat dasar dan tingkat menengah bagi masyarakat	
	Penyediaan akses internet dan sarana TIK lainnya untuk mendukung proses pembelajaran digital di sekolah menengah	
	Memperbanyak kerja sama dengan lembaga pendidikan yang menawarkan program khusus dalam bidang TIK, akademi teknologi dalam rangka mencetak talentaseperti sekolah vokasi maupun digital yang berkualitas dan berdaya saing	
	Penguatan keuangan syariah (klaster jasa keuangan syariah, klaster keuangan sosial syariah dan klaster infrastruktur ekosistem syariah)	
	Penguatan Dana sosial Syariah	
	Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui bantuan modal kerja UMKM/Industri Rumah Tangga/ Start Up Milenial	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran	
	Fasilitasi pembentukan BUMD pangan dan pengelolaan migas	
	Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi	
	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	
	Mempercepat proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah	
	Meningkatkan sinergitas antar daerah dalam penerapan opsen pajak	
	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja	
	pemberian *life skill* bagi angkatan kerja milenial/Gen Z	
	Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya	
	Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung	
	Fasilitasi akses perbankan bagi UMKM	
	Mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia	
	Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota	
	Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi	
	mengembangkan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal	
	Membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan	
	Mengembangkan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi, geopark Merangin dan geopark Kerinci sebagai destinasi wisata dunia	
	Mengembangkan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)	
	Penguatan industri halal, UMKM Halal, Ekspor Halal dan Ekosistem Halal (klaster industri dan produk halal; serta klaster bisnis dan kewirausahaan halal)	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat	
	Mendorong pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah	
	Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin	
	Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk	
	Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan	
	Meningkatkan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna	
	Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan	
	Fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam	
	Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non fiskal	
	Penetapan dan penerapan regulasi yang mendukung inovasi daerah	
	Penerapan budaya kerja inovatif kepada SDM Aparatur	
	Peningkatan alokasi anggaran riset dan inovasi daerah secara efektif dan efisien	
	Memberikan ruang kepada generasi muda untuk berinovasi	
	Tata kelola SDM yang mengarah kreatif dan inovatif	
	Mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam menghasilkan inovasi	
Misi 3 : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perlindungan sosial yang integratif, adaptif dan inklusif melalui subsidi jaminan kesehatan melalui BPJS bagi masyarakat miskin serta BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim dan pekerja rentan	
	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti Sopir Angkot, Ojek Online dan Pangkalan, Penarik becak dan Kusir Delman serta Seniman dan Budayawan	
	Meningkatkan UMP yang seimbang antara pekerja dan dunia usaha	
	Mendorong perusahaan untuk melakukan upsklilling dan re-skilling karyawan secara berkala	
	Bedah rumah untuk masyarakat miskin	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Bantuan bagi Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, dan Tuna Sosial	
	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sungai	
	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub Daerah Aliran Sungai Batanghari Hulu dan Sub Daerah Aliran Sungai Batang Tebo, serta peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muara Enim, Formasi Air Benakat, dan Formasi Sinamar;	
	Merestorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis	
	Pemulihan fungsi ekologis pada lahan gambut (pembasahan, rehabilitasi dan revegetasi), serta pengembangan ekonomi masyarakat lokal pada wilayah gambut secara terintegrasi	
	Meningkatkan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat	
	Memanfaatkan lahan dengan teknologi ramah lingkungan	
	Mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat	
	Meningkatkan penggunaan energi bersih (*clean energy*) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan	
	Menerapkan *Good mining pratices* pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	
	Mendorong Geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh	
	Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera	
	Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan	
	Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk	
	Pemberdayaan masyarakat pesisir	
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	
	Pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RTRW	
	Peningkatan pengolahan hasil perikanan	
	Menggalakan program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)	
	Bantuan Gizi bagi Ibu Hamil, Balita dan	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Remaja	
	Menggalakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	
	Penguatan kapasitas dan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting	
	Penguatan kapasitas tim pembina dan kader Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam melaksanakan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal	
	Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi layak	
	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	
	Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat	
	Peningkatan kolaborasi penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	
	Sosialisasi dan advokasi Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dalam rangka mendukung Wajib Belajar 13 Tahun	
	Bantuan Pendidikan bagi Siswa/i SMA/SMK/SLB Kurang Mampu dan Beasiswa S1 ,S2 dan S3 bagi Putra Putri Jambi Berprestasi dan Kurang Mampu	
	Pendidikan Vokasi Secara Kemitraan dengan Lembaga/Dunia Usaha Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	
	Membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba)	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas festival dan lomba budaya daerah	
	Meningkatkan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah	
	Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat	
	Meningkatkan aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum,ketenagakerjaan, sosial, politik,lingkungan hidup dan ekonomi	
	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	
	Peningkatan Usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi	
	Meningkatkan peran pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga	
	Meningkatkan gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"		
Misi	**Arah kebijakan**	**Ket**
	Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
	Meningkatkan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan perumahan)	
	Fasilitasi pendirian Sekolah Rakyat	

Dipindai dengan CamScanner

3.4.1 Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi

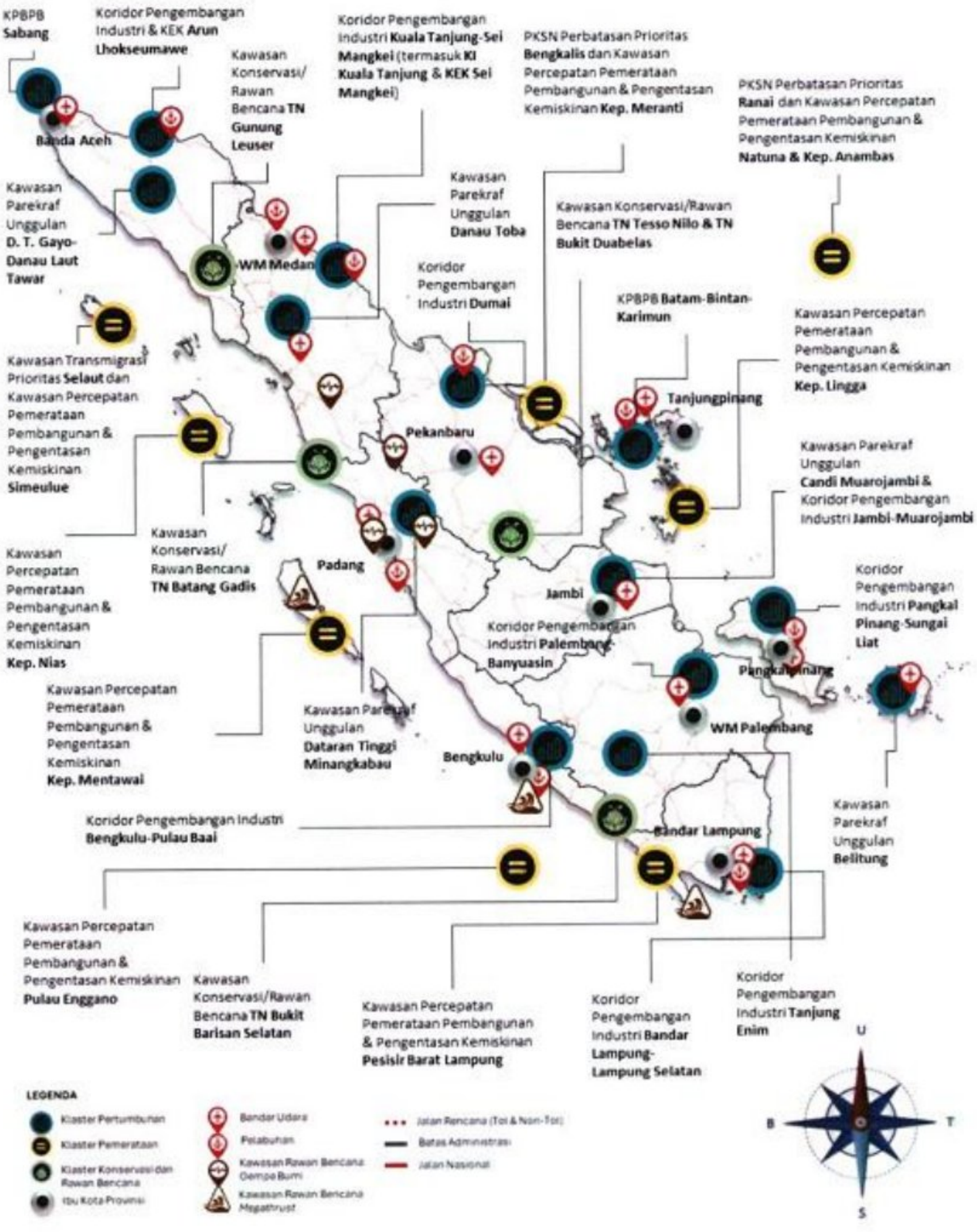

Sumber : RPJMN, 2025

Gambar 3-1 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Sumatera

Pembangunan kewilayahan nasional seperti yang tertuang pada RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan untuk terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia – Kawasan Timur Indonesia, yang diwujudkan melalui

Dipindai dengan CamScanner

pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Pada tahun 2025-2029, wilayah Sumatera diarahkan menjadi mata rantai utama biodiversity dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan dengan higlight lokasi prioritas pembangunan sebagaimana gambar di atas.

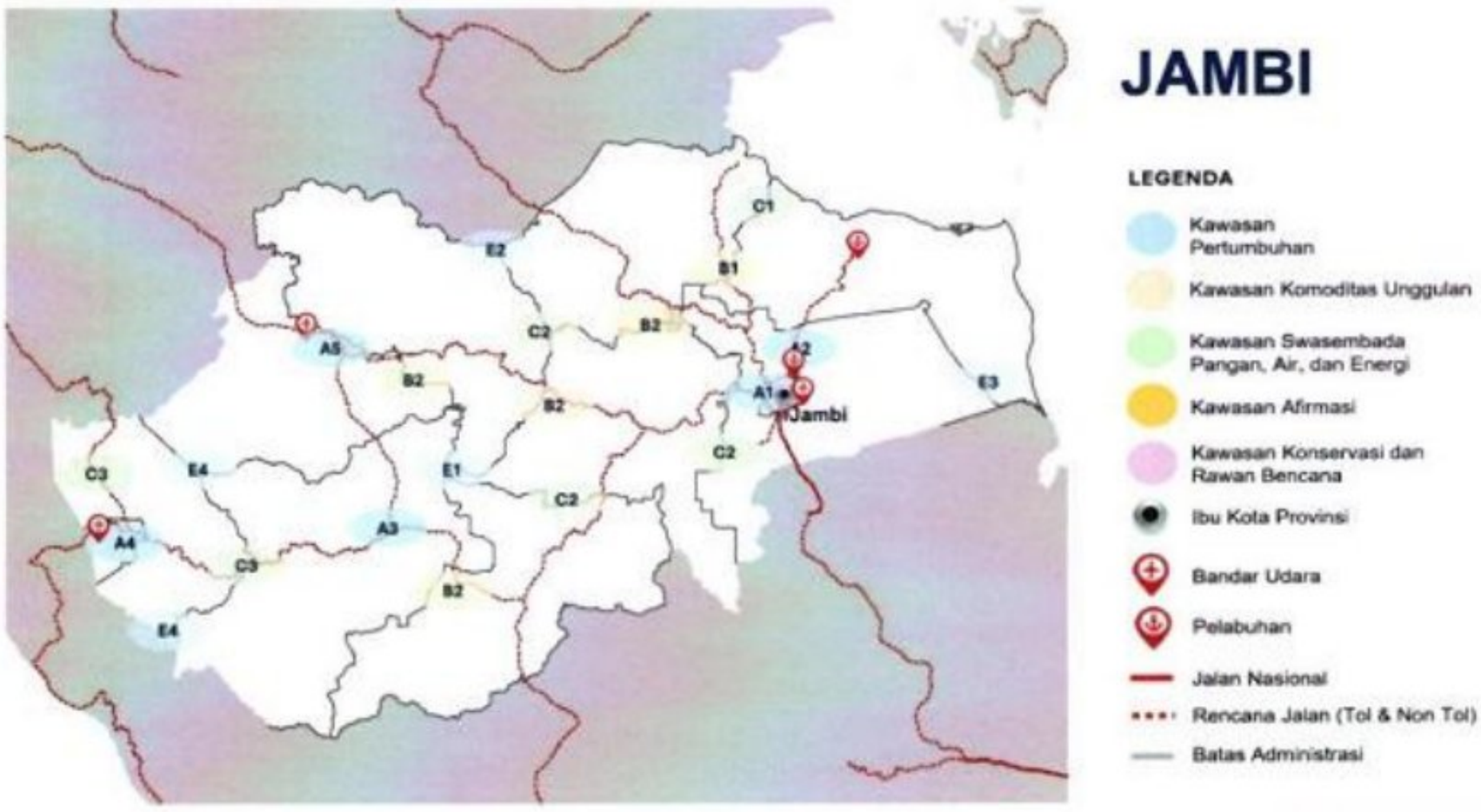

A. Kawasan Pertumbuhan

1 Kawasan Perkotaan Jambi
2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Candi Muarojambi
3 Kawasan Perkotaan Bangko
4 Kawasan Perkotaan Sungaipenuh
5 Kawasan Perkotaan Muarobungo

B. Kawasan Komoditas Unggulan

Sawit dan Kelapa
1 Tanjungjabung (Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur)

Sawit dan Karet
2 Cekungan Batanghari (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muarojambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Bungo, dan Kab. Merangin)

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

Swasembada Pangan
1 Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur

Swasembada Air dan Energi
2 Cekungan Batanghari (Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muarojambi, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat)

Swasembada Pangan, Air, dan Energi
3 Bukit Barisan Tengah Jambi (Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kota Sungaipenuh)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1 TN Bukit Duabelas
2 TN Bukit Tigapuluh
3 TN Berbak
4 TN Kerinci-Seblat

Sumber : RPJMN, 2025

Gambar 3-2 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi pada RPJMN 2025-2029

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya dengan mempertimbangkan

Dipindai dengan CamScanner

potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh masing-masing kabupaten/kota, perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI				
	2020	2021	2022	2023	2024**
Kerinci	3,69	4,16	4,43	5,73	4,57
Merangin	0,78	5,09	5,72	5,28	4,55
Sarolangun	-0,26	6,61	6,73	4,02	3,70
Batang Hari	-0,27	4,74	12,27	3,70	2,99
Muaro Jambi	0,27	4,08	7,97	6,28	6,17
Tanjung Jabung Timur	-3,87	0,13	0,57	2,17	4,73
Tanjung Jabung Barat	-0,64	1,36	2,56	3,51	4,45
Tebo	-0,04	4,32	6,30	4,50	3,97
Bungo	-0,40	5,12	4,73	4,66	3,30
Kota Jambi	-3,28	3,94	5,36	6,61	4,98
Kota Sungai Penuh	-0,14	3,67	4,45	4,92	5,10

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Bila dilihat dari data *time serries* pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuatif, dan telah menunjukkan pemulihan ekonomi setelah Covid-19 Tahun 2020 yang lalu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 adalah Kabupaten Muaro Jambi, diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi. Persebaran perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

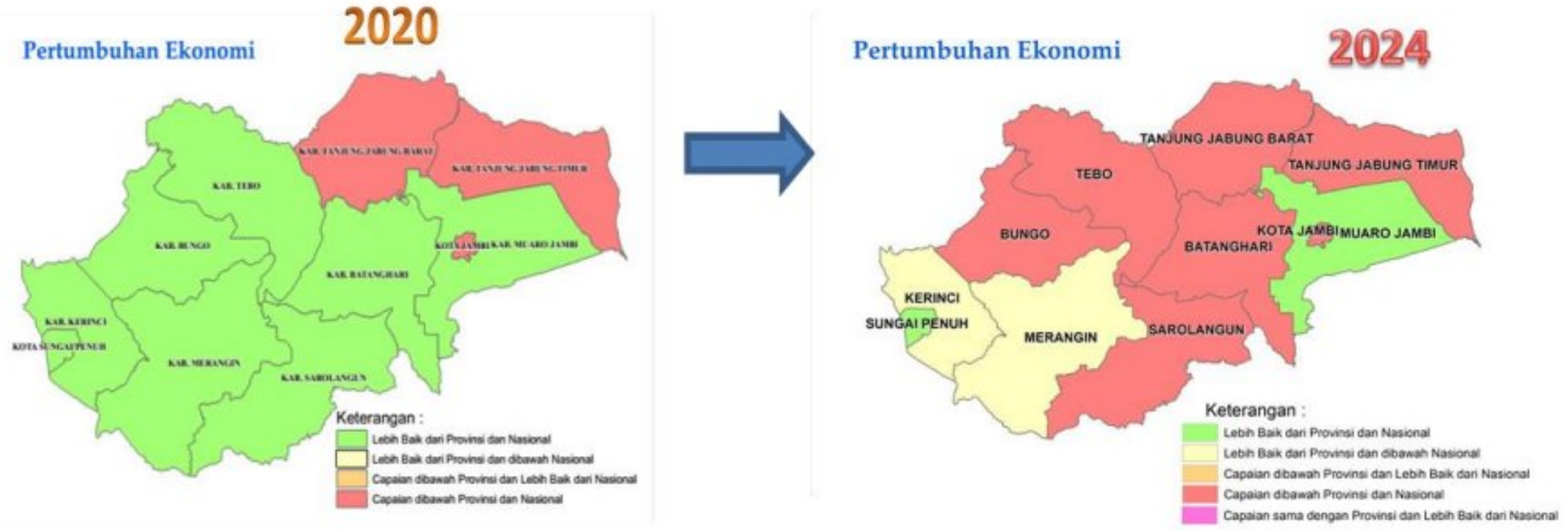

Gambar 3-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2024

Dipindai dengan CamScanner

Gambar di atas memperlihatkan bahwa kecepatan pemulihan ekonomi di tiap wilayah tidak sama. Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dari Provinsi Jambi dan Nasional pada Tahun 2020, justru pertumbuhannya di bawah capaian Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2024. Hal ini merupakan implikasi dari perlambatan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor unggulan kabupaten-kabupaten tersebut.

Bila dilihat dari kontribusi Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi, yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontribusi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terutama berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari sub kategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, kontributor terbesar kedua adalah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi, Sementara untuk kontributor terkecil adalah Kota Sungai Penuh, dengan kontribusi yang cenderung menurun sejak Tahun 2020.

Tabel 3-6 Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA THD PDRB PROVINSI JAMBI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	5,03	4,84	4,43	4,59	4,64
Merangin	7,55	7,67	7,36	7,71	8,02
Sarolangun	6,98	7,13	7,53	7,36	7,15
Batanghari	7,91	8,06	8,82	8,71	8,24
Muaro Jambi	11,8	11,89	11,96	12,28	12,75
Tanjung Jabung Timur	9,39	9,38	9,29	8,58	8,60
Tanjung Jabung Barat	17,88	18,02	18,17	17,40	17,56
Tebo	7,1	7,27	7,15	7,25	7,53
Bungo	8,36	8,64	9,04	8,98	8,62
Kota Jambi	14,35	13,68	13,11	13,89	13,66
Kota Sungai Penuh	3,64	3,42	3,15	3,24	3,24

Sumber : Jambi Dalam angka 2025,2025

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3-7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	7,30	7,71	7,57	7,54	6,93
Merangin	8,63	9,11	8,70	8,90	8,40
Sarolangun	8,42	8,87	8,48	8,54	8,36
Batang Hari	9,65	10,05	9,63	9,45	8,63
Muaro Jambi	3,83	4,53	4,47	4,43	3,65
Tanjung Jabung Timur	10,95	11,39	10,91	10,85	10,14
Tanjung Jabung Barat	10,29	10,75	10,00	9,79	9,54
Tebo	6,26	6,68	6,34	6,46	6,12
Bungo	5,8	6,23	5,38	5,29	5,06
Kota Jambi	8,27	9,02	8,33	8,24	7,73
Kota Sungai Penuh	3,03	3,41	2,97	3,00	2,92

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin kabupaten/kota dari tahun 2020 – 2024 pada tabel diatas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki persentase penduduk miskin yang paling besar, namun jika dilihat dari jumlah maka penduduk miskin terbanyak berada pada Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 2,92 persen, dan persentase ini terus menunjukan penurunan sejak meningkat pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

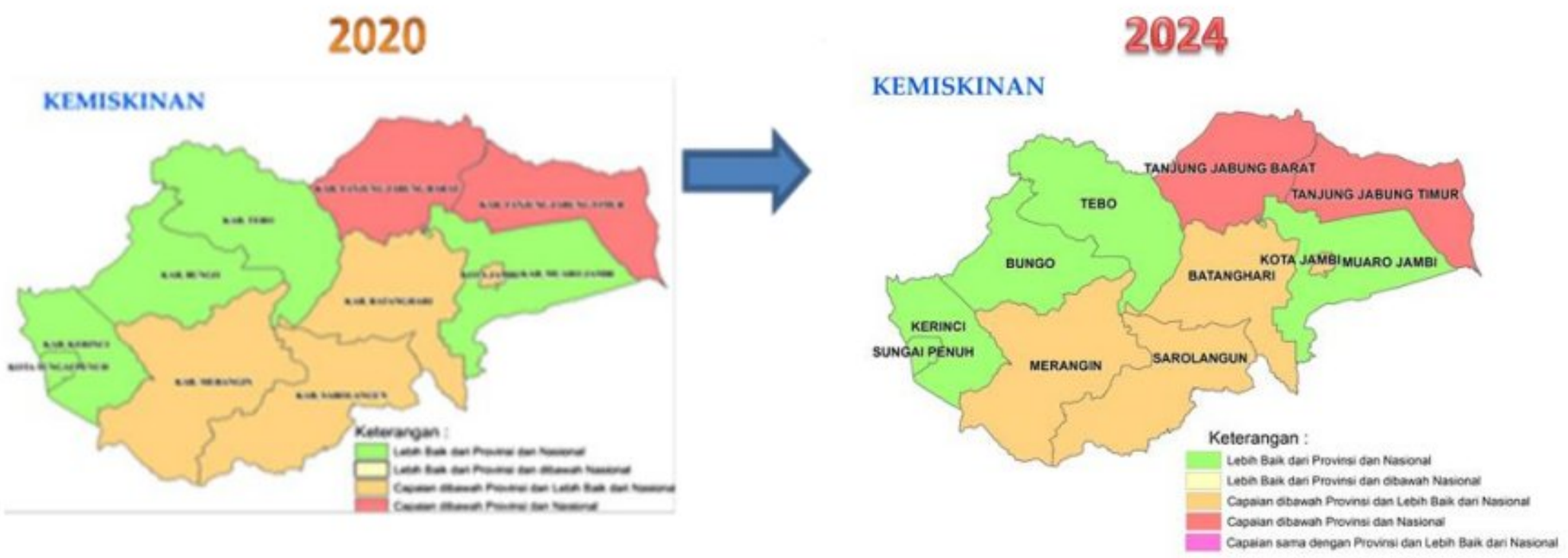

Gambar 3-4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Kota Jambi memiliki TPT tertinggi disusul oleh Kabupaten Bungo. Kedua kabupaten/kota tersebut didominasi oleh sektor jasa, dimana dampak pandemi Covid-19 belum hilang sepenuhnya pada sektor ini. Namun demikian, pada dasarnya TPT pada kedua kabupaten/kota tersebut telah turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3-8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	2,43	2,32	2,63	2,48	2,51
Merangin	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18
Sarolangun	5,71	5,52	5,22	5,09	5,03
Batanghari	4,42	4,26	3,53	3,85	4,49
Muaro Jambi	5,43	5,59	5,35	5,40	5,27
Tanjung Jabung Timur	1,41	1,56	1,32	1,67	2,06
Tanjung Jabung Barat	2,16	2,53	2,88	2,95	3,20
Tebo	2,95	2,83	1,38	1,71	2,50
Bungo	5,94	5,86	5,50	5,23	4,67
Kota Jambi	10,49	10,66	8,95	8,27	7,38
Kota Sungai Penuh	5,56	3,00	2,49	3,80	4,30

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Gambar 3-5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Koefisien Gini (Gini Rasio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 3-9 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Kerinci	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30
Merangin	0,32	0,29	0,35	0,36	0,36
Sarolangun	0,31	0,32	0,30	0,38	0,38
Batanghari	0,32	0,31	0,29	0,36	0,36
Muaro Jambi	0,28	0,32	0,27	0,34	0,34
Tanjung Jabung Timur	0,25	0,25	0,27	0,31	0,31
Tanjung Jabung Barat	0,28	0,25	0,26	0,32	0,32
Tebo	0,30	0,30	0,30	0,24	0,24
Bungo	0,31	0,30	0,32	0,28	0,28
Kota Jambi	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
Kota Sungai Penuh	0,31	0,31	0,29	0,31	0,31

Sumber : BPS, 2025
*Ket: * data terakhir 2023*

Gambar 3-6 Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/ kota menunjukan peningkatan yang berarti ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, kecuali kedua kabupaten tersebut.

Tabel 3-10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kerinci	71,21	71,45	71,99	73,77	74,33
Merangin	69,19	69,53	69,98	71,81	72,65
Sarolangun	69,86	70,25	70,89	73,05	73,76
Batanghari	69,84	70,11	70,51	72,50	73,12
Muaro Jambi	69,18	69,55	70,18	72,26	73,11
Tanjung Jabung Timur	64,43	64,91	65,77	69,85	70,77
Tanjung Jabung Barat	67,54	68,16	68,79	71,44	72,01
Tebo	69,14	69,35	69,78	71,99	72,67
Bungo	69,92	70,15	70,55	73,57	74,44
Kota Jambi	78,37	79,12	79,58	80,93	81,77
Kota Sungai Penuh	75,42	75,70	76,17	77,20	77,93

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025,2025

Gambar 3-7 IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi terus memperlihatkan perbaikan. Pada tahun 2020, baru 3 kabupaten/ kota yang termasuk dalam kategori IPM tingkat tinggi, pada tahun 2024 seluruh kabupaten/kota telah masuk dalam IPM kategori tinggi, bahkan Kota Jambi masuk kategori IPM sangat tinggi. Jika dilihat secara spasial dengan membandingkan capaian IPM Provinsi dan nasional, terdapat perubahan dari tahun 2020. Jika sebelumnya hanya 2 Kota yang capaiannya lebih baik dari provinsi dan nasional, yaitu Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh, maka pada 2024 Kabupaten Bungo mampu mengakselerasi IPM Kabupaten tersebut hingga lebih tinggi dibanding provinsi walaupun masih di bawah nasional.

Berdasarkan beberapa kondisi perwilayahan diatas maka Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2045** juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dan biru dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2025-2029 akan diprioritaskan pada :

1. Reformasi birokrasi
2. Digitalisasi pelayanan publik

Dipindai dengan CamScanner

3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah
4. Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muara Jambi, KSPN Danau Kerinci dan Geopark Merangin)
5. Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi
6. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah
7. Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti – Tungkal -Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh
8. Fasilitasi Percepatan Ketahanan Energi Mendukung Kawasan Strategis
9. Percepatan Pengembangan sistem logistik transportasi daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X)
10. Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
11. PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)
12. Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

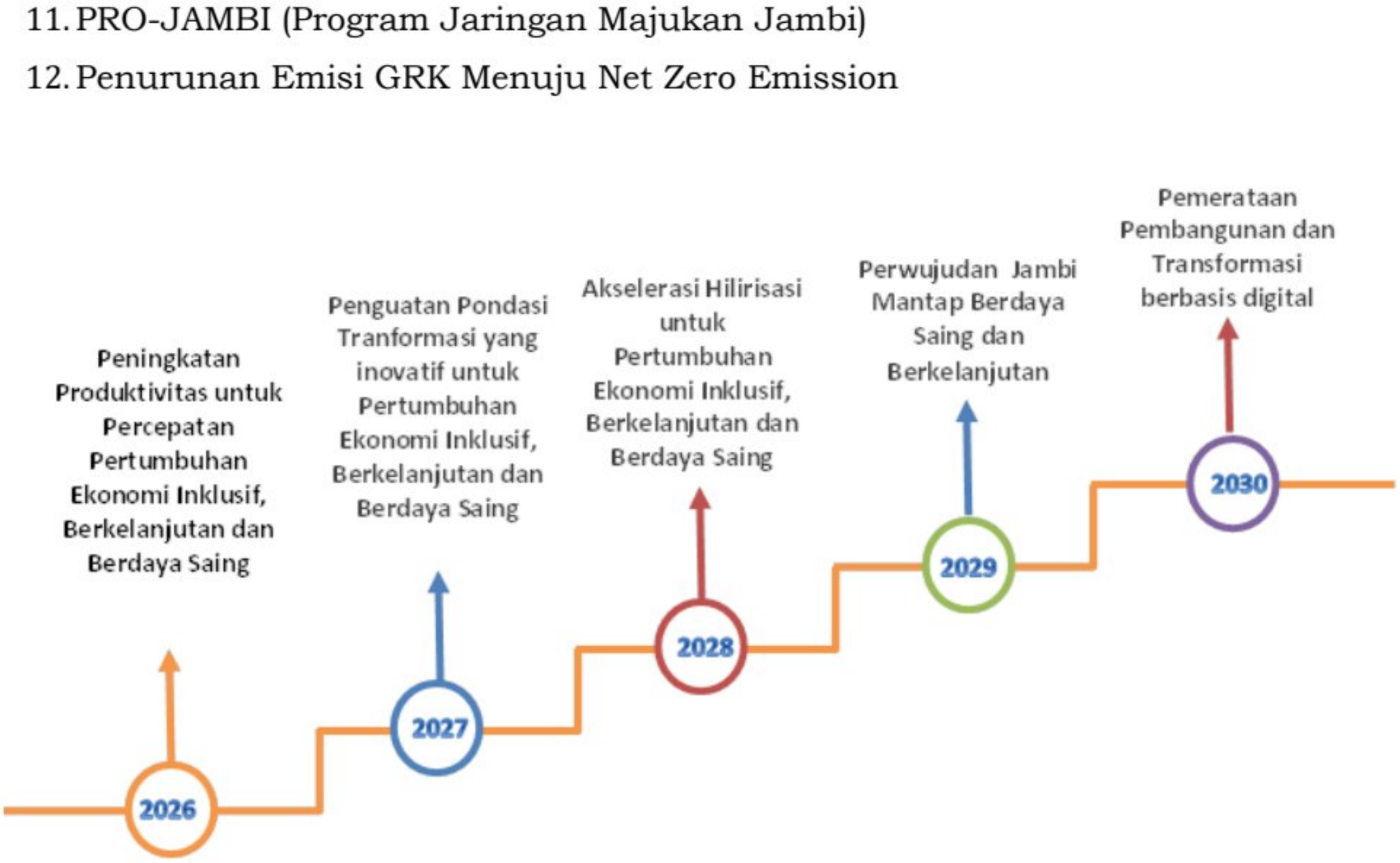

Gambar 3-8 Penahapan Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam **RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi** yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
   a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan pengembangan kawasan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
   b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
   c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
   d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
   c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
   - meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
   - meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasam strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.

Dipindai dengan CamScanner

3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
   a. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
   b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
   c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
   d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
   e. Pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana.
4 Pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
   a. Pemantapan PKN Kawasan Perkotaan Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Muara Bulian, dan Perkotaan Muara Sabak sesuai arahan RTRWN.
   c. Pemantapan PKL yang terdiri dari Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, Perkotaan Sanggaran Agung, Perkotaan Bangko, Perkotaan Sungai Manau, Perkotaan Pasar Masurai, Perkotaan Rantau Panjang, Perkotaan Pasar Pamenang, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Wirotho Agung, Perkotaan Sungai Bengkal, Perkotaan Sengeti, Perkotaan Pijoan, Perkotaan Sebapo, Perkotaan Marga, Perkotaan Sungai Gelam, Perkotaan Pauh, Perkotaan Pekan Gedang, Perkotaan Singkut, Perkotaan Rantau Keloyang, Perkotaan Embacang Gedang, Perkotaan Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Ikil, Perkotaan Simpang Sungai Rengas, Perkotaan Muara Tembesi, Perkotaan Muara Jangga, Perkotaan Merlung, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Mendahara, Perkotaan Nipah Panjang, dan Perkotaan Pandan Jaya.
5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melalui:

Dipindai dengan CamScanner

a. Penatagunaan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan.
b. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta peanfaatan jasa lingkungan.
c. Konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.
d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan lindung
e. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah daerah.
f. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
g. Menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.

6 Peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui:

a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah daerah
b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ Tentara Nasional Indonesia

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

1 Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan

Dipindai dengan CamScanner

perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.

2 Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.

3 Kabupaten Muaro Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar.

4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.

5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi.

6 Kota Sungai Penuh mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.

7 Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar.

Berdasarkan arahan pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, maka highlight kebijakan kewilayahan beserta lokasi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Lokasi Prioritas	**highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan**	
	Pusat	**Provinsi**
Kawasan Perkotaan Jambi dan Kawasan	- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi,antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan	- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi, antara lain melalui:

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Candi Muaro Jambi • Kota Jambi • Kab. Muaro Jambi	kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan - Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Jambi (PHTC) - Pengembangan SPAM Regional Jambi - Pembangunan jalan tol Betung-Tempino-Jambi - Peningkatan 6A pada kawasan pariwisata Candi Muaro Jambi (Revitalisasi kawasan purbakala Situs Percandian Muaro Jambi dan Peningkatan Jalan Nasional akses Situs Percandian Muaro Jambi - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD Raden Mattaher (PHTC) - Preservasi jalan ruas Jambi-Sengeti-Kuala Tungkal, Jambi-Muarabulian, dan Jambi-Muara Sabak - Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Jambi - Pengembangan koridor industri rintisan Jambi-Muaro Jambi	• Kolaborasi pengendalian banjir di Kota Jambi • Kolaborasi optimalisasi potensi Danau Sipin • Penyediaan Ruang Terbuka Hijau • Penataan Permukiman kumuh terpadu - Penguatan peran RSUD Rd. Mattaher sebagai RS layanan prioritas utama untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, diabetes melitus, dan penyakit infeksi emerging; serta layanan prioritas madya untuk gastroenterologi. - Penguatan peran RS. Jiwa Kolonel Inf. H.M. Syukur sebagai rumah sakit layanan prioritas utama untuk kesehatan jiwa. - Mendorong RSUD H. Abdul Manaf sebagai rumah sakit layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, dan penyakit infeksi emerging. - Bedah rumah (Pro Jambi) - Preservasi Jalan Lingkar

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	- Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan dan karbon aktif - Hilirisasi lanjutan batubara, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti briket, kokas, karbon aktif, syngas, metanol, DME - Penguatan pendidikan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah	- Dalam Perkotaan Jambi dan Jalan Perkotaan Jambi - Pembangunan Fly Over Tugu Juang, Mayang - Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota Jambi} - Fasilitasi pembangunan Jalan Layang Simpang 4 Pal X - Pembangunan Griya UMKM terpadu - Rehabilitasi GOR Kota Baru - Pemberdayaan masyarakat pada Kawasan Candi Muaro Jambi - Memperkuat pengembangan Desa Wisata di Kawasan candi Muaro Jambi - Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM - Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, klaster keuangan sosial syariah, klaster infrastruktur ekosistem syariah.

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Kawasan Perkotaan Bangko • Kab. Merangin	- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bangko,antara lain melalui: ▪ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ▪ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ▪ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ▪ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan - Pengembangan SPAM Perkotaan Bangko - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD Kolonel Abundjani (PHTC) - Preservasi jalan ruas Bangko-Muara Bungo-Muaratebo, Bangko-Sarolangun-Rupit, Bangko-Sungai Penuh	- Peningkatan kualitas jalan Provinsi pada kawasan Perkotaan Bangko - Fasilitasi pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah regional - Fasilitasi Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan menengah/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan - Fasilitasi penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan sesuai kewenangan - Mendorong penguatan peran RSUD Kolonel Abundjani Bangko sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, dan kesehatan jiwa. - Bedah rumah (Pro

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	Provinsi
		Jambi) - Perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air - Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan - Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, dan klaster keuangan sosial syariah

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Kawasan Perkotaan Sungai Penuh • Kota Sungai Penuh	- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sungai Penuh, antara lain melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan - Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sungai Penuh (PHTC) - Pengembangan SPAM Regional Sungai Penuh-Kerinci - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD Mayjen H.A. Thalib (PHTC) - Pengembangan kota agropolitan Sungai Penuh - Preservasi jalan ruas Sungai Penuh-Padang Aro, Sungai Penuh-Bangko, Sungai Penuh-Tapan-Muko muko	- Percepatan pembangunan TPA Regional Sungai Penuh-Kerinci - Peningkatan kualitas jalan kewenangan Provinsi di wilayah Kota Sei. Penuh - Kolaborasi pengendalian banjir - Bedah rumah (Pro Jambi) - Penataan permukiman kumuh terpadu - Fasilitasi Geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh - Perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air - Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan - Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, dan klaster keuangan sosial syariah
Kawasan Perkotaan	- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Bungo, antara lain	- Peningkatan kualitas jalan kewenangan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Muara Bungo • Kab. Bungo	melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan - Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Muara Bungo (PHTC) - Pengembangan SPAM Perkotaan Muara Bungo - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD H.Hanafie (PHTC) - Preservasi jalan ruas Muara Bungo-Bangko, Muara Bungo -Tebo, Muara Bungo -Pulau Punjung - Peningkatan Bandar Udara Muara Bungo	Provinsi di wilayah Kab. Bungo - Mendorong penguatan peran RSUD H. Hanafie sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, diabetes melitus, dan penyakit infeksi emerging dan kesehatan jiwa. - Bedah rumah (Pro Jambi) - Penataan permukiman kumuh terpadu - Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan - Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, klaster keuangan sosial syariah, klaster infrastruktur ekosistem syariah.
Kawasan Pertumbuhan	- Mendorong untuk	Kabupaten melakukan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Baru SENTUSA - Kab. Ma Jambi - Kab. Tanjung Jabung Barat - Kab. Tanjung Jabung Timur		percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan prioritas: - RTRW Kab. Ma. Jambi - RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur - RDTR Muara Sabak - RDTR Kawasan Pelabuhan Ujung Jabung - RDTR Kawasan Nipah Panjang - RDTR Tungkal Ilir - RDTR Perkotaan Merlung - RDTR Perkotaan Muara Papalik - RDTR Perkotaan Sengeti Pengembangan konektivitas baru: - Rehabilitasi jalan Ds Simpang/Berbak-simp. Jembatan Muara Sabak - Peningkatan jalan Parit 10 Senyerang Simp.3 Tebing tInggi-Simpang Kuala Dasal - Peningkatan jalan Berbak-Ujung Jabung - Peningkatan Produktivitas komoditi tanaman pangan • Pengendalian pemanfaatan ruang KP2B

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	Provinsi
		• Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan • Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Pengelolaan Sumberdaya Air - Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan kelapa dan pinang: - Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan - Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian - Pengembangan pabrik es batu - Pemberdayaan UMKM dan pengembangan UKM - Pengembangan iklim penanaman modal - Pengembangan pariwisata Candi Muaro Jambi (WPP Maro Sebo-Taman Rajo) - Pemenuhan standar akreditasi SMK jurusan kelautan dan perkapalan - Percepatan Pelabuhan Ujung Jabung - Mendorong penguatan peran RSUD Ahmad Ripin

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
		sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, penyakit infeksi emerging, dan kesehatan jiwa - Mendorong Penguatan peran RSUD KH. Daud Arif sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, dan kesehatan jiwa - Mendorong penguatan peran RSUD Nurdin Hamzah sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak
Kawasan swasembada pangan Wilayah Tengah: - Kab. Batang Hari - Kab. Muaro Jambi - Kab. Bungo		- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi: D.I Batang Uleh - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
- Kab. Tebo		pengembangan kawasan peternakan) - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/ pestisida/pakan organik - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan;

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	Provinsi
		peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen - Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/ gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama - Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
		untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I.R Parit Pudin, D.I.R Pematang Lumut - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu pada: ▪ D.I Sei Suban ▪ D.I.R Sungai Ayam ▪ D.I.R Senyerang ▪ D.I.R Teluk Ketapang ▪ D.I.R Teluk Nilau ▪ D.I.R Koto Kandis ▪ D.I.R Nipah Panjang I-II ▪ D.I.R Rantau Rasau ▪ D.I.R Simpang Datuk ▪ D.I.R Simpang Puding ▪ D.I.R. Sei Raya - Peningkatan Produktivitas komoditi tanaman pangan : - Pengendalian pemanfaatan ruang KP2B - Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan - Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen - Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama - Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian - Pembangunan Jembatan Sungai Rambut	- Pengelolaan Sumberdaya Air - Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Kawasan swasembada air dan energi : • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Ma. Jambi • Kab. Batang Hari • Kab. Bungo • Kab. Tebo • Kab. Sarolangun • Kab. Tanjung Jabung Timur	- Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Batanghari, terutama ada sub-DAS Batanghari Hulu dan Sub-Das batang Tebo - Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muaraenim, Formasi Air Benakat dan Formasi Sinamar - Pengembangan gasifikasi batubara - Pembangunan PLTU Mulut Tambang - Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Aurduri-Muara Enim- Bukit Asam - Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Aurduri-PLTU MT Jambi 1 dan 2 - Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Bangko-PLTU MT Jambi 1 dan 2 - Perencanaan dan persiapan pembangunan jalur kereta api logistik Sarolangun, Muaratembesi-Muarabulian-Jambi-Muara Sabak - Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak	- Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan - Fasilitasi Pengembangan gasifikasi batubara - Mendorong Pembangunan PLTU Mulut Tambang - Mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api logistik Sarolangun, Muaratembesi – Muarabulian – Jambi - Muara Sabak
Kawasan swasembada pangan, air dan energi Bukit Barisan Tengah • Kab. Kerinci • Kab, Merangin • Kota Sei Penuh	- Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Batanghari, terutama ada sub-DAS Batang Merangin - Tembesi - Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muaraenim, Formasi Air Benakat dan Formasi Sinamar - Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-Das Batang Merangin-Tembesi	- Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi: D.I Tanduk - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Peningkatan produktivitas peternakan/pangan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	- Revitalisasi Danau Kerinci - Pembangunan Bendungan Merangin dan PLTA Bendungan Merangin - Pembangunan infrastruktur PLTA Merangin - Pembangunan infrastruktur PLTP Sungai Penuh - Pembangunan PLTS apung Danau Kerinci - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Sei Batang Sangkir dan D.I Sei. Siulak Deras - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana	hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen - Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama - Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian	perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen - Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
		layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama - Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, pinang dan Kelapa Tanjung Jabung • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur	- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan kelapa) - Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan kelapa) - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan kelapa) - Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan kelapa) - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan kelapa	- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, pinang dan kelapa) - Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, pinang dan kelapa) - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, pinang dan kelapa) - Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan kelapa) - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan kelapa
Kawasan Komoditas Unggulan Sawit	- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet) - Pengembangan dan perlindungan	- Peremajaan sawit rakyat dan karet rakyat

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
dan Karet Cekungan Batanghari • Kab. Ma. Jambi • Kab. Bungo • Kab. Tebo • Kab. Batang Hari Serta Kabupaten Merangin	- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet) - Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet) - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet - Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura	- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet) - Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet) - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet) - Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet) - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet - Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
		- Pembangunan/ peningkatan Ruas Jalan Betung Bedarah – Pintas – Tebo/Bungo
Kawasan Konservasi dan rawan Bencana TN Bukit dua belas, TN Bukit Tiga Puluh, TN Berbak dan TN Kerinci Seblat • TN Bukit Dua Belas: Kab. Batang Hari dan Kab. Tebo • TN Bukit Tiga Puluh: Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat • TN Berbak: Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Muaro Jambi • TN kerinci Seblat: Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Merangin, dan Kota	- Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi - Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan - Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi - Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumberdaya genetik - Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri - Perlindungan dan pengamanan hutan - Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi - Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana - Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana - Pengembangan kawasan perdesaan mina-agro-wisata VII Koto Ilir (Kab. Tebo)	- Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi - Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumberdaya genetik - Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri - Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi - Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana - Mendorong percepatan jalur evakuasi bencana melalui TNKS (Kerinci – Bungo dan Kerinci-Merangin) - Mendorong Kab. Bungo sebagai pusat logistik kebencanaan Sumatera - Pengembangan kawasan perdesaan Mina-Agro-Wisata Kabupaten Tebo dan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Sungai penuh		
Kawasan Pariwisata Unggulan: • Kab. Kerinci, • Kota Sei.Penuh • Kab. Merangin • Kab. Muaro Jambi	-	- Pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata dengan menerapkan SAPTA PESONA - Memperkuat pengembangan Desa Wisata - Pengembangan kawasan Geopark Merangin menjadi destinasi wisata dunia - Fasilitasi Geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh - Peningkatan sarana prasarana (akomodasi, transportasi, *travel pattern*) - Memperluas pangsa pasar internasional, salah satunya melalui keanggotaan *Asean Tourism Forum (ATF)* - Pengelolaan wisata minat khusus yang lebih baik - Penataan area/ zona komersial destinasi wisata - Pengembangan wisata halal
Kawasan		- Peningkatan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
Unggulan Komoditas Kopi: • Kab. Kerinci • Kota Sei. Penuh • Kab.Merangin		produktivitas perkebunan dan kualitas produksi kopi - Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri kopi - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi kopi - Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi) - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi - Penyediaan bibit dan varietas unggul kopi yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. - Hilirisasi kopi
• Kab. Ma. Jambi • Kab. Bungo • Kab. Sarolangun • Kab. Tebo • Kab. Batang Hari	- Indikasi Daerah Prioritas intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)	- Dukungan daerah terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
Provinsi Jambi	- Pemberian makan bergizi di sekolah,	- Perluasan upaya

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	madrasah dan dayah/pesantren serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita - Percepatan Wajib Belajar 13 tahun, antara lain melalui: • Perluasan layanan PAUD • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran • Pencegahan dan penaganan anak tidak sekolah • Revitalisasi pendidikan non formal • Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas - Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: • Penurunan kematian ibu dan anak • Pencegahan dan penurunan stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lansia serta KB dan Kespro • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis - Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: • Penuntasan TBC • Pengendalian penyakit menular lainnya • Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa • Pembudayaan hidup sehta dan	promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	pengendalian faktor resiko PTM - Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan • Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional - Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan - Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain melalui: • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR - Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan • Penerapan jaringan cerdas untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi	masyarakat - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan - Percepatan wajib belajar 13 tahun, salah satunya melalui Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi (Pro Jambi) - Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	• Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik • Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time • Perluasan penggunaan kendaraan listrik • Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: • Perluasan infrastruktur digital • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: • Penguatan tata kelola pemerintahan digital • Penguatan infrastruktur pemerintahan digital • Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN • Digitalisasi layanan publik prioritas • Pengembangan ekosistem layanan publik digital - Pelestarian dan pemajuan kebudayaan melayu Jambi, antara lain melalui: • Perlindungan dan pelestarian warisan budaya • Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan budaya • Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan	sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien - Penguatan Kelembagaan, Destinasi dan Promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis Teknologi Infomasi - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. - Penguatan pengelolaan jalan provinsi - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. - Peningkatan keragaman wisata, penguatan kelembagaan, destinasi dan promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis teknologi infomasi - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital,

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
	masyarakat hukum adat - Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: • Pengembangan industri halal • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional • Penciptaan ekosistem UMKM Halal • Penguatan keuangan syariah • Penguatan dana sosial syariah - Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jambi, antara lain melalui: • Pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) • Penanggulangan judi dan penyelundupan • Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)	serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif - Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. - penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital) - Penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling serta integrasi soft skills dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi - Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi ternaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan - Percepatan penyediaan informasi pasar kerja

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	Provinsi
		yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas - Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis - menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor - Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah - Peningkatan potensi pemuda dalam pengembangan teknologi, kemajuan kebudayaan, peningkatan inovasi dan kreatifitas - Penetapan upah Provinsi berbasis produktivitas dan berkeadilan - Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar - Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat,

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
		laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang - Pembentukan Desa BERSINAR (Bersih Narkoba) - Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain melalui: • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR - Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan • Penerapan jaringan cerdas untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi • Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	Provinsi
		• Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time • Perluasan penggunaan kendaraan listrik - Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: • Perluasan infrastruktur digital • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: • Penguatan tata kelola pemerintahan digital • Penguatan infrastruktur pemerintahan digital • Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN • Digitalisasi layanan publik prioritas • Pengembangan ekosistem layanan publik digital - Pelestarian dan pemajuan kebudayaan melayu Jambi, antara lain melalui: • Perlindungan dan pelestarian warisan

Dipindai dengan CamScanner

Lokasi Prioritas	highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan	
	Pusat	**Provinsi**
		budaya • Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan budaya • Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Quick Wins PROgram JAringan Majukan JamBI (PRO JAMBI), yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. Pro Jambi Cerdas, berupa bantuan biaya pendidikan (perlengkapan sekolah)/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 untuk umum. Selain itu juga terdapat pula menu pendidikan vokasi secara kemitraan dengan Lembaga/ Dunia Usaha baik dalam maupun luar negeri. Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3-11 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa

Tingkat Pendidikan	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa					
	2025*	2026	2027	2028	2029	2030
SMA	2700	2700	2700	2700	2700	2700
SMK	1600	1600	1600	1600	1600	1600

Dipindai dengan CamScanner

Tingkat Pendidikan	Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa					
	2025*	2026	2027	2028	2029	2030
SLB	500	500	500	500	500	500
S1	300	425	425	425	425	425
S2	52	100	100	100	100	100
S3	102	25	25	25	25	25

Selain bantuan biaya pendidikan/beasiswa yang diberikan satu kali selama pendidikan dengan skema di atas, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa selama masa perkuliahan maksimal 4 tahun.

b. Pro Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin, bantuan gizi bagi ibu hamil, balita dan remaja, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3-12 Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jambi (jiwa)	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000

c. Pro Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* milenial/Gen Z siap kerja; job fair (bursa kerja) mantap berdaya saing; jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti sopir angkot, ojek online dan pangkalan, penarik becak dan kusir delman, serta seniman dan budayawan; kredit murah 2% bagi petani, nelayan dan pedagang

Dipindai dengan CamScanner

pasar tradisional. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun skema bedah rumah dan bantuan permodalan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3-13 Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/ UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Bedah Rumah	550	550	550	550	550
Bantuan modal kerja bagi UMKM/ Industri Rumah Tangga/start up	1000	1000	1000	1000	1000

d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara', guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da'i kecamatan; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur'an dan pegawai syara' berprestasi; program satu desa satu havidz alqur'an.
e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lansia, dan tuna sosial; insentif Babinsa/ Babinkamtibmas; membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba) dan Saluran Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) yang menghimpun aspirasi dan layanan pengaduan masyarakat.

2. **Meningkatkan konektivitas** , diantaranya:
   a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
   b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
   c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan kewenangan Provinsi.
   d. Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai strategis terhadap aktivitas perekonomian Provinsi Jambi
   e. Mendorong pembangunan jaringan kereta api di Provinsi Jambi
3. **Membangun pusat-pusat pertumbuhan**

Dipindai dengan CamScanner

a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN Perkotaan Jambi, Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Bangko dan Perkotaan Muara Bungo
b. Meningkatkan Peran dan fungsi PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
c. Pengembangan Kawasan SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
d. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
e. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah
f. Pengembangan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi lokasi prioritas untuk diintervensi pada periode tahun 2025-2029.

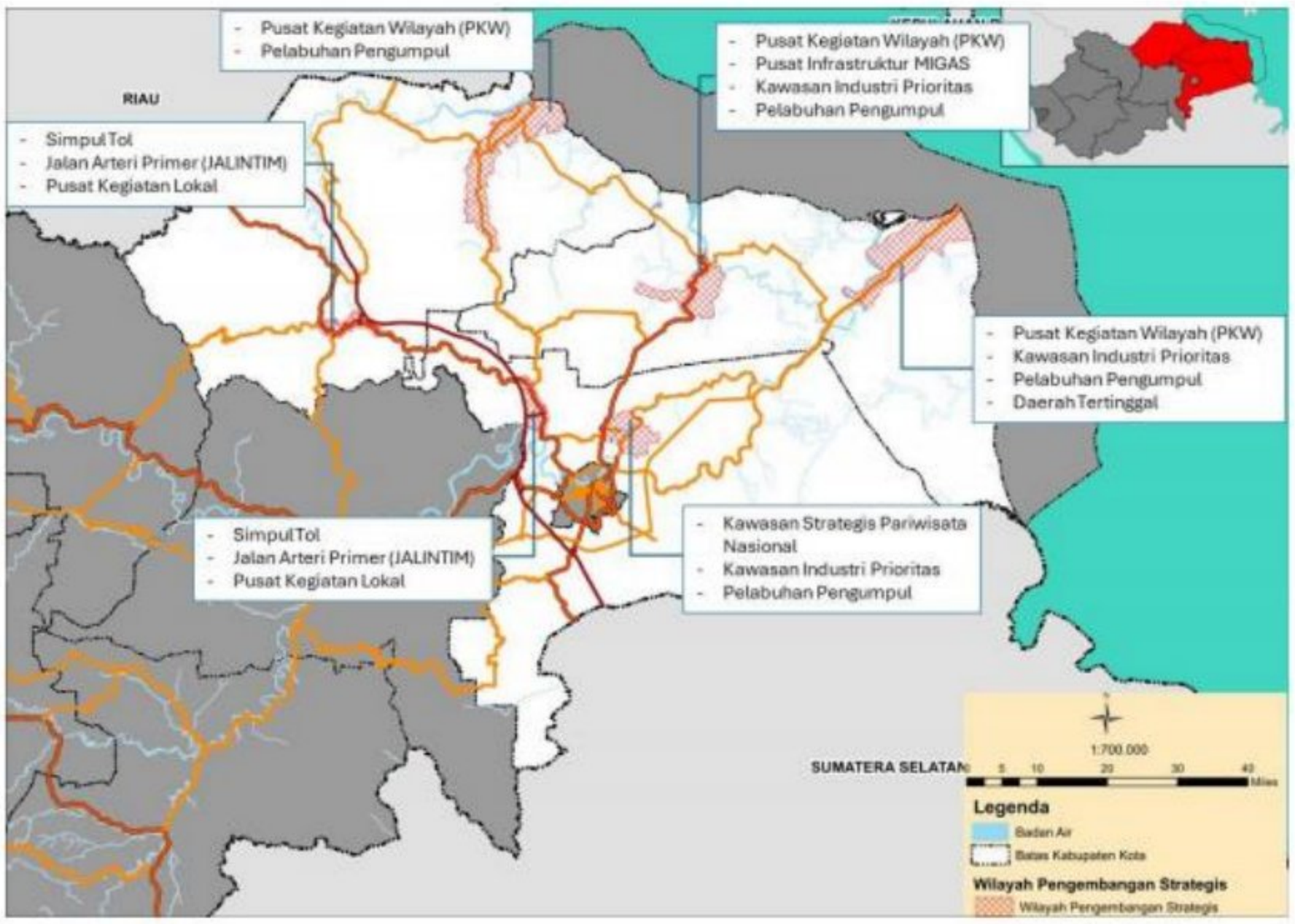

Gambar 3-9 Pengembangan Kawasan Sentusa (Sengeti – Tungkal – Sabak)

Bila pembangunan kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan ruang tersebut, diharapkan akan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/ kota, meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan mampu mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan target minimal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks gini pada

Dipindai dengan CamScanner

seluruh kabupaten/ kota se Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2025 – 2029 guna mendukung target Provinsi dan nasional. Secara rinci target minimal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3-14 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Kab/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	
	Rata-rata 2025 - 2029	2029
Kab. Kerinci	4,65	5,38
Kab. Merangin	4,92	6,60
Kab. Sarolangun	5,03	7,30
Kab. Batang Hari	4,87	6,61
Kab. Muaro Jambi	5,15	7,50
Kab. Tanjab Timur	4,97	7,00
Kab. Tanjab Barat	4,99	7,18
Kab. T e b o	4,95	7,15
Kab. Bungo	4,97	7,12
Kota Jambi	4,99	7,16
Kota Sungai Penuh	4,84	6,34

Tabel 3-15 Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Kab/ Kota	Tingkat Kemiskinan (Persen)	
	2025	2029
Kab. Kerinci	6,13 – 6,62	2,56 – 3,26
Kab. Merangin	7,38 – 7,96	6,39 – 8,14
Kab. Sarolangun	7,34 – 7,92	3,52 - 4,48
Kab. Batang Hari	7,59 – 8,19	4,57 – 5,82
Kab. Muaro Jambi	3,20 – 3,46	2,52 – 2,31
Kab. Tanjab Timur	8,94 – 9,65	2,93 – 3,73
Kab. Tanjab Barat	8,37 – 9,04	4,89 – 6,23
Kab. T e b o	5,38 – 5,81	4,72 – 5,01
Kab. Bungo	4,45 – 4,80	2,60 – 3,31

Dipindai dengan CamScanner

Kab/ Kota	Tingkat Kemiskinan (Persen)	
	2025	2029
Kota Jambi	6,80 – 7,34	3,99 – 5,08
Kota Sungai Penuh	2,57 – 2,77	1,51 – 1,92

Tabel 3-16 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Kab/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	
	2025	2029
Kab. Kerinci	2,39 – 2,45	1,56 – 2,28
Kab. Merangin	3,98 – 4,08	2,59 – 3,79
Kab. Sarolangun	4,79 – 4,91	3,12 – 4,57
Kab. Batang Hari	4,28 – 4,39	2,78 – 4,08
Kab. Muaro Jambi	5,02 – 5,15	3,27 – 4,78
Kab. Tanjab Timur	1,96 – 2,01	1,28 – 1,87
Kab. Tanjab Barat	3,05 – 3,13	1,98 – 2,91
Kab. T e b o	2,38 – 2,44	1,55 – 2,27
Kab. Bungo	4,45 – 4,56	2,90 – 4,24
Kota Jambi	7,03 – 7,21	4,58 – 6,70
Kota Sungai Penuh	4,10 – 4,20	2,67 – 3,90

Tabel 3-17 Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

Kab/ Kota	Gini Ratio	
	2025	2029
Kab. Kerinci	0,280-0,290	0,280-0,290
Kab. Merangin	0,300-0,345	0,300-0,320
Kab. Sarolangun	0,350-0,360	0,330-0,325
Kab. Batang Hari	0,330-0,340	0,322-0,325
Kab. Muaro Jambi	0,322-0,325	0,310-0,315
Kab. Tanjab Timur	0,310-0,315	0,300-0,305

Dipindai dengan CamScanner

Kab/ Kota	Gini Ratio	
	2025	2029
Kab. Tanjab Barat	0,300-0,305	0,300-0,305
Kab. T e b o	0,300-0,305	0,300-0,305
Kab. Bungo	0,270-0,280	0,270-0,280
Kota Jambi	0,320-0,330	0,300-0,305
Kota Sungai Penuh	0,300-0,310	0,300-0,305

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3-18 Program Prioritas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah melalui penerapan SPBE berintegritas dengan pelayanan publik prima	- Predikat AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Reformasi birokrasi
				- Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Digitalisasi pelayanan publik
				- Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah
				- Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				- Indeks Keterbukaan Informasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan,	Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah			Indeks Daya Saing Daerah		
		Meningkatnya daya saing infrastruktur dan	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur	Rasio Konektivitas	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Percepatan Pengembangan sistem logistik transportasi

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Industri dan Pariwisata		konektivitas antar wilayah	konektivitas dan infrastruktur handal lainnya	Indeks Daya Saing Infrastruktur	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X)

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
		Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi Jambi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan produktivitas	- Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Digitalisasi pelayanan publik

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
				Jambi - Tingkat inklusi keuangan Provinsi - Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi
		Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi	Stabilnya ekonomi makro daerah	- Inflasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
				- Rasio kapasitas fiskal daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti – Tungkal -Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh
				- Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Fasilitasi Percepatan Ketahanan Energi Mendukung Kawasan Strategis
				- Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percepatan Pengembangan sistem logistik transportasi daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
						Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X)
				- Indeks Ketahanan Pangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				- Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				- PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
					PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
					PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Meningkatnya nilai tambah sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muara Jambi, KSPN Danau Kerinci dan Geopark Merangin)

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
				Distribusi PDRB sektor tersier	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah
				Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti – Tungkal -Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
		Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi
Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial			Indeks Ekonomi Hijau		
		Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kemampuan pengeluaran masyarakat	Tingkat Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)
		Menurunnya ketimpangan pendapatan	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Rasio Gini	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
					PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
					PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
					PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Indeks Ekonomi Biru		

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
		Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya nilai tambah sektor kelautan	- Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%) - Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari - Persentase Penduduk Pesisir yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkesetaraan gender			Indeks Modal Manusia		
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya peluang harapan hidup masyarakat dengan perkembangan tumbuh kembang anak yang baik	Usia Harapan Hidup	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	- Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Peningkatan Kualitas Pendidikan - PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)
				Prevalensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan	Meningkatnya karakter Sumber Daya Manusia	- Rata-rata lama sekolah	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
		masyarakat serta pengarusutamaan gender		- Indeks Pembangunan Kebudayaan - Indeks Ketimpangan Gender	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
					PERSENTASE KEGIATAN KEPRAMUKAAN YANG TERFASILITASI	
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

Dipindai dengan CamScanner

VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"						
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)**	**PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Arsitektur perencanaan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, hal yang sama juga berlaku dalam penyusunan program. Dalam hal program tersebut merupakan program strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding operasional, demikian pula dalam hal penganggarannya. Adapun kinerja program merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah untuk mencapainya.

Tabel 4-1 Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					3,652,569,491,540,00		3,822,569,491,540,00		3,822,569,491,540,00		3,822,569,491,540,00		3,822,569,491,540,00	
1,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,432,630,203,540,00		2,602,630,203,540,00		2,602,630,203,540,00		2,602,630,203,540,00		2,602,630,203,540,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	92,92	93	94	2,432,630,203,540,00	95	2,602,630,203,540,00	96	2,602,630,203,540,00	97	2,602,630,203,540,00	98	2,602,630,203,540,00	1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,95	75	78		80		82		83		84		1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	95,8	96	96,5		97		97,5		98		99		1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan
1,01,02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1,215,439,288,000,00		1,215,439,288,000,00		1,215,439,288,000,00		1,215,439,288,000,00		1,215,439,288,000,00	
Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	71,97	72,31	72,65	1,215,439,288,000,00	72,99	1,215,439,288,000,00	73,33	1,215,439,288,000,00	73,67	1,215,439,288,000,00	74,01	1,215,439,288,000,00	1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%)	59,78	67,82	75,87		76,96		78,05		79,14		80,23		1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)	81,6	83,66	85,72		87,77		89,83		91,89		93,95		1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	74,48	75,02	75,94		76,86		77,78		78,7		80		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	70,1	70,7	71,3		71,9		72,5		73,1		73,7		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,73	66,03	67,33		68,63		69,93		71,23		72,53		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,42	62,02	63,62		65,22		66,82		68,42		70,02		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	55,53	56,03	56,53		57,03		57,53		58,03		58,53		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,69	58,19	58,69		59,19		59,69		60,19		60,69		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,05	61,65	63,25		64,85		66,45		68,05		69,65		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	56,19	58,39	60,59		62,79		64,99		67,19		69,39		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	54,07	54,67	55,27		55,87		56,47		57,07		57,67		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	53,55	53,8	54,05		54,3		54,55		54,8		55,05		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	57,91	58,41	58,91		59,41		59,91		60,41		60,91		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMA (Nilai)	58,85	60,35	61,85		63,35		64,85		66,35		67,85		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMK (Nilai)	55,33	57,63	59,93		62,23		64,53		66,83		69,13		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SDLB (Nilai)	64,31	65,61	66,91		68,21		69,51		70,81		72,11		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim inklusivitas SMPLB (Nilai)	62,62	64,02	65,42		66,82		68,22		69,62		71,02		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Iklim inklusivitas SMALB (Nilai)	63,18	64,78	66,38		67,98		69,58		71,18		72,78		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim keamanan SMA (Nilai)	70,95	80,05	81,25		82,45		83,65		84,85		86,05		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim keamanan SMK (Nilai)	67,46	68,66	69,86		71,06		72,26		73,46		74,66		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim keamanan SDLB (Nilai)	74,38	74,88	75,38		75,88		76,38		76,88		77,38		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim keamanan SMPLB (Nilai)	64,08	65,28	66,48		67,68		68,88		70,08		71,28		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Iklim keamanan SMALB (Nilai)	69,18	70,48	71,78		73,08		74,39		75,68		76,98		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim kebinekaan SMA (Nilai)	71,08	72,08	73,08		74,08		75,08		76,08		77,08		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim kebinekaan SMK (Nilai)	68,65	69,95	71,25		72,55		73,85		75,15		76,45		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim kebinekaan SDLB (Nilai)	65,23	66,23	67,23		68,23		69,23		70,23		71,23		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim kebinekaan SMPLB (Nilai)	66,62	68,42	70,22		72,02		73,82		75,62		77,42		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Iklim kebinekaan SMALB (Nilai)	68,82	70,82	72,82		74,82		76,82		78,82		80,82		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi Pendidikan (TIKP) oleh satuan pendidikan			100		100		100		100		100		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,01,03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					2,930,000,000,00		2,930,000,000,00		2,930,000,000,00		2,930,000,000,00		2,930,000,000,00	
Terakomodirnya muatan lokal dalam kurikulum sekolah	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	2,930,000,000,00	100	2,930,000,000,00	100	2,930,000,000,00	100	2,930,000,000,00	100	2,930,000,000,00	1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
1,01,04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Distribusi Guru SLB (Indeks)	1	1	1	600,000,000,00	1	600,000,000,00	1	600,000,000,00	1	600,000,000,00	1	600,000,000,00	1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Indeks Distribusi Guru SMA (Indeks)	0,67	0,7	0,72		0,74		0,76		0,78		0,8		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Indeks Distribusi Guru SMK (Indeks)	0,81	0,81	0,82		0,83		0,84		0,84		0,85		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	71	71	72		73		74		75		75		1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,01,05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					370,000,000,00		370,000,000,00		370,000,000,00		370,000,000,00		370,000,000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	370,000,000,00	100	370,000,000,00	100	370,000,000,00	100	370,000,000,00	100	370,000,000,00	1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
1,01,06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00	
terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Satuan Pendidikan Pengaprisiasi Bahasa dan Sastra Kewenangan Provinsi (%)	20	30	40	600,000,000,00	60	600,000,000,00	70	600,000,000,00	90	600,000,000,00	100	600,000,000,00	1,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pendidikan
1,02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					874,752,517,057,38		946,774,025,615,32		970,966,825,065,65		1,028,642,501,919,62		1,090,217,874,129,58	
1,02,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					633,349,831,957,38		662,376,319,309,32		701,829,293,593,65		743,887,674,299,62		788,741,557,039,58	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,6	82,7	82,8	55,469,539,38	82,9	63,513,143,32	83	69,991,677,65	83,1	77,758,029,62	83,2	79,921,417,58	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,4	89	89,5		90		90,5		91		91,5		1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	16	70,01	75		80		85		90		92		1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	35	70	75	377.747.240.959	78	386.750.468.718	82	394.327.883.431	85	402.238.757.412	90	410.516.751.391	1,02,0,00,0,00,02 ,0000 - RSUD Rd, Mattaher
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,36	86,5	86,66		86,96		87,26		87,56		87,86		1,02,0,00,0,00,02 ,0000 - RSUD Rd, Mattaher
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,75	71	71,25		71,75		72,25		72,75		73,25		1,02,0,00,0,00,02 ,0000 - RSUD Rd, Mattaher
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,24	71	72,5	255.547.121.449	73	275.562.337.438	73,5	307.431.418.475	74	341.571.158.848	75	378.144.884.221	1,02,0,00,0,00,03 ,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85	85,5	86		87		87,5		88		88,5		1,02,0,00,0,00,03 ,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	90	90,25	90,8		91		91,5		92		92,5		1,02,0,00,0,00,03 ,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur
1,02,02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					189.346.126.000		276,810,243,000,00		261,175,222,500,00		276,360,139,700,00		292,512,613,670,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian bayi	20	13	12	330.000.000	12	390.000.000	11	410.000.000	10	440.000.000	10	460.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Angka kematian neonatal	164	6	5	335.000.000	5	360.000.000	5	405.500.000	5	425.000.000	5	445.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar	87	35	35	85.000.000	55	90.000.000	70	95.000.000	88	103.000.000	90	106.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia	82	82	83	190.000.000	84	200.000.000	85	210.500.000	87	225.000.000	89	235.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	7	7	6	750.000.000	6	1.000.000.000	6	1.250.000.000	6	1.500.000.000	6	1.750.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ibu hamil KEK	10	9	9	320.000.000	8	340.000.000	8	350.000.000	8	360.000.000	7	370.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas lingkungan	NA	9,09	18,18	1.012.000.000	27,27	1.118.200.000	36,36	1.243.230.000	45,45	1.348.512.000	54,55	1.434.720.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase depresi yang mendapatkan layanan	N/A	5	7	400.000.000	9	450.000.000	11	500.000.000	13	550.000.000	15	600.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan gangguan penggunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL	N/A	5	7	200.000.000	9	200.000.000	11	200.000.000	13	200.000.000	15	200.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	84	85	87	384.476.000	89	418.668.000	91	456.280.000	93	497.652.000	95	547.417.200	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	0,30	5	10	150.000.000	15	200.000.000	20	250.000.000	25	300.000.000	30	300.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	% Diabetes dalam pengendalian	N/A	5	10	150.000.000	15	200.000.000	20	250.000.000	25	300.000.000	30	350.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	NA	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/kota yang memiliki proporsi obesitas <23,4%	14,60	14,60	14,60	150.000.000	14,60	150.000.000	14,60	150.000.000	14,60	150.000.000	14,60	150.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	64	65	70	110.000.000	75	165.000.000	80	247.500.000	85	371.250.000	90	556.875.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Insiden HIV / Persentase ODHIV on ART yang di obati	64	65	70	350.000.000	75	375.000.000	80	425.000.000	85	450.000.000	90	475.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota dengan eliminasi malaria	72,73	72,73	72,73	350.000.000	81,82	375.000.000	81,82	425.000.000	90,91	450.000.000	90,91	475.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	70	71	72	75.000.000	73	100.000.000	74	125.000.000	75	150.000.000	76	175.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota eliminasi rabies	81,82	81,82	90,91	75.000.000	90,91	100.000.000	100,00	125.000.000	100,00	150.000.000	100,00	175.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Penurunan Angka kematian Dengue	0	1	0	75.000.000	0	100.000.000	0	125.000.000	0	150.000.000	0	175.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	90	91	92	4.963.250.000	93	5.472.575.000	94	6.019.832.500	95	6.629.767.700	96	7.292.744.470	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif JKN	69	80	81	77.914.400.000	82	78.872.000.000	83	79.829.600.000	84	80.787.200.000	85	81.744.800.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	N/A	36	46	500.000.000	55	500.000.000	61	500.000.000	70	500.000.000	80	500.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	430.000.000	100	470.000.000	100	520.000.000	100	550.000.000	100	580.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Fasyankes yang terakreditasi paripurna	32,69	32,69	32,69	748.000.000	32,69	840.800.000	40,87	958.880.000	45,67	1.042.768.000	45,67	1.062.768.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	80,00	82,00	84,00	5.940.000.000	86,00	6.534.000.000	88,00	7.187.400.000	90,00	7.906.140.000	90,00	8.696.754.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase labkesmas tingkat 3 yang dikembangkan sesuai standar	84,78	85	85	8.150.000.000	85	9.215.000.000	85	10.340.500.000	90	11.517.050.000	95	12.775.755.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	84,62	85	86	8.250.000.000	87	39.325.000.000	88	10.465.500.000	89	11.647.050.000	90	12.925.755.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	75	76	77	250.000.000	79	250.000.000	81	250.000.000	83	250.000.000	85	250.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/ kelurahan sesuai standar	N/A	9,1	18,2	200.000.000	27,3	200.000.000	36,4	200.000.000	45,5	200.000.000	54,5	200.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam SIKN	75	78	80	250.000.000	85	275.000.000	90	302.500.000	95	332.750.000	100	366.025.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ketercapaian INM (Indikator Nasional Mutu) di Rumah Sakit (%)	53,84	58,33	61,53	75.959.000.000	69,23	79.757.000.000	76,92	83.745.000.000	84,61	87.932.000.000	92,3	92.329.000.000	1,02,0,00,0,00,02 ,0000 - RSUD Rd, Mattaher

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ketercapaian INM (Indikator Nasional Mutu) di Rumah Sakit (%)	85	86	86,5	44,061,000,000,00	87	48.467.000.000	88	53.313.000.000	89	58.645.000.000	92,3	64.509.000.000	1,02,0,00,0,00,03 ,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur
1,02,03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.210.559.100		4.389.963.306		4.523.683.972		4.670.981.920		4.897.726.920	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	6,6 : 1,000	6,6 : 1,000	6,6 : 1,000	705.192.050	6,6 : 1,000	797.856.653	6,6 : 1,000	842.179.486	6,6 : 1,000	888.040.960	6,6 : 1,000	984.625.960	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Pesentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	8,17	13,46	18,75	135.000.000	24	121.000.000	29	109.350.000	35	99.415.000	40	95.000.000	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	97	90	91	123.292.050	92	129.456.653	93	135.929.486	94	152.725.960	95	192.725.960	1,02,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	64,77	67,77	70,77	3.247.075.000	74	3.341.650.000	77	3.436.225.000	80	3.530.800.000	83	3.625.375.000	
1,02,04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1,050,000,000,00		1,102,500,000,00		1,157,625,000,00		1,215,506,000,00		1,337,056,500,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alkes, PKRT yang memenuhi persyaratan perizinan	100	100	100	1.050.000.000	100	1.102.500.000	100	1.157.625.000	100	1.215.506.000	100	1.337.056.500	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
1,02,05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2,240,000,000,00		1,545,000,000,00		1,677,000,000,00		1,847,200,000,00		2,006,920,000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kab/Kota mencapai target STBM	18,18	18,18	18,18	200.000.000	18,18	225.000.000	27,27	225.000.000	36,36	250.000.000	45,45	250.000.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	N/A	15,00	65	2.040.000.000	68	1.320.000.000	71	1.452.000.000	74	1.597.200.000	77	1.756.920.000	1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan
1,03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					770.094.000.000,00		966,301,000,000,00		995,019,600,000,00		1,033,141,000,000,00		1,238,343,000,000,00	
1,03,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					45,258,000,000,00		50,799,000,000,00		60,001,000,000,00		65,534,000,000,00		70,876,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	15,2	70,01	71,01	45,258,000,000,00	72,01	50,799,000,000,00	73,01	60,001,000,000,00	74,01	65,534,000,000,00	75	70,876,000,000,00	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91	91,9	92,1		92,2		92,3		92,4		92,5		1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72	75	76		77		78		78,5		79		1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					70,136,000,000,00		66,324,000,000,00		62,313,000,000,00		57,547,000,000,00		89,840,000,000,00	
meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.	64,51	65,78	66,35	68.309.000.000	67,69	68.435.000.000	68,82	70.333.000.000	70,14	75.528.000.000	71,93	87.069.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Provinsi yang dilindungi dengan Infrastruktur Sumber Daya Air	4	4	17,48	41.827.000.000	38,76	41.889.000.000	52,30	41.980.000.000	76,54	42.019.000.000	82,86	62.771.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,03,03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00	
meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum Perpipaan, perkotaan dan perdesaan	80	80	40	5.000.000.000	42	5.000.000.000	44	5.000.000.000	46	5.000.000.000	48	5.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					500,000,000,00		200,000,000,00		1,200,000,000,00		1,000,000,000,00		90,000,000,000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Ketersediaan TPA/TPST/SPAL Regional	0	0	10	500.000.000	20	200.000.000	40	1.200.000.000	60	1.000.000.000	80	90.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					500,000,000,00		200,000,000,00		1,200,000,000,00		1,000,000,000,00		20,000,000,000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak)	66,21	68,84	70	500.000.000	71	200.000.000	73	1.200.000.000	74	1.000.000.000	75	20.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,03,06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					300,000,000,00		300,000,000,00		7,164,000,000,00		25,860,000,000,00		16,087,000,000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	0	0	5	300.000.000	10	300.000.000	40	7.164.000.000	70	25.860.000.000	100	16.087.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Peningkatan Ketersediaan TPS/TPA/TPS3R /TPST/SPAM di Kawasan Strategis Provinsi	2	10	10	1.000.000.000	20	1.000.000.000	30	1.000.000.000	40	1.000.000.000	50	1.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					100,000,000,000,00		100,000,000,000,00		100,000,000,000,00		100,000,000,000,00		100,000,000,000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat	2	3	42,11	100.000.000.000	55,26	100.000.000.000	71,05	100.000.000.000	84,21	100.000.000.000	100	100.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					50,000,000,000,00		50,000,000,000,00		50,000,000,000,00		50,000,000,000,00		50,000,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat	2	3	42,11	50.000.000.000	55,26	50.000.000.000	71,05	50.000.000.000	84,21	50.000.000.000	100	50.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					483,400,000,000,00		678,228,000,000,00		692,641,600,000,00		711,450,000,000,00		780,540,000,000,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)	74,7	74,7	74,98	483,400,000,000,00	75,56	678,228,000,000,00	76,14	692,641,600,000,00	76,85	711,450,000,000,00	77,35	780,540,000,000,00	1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					10,000,000,000,00		10,250,000,000,00		10,500,000,000,00		10,750,000,000,00		11,000,000,000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga kerja konstruksi tingkat ahli yang bersertifikasi	100	100	20	9.000.000.000	40	9.250.000.000	60	9.500.000.000	80	9.750.000.000	100	10.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Pekerjaan Konstruksi yang di kendalikan	NA	10	20	1.000.000.000	40	1.000.000.000	60	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	1.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum
1,03,12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4,000,000,000,00		4,000,000,000,00		4,000,000,000,00		4,000,000,000,00		4,000,000,000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Nilai Hasil TURBINLAK Serta kinerja Fungsi dan Manfaat Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	0,00	60	4.000.000.000	64	4.000.000.000	69	4.000.000.000	75	4.000.000.000	81	4.000.000.000	1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					46,593,000,000,00		58,900,000,000,00		57,233,000,000,00		51,329,000,000,00		58,979,000,000,00	
1,04,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	15,2	70,01	71,01	1,000,000,000,00	72,01	1,000,000,000,00	73,01	1,000,000,000,00	74,01	1,000,000,000,00	75	1,000,000,000,00	1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91	91,9	92,1		92,2		92,3		92,4		92,5		1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72	75	76		77		78		78,5		79		1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1,04,02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana Alam / Rumah Terkena Program Pemerintah Yang Tertangani	100	100	20	15.000.000.000	40	15.000.000.000	60	15.000.000.000	80	15.000.000.000	100	15.000.000.000	1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1,04,03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					19,593,000,000,00		26,900,000,000,00		20,233,000,000,00		9,329,000,000,00		11,979,000,000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	1,25	10,41	20,53	19.593.000.000	49,36	26.900.000.000	70,11	20.233.000.000	89,49	9.329.000.000	100	11.979.000.000	1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1,04,05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					25,000,000,000,00		30,000,000,000,00		35,000,000,000,00		40,000,000,000,00		45,000,000,000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	30	30	33,33	25.000.000.000	50	30.000.000.000	66,67	35.000.000.000	83,33	40.000.000.000	100	45.000.000.000	1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1,05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					62,732,678,022,00		68,130,477,985,00		76,928,333,954,00		78,494,738,617,00		84,073,256,993,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,05,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					42,076,959,067,00		44,979,468,180,00		51,048,270,249,00		49,669,620,912,00		52,432,257,538,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,8	87,85	87,9	42,076,959,067,00	88,6	44,979,468,180,00	88,7	51,048,270,249,00	88,9	49,669,620,912,00	89	52,432,257,538,00	1,05,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	96,6	96,65	96,75		96,8		96,9		97		97,61		1,05,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,15	70,01	71		73		75		78		80,5		1,05,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84	84,5	85		86		88		89		90		1,05,0,00,0,00,02 ,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	71	72		74		76		78		80		1,05,0,00,0,00,02 ,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	96,4	96,5	96,6		96,7		96,8		96,9		97		1,05,0,00,0,00,02 ,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,05,02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5,918,773,850,00		6,339,925,200,00		6,970,171,600,00		7,809,932,600,00		8,294,680,100,00	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	5,918,773,750,00	100	6,339,925,100,00	100	6,970,171,500,00	100	7,809,932,500,00	100	8,294,680,000,00	1,05,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1,05,03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					12,800,000,005,00		14,800,000,005,00		16,800,000,005,00		18,800,000,005,00		21,000,000,005,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	3.000.000.000	100	3.500.000.000	100	4.000.000.000	100	4.500.000.000	100	5.000.000.000	1,05,0,00,0,00,02,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	7.800.000.000	100	8.800.000.000	100	9.800.000.000	100	10.800.000.000	100	11.800.000.000	1,05,0,00,0,00,02,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	3.000.000.000	1,05,0,00,0,00,02,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,05,04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1,936,945,100,00		2,011,084,600,00		2,109,892,100,00		2,215,185,100,00		2,346,319,350,00	
Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Kebakaran (Indeks)	0	0	60	1,936,945,000,00	65	2,011,084,500,00	70	2,109,892,000,00	75	2,215,185,000,00	80	2,346,319,250,00	1,05,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1,06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					30,662,069,600,00		31,622,686,331,00		32,559,169,600,00		33,531,169,600,00		34,563,294,600,00	
1,06,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17,950,000,000,00		18,055,000,000,00		18,110,000,000,00		18,190,000,000,00		18,270,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	80	80	80	17,950,000,000,00	80	18,055,000,000,00	80	18,110,000,000,00	80	18,190,000,000,00	80	18,270,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80	80	80		80		80		80		80		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	70	70		70		70		70		80		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,06,02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1,875,000,000,00		1,930,016,731,00		2,000,000,000,00		2,200,000,000,00		2,260,000,000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	100	100	1,875,000,000,00	100	1,930,016,731,00	100	2,000,000,000,00	100	2,200,000,000,00	100	2,260,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos (Predikat)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,06,03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					250,000,000,00		275,000,000,00		280,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi (Angka)	96,6	96,6	97,5	250,000,000,00	97,8	275,000,000,00	97,9	280,000,000,00	98	300,000,000,00	100	300,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	96,6	96,6	97,5		97,8		97,9		98		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,06,04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					7,277,069,600,00		7,687,669,600,00		8,214,169,600,00		8,486,169,600,00		9,053,294,600,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	7,277,069,600,00	100	7,687,669,600,00	100	8,214,169,600,00	100	8,486,169,600,00	100	9,053,294,600,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	12,5	15,6	15,6		15,6		20,83		20,83		20,83		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	13,25	22,09	22,09		22,09		22,09		22,09		22,09		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,06,05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2,100,000,000,00		2,200,000,000,00		2,250,000,000,00		2,305,000,000,00		2,330,000,000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	0,2	0,22	0,25	2,100,000,000,00	0,27	2,200,000,000,00	0,3	2,250,000,000,00	0,32	2,305,000,000,00	0,35	2,330,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1,06,06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					510,000,000,00		675,000,000,00		805,000,000,00		1,025,000,000,00		1,200,000,000,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM	96,4	96,4	96,4	510,000,000,00	96,6	675,000,000,00	96,8	805,000,000,00	97	1,025,000,000,00	97	1,200,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1,06,07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					700,000,000,00		800,000,000,00		900,000,000,00		1,025,000,000,00		1,150,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	700,000,000,00	100	800,000,000,00	100	900,000,000,00	100	1,025,000,000,00	100	1,150,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01 ,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					32,021,100,000,00		33,351,200,000,00		34,681,300,000,00		36,011,400,000,00		37,341,500,000,00	
2,07,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,000,000,000,00		23,000,000,000,00		24,000,000,000,00		25,000,000,000,00		26,000,000,000,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD ()	22,4	70,01	75	22,000,000,000,00	77	23,000,000,000,00	79	24,000,000,000,00	80	25,000,000,000,00	81	26,000,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,91	84,91	85		85,5		85,7		85,9		86		2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	72	72,5		74		76		78		80,01		2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,07,02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					120,000,000,00		130,000,000,00		140,000,000,00		150,000,000,00		160,000,000,00	
Meningkatnya pengelolaan Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	27,27	27,27	45,4	120,000,000,00	54,5	130,000,000,00	72,7	140,000,000,00	90,9	150,000,000,00	100	160,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,07,03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					7,000,000,000,00		7,100,000,000,00		7,200,000,000,00		7,300,000,000,00		7,400,000,000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	5,44	5,44	5,5	7,000,000,000,00	5,6	7,100,000,000,00	5,7	7,200,000,000,00	5,8	7,300,000,000,00	5,9	7,400,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,07,04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1,000,000,000,00		1,100,000,000,00		1,200,000,000,00		1,300,000,000,00		1,400,000,000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	34,9	34,95	35	1,000,000,000,00	35,1	1,100,000,000,00	35,2	1,200,000,000,00	35,3	1,300,000,000,00	35,4	1,400,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,07,05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					800,000,000,00		820,000,000,00		840,000,000,00		860,000,000,00		880,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase peningkatan kelembagaan keternagakerjaan	9,4	9,5	9,6	400,000,000,00	9,7	410,000,000,00	9,8	420,000,000,00	9,9	430,000,000,00	10	440,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,07,06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					1,100,000,000,00		1,200.000,000,00		1,300,000,000,00		1,400,000,000,00		1,500,000,000,00	
Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma tenaga kerja (Angka)	98,6	98,6	98,7	1,100,000,000,00	98,8	1,200.000,000,00	98,9	1,300,000,000,00	99	1,400,000,000,00	99,1	1,500,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2,08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					23,625,000,000,00		24,745,000,000,00		26,798,000,000,00		27,270,600,000,00		31,550,460,000,00	
2,08,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12,000,000,000,00		12,710,000,000,00		14,397,000,000,00		14,397,000,000,00		18,397,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	16,54	70,01	70,25	12,000,000,000,00	70,5	12,710,000,000,00	71	14,397,000,000,00	71,25	14,397,000,000,00	71,75	18,397,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)	75	80	82		83		85		88		88		2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,25	77	77,75		78,5		79,25		80		80,75		2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,08,02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					5,125,000,000,00		5,210,000,000,00		5,301,000,000,00		5,398,600,000,00		5,503,460,000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	51,17	52,6	54,8	5,125,000,000,00	55,35	5,210,000,000,00	55,8	5,301,000,000,00	56,46	5,398,600,000,00	56,75	5,503,460,000,00	2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,08,03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					2,725,000,000,00		2,725,000,000,00		2,725,000,000,00		2,725,000,000,00		2,725,000,000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	2,725,000,000,00	100	2,725,000,000,00	100	2,725,000,000,00	100	2,725,000,000,00	100	2,725,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,08,04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1,325,000,000,00		1,325,000,000,00		1,325,000,000,00		1,525,000,000,00		1,525,000,000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	NA	100	100	1,325,000,000,00	100	1,325,000,000,00	100	1,325,000,000,00	100	1,525,000,000,00	100	1,525,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,08,05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					300,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00	
Tersedianya sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (%)	100	100	100	300,000,000,00	100	300,000,000,00	100	300,000,000,00	100	300,000,000,00	100	300,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,08,06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1,100,000,000,00		1,200,000,000,00		1,350,000,000,00		1,350,000,000,00		1,350,000,000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,08	61,13	61,18	1.100.000.000	61,23	1.200.000.000	61,28	1.350.000.000	61,33	1.350.000.000	61,38	1.350.000.000	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (%)	80	85	90		95		100		100		100		2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,08,07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1,050,000,000,00		1,275,000,000,00		1,400,000,000,00		1,575,000,000,00		1,750,000,000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran perkawinan dan perlakukan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komperehsif	100	100	100	300,000,000,00	100	500,000,000,00	100	600,000,000,00	100	750,000,000,00	100	900,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					38,500,000,000,00		42,250,000,000,00		46,000,000,000,00		49,750,000,000,00		53,500,000,000,00	
2,09,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17,500,000,000,00		19,000,000,000,00		20,500,000,000,00		22,000,000,000,00		23,500,000,000,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD ()	15,4	70,01	71	17,500,000,000,00	72	19,000,000,000,00	73	20,500,000,000,00	74	22,000,000,000,00	75	23,500,000,000,00	2,09,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	89,9	90	90		90,1		90,2		90,3		90,4		2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,7	70	72		74		76		78		80,1		2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2,09,02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					3,000,000,000,00		3,100,000,000,00		3,200,000,000,00		3,300,000,000,00		3,400,000,000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Ideal	66,96	66,96	73,57	3,000,000,000,00	80,18	3,100,000,000,00	86,78	3,200,000,000,00	93,29	3,300,000,000,00	100	3,400,000,000,00	2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2,09,03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					10,000,000,000,00		11,000,000,000,00		12,000,000,000,00		13,000,000,000,00		14,000,000,000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan konsumsi	92,5	95,5	95,5	10,000,000,000,00	95,8	11,000,000,000,00	96,1	12,000,000,000,00	96,4	13,000,000,000,00	96,7	14,000,000,000,00	2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan	93,64	93,7	94		94,5		94,8		95		95,5		2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
	inflasi Pangan bergejolak	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0		1,0 - 3,0		1,0 - 3,0		1,0 - 3,0		1,0 - 3,0		2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2,09,04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					5,000,000,000,00		6,000,000,000,00		7,000,000,000,00		8,000,000,000,00		9,000,000,000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	20,58	17,38	15,78	5,000,000,000,00	14,18	6,000,000,000,00	12,58	7,000,000,000,00	10,98	8,000,000,000,00	9,38	9,000,000,000,00	2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2,09,05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					3,000,000,000,00		3,150,000,000,00		3,300,000,000,00		3,450,000,000,00		3,600,000,000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	86,42	86,5	86,5	3,000,000,000,00	87	3,150,000,000,00	87,5	3,300,000,000,00	88	3,450,000,000,00	88,5	3,600,000,000,00	2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2,10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					15,000,000,000,00		16,000,000,000,00		17,000,000,000,00		18,000,000,000,00		19,000,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,10,03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					10,000,000,000,00		10,000,000,000,00		10,000,000,000,00		10,000,000,000,00		10,000,000,000,00	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	0	0	33,33	10.000.000.000	50	10.000.000.000	66,67	10.000.000.000	83,33	10.000.000.000	100	10.000.000.000	1,04,2,10,0,00,01 ,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2,10,05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					5,000,000,000,00		6,000,000,000,00		7,000,000,000,00		8,000,000,000,00		9,000,000,000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0	0	33,33	5,000,000,000,00	50	6,000,000,000,00	66,67	7,000,000,000,00	83,33	8,000,000,000,00	100	9,000,000,000,00	1,04,2,10,0,00,01 ,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2,11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					30,930,000,000,00		34,876,000,000,00		38,195,000,000,00		40,790,000,000,00		42,520,000,000,00	
2,11,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,000,000,000,00		23,935,000,000,00		25,775,000,000,00		27,330,000,000,00		28,550,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,85	79	79,25	22,000,000,000,00	79,5	23,935,000,000,00	79,75	25,775,000,000,00	80	27,330,000,000,00	80,25	28,550,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86,22	84	86,42		86,52		86,62		86,72		86,82		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	85,4	85,5	85,6		85,7		85,8		85,9		86		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan	18	7,5	11,11		12		14,04		13,05		2,07		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					400,000,000,00		950,000,000,00		950,000,000,00		600,000,000,00		900,000,000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	100	400,000,000,00	100	950,000,000,00	100	950,000,000,00	100	600,000,000,00	100	900,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,11,03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					4,050,000,000,00		4,535,000,000,00		4,825,000,000,00		5,145,000,000,00		5,415,000,000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	55,58	69,78	69,98	4,050,000,000,00	70,18	4,535,000,000,00	70,38	4,825,000,000,00	70,58	5,145,000,000,00	70,58	5,415,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,98	77,71	78,01		78,31		78,61		78,91		78,91		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penyelesaian inventarisasi pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (%)	100	100	100		100		100		100		100		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penyelesaian pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					100,000,000,00		500,000,000,00		250,000,000,00		550,000,000,00		500,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0	0	7	100,000,000,00	24	500,000,000,00	15	250,000,000,00	31	550,000,000,00	23	500,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					475,000,000,00		525,000,000,00		575,000,000,00		975,000,000,00		675,000,000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	11,21	20	475,000,000,00	20	525,000,000,00	20	575,000,000,00	20	975,000,000,00	20	675,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (Poin)	3,6	3,6	3,5		3,5		3,4		3,4		3,3		2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					1,305,000,000,00		1,731,000,000,00		2,020,000,000,00		2,340,000,000,00		2,660,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	70	75	30	1,305,000,000,00	30	1,731,000,000,00	25	2,020,000,000,00	25	2,340,000,000,00	20	2,660,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	79	86	20	500,000,000,00	40	500,000,000,00	60	500,000,000,00	80	500,000,000,00	100	500,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					450,000,000,00		450,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	100	450,000,000,00	100	450,000,000,00	100	500,000,000,00	100	500,000,000,00	100	500,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,11,09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					300,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00		300,000,000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	20	300,000,000,00	20	300,000,000,00	20	300,000,000,00	20	300,000,000,00	20	300,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					600,000,000,00		600,000,000,00		700,000,000,00		700,000,000,00		620,000,000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	600,000,000,00	100	600,000,000,00	100	700,000,000,00	100	700,000,000,00	100	620,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2,11,11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					750,000,000,00		850,000,000,00		1,800,000,000,00		1,850,000,000,00		1,900,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55	55	55	750,000,000,00	56	850,000,000,00	56	1,800,000,000,00	57	1,850,000,000,00	57	1,900,000,000,00	2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2,325,000,000,00		2,655,000,000,00		2,985,000,000,00		3,340,000,000,00		3,670,000,000,00	
2,12,02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					700,000,000,00		800,000,000,00		900,000,000,00		1,025,000,000,00		1,150,000,000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan PEndaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,9	20	21	700,000,000,00	22	800,000,000,00	23	900,000,000,00	24	1,025,000,000,00	25	1,150,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	56,31	60	65		70		75		80		85		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,12,03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					700,000,000,00		800,000,000,00		900,000,000,00		1,025,000,000,00		1,125,000,000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98	98	98	700,000,000,00	98	800,000,000,00	98	900,000,000,00	98	1,025,000,000,00	98	1,125,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil (%)	98	98	99		99		99		99		100		1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,12,04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					850,000,000,00		975,000,000,00		1,100,000,000,00		1,200,000,000,00		1,300,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	850,000,000,00	100	975,000,000,00	100	1,100,000,000,00	100	1,200,000,000,00	100	1,300,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,12,05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					75,000,000,00		80,000,000,00		85,000,000,00		90,000,000,00		95,000,000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	75,000,000,00	100	80,000,000,00	100	85,000,000,00	100	90,000,000,00	100	95,000,000,00	1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8,550,000,000,00		8,975,000,000,00		9,550,000,000,00		9,975,000,000,00		10,750,000,000,00	
2,13,02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1,050,000,000,00		1,075,000,000,00		1,100,000,000,00		1,175,000,000,00		1,200,000,000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	14	25	45	1,050,000,000,00	65	1,075,000,000,00	85	1,100,000,000,00	100	1,175,000,000,00	100	1,200,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,13,03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					750,000,000,00		750,000,000,00		750,000,000,00		750,000,000,00		750,000,000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	66,96	79,99	84,94	750,000,000,00	89,96	750,000,000,00	94,98	750,000,000,00	100	750,000,000,00	100	750,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,13,04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,200,000,000,00		4,500,000,000,00		5,050,000,000,00		5,100,000,000,00		5,500,000,000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	72,66	78,13	83,61	4,200,000,000,00	89,08	4,500,000,000,00	94,55	5,050,000,000,00	100	5,100,000,000,00	100	5,500,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,13,05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2,550,000,000,00		2,650,000,000,00		2,650,000,000,00		2,950,000,000,00		3,300,000,000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	2,550,000,000,00	100	2,650,000,000,00	100	2,650,000,000,00	100	2,950,000,000,00	100	3,300,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	72,66	78,13	83,61		89,08		94,55		100		100		2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1,700,000,000,00		1,775,000,000,00		2,075,000,000,00		2,125,000,000,00		2,175,000,000,00	
2,14,02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00		600,000,000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	22,4	22,1	22	600,000,000,00	21,9	600,000,000,00	21,8	600,000,000,00	21,8	600,000,000,00	21,76	600,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,14,03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					800,000,000,00		850,000,000,00		1,125,000,000,00		1,150,000,000,00		1,175,000,000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	63	67	67	800,000,000,00	67	850,000,000,00	67	1,125,000,000,00	70	1,150,000,000,00	70	1,175,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,14,04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					300,000,000,00		325,000,000,00		350,000,000,00		375,000,000,00		400,000,000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Angka)	63,66	65,36	67,06	300,000,000,00	68,76	325,000,000,00	70,46	350,000,000,00	72,16	375,000,000,00	74	400,000,000,00	2,08,2,13,2,14,01 ,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2,15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					59.264.023.000,00		57.956.227.000,00		61.753.027.000,00		63.825.785.000,00		62.108.285.000,00	
2,15,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19.052.500.000,00		19.132.500.000,00		19.847.500.000,00		20.215.903.000,00		20.415.903.000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	63,1	65	66	19.052.500.000,00	67	19.132.500.000,00	70	19.847.500.000,00	72	20.215.903.000,00	74	20.415.903.000,00	2,15,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Perhubungan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	73	74	75		76		77		78		79		2,15,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Perhubungan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,78	76,78	77		77,55		78		78,5		79		2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan
2,15,02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					33.360.398.000,00		30.070.102.000,00		31.629.402.000,00		34.578.757.000,00		33.024.757.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat	0,428	0,379	0,376	33.360.398.000,00	0,389	30.070.102.000,00	0,41	31.629.402.000,00	0,413	34.578.757.000,00	0,422	33.024.757.000,00	2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	37	37	40		43		46		49		52		2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan
2,15,03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					6.851.125.000,00		8.753.625.000,00		10.276.125.000,00		9.031.125.000,00		8.667.625.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio Konektivitas Laut	0	0,163	0,161	6.851.125.000,00	0,167	8.753.625.000,00	0,176	10.276.125.000,00	0,177	9.031.125.000,00	0,181	8.667.625.000,00	2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan
2,16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					44,134,000,000,00		45,883,000,000,00		49,241,000,000,00		49,009,000,000,00		51,351,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,16,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14,756,000,000,00		15,352,000,000,00		17,590,000,000,00		16,213,000,000,00		17,366,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	97,9	97,9	98	14,756,000,000,00	98	15,352,000,000,00	98	17,590,000,000,00	99	16,213,000,000,00	100	17,366,000,000,00	2,16,2,20,2,21,01 ,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	91,12	85	85		86		87		88		89		2,16,2,20,2,21,01 ,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,15	73	75		77		78		81		82		2,16,2,20,2,21,01 ,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2,16,02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					19,340,000,000,00		19,911,000,000,00		20,581,000,000,00		21,234,000,000,00		21,950,000,000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase implementasi strategi komunikasi publik di Pemerintah Daerah (%)	0	50	70	19,340,000,000,00	75	19,911,000,000,00	80	20,581,000,000,00	85	21,234,000,000,00	90	21,950,000,000,00	2,16,2,20,2,21,01 ,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	87,43	87,8	88		88,4		88,7		88,9		90		2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2,16,03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					10,038,000,000,00		10,620,000,000,00		11,070,000,000,00		11,562,000,000,00		12,035,000,000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE ()	3,05	1,7	1,7	10,038,000,000,00	1,7	10,620,000,000,00	1,8	11,070,000,000,00	1,8	11,562,000,000,00	2	12,035,000,000,00	2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (%)	66,7	70	73,33		80		86,66		93,33		96,66		2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tingkat kematangan keterpaduan layanan digital pemerintah (Level)	0	1	1		1		1		1		2		2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2,17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20,300,000,000,00		20,455,000,000,00		21,605,000,000,00		21,755,000,000,00		22,850,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,17,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12,940,000,000,00		12,840,000,000,00		13,770,000,000,00		13,725,000,000,00		14,680,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	84,1	84,5	85	12,940,000,000,00	85,5	12,840,000,000,00	86	13,770,000,000,00	86,5	13,725,000,000,00	87	14,680,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,17	89,48	89,8		90		91		92		93		2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,6	81,5	81,6		81,7		81,8		81,9		82		2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					200,000,000,00		250,000,000,00		250,000,000,00		250,000,000,00		250,000,000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	24,56	5	5	200,000,000,00	5	250,000,000,00	5	250,000,000,00	5	250,000,000,00	5	250,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200,000,000,00		255,000,000,00		255,000,000,00		255,000,000,00		300,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	12,75	11,9	12,75	200,000,000,00	12,75	255,000,000,00	12,75	255,000,000,00	12,75	255,000,000,00	12,75	300,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					200,000,000,00		200,000,000,00		250,000,000,00		250,000,000,00		250,000,000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	92,86	93,33	94	200,000,000,00	95	200,000,000,00	96	250,000,000,00	97	250,000,000,00	98	250,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					200,000,000,00		230,000,000,00		260,000,000,00		290,000,000,00		320,000,000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	15,38	22,03	30,17	200,000,000,00	35,86	230,000,000,00	41,32	260,000,000,00	48,58	290,000,000,00	55,56	320,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					660,000,000,00		780,000,000,00		820,000,000,00		835,000,000,00		900,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	19,49	21,49	27,49	660,000,000,00	29,49	780,000,000,00	31,49	820,000,000,00	33,49	835,000,000,00	35,49	900,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					5,550,000,000,00		5,550,000,000,00		5,550,000,000,00		5,700,000,000,00		5,700,000,000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	45	45	60	5,550,000,000,00	70	5,550,000,000,00	80	5,550,000,000,00	90	5,700,000,000,00	100	5,700,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	4	4,1	4,2		4,3		4,4		4,5		4,6		2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2,17,08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					350,000,000,00		350,000,000,00		450,000,000,00		450,000,000,00		450,000,000,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	28,09	30	32	350,000,000,00	34	350,000,000,00	36	450,000,000,00	38	450,000,000,00	40	450,000,000,00	2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					17,981,611,966,00		16,181,611,966,00		16,181,611,966,00		16,181,611,966,00		16,181,611,966,00	
2,18,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15,081,611,966,00		13,281,611,966,00		13,281,611,966,00		13,281,611,966,00		13,281,611,966,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,31	73,5	73,6	15,081,611,966,00	74	13,281,611,966,00	74,2	13,281,611,966,00	74,5	13,281,611,966,00	75	13,281,611,966,00	2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	90	90	90,25		90,5		91		91,5		92		2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	41,6	70,01	71		72		73		74		75		2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2,18,02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00	
meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	202,69	100	100	500,000,000,00	100	500,000,000,00	100	500,000,000,00	100	500,000,000,00	100	500,000,000,00	2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,18,03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	0	2	2	500,000,000,00	3	500,000,000,00	3	500,000,000,00	4	500,000,000,00	4	500,000,000,00	2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2,18,04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					900,000,000,00		900,000,000,00		900,000,000,00		900,000,000,00		900,000,000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	72,17	100	73	900,000,000,00	74	900,000,000,00	75	900,000,000,00	76	900,000,000,00	77	900,000,000,00	2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2,18,05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00		1,000,000,000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	74	100	100	1,000,000,000,00	100	1,000,000,000,00	100	1,000,000,000,00	100	1,000,000,000,00	100	1,000,000,000,00	2,18,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2,19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					65,953,522,373,00		67,710,882,700,00		73,378,414,680,00		89,086,785,738,00		75,280,990,800,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,19,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25,562,940,149,00		22,208,874,700,00		23,386,365,680,00		23,848,786,738,00		25,057,775,800,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	1	70	70,5	25,562,940,149,00	71,5	22,208,874,700,00	75	23,386,365,680,00	76	23,848,786,738,00	78	25,057,775,800,00	2,19,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,56	85,56	86,3		86,6		87		87		88		2,19,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,25	72	73		74		75		76		77		2,19,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2,19,02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2,045,695,575,00		3,001,998,000,00		3,190,084,000,00		3,391,374,000,00		3,606,908,000,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,064	0,075	0,081	2,045,695,575,00	0,088	3,001,998,000,00	0,095	3,190,084,000,00	0,104	3,391,374,000,00	0,114	3,606,908,000,00	2,19,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Rasio Pemberdayaan Pemuda	0,008	0,011	0,012		0,013		0,014		0,015		0,016		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,19,03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					34,390,582,224,00		37,650,010,000,00		41,709,465,000,00		56,499,500,000,00		41,001,828,000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet pelajar yang memperoleh medali pada kejuaraan olahraga pelajar single event nasional (%)	52,38	0	53,33	34,390,582,224,00	54,17	37,650,010,000,00	54,9	41,709,465,000,00	55,56	56,499,500,000,00	56,4	41,001,828,000,00	2,19,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase atlet yang memperoleh medali pada kejuaraan olahraga multi event nasional (%)	42,02	22,22	0		23,72		45,21		25,33		0		2,19,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase peningkatan partisipasi pada seleksi pembinaan SPOBDA	15,38	33,3	5		7,14		8,89		10,2		11,1		2,19,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga
2,19,04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					3,954,304,425,00		4,850,000,000,00		5,092,500,000,00		5,347,125,000,00		5,614,479,000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	1,59	1,66	1,72	3,954,304,425,00	1,78	4,850,000,000,00	1,85	5,092,500,000,00	1,92	5,347,125,000,00	1,99	5,614,479,000,00	2,19,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pemuda dan Olahraga

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					540,000,000,00		569,000,000,00		613,000,000,00		657,000,000,00		699,000,000,00	
2,20,02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					540,000,000,00		569,000,000,00		613,000,000,00		657,000,000,00		699,000,000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia (%)	80	80	87	540,000,000,00	90	569,000,000,00	94	613,000,000,00	97	657,000,000,00	100	699,000,000,00	2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2,21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1,017,000,000,00		1,055,500,000,00		1,095,000,000,00		1,140,000,000,00		1,180,500,000,00	
2,21,02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1,017,000,000,00		1,055,500,000,00		1,095,000,000,00		1,140,000,000,00		1,180,500,000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	58,75	40	40	1,017,000,000,00	45	1,055,500,000,00	46	1,095,000,000,00	47	1,140,000,000,00	48	1,180,500,000,00	2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2,22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					26,645,600,000,00		27,738,240,000,00		28,724,696,000,00		29,741,500,000,00		30,791,150,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2,22,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,105,600,000,00		22,658,240,000,00		23,224,696,000,00		23,805,000,000,00		24,400,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	24	70,01	71	22,105,600,000,00	72	22,658,240,000,00	73	23,224,696,000,00	74	23,805,000,000,00	75	24,400,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,65	87,35	88		88,5		89		89,5		90		2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,75	80,95	81		81,05		81,4		81,6		82		2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,22,02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2,325,000,000,00		2,330,000,000,00		2,335,000,000,00		2,340,000,000,00		2,345,000,000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	25	30	2,325,000,000,00	35	2,330,000,000,00	40	2,335,000,000,00	45	2,340,000,000,00	50	2,345,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	1,47	1,48	1,5		1,51		1,53		1,55		1,57		2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,22,03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					415,000,000,00		725,000,000,00		900,000,000,00		1,075,000,000,00		1,250,000,000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	20	30	40	415,000,000,00	50	725,000,000,00	60	900,000,000,00	70	1,075,000,000,00	80	1,250,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,22,04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					150,000,000,00		200,000,000,00		250,000,000,00		300,000,000,00		350,000,000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	20	21	22	150,000,000,00	23	200,000,000,00	24	250,000,000,00	25	300,000,000,00	26	350,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,22,05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1,500,000,000,00		1,650,000,000,00		1,815,000,000,00		1,996,500,000,00		2,196,150,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	4,76	9,52	14,28	1,500,000,000,00	19,04	1,650,000,000,00	23,81	1,815,000,000,00	28,57	1,996,500,000,00	33,3	2,196,150,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0,35	0,35	0,36		0,36		0,37		0,37		0,38		2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,22,06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					150,000,000,00		175,000,000,00		200,000,000,00		225,000,000,00		250,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase peningkatan kunjungan ke museum (%)	11,813	11,813	2,54	150,000,000,00	9,1	175,000,000,00	14,5	200,000,000,00	15,6	225,000,000,00	15,7	250,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					404,907,928,00		460,000,000,00		520,000,000,00		580,000,000,00		640,000,000,00	
2,23,02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					204,907,928,00		250,000,000,00		300,000,000,00		350,000,000,00		400,000,000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	63	65,43	67,4	204,907,928,00	69,4	250,000,000,00	71,4	300,000,000,00	73,4	350,000,000,00	73,4	400,000,000,00	2,23,2,24,0,00,01 ,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,05	68,1	69,2		71,2		73,2		75,2		75,2		2,23,2,24,0,00,01 ,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2,23,03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					200,000,000,00		210,000,000,00		220,000,000,00		230,000,000,00		240,000,000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (naskah)	0	0	1	200,000,000,00	1	210,000,000,00	2	220,000,000,00	2	230,000,000,00	2	240,000,000,00	2,23,2,24,0,00,01 ,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2,24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					636,054,022,00		709,659,424,00		797,622,366,00		6,088,843,602,00		938,423,062,00	
2,24,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					200,000,000,00		230,000,000,00		270,000,000,00		285,000,000,00		300,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	95	95,5	96	200,000,000,00	96,5	230,000,000,00	97	270,000,000,00	97,5	285,000,000,00	98	300,000,000,00	2,23,2,24,0,00,01 ,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85	85	85,5		86		86,5		87		87,5		2,23,2,24,0,00,01 ,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,2	70,2	70,5		71		71,2		71,5		71,5		2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2,24,02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					436,054,022,00		479,659,424,00		527,622,366,00		5,803,843,602,00		638,423,062,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	90,03	90,25	90,5	436,054,022,00	91,1	479,659,424,00	91,5	527,622,366,00	92,1	5,803,843,602,00	92,1	638,423,062,00	2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3,25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					74,200,000,000,00		78,868,000,000,00		82,375,000,000,00		87,012,000,000,00		89,774,000,000,00	
3,25,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35,000,000,000,00		37,000,000,000,00		38,000,000,000,00		39,000,000,000,00		39,000,000,000,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86	86,78	35,000,000,000,00	87,25	37,000,000,000,00	87,95	38,000,000,000,00	88,65	39,000,000,000,00	89,2	39,000,000,000,00	3,25,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	65	70,01	71		72		73		74		75		3,25,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,76	77	78,26		80,35		80,85		81,45		82		3,25,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3,25,02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					2,250,000,000,00		1,600,000,000,00		1,600,000,000,00		1,600,000,000,00		1,600,000,000,00	
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Sumber Nilai Tambah Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap Terhadap PDRB (Persentase)	2,16	2,016	2,17	2,250,000,000,00	2,18	1,600,000,000,00	2,19	1,600,000,000,00	2,2	1,600,000,000,00	2,21	1,600,000,000,00	3,25,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3,25,03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					14,070,000,000,00		15,200,000,000,00		16,400,000,000,00		17,600,000,000,00		18,800,000,000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	45.187	46.467	47.500	14,070,000,000,00	48.300	15,200,000,000,00	49.800	16,400,000,000,00	51.200	17,600,000,000,00	52400	18,800,000,000,00	3,25,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3,25,04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					11,880,000,000,00		13,068,000,000,00		14,375,000,000,00		15,812,000,000,00		17,374,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	49595	50937,7	51082	11,880,000,000,00	53125	13,068,000,000,00	55250	14,375,000,000,00	58012	15,812,000,000,00	60912	17,374,000,000,00	3,25,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3,25,05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00	
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	0	11213,4	10.772,33	5,000,000,000,00	5715,1	5,000,000,000,00	11244,38	5,000,000,000,00	6.221,44	5,000,000,000,00	2.711,22	5,000,000,000,00	3,25,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3,25,06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					6,000,000,000,00		7,000,000,000,00		7,000,000,000,00		8,000,000,000,00		8,000,000,000,00	
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41,5	28,07	28,67	6,000,000,000,00	29,27	7,000,000,000,00	29,87	7,000,000,000,00	30,47	8,000,000,000,00	31,07	8,000,000,000,00	3,25,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan
3,26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11,608,960,000,00		12,849,530,000,00		14,115,100,000,00		14,785,670,000,00		16,011,000,000,00	
3,26,02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					450,000,000,00		500,000,000,00		550,000,000,00		600,000,000,00		650,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	49,68	10	11	450,000,000,00	12	500,000,000,00	13	550,000,000,00	14	600,000,000,00	15	650,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3,26,03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					10,143,960,000,00		11,294,530,000,00		12,445,100,000,00		13,020,670,000,00		14,171,000,000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	4	25,75	27,25	10,143,960,000,00	28,8	11,294,530,000,00	29,35	12,445,100,000,00	31,25	13,020,670,000,00	32	14,171,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3,26,04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					765,000,000,00		790,000,000,00		830,000,000,00		850,000,000,00		865,000,000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	1,84	1,84	1,86	765,000,000,00	1,9	790,000,000,00	1,94	830,000,000,00	1,96	850,000,000,00	2	865,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01 ,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3,26,05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					250,000,000,00		265,000,000,00		290,000,000,00		315,000,000,00		325,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	0	1,36	250,000,000,00	1,37	265,000,000,00	1,38	290,000,000,00	1,39	315,000,000,00	1,4	325,000,000,00	2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3,27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					144,856,836,985,00		158,291,556,647,00		167,404,366,465,00		179,299,357,499,00		178,644,425,720,00	
3,27,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					60,112,410,601,00		64,304,151,661,00		69,563,316,827,00		74,914,898,510,00		80,724,788,361,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,72	88	88,2	18,400,000,000,00	89	18,500,000,000,00	89,5	19,200,000,000,00	89,7	19,700,000,000,00	90	20,200,000,000,00	3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	70,2	71	72		73		74		75		76		3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,45	75	75,2		75,5		76		77		80		3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,2	72,5	74	41,712,410,601,00	75	45,804,151,661,00	76	50,363,316,827,00	78	55,214,898,510,00	80,01	60,524,788,361,00	3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80,69	81	82		94		85		87		88		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	27,6	70,1	71,5		72		73		74		75		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3,27,02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					51,892,986,384,00		55,049,964,986,00		57,256,609,638,00		61,194,018,989,00		64,072,197,359,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,38	0,38	0,38	41,042,986,384,00	0,38	43,549,964,986,00	0,38	45,056,609,638,00	0,38	48,594,018,989,00	0,38	51,072,197,359,00	3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	0,45	0,45	0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	0,60	0,60	0,60		0,60		0,60		0,60		0,60		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,80	0,80	0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	40,00	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard	17,00	17,00	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	45,00	50,00	55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Peningkatan Kelahiran Bibit Ternak Berkualitas	35,00	40,00	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan Kab/Kota (%)	15	16	16	10,850,000,000,00	17	11,500,000,000,00	19	12,200,000,000,00	21	12,600,000,000,00	23	13,000,000,000,00	3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	1	1,13	2,29		2,31		2,33		2,35		2,38		3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
3,27,03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					12,520,000,000,00		16,560,000,000,00		17,010,000,000,00		18,630,000,000,00		8,800,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	56	58	61	4,970,000,000,00	65	5,960,000,000,00	70	6,310,000,000,00	76	7,030,000,000,00	83	7,700,000,000,00	3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Bunbin	15,00	15,00	15,00		20		20		25		25		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan kabupaten/kota (%)	7	7	8,5	7,550,000,000,00	9	10,600,000,000,00	9,5	10,700,000,000,00	10	11,600,000,000,00	10,5	1,100,000,000,00	3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase peningkatan nilai tambah hasil produk perkebunan (%)	3	3	3,6		3,7		3,8		3,9		4,2		3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
3,27,04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					3,600,000,000,00		4,100,000,000,00		4,700,000,000,00		5,300,000,000,00		5,300,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	75	76	77	3,600,000,000,00	78	4,100,000,000,00	80	4,700,000,000,00	82	5,300,000,000,00	85	5,300,000,000,00	3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	55	55	56		57		58		59		60		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Pesentase pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	75,00	76,00	77,00		78		80		82		85		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3,27,05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					12,061,440,000,00		13,227,440,000,00		13,494,440,000,00		13,710,440,000,00		14,027,440,000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	80,74	81,29	81,94	6,061,440,000,00	82,24	6,227,440,000,00	83,74	6,394,440,000,00	84,84	6,610,440,000,00	86,14	6,827,440,000,00	3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	12,27	12,57	13,07		13,77		14,67		15,77		16,97		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (Ha)	225	425	425	6,000,000,000,00	650	7,000,000,000,00	650	7,100,000,000,00	650	7,100,000,000,00	650	7,200,000,000,00	3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
3,27,06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					400,000,000,00		600,000,000,00		700,000,000,00		700,000,000,00		700,000,000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase perkebunan besar yang berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	80	81	82	400,000,000,00	84	600,000,000,00	85	700,000,000,00	87	700,000,000,00	89	700,000,000,00	3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
3,27,07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4,270,000,000,00		4,450,000,000,00		4,680,000,000,00		4,850,000,000,00		5,020,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0,1	0,33	0,5	2,270,000,000,00	0,8	2,450,000,000,00	1	2,630,000,000,00	1,2	2,800,000,000,00	1,3	2,970,000,000,00	3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0,2	0,24	0,59		0,63		0,67		0,77		0,87		3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	4,08	6,12	8,16	2,000,000,000,00	10,2	2,000,000,000,00	12,2	2,050,000,000,00	14,28	2,050,000,000,00	16,32	2,050,000,000,00	3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
	Persentase kelembagaan petani pekebun yang dibentuk dan dibina	1	1,1	1,2		1,3		1,4		1,5		1,6		3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan
3,28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					88,608,447,815,00		86,000,000,000,00		88,240,000,000,00		90,460,000,000,00		92,700,000,000,00	
3,28,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					57,200,000,000,00		57,700,000,000,00		58,200,000,000,00		58,700,000,000,00		59,200,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72	57,200,000,000,00	74	57,700,000,000,00	76	58,200,000,000,00	78	58,700,000,000,00	80	59,200,000,000,00	3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
	Nilai AKIP (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	27	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,42	76,5	77		77,5		78		79		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0012 - UPTD Tahura
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	25	70	72		74		76		78		80		3,28,0,00,0,00,01 ,0012 - UPTD Tahura
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	87	87,5		88		88,5		90		90,5		3,28,0,00,0,00,01 ,0012 - UPTD Tahura
3,28,03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					24,048,962,959,00		19,000,000,000,00		20,000,000,000,00		21,000,000,000,00		22,000,000,000,00	
Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214	24,048,962,959,00	0,216	19,000,000,000,00	0,218	20,000,000,000,00	0,22	21,000,000,000,00	0,222	22,000,000,000,00	3,28,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Kehutanan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%)	0,21	0,212	0,214		0,216		0,218		0,22		0,222		3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3,28,04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					2,700,000,000,00		2,900,000,000,00		3,100,000,000,00		3,300,000,000,00		3,500,000,000,00	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya (%)	81,87	81,878	81,887	2,700,000,000,00	81,896	2,900,000,000,00	81,905	3,100,000,000,00	81,914	3,300,000,000,00	81,922	3,500,000,000,00	3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya (%)	81,87	81,878	81,887		81,896		81,905		81,914		81,922		3,28,0,00,0,00,01,0012 - UPTD Tahura
3,28,05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					4,384,941,906,00		6,000,000,000,00		6,500,000,000,00		7,000,000,000,00		7,500,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48	4,384,941,906,00	26,52	6,000,000,000,00	29,54	6,500,000,000,00	32,57	7,000,000,000,00	35,61	7,500,000,000,00	3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01 ,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01 ,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01 ,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01 ,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01 ,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)	18,56	20,45	23,48		26,52		29,54		32,57		35,61		3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%)	6,57	7,57	9,16		10,76		12,35		13,94		15,54		3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
3,28,06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					274,542,950,00		400,000,000,00		440,000,000,00		460,000,000,00		500,000,000,00	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis (%)	0,19	0,27	0,37	274,542,950,00	0,47	400,000,000,00	0,57	440,000,000,00	0,68	460,000,000,00	0,78	500,000,000,00	3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan
3,29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					38,300,000,000,00		39,750,000,000,00		40,550,000,000,00		41,650,000,000,00		42,750,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3,29,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24,150,000,000,00		25,250,000,000,00		26,350,000,000,00		27,450,000,000,00		28,550,000,000,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	35,02	70	72	24,150,000,000,00	74	25,250,000,000,00	76	26,350,000,000,00	78	27,450,000,000,00	80	28,550,000,000,00	3,29,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,22	88,51	89,8		91,09		92,38		93,67		94,96		3,29,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,20	77,45	79,7		81,95		84,2		86,45		88,7		3,29,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3,29,02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					650,000,000,00		1,000,000,000,00		700,000,000,00		700,000,000,00		700,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase pengusahaan usaha air tanah (kewenangan provinsi) yang baik dan benar, (Persentase)	NA	10	40	650,000,000,00	50	1,000,000,000,00	60	700,000,000,00	70	700,000,000,00	80	700,000,000,00	3,29,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3,29,03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					8,000,000,000,00		8,000,000,000,00		8,000,000,000,00		8,000,000,000,00		8,000,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Presentase pemegang IUP yang melaksanakan tata kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik (%)	35,2	45,5	65,5	8,000,000,000,00	75,5	8,000,000,000,00	85,5	8,000,000,000,00	95	8,000,000,000,00	95	8,000,000,000,00	3,29,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3,29,05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00		500,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Intensitas energi primer	NA	111.308	113.405	500.000.000	115320	500.000.000	116755	500.000.000	118513	500.000.000	119630	500.000.000	3,29,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3,29,06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00		5,000,000,000,00	
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Konsumsi listrik per kapita	768	696	700,52		991,21		1150,07		1181		1190		3,29,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3,30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					10,277,120,000,00		11,342,000,000,00		12,171,800,000,00		12,916,220,000,00		13,732,343,000,00	
3,30,02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					800,000,000,00		870,000,000,00		942,000,000,00		1,016,200,000,00		1,092,820,000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	85	85	88	800,000,000,00	89	870,000,000,00	90	942,000,000,00	91	1,016,200,000,00	92,5	1,092,820,000,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,30,03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					160,000,000,00		165,000,000,00		170,000,000,00		175,000,000,00		180,000,000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	NA	100	100	160,000,000,00	100	165,000,000,00	100	170,000,000,00	100	175,000,000,00	100	180,000,000,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,30,04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					4,410,000,000,00		4,482,000,000,00		4,674,800,000,00		4,770,020,000,00		4,984,523,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,65	80	80	4,410,000,000,00	90	4,482,000,000,00	90	4,674,800,000,00	95	4,770,020,000,00	95	4,984,523,000,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,30,05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					2,200,000,000,00		2,450,000,000,00		2,700,000,000,00		2,950,000,000,00		3,100,000,000,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (USD Milyar)	2,34	2,34	2,49	2,200,000,000,00	2,49	2,450,000,000,00	2,66	2,700,000,000,00	2,66	2,950,000,000,00	2,84	3,100,000,000,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,30,06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					2,242,120,000,00		2,870,000,000,00		3,140,000,000,00		3,415,000,000,00		3,750,000,000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh darah kabupaten/kota pada UPTD BPSMB	100	100	100	2,242,120,000,00	100	2,870,000,000,00	100	3,140,000,000,00	100	3,415,000,000,00	100	3,750,000,000,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3,30,07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					465,000,000,00		505,000,000,00		545,000,000,00		590,000,000,00		625,000,000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	65	65	66	465,000,000,00	67	505,000,000,00	70	545,000,000,00	72	590,000,000,00	75	625,000,000,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					26,087,164,843,00		28,231,909,085,00		29,409,882,269,00		30,604,073,401,00		31,502,508,718,00	
3,31,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,175,164,843,00		24,097,909,085,00		25,049,882,269,00		26,017,673,401,00		26,687,268,718,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	19,08	70,01	80	22,175,164,843,00	85	24,097,909,085,00	88	25,049,882,269,00	90	26,017,673,401,00	95	26,687,268,718,00	3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85	85	86		86,5		87		87,5		88		3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,15	70,15	70,16		70,17		70,18		70,19		70,2		3,30,3,31,0,00,01 ,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,31,02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3,162,000,000,00		3,314,000,000,00		3,466,000,000,00		3,618,000,000,00		3,770,000,000,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	100	100	100	3,162,000,000,00	100	3,314,000,000,00	100	3,466,000,000,00	100	3,618,000,000,00	100	3,770,000,000,00	3,30,3,31,0,00,01 ,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,31,03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					300,000,000,00		370,000,000,00		444,000,000,00		518,400,000,00		595,240,000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin usaha industri yang diterbitkan	100	100	100	300,000,000,00	100	370,000,000,00	100	444,000,000,00	100	518,400,000,00	100	595,240,000,00	3,30,3,31,0,00,01 ,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,31,04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					450,000,000,00		450,000,000,00		450,000,000,00		450,000,000,00		450,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	100	450,000,000,00	100	450,000,000,00	100	450,000,000,00	100	450,000,000,00	100	450,000,000,00	3,30,3,31,0,00,01 ,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3,32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1,404,000,000,00		1,711,000,000,00		1,904,000,000,00		2,116,000,000,00		2,230,000,000,00	
3,32,02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					257,000,000,00		278,000,000,00		300,000,000,00		328,000,000,00		328,000,000,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	257,000,000,00	100	278,000,000,00	100	300,000,000,00	100	328,000,000,00	100	328,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3,32,03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					619,000,000,00		775,000,000,00		877,000,000,00		929,000,000,00		977,000,000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	18	20	20	619,000,000,00	22	775,000,000,00	25	877,000,000,00	27	929,000,000,00	30	977,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01 ,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera (%)	27,61%	27,61%	30,00%		50,00%		60,00%		75,00%		85,00%		2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3,32,04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					528,000,000,00		658,000,000,00		727,000,000,00		859,000,000,00		925,000,000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0,01	0,12	0,016	528,000,000,00	0,024	658,000,000,00	0,03	727,000,000,00	0,046	859,000,000,00	0,048	925,000,000,00	2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4,01 - SEKRETARIAT DAERAH					245.366.338.530,00		270.626.948.913,00		295.989.538.563,00		304.025.671.026,00		321.973.063.500,00	
4,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					147.027.357.314,00		166.551.434.779,00		185.597.921.111,00		186.683.214.332,00		197.672.775.663,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,68	73,01	74,5	147.027.357.314,00	75,57	166.551.434.779,00	76,6	185.597.921.111,00	77,5	186.683.214.332,00	79,5	197.672.775.663,00	4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	96,6	96,7	96,8		96,9		97		97,1		97,2		4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,05	84,1	84,2		84,33		86,5		86,51		87,33		4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	98,681	98,69	98,7		98,75		98,77		98,8		98,85		4,01,0,00,0,00,01,0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,4	73	74,2		75		76,5		77		78		4,01,0,00,0,00,01,0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,967	85	85,05		85,5		85,9		86		86,1		4,01,0,00,0,00,01,0002 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60,55	70,05	72		73		74		75		77,5		4,01,0,00,0,00,01,0002 - Biro Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	83,333	84,09	84,94		85,78		86,62		87,47		88,31		4,01,0,00,0,00,01,0003 - Biro Perekonomian

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,75	72,3	73,85		75,4		76,95		78,5		80,05		4,01,0,00,0,00,01,0003 - Biro Perekonomian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80,406	80,5	81		82		83		84		85		4,01,0,00,0,00,01,0004 - Biro Administrasi Pembangunan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,06	70,25	72		73		74		75		77,5		4,01,0,00,0,00,01,0004 - Biro Administrasi Pembangunan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	84,444	85	85,5		86		86,5		87		87,5		4,01,0,00,0,00,01,0005 - Biro Umum
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,25	75,25	76		77		78,25		79		79,5		4,01,0,00,0,00,01,0005 - Biro Umum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	82,947	83	84		85		86		88		89		4,01,0,00,0,00,01,0006 - Biro Administrasi Pimpinan
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,01	72	74		76		78		80,01		80,1		4,01,0,00,0,00,01,0006 - Biro Administrasi Pimpinan

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85,167	85,5	86,5		87		87		87,5		88		4,01,0,00,0,00,01 ,0007 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,11	75	76		77		78,25		79		80,01		4,01,0,00,0,00,01 ,0007 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,317	89	89,25		89,5		90		90,25		90,5		4,01,0,00,0,00,01 ,0008 - Biro Hukum
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,8	75	77		78		79		80		81		4,01,0,00,0,00,01 ,0008 - Biro Hukum
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,944	89	90		90,01		90,05		90,07		90,08		4,01,0,00,0,00,01 ,0009 - Biro Organisasi
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,15	80,16	80,2		80,21		80,23		80,24		80,25		4,01,0,00,0,00,01 ,0009 - Biro Organisasi
4,01,02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					3,960,000,000,00		4,752,000,000,00		5,702,400,000,00		6,842,880,000,00		8,211,456,000,00	
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	37	37,01	37,18	3,960,000,000,00	37,25	4,752,000,000,00	37,35	5,702,400,000,00	37,45	6,842,880,000,00	37,55	8,211,456,000,00	4,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Sekretariat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4,01,03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1,550,000,000,00		1,680,183,551,00		2,000,000,000,00		2,509,455,996,00		2,509,455,996,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2,9788	2,979	2,98	1,550,000,000,00	2,985	1,680,183,551,00	2,986	2,000,000,000,00	2,987	2,509,455,996,00	3	2,509,455,996,00	4,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	61,9	62	62,2		62,4		62,6		62,8		63		4,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Sekretariat Daerah
4,01,04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					86,598,975,079,00		90,928,923,833,00		95,475,370,025,00		100,249,138,526,00		105,261,595,452,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	86,598,975,079,00	100	90,928,923,833,00	100	95,475,370,025,00	100	100,249,138,526,00	100	105,261,595,452,00	4,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Sekretariat Daerah
4,01,05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					1,500,000,000,00		1,600,000,000,00		1,700,000,000,00		1,800,000,000,00		1,900,000,000,00	
Meningkatnya Kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase capaian rencana aksi HAM (%)	100	100	100	1,500,000,000,00	100	1,600,000,000,00	100	1,700,000,000,00	100	1,800,000,000,00	100	1,900,000,000,00	4,01,0,00,0,00,01 ,0000 - Sekretariat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (%)	100	100	100		100		100		100		100		4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah
4,01,06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					377,397,600,00		415,137,360,00		456,651,096,00		502,316,207,00		552,547,826,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	377,397,600,00	100	415,137,360,00	100	456,651,096,00	100	502,316,207,00	100	552,547,826,00	4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah
4,01,07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					2,776,608,537,00		3,054,269,390,00		3,359,696,331,00		3,695,665,965,00		4,065,232,563,00	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	100	100	100	2,776,608,537,00	100	3,054,269,390,00	100	3,359,696,331,00	100	3,695,665,965,00	100	4,065,232,563,00	4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4,01,08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1,576,000,000,00		1,645,000,000,00		1,697,500,000,00		1,743,000,000,00		1,800,000,000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1,576,000,000,00	100	1,645,000,000,00	100	1,697,500,000,00	100	1,743,000,000,00	100	1,800,000,000,00	4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah
4,02 - SEKRETARIAT DPRD					168,700,981,933,00		169,544,486,843,00		170,392,209,276,00		175,420,210,323,00		172,100,391,174,00	
4,02,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					79,643,010,102,00		80,041,225,153,00		80,441,431,278,00		85,019,678,435,00		81,247,856,626,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70	71	72	79,643,010,102,00	73	80,041,225,153,00	74	80,441,431,278,00	75	85,019,678,435,00	76	81,247,856,626,00	4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85	97,15	97,15		97,63		98,11		98,6		99,09		4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	80	80,5	81		81,5		82		82,5		83		4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD
4,02,02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					89,057,971,831,00		89,503,261,690,00		89,950,777,998,00		90,400,531,888,00		90,852,534,548,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	89,057,971,831,00	100	89,503,261,690,00	100	89,950,777,998,00	100	90,400,531,888,00	100	90,852,534,548,00	4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD
5,01 - PERENCANAAN					32,196,863,791,00		33,867,855,485,00		35,745,618,112,00		37,139,562,732,00		38,811,264,408,00	
5,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16,294,923,190,00		16,783,770,885,00		17,387,284,012,00		17,705,902,532,00		18,340,079,608,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,5	82	82,5	16,294,923,190,00	83	16,783,770,885,00	83,5	17,387,284,012,00	84	17,705,902,532,00	85	18,340,079,608,00	5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86	86		86		86,5		86,85		87		5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	92,9	93	93,5		94		94,5		95		96		5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5,01,02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					6,017,999,901,00		6,350,144,400,00		7,125,073,700,00		7,440,629,700,00		7,820,629,700,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	97	97	98	6,017,999,901,00	98	6,350,144,400,00	98	7,125,073,700,00	98	7,440,629,700,00	98	7,820,629,700,00	5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	98	98	98		98		98		98		98		5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5,01,03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					9,883,940,700,00		10,733,940,200,00		11,233,260,400,00		11,993,030,500,00		12,650,555,100,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	9,883,940,700,00	100	10,733,940,200,00	100	11,233,260,400,00	100	11,993,030,500,00	100	12,650,555,100,00	5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5,02 - KEUANGAN					1,160,928,761,165,00		1,411,651,163,755,00		1,661,347,123,645,00		1,981,772,109,092,00		2,366,041,956,529,00	
5,02,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					119,511,483,757,00		155,266,297,075,00		156,290,767,217,00		176,267,010,185,00		199,157,577,164,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel					25,995,752,774,00		33,273,394,460,00		37,524,996,099,00		42,144,918,066,00		47,362,020,666,00	5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,11	75,5	76	93,515,730,983,00	78	121,992,902,615,00	80	118,765,771,118,00	81	134,122,092,119,00	81,5	151,795,556,498,00	5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	94,8	94,9	95		95,1		95,2		95,3		95,4		5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86,2	86,4		86,6		86,8		87		87,2		5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	95	95	94,9		95		95,1		95,2		95,3		5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86	86,4		86,6		86,8		87		87,2		5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75,2	75,5		76		76,5		77		77,5		5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah
5,02,02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					1,011,004,189,363,00		1,214,045,585,356,00		1,456,420,057,475,00		1,747,279,165,665,00		2,096,334,241,352,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	84,09	84,09	80	1,007,819,670,924,00	30	1,209,745,127,220,00	30	1,451,415,919,357,00	30	1,741,423,015,271,00	30	2,089,440,741,607,00	5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik	20,18	20,18	20,80		21		21,2		21,5		21,8		5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Pesentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	94,57	94,57	94,65	1,663,019,270,00	95	1,986,240,432,00	95,3	2,384,414,480,00	95,5	2,877,686,319,00	96	3,492,806,998,00	5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penurunan SILPA	-16,17	-16,17	-16,17		-16,17		-16,17		-16,17		-16,17		5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	1,521,499,169,00	100	2,314,217,704,00	100	2,619,723,638,00	100	2,978,464,075,00	100	3,400,692,747,00	5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5,02,03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					6,096,000,000,00		7,010,000,000,00		8,602,000,000,00		9,271,000,000,00		10,662,000,000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	16,71	16,71	16,83	6,096,000,000,00	16,9	7,010,000,000,00	16,92	8,602,000,000,00	16,95	9,271,000,000,00	17	10,662,000,000,00	5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
5,02,04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					24,317,088,045,00		35,329,281,324,00		40,034,298,953,00		48,954,933,242,00		59,888,138,013,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan PAD	0,01	-6,66	4,49	20,188,563,351,00	1,02	26,411,091,700,00	2,24	32,424,329,638,00	2,17	39,822,970,063,00	2,12	48,929,782,198,00	5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	447,741,082,00	100	1,660,857,484,00	100	1,993,028,981,00	100	2,391,634,778,00	100	2,869,961,733,00	5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	75	75,5	76	3,680,783,612,00	76,5	7,257,332,140,00	77	5,616,940,334,00	77,5	6,740,328,401,00	100	8,088,394,082,00	5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah
5,03 - KEPEGAWAIAN					18,825,614,703,80		22,569,281,745,34		23,142,205,503,26		24,848,770,824,52		27,193,434,033,79	
5,03,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16,035,630,320,00		19,389,193,352,00		19,803,112,687,00		21,343,423,956,00		23,477,766,352,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	93,5	93,7	94	16,035,630,320,00	94,5	19,389,193,352,00	95	19,803,112,687,00	95,5	21,343,423,956,00	96	23,477,766,352,00	5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86,4	87		87,5		88		88,5		89		5,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,81	79,35	79,8		80,5		81		81,5		82		5,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
5,03,02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2,789,984,383,80		3,180,088,393,34		3,339,092,816,26		3,505,346,868,52		3,715,667,681,79	
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN dan Produktifitas ASN	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Pengadaan (%)	85	86	87	2,789,984,383,80	88	3,180,088,393,34	89	3,339,092,816,26	90	3,505,346,868,52	90	3,715,667,681,79	5,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (%)	90,75	91,25	93,75		93,75		93,75		93,75		93,75		5,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Pengembangan Karir (%)	31,25	35	35		45,58		56,92		64,92		72,92		5,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Badan Kepegawaian Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Promosi dan Mutasi (%)	50	66,25	66,25		70		73,25		75,5		81,25		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Manajemen Kinerja (%)	75	75	75		75		75		77,5		81,25		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Penggajian Penghargaan dan Disiplin (%)	87,5	87,5	87,5		87,5		87,5		87,5		87,5		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (%)	87,5	87,5	87,5		87,5		87,5		87,5		87,5		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Sistem Informasi (%)	62,5	66,67	66,67		70		73,75		77,5		81,25		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN (%)	87,24	88	90		92		94		96		98		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	63,9	65	66,25		70,62		75		79,37		83,75		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	81,8	83,33	80		82,5		85		87,5		90		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
	Presentase Pegawai ASN yang Disiplin (%)	100	100	100		100		100		100		100		5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah
5,04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					32,500,000,000,00		32,500,000,000,00		32,500,000,000,00		32,500,000,000,00		32,500,000,000,00	
5,04,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24,000,000,000,00		24,000,000,000,00		24,000,000,000,00		24,000,000,000,00		24,000,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,56	73,6	75	24,000,000,000,00	80	24,000,000,000,00	80,5	24,000,000,000,00	81	24,000,000,000,00	81,5	24,000,000,000,00	5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80	80,5	81		81,5		82		82,5		83		5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	35	70,01	70,5		71		71,5		72		72,5		5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,04,02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8,500,000,000,00		8,500,000,000,00		8,500,000,000,00		8,500,000,000,00		8,500,000,000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional, kompetensi teknis, sera sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	0,63	0,64	0,7	8,500,000,000,00	0,8	8,500,000,000,00	0,9	8,500,000,000,00	1	8,500,000,000,00	1,1	8,500,000,000,00	5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	3,78	3,79	3,8		3,9		4		4,1		4,2		5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5,37	5,4	5,5		5,6		5,7		5,8		6		5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5,05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					29,404,850,000,00		32,816,500,000,00		33,676,450,000,00		35,361,140,000,00		38,164,390,000,00	
5,05,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					14,430,250,000,00		15,159,000,000,00		15,327,250,000,00		16,801,000,000,00		17,244,250,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang priima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	94,3	94,5	94,7	14,430,250,000,00	94,9	15,159,000,000,00	95	15,327,250,000,00	95,1	16,801,000,000,00	95,2	17,244,250,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	80	81	82		82,5		82,6		82,7		82,8		5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,65	70,01	70,02		70,03		70,04		70,05		7006		5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5,05,02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					13,724,600,000,00		16,267,500,000,00		16,819,200,000,00		16,890,140,000,00		19,110,140,000,00	
Meningkatnya hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	75	75	76	10,407,300,000,00	77	12,478,750,000,00	78	12,737,600,000,00	79	12,744,570,000,00	80	14,485,070,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	20	22	24	400,000,000,00	26	450,000,000,00	28	500,000,000,00	29	550,000,000,00	30	600,000,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan	20	25	30	200,000,000,00	35	235,000,000,00	40	237,500,000,00	45	245,000,000,00	50	275,000,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Daerah (Persentase)													
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan , pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	50	51	2,717,300,000,00	52	3,103,750,000,00	53	3,344,100,000,00	54	3,350,570,000,00	55	3,750,070,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5,05,03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1,250,000,000,00		1,390,000,000,00		1,530,000,000,00		1,670,000,000,00		1,810,000,000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	20	25	30	200,000,000,00	35	220,000,000,00	40	240,000,000,00	45	260,000,000,00	50	280,000,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	60	65	66	200,000,000,00	67	220,000,000,00	68	240,000,000,00	70	260,000,000,00	71	280,000,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	30	40	400,000,000,00	45	450,000,000,00	47	500,000,000,00	48	550,000,000,00	50	600,000,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	50	60	450,000,000,00	65	500,000,000,00	70	550,000,000,00	75	600,000,000,00	80	650,000,000,00	5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah
5,07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					32,747,000,000,00		37,659,000,000,00		43,308,000,000,00		45,782,900,000,00		57,275,000,000,00	
5,07,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					29,809,000,000,00		34,280,000,000,00		39,422,000,000,00		45,336,000,000,00		52,136,000,000,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang priima dan akuntabel	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	8	70,01	71	29,809,000,000,00	72	34,280,000,000,00	73	39,422,000,000,00	74	45,336,000,000,00	75	52,136,000,000,00	5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	83,72	83,8	84		84,05		84,1		84,15		84,2		5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah
	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,4	70,7	70,75		70,8		70,85		70,9		70,95		5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah
5,07,02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					2,938,000,000,00		3,379,000,000,00		3,886,000,000,00		446,900,000,00		5,139,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya pelayanan penghubung	Persentase pelayanan penghubung yang optimal (%)	66,7	71,7	76,7	2,938,000,000,00	80	3,379,000,000,00	82,5	3,886,000,000,00	84	446,900,000,00	86,5	5,139,000,000,00	5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah
6,01 - INSPEKTORAT DAERAH					49,392,926,817,00		48,695,759,299,00		49,351,337,412,00		48,874,092,776,00		49,774,959,471,00	
6,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38,594,019,517,00		37,733,359,909,00		38,255,582,496,00		37,716,167,395,00		38,451,489,399,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	81,7	82	38,594,019,517,00	82,5	37,733,359,909,00	83	38,255,582,496,00	83,5	37,716,167,395,00	84	38,451,489,399,00	6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	98,4	98,45	98,5		98,55		98,6		98,65		98,7		6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	83,806	85,3	85,5		85,6		85,7		86		86,3		6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6,01,02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					8,402,248,000,00		8,528,281,640,00		8,623,593,870,00		8,750,338,213,00		8,880,912,634,00	
Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektur Pembantu I	85,6	85,6	86	8,402,248,000,00	86,5	8,528,281,640,00	87	8,623,593,870,00	88	8,750,338,213,00	90	8,880,912,634,00	6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektur Pembantu II	85,6	85,6	86		86,5		87		88		90		
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektur Pembantu III	85,6	85,6	86		86,5		87		88		90		
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektur Pembantu IV	85,6	85,6	86		86,5		87		88		90		
	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	75	75	77		80		83		85		100		
	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	80	80	87		90		95		97		100		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6,01,03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2,396,659,300,00		2,434,117,750,00		2,472,161,046,00		2,407,587,168,00		2,442,557,438,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan & Asistensi	Persentase hasil pendampingan/asistensi Inpektur Pembantu I yang ditindaklanjuti	100	100	100	2,396,659,300,00	100	2,434,117,750,00	100	2,472,161,046,00	100	2,407,587,168,00	100	2,442,557,438,00	6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi
	Persentase hasil pendampingan/asistensi Inpektur Pembantu II yang ditindaklanjuti	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase hasil pendampingan/asistensi Inpektur Pembantu III yang ditindaklanjuti	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase hasil pendampingan/asistensi Inpektur Pembantu IV yang ditindaklanjuti	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase hasil pendampingan/asistensi Inpektur Pembantu Khusus yang ditindaklanjuti	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase kebijakan bidang pengawasan yang ditetapkan	100	100	100		100		100		100		100		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8,01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					124,035,000,000,00		127,761,000,000,00		33,619,000,000,00		36,893,000,000,00		40,264,000,000,00	
8,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10,100,000,000,00		11,100,000,000,00		12,200,000,000,00		13,400,000,000,00		14,700,000,000,00	
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,75	72,25	72,5	10,100,000,000,00	73	11,100,000,000,00	74	12,200,000,000,00	75	13,400,000,000,00	80	14,700,000,000,00	8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	85	86	87		88		89		90		91		8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	58,8	70	71		72		73		74		75		8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8,01,02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					7,600,000,000,00		8,450,000,000,00		9,200,000,000,00		10,200,000,000,00		11,240,000,000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	76	77	78	7,600,000,000,00	79	8,450,000,000,00	80	9,200,000,000,00	81	10,200,000,000,00	82	11,240,000,000,00	8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8,01,03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					7,150,000,000,00		7,865,000,000,00		8,650,000,000,00		9,515,000,000,00		10,467,000,000,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	7,150,000,000,00	100	7,865,000,000,00	100	8,650,000,000,00	100	9,515,000,000,00	100	10,467,000,000,00	8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8,01,04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					97,000,000,000,00		98,000,000,000,00		1,100,000,000,00		1,200,000,000,00		1,250,000,000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	90	91	92	97,000,000,000,00	93	98,000,000,000,00	94	1,100,000,000,00	95	1,200,000,000,00	96	1,250,000,000,00	8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8,01,05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					660,000,000,00		726,000,000,00		799,000,000,00		878,000,000,00		887,000,000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	75	76	77	660,000,000,00	78	726,000,000,00	79	799,000,000,00	80	878,000,000,00	81	887,000,000,00	8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8,01,06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1,525,000,000,00		1,620,000,000,00		1,670,000,000,00		1,700,000,000,00		1,720,000,000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	78	78,5	79	1,525,000,000,00	79,5	1,620,000,000,00	80	1,670,000,000,00	80,5	1,700,000,000,00	81	1,720,000,000,00	8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/ kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Guna mengukur ki nerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4-2 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi

No	Indikator Pembangunan	Target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,65-5,00	4,80 - 5,40	4,95 - 5,50	5,10 - 5,6	6,25 - 7,0	5,25 - 5,50
2	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	92,2	96,53	108,48	123,05	132,70	140,68
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,30 – 6,80	6,25 - 6,76	5,9 - 6,5	4,98-5,75	3,66-4,66	3,65-4,63
5	Rasio Gini	0,337 – 0,341	0,330 – 0,337	0,318 – 0,325	0,314 -0,318	0,311-0,315	0,311-0,315
6	Indeks Modal Manusia	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	78,5	80,76	83,58	86,14	86,55	88,70
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,71	73,92	74,13	74,34	74,56	74,77
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,27 – 4,38	4,20-4,35	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65 - 4,00

Tabel 4-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2024)	Target						Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (78,88)	BB (79,00)	BB (79,5)	A (80,01)	A (81,0)	A (82,0)	A (83,0)	A (83,0)
2	Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,42	3,47	3,58	3,76	3,85	3,99	3,99
3	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	42,3**	50,80	51,23	51,67	52,10	52,53	52,65	52,65

Dipindai dengan CamScanner

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2024)	Target						Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	4,65-5,00	4,80 - 5,40	4,95 - 5,50	5,10 - 5,6	6,25 - 7,0	5,25 - 5,50	5,25 - 5,50
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	4,27- 4,38	4,20-4,37	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65 - 4,00	2,65 - 4,00
6	Indeks Ketahanan Pangan	74,94	75,10	76,94	77,5	78,5	79,50	80,50	80,50
7	Indeks Inovasi Daerah	58,59	58,75	58,89	59,00	59,25	60,10	61	61
8	Tingkat Kemiskinan	7,1	6,30 – 6,80	6,25 - 6,76	5,9 - 6,5	4,98-5,75	3,66-4,66	3,65-4,63	3,65-4,63
9	Indeks Ekonomi Hijau	57,92**	61,39	63,65	65,54	66,46	68,55	68,60	68,60
10	Indeks Ekonomi Biru	14,03*	15,26	15,35	16,26	17,27	18,29	19,01	19,01
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,15*	73,71	73,92	74,13	74,34	74,56	74,77	74,77
12	Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	77,27*	78,5	80,76	83,58	86,14	86,55	88,70	88,70
13	Indeks Modal Manusia	0,54*	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,6

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Tabel 8.3 berikut adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi .

Tabel 4-4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,94	75,10	76,94	77,5	78,5	79,50	80,50	80,50
1.2	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	82,16	82,25	82,56	82,76	82,96	83,16	83,36	83,56
1.3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak	%	83,04	83,14	83,25	83,8	84	84,15	84,5	84,5

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	NA	0,562	0,565	0,57	0,575	0,58	0,585	0,585
1.5	Kualitas Lingkungan Hidup: a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	68,15*	73,71	73.92	74.13	74.34	74.56	74,77	74,77
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	NA	12	12,5	13	14	15	16	16
	c. Pengelolaan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	NA	28	30	35	40	45	47	47
	d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% RT	NA	34	38	42	47	50	53	53
1.6	Ketahanan energi, air dan pangan									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Ketahanan energi									
	- Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/Kapita	768	696	700,52	991,21	1150,07	1181	1190	1190
	- Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	111.308	113.405	115.320	116.755	118.513	119.630	119.630
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernurishment*)	%	10,58	11,48	10,45	9,75	8,98	7,99	7,84	7,84
	c. Ketahanan air - Kapasitas tampungan air	M3/kapita	NA	696	855	1105	1325	1513	1550	1550
1.7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	NA	34,66	38,75	42,50	45,00	48,00	50,00	50,00

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8	Indeks Risiko Bencana	Indeks	138,02	122,51	121,14	120,64	119,24	118,64 - 114,86	118,25 – 114,50	118,25 – 114,50
1.9	Persentase penurunan emisi GRK									
	a. Kumulatif	%	NA	20,63	21,45	22,63	23,74	25,31	25,56	25,56
	b. Tahunan	%	NA	36,51	40,25	43,86	47,50	50,88	51,50	51,50
1.10	Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	%	77,27*	78,5	80,76	83,58	86,14	86,55	88,70	88,70
1.11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,30	1,20	1,15	1,12	1,10	1,09	1,08	1,08
1.12	Rasio penduduk	%	103,4	103,2	102,39	102,17	101,95	101,73	101,50	101,50
1.13	Kepadatan penduduk	Orang/km2	75,94	76,87	77,93	78,98	80,03	81,08	82,13	82,13
1.14	Persentase kepemilkan NPWP	%		43,44	43,49	44,02	44,31	44,8	44,9	44,9
1.15	Indeks lansia Tangguh (Indeks	Indeks	58	61,25	61,5	61,75	62	62,25	62,3	62,3

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lansia Berdaya)									
1.16	Nett recent migration rate	Angka	-0,11	-0,52	-0,52	-0,52	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
2.1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,51	4,65 – 5,00	4,80 - 5,40	4,95 - 5,50	5,10 - 5,6	6,25 - 7,0	5,25 - 5,50	5,25 - 5,50
2,2	Tingkat Kemiskinan	%	7,1	6,30 – 6,80	6,25 - 6,76	5,9 - 6,5	4,98-5,75	3,66-4,66	3,65-4,63	3,65-4,63
2.3	PDRB Perkapita	juta rupiah perkapita per tahun	86,72	92,2	96,53	108,48	123,05	132,70	140,68	140,68
2.4	Rasio Gini	-	0,321	0,337-0,341	0,330 – 0,337	0,318 – 0,325	0,314 -0,318	0,311-0,315	0,311-0,315	0,311-0,315
2.5	Cakupan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan	%	39,52 (agustus 2024)	37,19	40,51	45,09	48,66	50,61	52,01	52,01
2.6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	63	67	71	75	79	83	87.00	87.00
2.7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54*	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,6

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,8	86,9	87	87,25	87,5	87,75	88,25	88,25
2.9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,06	74,14	74,25	74,50	74,94	75,18	75,45	75,45
2.10	Angka kematian ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	68,4	130	120	110	100	84	83	83
2.11	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	19,60**	12,62	12,21	11,75	10,99	9,96	9,89	9,89
2.12	Rata-rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	8,9	9,38-9,4	9,5	9,60	9,76	9,86-9,89	9,93	9,93
2.13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	13,25-13,26	13,30-13,31	13,36-13,37	13,42-13,43	13,5 – 13,51	13,61– 13,62	13,61– 13,62
2.14	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	%	11,84	11,84	11,85	11,87	11,90	11,93	12,0	12,0
2.15	Kasus kematian Balita (AKABA)	Jumlah kematian	5,79	5,69	5,59	5,49	5,39	5,29	5,29	304

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,1	11,9	11,5	11,0	10,25	9,3	9,1	9,1
2.17	Prevalensi wasting pada balita	%	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,10	6,0	6,0
2.18	Insidensi tubercolusis (per 100.000 penduduk)									
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	64	85	85	85	85	85	85	85
	b. Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment succes rate)	%	87	95	95	95	95	95	95	95
2.19	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	92,30	98,6	98,7	98,8	98,9	99	100	100

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.20	hasil pembelajaran: - persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) literasi membaca	%	NA	9,09-9,09	9,09-9,09	9,09-18,18	9,09-18,18	18,18-27,27	27,27-36,36	27,27-36,36
	b) numerasi	%	NA	0,00-9,09	0,00-9,09	0,00-9,09	9,09-18,18	9,09-18,18	18,18-27,27	18,18-27,27
	- persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:									
	a) literasi membaca	%	NA	39,64-42,14	40,80-43,25	41,91-44,99	43,00-46,20	44,92-47,42	45,25-48,75	45,25-48,75
	b) numerasi	%	NA	34,30-36,80	35,30-37,80	36,30-38,80	37,30-39,80	38,30-40,80	39,00-41,25	39,00-41,25
2.21	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	%	32,0	33,94	35,24	36,55	37,85	39,15	40,0	40,0

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.22	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	NA	10,21	10,21-10,30	10,21-10,40	10,21-10,50	10,21-10,58	10,25-10,60	10,25-10,60
2.23	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	NA	70,9	72,0	73,20	74,90	76,46	77,50	77,50
2.24	Persentase penduduk bersertifikat keahlian	%		11,84	11,85	11,87	11,9	11,93	11,94	11,94
2.25	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	NA	3600	3700	3850	4000	4200	4200	4200

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.26	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	unit	NA	7	8	9	10	12	12	12
2.27	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	%	NA	27	28,5	30,02	32,3	34,75	34,9	34,9
2.28	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	5	10	15	20	25	30	35	35
2.29	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	%	64,24	80	90	90	90	90	90	90
2.30	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	8	8	9	10	10	10	11	11
2.31	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	perizinan									
2.32	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.33	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabag yang memenuhi ketentuan perizinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	4,27- 4,38	4,20-4,37	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65 - 4,00	2,65 - 4,00
2.35	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	NA	43	45	47	49	51,4	52	52
2.36	Persentase pekerja informal	%		54,57	54,52	54	53,75	53,3	53,2	53,2
2.37	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	51,17	52,60-54,52	52,80-54,80	53,00-55,35	53,22-55,80	53,58-56,46	53,75-56,75	53,75-56,75
2.38	Indeks kerukunan	Indeks	69,24	69,25-69,50	69,36-69,55	69,45-69,75	69,70-69,98	70,00-70,45	70,58-71,54	70,58-71,54

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umat Beragama									
2.39	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,92*	60,15-60,23	60,73-60,85	61.29-61.44	61,83-62.02	62,38-62,6	62,7-63,0	62,7-63,0
2.40	Indeks perlindungan anak (IPA)	indeks	76.12	80,00	84.24	88.62	93.23	93.23	93.23	93.23
2.41	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	NA	77,23	77,80	78,35	78,90	79,46	79,83	79,83
2.42	Indeks Ketimpangan Gender(IKG)	Indeks	0,528	0,514	0.504	0.489	0.469	0.467	0.465	0.465
2.43	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	Indeks	84,70	85,20	85,70	86,20	86,70	87,20	88,0	88,0
2.44	Indeks Pembangunan Gender(IPG)	Indeks	89.29	89,40	89.59	89.60	89.61	89.62	89.63	89.63
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
3.1	Nilai Tukar Petani	-	156,1	156,7	157,4	158,4	160,4	162,4	164,4	164,4

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	47,46	48,01	48,52	48,84	48,98	49,30	49,38	49,38
3.3	Rasio ketergantungan	-	31,06	45,40	45,42	45,62	45,83	46,06	46,30	46,30
3.4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	-	9,77	10,1	10,1	10,0	10,0	9,99	9,99	9,99
3.5	Rasio PDRB penyediaan akomodasi Makan dan Minum	%	1,10	1,21	1,22	1,23	1,24	1,26	1,27	1,27
3.6	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu orang	NA	5,66	5,90	5,45	6,02	6,80	6,91	6,91
3.7	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)	%	NA	2,87	2,93	2,99	3,02	3,08	3,09	3,09
3.8	Rasio kewirausahaan	-	NA	5,35	5,40	5,47	5,59	5,75	5,84	5,84
3.9	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	NA	0,71	0,72	0,74	0,76	0,78	0,79	0,79

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10	*Return on Asset (ROA)* BUMD	%	NA	3,37	3,42	3,47	3,50	3,54	3,56	3,56
3.11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,59	58,75	58,89	59,00	59,25	60,1	61	61
3.12	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	57,92**	61,39	63,65	65,54	66,46	68,55	68,60	68,60
3.13	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	14,03*	15,26	15,35	16,26	17,27	18,29	19,01	19,01
3.14	Porsi EBT Dalam Bauran Energi	%	24	30,62	33,41	36,2	39	42,07	44,58	44,58
3.15	Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi	Indeks	42,3**	50,80	51,23	51,67	52,10	52,63	52,65	52,65
3,16	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,92*	5,9	6,1	6,27	6,5	6,8	6,85	6,85
3.17	Rasio pajak daerah terhadap PDRB		0,57	1,2	1,24	1,29	1,33	1,38	1,425	1,425
3.18	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	16,32	17,0	18,0	19,0	19,79	20,0	20,0
3.19	Aset Dana	%	NA	0,08	0,082	0,085	0,088	0,09	0,092	0,092

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pensiun/PDRB									
3.20	Nilai transaksi saham per kapita per provinsi	Rupiah	NA	4.219.124,01	5.300.125	6.355.400	7.453.500	8.542.116,56	8.900.250	8.900.250
3.21	Total Kredit/PDRB	%	NA	18,0	18,7	19,3	20,0	21,3	21,5	21,5
3.22	Tingkat inklusi keuangan Provinsi	%	85*	91,35	91,86	92,50	93,10	93,72	94,25	94,25
3.23	Pembentukan Modal tetap Bruto	%	21,69	19,1	18,79	18,48	18,17	17,86	17,55	17,55
3.24	Ekspor Barang dan Jasa	%	29,27	17,9	18,11	18,32	18,53	18,74	18,95	18,95
3.25	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	2,38	2,5	2,56	2,62	2,67	2,73	2,79	2,79
3.26	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	66,21	68,84	70,39	71,95	73,51	75,07	76,63	76,63
3.27	Persentase Desa Mandiri	%	9,97	26,10	26,91	27,51	27,99	28,01	28,50	28,50
3.28	Tingkat Inflasi	%	1,43	3,1-3,7	3,0-3,7	2,9-3,7	2,5-3,7	1,6-3,7	1,5-3,5	1,5-3,5

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29	Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan	%	4,25	5,5	5,60	6,00	7,01	8,10	8,10	8,1
3.30	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	10,1	10,0	9,8	9,7	9,5	9,5	9,5
3.31	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	2,46	2,63	2,92	3,24	3,65	4,11	4,25	4,25
3.32	Indeks Zakat Nasional	indeks	0,5	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,68
3.33	Jumlah produk tersertifikasi halal Provinsi	Produk	13.367	17.257	17.321	17.378	17.429	17.458	17.486	17.486
ASPEK PELAYANAN UMUM										
4.1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	NA	41,15	42,42	43,69	44,96	46,23	47,5	47,5
4.2	Indeks SPBE	Indeks	3,05	3,85	4,0	4,20	4,41	4,63	4,85	4,85

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B (3,67)	3,33	3,35	3,39	3,42	3,45	3,50	3,50
4.4	Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas (SPI))	Indeks	65,36	73,97	73,99	74,55	75,7	77	77,75	77,75
4.5	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Indeks Demokrasi Indonesia	%	74,47	77,72-80,97	77,90-81,0	78,01-81,25	78,25-81,46	78,43-81,68	85	85
4.7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	65,56	65,56	66,43	67,31	68,17	69,04	69,905	69,905
4.8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,38	3,42	3,47	3,58	3,76	3,85	3,99	3,99
INDIKATOR KINERJA KUNCI										

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fokus Pelayanan Urusan Wajib										
1	*Kesehatan*									
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar	%	74,0	75,0	78,0	82,0	86,0	91,0	95,0	95,0
1.1	Persentase RS terakreditasi paripurna	%	70,45	71,50	72,72	79,54	81,81	84,09	86,36	86,36
1.2	Persentase FKTP yang terakreditasi minimal Utama	%	87,98%		91,35%	93,75%	96,15%	98,56%	99,04%	99,04%
1.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Persentase Fasyankes yang terakreditasi paripurna	%	32,69	32,69	32,69	32,69	40,87	45,67	45,67	60%
1.6	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio	1,26		1,27	1,28	1,29	1,3	1,31	1,32
1.7	Rasio Puskesmas per Kecamatan	Rasio	98,61		98,61	99,31	99,31	100	100	100
1.8	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	*Pendidikan*									
2.1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam	%	71,97%	72,31	72,65%	72,99%	73,33%	73,67%	74,01%	74,01%

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendidikan menengah									
2.2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	59,78%	67,82	75,87%	76,96%	78,05%	79,14%	80,23%	80,23%
2.3	Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	nilai	70,1	70,70	71,3	71,9	72,5	73,1	73,7	73,7
2.4	Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	nilai	60,05	61,65	63,25	64,85	66,45	68,05	69,65	69,65
2.5	Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional	nilai	64,73	66,03	67,33	68,63	69,93	71,23	72,53	72,53
2.6	Rata-rata kompetensi numerasi SMK	nilai	56,19	58,39	60,59	62,79	64,99	67,19	69,39	69,39

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	berdasarkan asesmen nasional									
2.7	Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	nilai	60,42	62,02	63,62	65,22	66,82	68,42	70,02	70,02
2.8	Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	nilai	55,53	56,03	56,53	57,03	57,53	58,03	58,53	58,53
2.9	Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	nilai	57,69	58,19	58,69	59,19	59,69	60,19	60,69	60,69
2.10	Rata-rata kompetensi numerasi SDLBberdasarkan asesmen nasional	nilai	54,07	54,67	55,27	55,87	56,47	57,07	57,67	57,67
2.11	Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	nilai	53,65	53,80	54,05	54,3	54,55	54,8	55,05	55,05

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12	Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	nilai	57,91	58,41	58,91	59,41	59,91	60,41	60,91	60,91
2.13	Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	81,60%	83,66	85,72%	87,77%	89,83%	91,89%	93,95%	93,95%
2.14	Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	74,48	75,02	75,94%	76,86%	77,78%	78,70%	80,00%	80,00%
2.15	Iklim keamanan SMA	nilai	70,95	80,05	81,25	82,45	83,65	84,85	86,05	86,05
2.16	Iklim keamanan SMK	nilai	67,46	68,66	69,86	71,06	72,26	73,46	74,66	74,66
2.17	Iklim keamanan SDLB	nilai	74,38	74,88	75,38	75,88	76,38	76,88	77,38	77,38
2.18	Iklim keamanan SMPLB	nilai	64,08	65,28	66,48	67,68	68,88	70,08	71,28	71,28
2.19	Iklim keamanan SMALB	nilai	69,18	70,48	71,78	73,08	74,38	75,68	76,98	76,98
2.20	Iklim kebinekaan SMA	nilai	71,08	72,08	73,08	74,08	75,08	76,08	77,08	77,08

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21	Iklim kebinekaan SMK	nilai	68,65	69,95	71,25	72,55	73,85	75,15	76,45	76,45
2.22	Iklim kebinekaan SDLB	nilai	65,23	66,23	67,23	68,23	69,23	70,23	71,23	71,23
2.23	Iklim kebinekaan SMPLB	nilai	66,62	68,42	70,22	72,02	73,82	75,62	77,42	77,42
2.24	Iklim kebinekaan SMALB	nilai	68,82	70,82	72,82	74,82	76,82	78,82	80,82	80,82
2.25	Iklim inklusivitas SMA	nilai	58,85	60,35	61,85	63,35	64,85	66,35	67,85	67,85
2.26	Iklim inklusivitas SMK	nilai	55,33	57,63	59,93	62,23	64,53	66,83	69,13	69,13
2.27	Iklim inklusivitas SDLB	nilai	64,31	65,61	66,91	68,21	69,51	70,81	72,11	72,11
2.28	Iklim inklusivitas SMPLB	nilai	62,62	64,02	65,42	66,82	68,22	69,62	71,02	71,02
2.29	Iklim inklusivitas SMALB	nilai	63,18	64,78	66,38	67,98	69,58	71,18	72,78	72,78
3	*Sosial*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	KPM	1025	500	500	500	500	500	500	2500
3.2	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	1337	550	550	550	500	500	578	4015
3.3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	25	30	35	35	35	40	48	193
3.4	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.5	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
3.6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
3.7	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
3.8	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3.9	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	*Trantibum dan Perlindungan Masyarakat*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	*PU dan Penataan Ruang*									
5.1	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	62,49	63,5	67,14	68,4	68,8	69	69,85	69,85
5.2	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	74,7	74,9	75,2	76,8	77,15	78,4	79,5	79,5

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.3	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	160	160	160	160	160	160	160	160
5.4	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50
5.5	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.7	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.8	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.9	Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi	Dokumen	7	-	3	1	-	-	-	11
5.10	Jumlah rancangan Perda RTRW kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda	Dokumen	2	-	3	1	-	-	-	4
5.11	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	-	-	1	1	1	-	-	3

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.12	Jumlah laporan kebutuhan PPNS penataan ruang di daerah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1
6	*Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*									
6.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	*Tenaga Kerja*									
7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	4,27- 4,38	4,20-4,37	3,89-4,31	3,55-4,20	2,78-4,07	2,65 - 4,00	2,65 - 4,00

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker	%	41	41	42	43	44	45	46	46
7.3	Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan	%	15,76	15,76	15,8	15,82	15,84	15,86	15,88	15,88
7.4	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya	orang	1350	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1600
7.5	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	orang	2027	2027	3000	3500	4000	4500	5000	5000
7.6	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online	%	68	68	69	70	71	72	73	73

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	98,6	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99,1	99,1
8	*Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*									
8.1	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.2	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	nilai	700	700	701	720	750	780	800	800
8.3	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	55	57	60	70	80	85	90	90
8.4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	layanan komprehensif									
9	*Pangan*									
9.1	Persentase pemenuhan cadangan pangan ideal	%	66,96	66,96	73,57	80,18	86,78	93,29	100	100
9.2	Skor PPH	%	93,1*	93,4	93,7	94,0	94,3	94,6	95,0	95,0
9.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	20,58	17,38	15,78	14,18	12,58	10,98	9,38	9,38
9.4	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	86,42	86,5	86,5	87	87,5	88	88,5	88,5
10	*Pertanahan*									
10.1	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan	%	0	0	33,33	50	66,67	83,33	100	100

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umum									
10.2	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	0	0	33,33	50	66,67	83,33	100	100
11	*Lingkungan Hidup*									
11.1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,538	0,556	0,589	0,612	0,624	0,632	0,640	0,640
11.2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	25	50	50.5	51	51.5	52	52
12	*Administrasi Kependudukan dan Capil*									
12.1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.4	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.5	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.6	Persentase Kartu Indetitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	14
13	*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*									
13.1	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	149	149	149	185	222	324	427	427
13.2	Jumlah BPD yang Mengimplementasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	BPD	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
13.3	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	orang	5,137	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.982	7,119

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.4	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Digital	Desa	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
13.5	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	989	1.131	1.131	1.201	1.272	1.343	1.414	1414
13.6	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	%	6,08%	5,88%	5,88%	5,68%	5,48%	5,28%	5,08%	5.08%
13.7	Persentase BUM Desa Maju	%	0,31	1,91	1,91	3	7	12	17	17
14	*Pengendalian Penduduk dan KB*									
14.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	63,66	65,36	67,06	68,76	70,46	72,16	74,00	74,00

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun	22,40	22,10	22,00	21,90	21,80	21,80	21,76	21,76
14.3	Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)	Rata-rata anak per wanita	2,25	2,22	2,21	2,2	2,19	2,19	2,19	2,19
14.4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,48	68,48	70,48	72,48	74,48	76,48	77,21	77.21
14.5	Persentase kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	%	89,30	89,80	90,20	90,60	91,10	91,50	91,60	91,60
14,6	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	13,10	7,82	7,55	7,34	7,13	6,92	6,85	6,85
15	*Perhubungan*									
15.1	On time Performance	%	93	93	94	95	96	97	98	98

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Layanan transportasi									
15.2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0.5874	0,588	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.63
15.3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi	%	75	75	76	77	78	79	80	80
15.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Managemen keselamatan	Unit	27	27	28	29	30	31	32	33
15.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Rasio	76,78	76,8	76,9	77	78	79	80	80
16	*Komunikasi dan Informasi*									
16.1	Indeks Komunikasi Pembangunan dan	Indeks	NA	71	72	73	74	75	76	76

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Informasi Publik									
16.2	Indeks SPBE	Indeks	3,05	3,85	4,0	4,20	4,41	4,81	4,85	4,85
16.3	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	1	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
16.4	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	50	55	60	70	80	90	95	95
16.5	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	%	91.12	91.12	91.12	91.12	91.12	91.12	92	92

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemerintah daerah									
16.6	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.7	Persentase ASN Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	50	55	60	65	70	75	80	85
16.8	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival	%	57.89	63	69	72	75	78	81	81

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KIM,Bintek,pelatihan)									
16.9	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.10	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.11	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16.12	Persentase Kabupaten/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	18,18	30	50	70	80	100	100

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.13	Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)	%	2.95	50	75	80	85	90	95	95
16.14	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	62.5	64	66	69	72	75	78	78
16.15	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet A yang disediakan oleh Dinas	%	0	20	40	50	60	70	80	80
16.16	Nilai Pemerintah Indeks Transformasi Digital	nilai	NA	54,05	54,95	55,85	56,75	57,65	58,5	58,5
17	*Koperasi dan UKM*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	24,56	25,5	26,5	28.5	30.5	33	35	35
17.2	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	24,96	26,5	28,82	32,69	36,55	40,41	44,28	44,28
17.3	Pertumbuhan Wirausaha	%	4	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5
18	*Penanaman Modal*									
17.1	Realisasi PMDN	Rp. Trilyun	9,94	9,99	10,14	10,34	10,55	10,87	11,19	11,19
17.2	Realisasi PMA	Rp. Trilyun	1,63	1,64	1,66	1,70	1,73	1,74	1,79	1,79
19	*Kepemudaan dan Olahraga*									
19.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosialisasi Kemasyarakatan	%	0.486	0,598	0.728	0.736	0.743	0.75	0.758	0.758

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	0.016	0,019	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.136
19.3	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.025
19.4	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	kegiatan	11	11	11	11	11	11	11	11
20	*Statistik*									
20.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,6	2,75	3,0	3,5	4	4,5	5	5
21	*Persandian*									
21.1	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	orang	1	1	1	1	1	1	1	8

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.2	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	orang	1	1	1	1	1	1	1	5
20.3	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	36,38%	60%	65%	70%	72%	74%	75%	75%
20.4	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	2	1	1	1	1	1	1	5
22	*Kebudayaan*									
22.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	28	29	31	34	37	40	43	43

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	Persentase pemduduk usia 10 tahun keatas yang mengujungi peninggalan sejarah	%	2,7	2,8	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	4,7
22.3	Persentase pemduduk usia 10 tahun keatas yang pernh terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	4,6	4,7	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,1
22.4	Persentase rumah tangga yang menyelengarakan upacara adat	%	19	19,5	20	21	22	23	24	24
22.5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	8	5	5	5	5	5	5	33
22.6	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung	unit	4,6	4,7	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,1

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kegiatan seni									
23	*Perpustakaan*									
23.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71.3	73,0	79.3	79.5	79.8	80.1	80.40	80.40
24	*Kearsipan*									
24.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	90,03 (A)	90,2	90.5	91.1	91.5	92.1	93.80	93.80
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan										
1	*Kelautan dan Perikanan*									
1.1	Luasan Kawasan konservasi	Ha	0	11.213,36	10.772,33	5.715,13	11.244,38	6.221,44	5.711,22	39.664,90 Ha
1.2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	45.187	46.467	47.500	48.300	49.800	51.200	52.400	52.400
1.3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	49595	50.937,7	51.082	53.125	55.250	58.012	60.912	60.912
1.4	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ thn	41,5	28,07	28,67	29,27	29,87	30,47	31,07	31,07

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap Terhadap PDRB	%	2,16	2,016	2,17	2,18	2,19	2,20	2,21	2,21
2	*Pariwisata*									
2.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,10	1,21	1,22	1,23	1,24	1,26	1,27	1,27
2.2	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	orang	4.595.145	4.595.145	4.955.905	5.526.719	6.097.532	6.668.346	7,239,160	7,239,160
3	*Pertanian*									
3.1	Produksi Padi	Ton GKG	281.022	282.427	283.839	285.258	286.685	288.118	289.559	289.559
3.2	Produksi Jagung	Ton pipil kering (PK)	18.825	10.557	10.584	10.610	10.637	10.663	10.690	10.690
3.3	Populai ternak:									
	- Populasi Sapi	Ekor	106.511	107.576	108.652	109.738	110.836	111.944	113.064	113.064
	- Populasi Kambing	Ekor	114.564	115.137	115.713	116.291	116.873	117.457	118.044	118.044
3.4	Produksi Daging:									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sapi	Ton	4.380	4.407	4.437	4.469	4.500	4.531	4.563	4.563
	- kambing	Ton	490	496	500	503	507	510	514	514
	- Ayam	Ton	1,39	57.540	57.827	58.116	58.406	58.698	58.992	58.992
3.5	Produksi Telur	Ton	40.440	40.522	40.603	40.684	40.765	40.847	40.929	40.929
3.6	Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Kw	1.642.414	1.726.573	1.738.659	1.750.829	1.763.085	1.775.427	1.787.855	1.787.855
3.7	Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Kw	124.12	123.122	123.369	123.615	123.863	124.110	124.359	124.359
3.8	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	TON	115778	115778	118693	120178	121682	123205	124746	124746
3.9	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	TON	716	716	716	713	711	709	706	706
3.10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	TON	20587	20587	23518	25380	27584	30207	33341	33341

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.11	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	TON	334829	334829	333742	333200	332659	332118	331579	331579
3.12	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	82,00	85,00	85,00
3.13	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	53,76	54,06	54,56	55,36	56,36	57,66	58,52	58,52
3.14	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	83,74	84,14	84,84	85,84	87,14	88,64	90,15	90,15
3.15	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (Ha)	HA	225	425	425	650	650	650	650	650

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.16	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	13,95	14,55	15,05	15,75	16,55	16,70	14,55	14,55
3.17	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	12,26	12,56	13,06	13,76	14,66	15,66	15,83	15,83
4	*Kehutanan*									
4.1	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	*Rp. Milyar*	269.504.315,75	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4.2	Nilai transaksi ekonomi KTII	*Rp.Milyar*	10.462.277.300	12.000.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000	14.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
4.3	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	*Ha*	*217.229,20*	*220.000*	*220.000*	*222.000*	*224.000*	*226.000*	*228.000*	*228.000*

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.4	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	*Ha*	*3.875,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*4.875,10*
4.5	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	*Ha*	*61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*3.633*
5	*ESDM*									
5.1	Rasio Elektrifikasi	%	99,99%	99,991%	99,992%	99,993%	99,994%	99,995%	99,996%	99,996%
5.2	Intesitas Energi Primer	SBM/Miliar rupiah	NA	111.308	113.405	115.320	116.755	118.513	119.630	119.630
6	*Perdagangan*									
6.1	Nilai ekspor barang	Milyar rupiah	NA	51.647,11	57.083,2	63.111,36	69.858,34	77.351,56	80.753,25	80.753,25
6.2	Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Provinsi	Trilyun rupiah	NA	8,87	9,51	10,19	10,77	11,04	11,35	11,35
7	*Perindustrian*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5.52	5.52	5.56	5.58	6.00	6.02	6.05	6.05
7.2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	9.97	9.97	10.18	10.29	10.40	10.51	10.62	10.62
7.3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	78.085	78.085	78.889	79.702	80.523	81.352	82.190	82.190
7.4	Nilai Inventasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Rp.Triliun	0,700	0,700	0,944	1,189	1,434	1,678	1,923	1,923
7.5	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	USD Miliar	0.793	0.793	0.813	0.833	0.863	0.900	1.000	1.000
8	*Transmigrasi*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	Jumlah kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas	lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	6 lokasi
8.2	Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera	%	27.61	28,50	30.25	35.50	40.75	55.95	75.25	75.25
8.3	Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan Clean	lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	6 lokasi
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	*Perencanaan*									
1.1	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Konsistensi program RKPD dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	*Keuangan*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SilPA terhadap LRA	%	1.34	1	1	1	1	1	1	1
2.3	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	1.3	1	1	1	1	1	1	1
2.4	Persentase belanja pendidikan	%	27.31	20	20	20	20	20	20	20
2.5	Persentase belanja kesehatan	%	11.92	10	10	10	10	10	10	10
3	*Kepegawaian dan Diklat*									
3.1	Persentase peningkatan kualifikasi ASN	%	87,24	88	90	92	94	96	98	98
3.2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi (Diklat 20 JP)	%	1,19	1,19	1,19	1,22	1,24	1,34	1,34	1,34
4	*Penelitian dan Pengembangan*									

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Persentase hasil riset dan teknologi yang diaplikasikan stakeholders	%	100	75	75	75	75	75	75	75
5	*Pengawasan*									
5.1	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Tahun Anggaran n-1	%	85	85,6	85,7	86	86,5	86,75	87	87
5.2	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK Tahun Anggaran n-1	%	73	73	75	76	77	78	78,1	78,1
6	*Kesatuan Bangsa dan Politik*									
6.1	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	-	75	80	81	85	85	85	85
6.2	Jumlah Prov/Kab/kota yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Kab/Kota	11	11	11	11	11	11	11	11

Dipindai dengan CamScanner

	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.3	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	-	75	80	82	84	85	85	85
6.4	Jumlah Prov/Kab/kota yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kab/Kota	11	11	11	11	11	11	11	11

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun, dalam hal ini tahun 2025-2029. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun untuk mewujudkan Visi.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah

Dipindai dengan CamScanner

dilantik yaitu pada tanggal 20 Februari 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanan RPJMD Provinsi Jambi, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1 Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.

2 Setiap Perangkat Daerah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Bagi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

3 Untuk menjalankan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:

   a) Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

   b) Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang kabupaten serta penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.

   c) Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari forum Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

4 Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jambi. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Daerah.

5 Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

6 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Jambi, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

5.1.1. Manajemen Resiko pembangunan

Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian berkala dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pengendalian perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan. Pengendalian jangka menengah mencakup:

Dipindai dengan CamScanner

- Penjabaran RPJPD Provinsi dalam RPJMD Provinsi, maupun penjabaran RPJMD Provinsi dalam RPJMD Kabupaten/ kota dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- Penetapan indikator keberhasilan
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

Pengendalian tahunan mencakup:

- penjabaran RPJMD Provinsi dalam RKPD Provinsi dan penjabaran RKPD Provinsi dalam RKPD Kabupaten/Kota serta Renja Perangkat Daerah
- Penetapan indikator keberhasilan
- Kesiapan *readines criteria* prioritas pembangunan
- Konsistensi perencanaan dan pemganggaran
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

b. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup:

- Monitoring kegiatan
- Monitoring mitigasi risiko pembangunan
- Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan
- Evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan.

5.1.2. Kerangka Regulasi

Pengendalian pembangunan daerah harus didukung oleh tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Selain itu dibutuhkan pula kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif, serta mampu mengoordinasi pengendalian lintas Perangkat Daerah dan lintas pemerintahan.

5.2 Pedoman Transisi

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, maka RPJMD ini menjadi pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2030. Mengacu pada Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD bagi provinsi yang belum memiliki RPJMD adalah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. RKPD yang disusun tersebut selanjutnya menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner